

EDISI REVISI



# RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2010 - 2014



KEMENTERIAN PERTANIAN





PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR: 83.1/Permentan/RC.110/12/2011  
TENTANG

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERTANIAN 2010-2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/RC.110/1/2010, telah ditetapkan Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010-2014;
- b. bahwa dengan adanya perubahan organisasi di lingkungan Kementerian Pertanian, perlu meninjau kembali Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/RC.110/1/2010, dengan Peraturan Menteri Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran negara Nomor 4405);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);
5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2010-2014.

#### **Pasal 1**

Rencana Strategis Kementerian Pertanian yang selanjutnya disebut Renstra Kementerian Pertanian, seperti tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.

#### **Pasal 2**

Renstra Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai dasar dalam:

- a. menyusun Renstra Unit Kerja Eselon I, Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Kementerian Pertanian;
- b. menyusun rencana/program pembangunan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota di bidang pertanian;
- c. koordinasi perencanaan kegiatan antar sektor dan/atau antar instansi pertanian di Pusat dan di daerah;
- d. pengendalian program dan kegiatan pembangunan lingkup Kementerian Pertanian.

### **Pasal 3**

Pejabat Eselon I, Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a menjabarkan dan menyusun lebih lanjut mengenai:

- a. Renstra Kementerian Pertanian ke dalam Renstra;
- b. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

berdasarkan Renstra Kementerian Pertanian.

### **Pasal 4**

Dengan ditetapkan Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/RC.110/1/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010-2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 5**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Desember 2011

MENTERI PERTANIAN,



**SUSWONO**

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas;
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
4. Kepala Unit Kerja Presiden Untuk Pemantauan dan Pengendalian Pembangunan;
5. Para Gubernur/Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
6. Pemimpin Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian.



# KATA PENGANTAR

**R**encana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian 2010-2014 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 15/Permentan/RC.110/1/2010 dan berlaku mulai 28 Januari 2010, merupakan acuan dan arah bagi jajaran Birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian dalam melaksanakan pembangunan pertanian selama periode 2010-2014. Pembangunan pertanian selama lima tahun kedepan (2010-2014) difokuskan kepada pencapaian Empat Target Utama pembangunan pertanian ke depan, yaitu: (1) pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, (2) peningkatan diversifikasi pangan, (3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor, dan (4) peningkatan kesejahteraan petani.

Upaya mencapai target utama pembangunan pertanian di atas tentu tidaklah mudah, karena dihadapkan pada kondisi permasalahan dan tantangan pembangunan pertanian yang tidak ringan, di samping juga gerak dinamika lingkungan strategis internasional, regional dan lokal yang semakin kompleks. Untuk menghadapi kondisi tersebut Kementerian Pertanian akan menerapkan Strategi **Tujuh GEMA Revitalisasi** yaitu revitalisasi lahan; revitalisasi perbenihan dan perbibitan; revitalisasi infrastruktur dan sarana; revitalisasi sumber daya manusia; revitalisasi pembiayaan petani, revitalisasi kelembagaan petani; serta revitalisasi teknologi dan industri hilir. Dalam implementasi tujuh GEMA Revitalisasi ini di lapangan membutuhkan kerjasama dan komitmen oleh para pelaku pembangunan pertanian di berbagai jenjang pemerintahan yang disesuaikan dengan karakteristik potensi dan prospek yang ada di masing-masing daerah.

Sehubungan dengan adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian yang tertuang dalam Permentan No.61/Permentan/OT.140/10/2010; perubahan lingkungan strategis global dan domestik; *refocusing* program/kegiatan mendatang pencapaian empat target sukses; penyempurnaan *output/outcome* dengan indikator yang lebih terukur dan SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timely*) serta adanya Direktif Presiden dan sensus sapi 2011, maka rencana dan pelaksanaan pembangunan pertanian 2010-2014 telah banyak mengalami penyesuaian. Untuk itu, Kementerian Pertanian memandang perlu untuk melakukan revisi terhadap Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010-2014 dimaksud.

Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014 yang telah direvisi ini diharapkan mampu mendorong dan mengakselerasi gerak dan langkah para pelaku pembangunan hingga ke tingkat petani di lapangan. Oleh karena itu, kami mengharapkan kepada segenap jajaran Kementerian Pertanian, instansi lintas sektor di Pusat dan Daerah, terlebih kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup pertanian seyogyanya dapat mendayagunakan dokumen Renstra ini dan menggunakannya sebagai pedoman dan arahan dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan di Kementerian/Lembaga, instansi dan unit kerja masing-masing sesuai yang tertuang dalam Renstra ini untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pertanian.

Akhir kata, semoga dokumen Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014 ini dapat bermanfaat untuk mencapai cita-cita luhur visi pembangunan pertanian yaitu terwujudnya pertanian industrial unggul yang berbasis sumberdaya lokal untuk meningkatkan kemandirian pangan, nilai tambah daya saing, ekspor dan kesejahteraan petani. Semoga Allah SWT berkenan memberikan perlindungan dan ridho-Nya atas semua upaya yang akan kita kerjakan bersama.

Jakarta, Desember 2011

Menteri Pertanian



SUSWONO





# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GRAFIK .....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xvi
DAFTAR BOKS .....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xviii
DAFTAR SINGKATAN .....	xx
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>2</b>
1.1 Kondisi Umum Pembangunan Pertanian Tahun 2005-2009 .....	6
1.1.1 Indikator Makro .....	8
1.1.1.1 Produk Domestik Bruto (PDB) .....	8
1.1.1.2 Tenaga Kerja .....	9
1.1.1.3 Nilai Tukar Petani .....	10
1.1.1.4 Neraca Perdagangan .....	12
1.1.1.5 Investasi .....	13
1.1.2 Produksi Komoditas Pertanian .....	14
1.1.3 Pendukung Peningkatan Produksi .....	17
1.1.3.1 APBN Kementerian Pertanian .....	17
1.1.3.2 Pembangunan Infrastruktur Pertanian .....	19
1.1.3.3 Pembangunan Kelembagaan dan Penguatan Modal Petani .....	20
1.1.3.4 Pengolahan Produk Pertanian dan Pengembangan Pasar .....	21
1.1.3.5 Ketahanan Pangan .....	21
1.1.3.6 Penelitian dan Pengembangan .....	22
1.1.3.7 Subsidi Bunga untuk Kredit Pertanian .....	22
1.2 Potensi, Permasalahan dan Tantangan .....	23
1.2.1 Potensi Pertanian Indonesia .....	23
1.2.1.1 Keanekaragaman Hayati dan Agroekosistem .....	23
1.2.1.2 Lahan Pertanian .....	24
1.2.1.3 Tenaga Kerja Pertanian .....	25
1.2.1.4 Teknologi .....	25
1.2.1.5 Pertumbuhan Jumlah dan Daya Beli Penduduk serta Pasar .....	26
1.2.2 Permasalahan .....	26

1.2.2.1	Meningkatnya Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim Global .....	27
1.2.2.2	Ketersediaan Infrastruktur, Sarana Prasarana Lahan dan Air .....	28
1.2.2.3	Status dan Luas Kepemilikan Lahan .....	31
1.2.2.4	Sistem Perbenihan dan Perbibitan Nasional Belum Berjalan Optimal .....	32
1.2.2.5	Keterbatasan Akses Petani Terhadap Permodalan dan Tingginya Suku Bunga Usaha Tani .....	33
1.2.2.6	Lemahnya Kapasitas dan Kelembagaan Petani Dan Penyuluh .....	34
1.2.2.7	Masih Rawannya Ketahanan Pangan dan Ketahanan Energi .....	35
1.2.2.8	Belum Berjalannya Diversifikasi Pangan dengan Baik .....	36
1.2.2.9	Rendahnya Nilai Tukar Petani .....	36
1.2.2.10	Belum Padunya Antar Sektor dalam Menunjang Pembangunan Pertanian .....	36
1.2.2.11	Kurang Optimalnya Kinerja dan Pelayanan Birokrasi Pertanian .....	37
1.2.3	Tantangan Pembangunan Pertanian 2010-2014 .....	37
1.2.3.1	Peningkatan Produktivitas, Mutu dan Nilai Tambah Produk Pertanian di Beberapa Sentra Produksi Dengan Menciptakan Sistem Pertanian yang Ramah Lingkungan .....	38
1.2.3.2	Penggunaan Pupuk Kimiawi dan Organik secara Berimbang untuk Memperbaiki dan Meningkatkan Kesuburan Tanah .....	39
1.2.3.3	Perbaikan dan Pembangunan Infrastruktur Lahan Dan Air serta Perbenihan dan Perbibitan .....	41
1.2.3.4	Kemudahan Akses Pembiayaan Pertanian dengan Suku Bunga Rendah bagi Petani/Peternak Kecil .....	42
1.2.3.5	Pencapaian Millenium Development Goals (MDG's) Yang Mencakup Angka Kemiskinan, Pengangguran, dan Rawan Pangan .....	42
1.2.3.6	Penciptaan Pricing Policies yang Proporsional Untuk Produk-Produk Pertanian Khusus .....	43
1.2.3.7	Persaingan Global serta Pelemahan Pertumbuhan Ekonomi Akibat Krisis Global .....	43
1.2.3.8	Perbaikan Citra Petani dan Pertanian agar Kembali Diminati Generasi Penerus .....	44
1.2.3.9	Kelembagaan Usaha Ekonomi Produktif yang kokoh di Perdesaan .....	44
1.2.3.10	Sistem Penyuluhan Pertanian yang Efektif .....	45
1.2.3.11	Pemenuhan Kebutuhan Pangan, disamping Pengembangan Komoditas Unggulan Hortikultura dan Peternakan, serta Peningkatan Komoditas Ekspor Perkebunan .....	46

<b>II. VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN PERTANIAN, TAHUN 2010 - 2014</b> .....	50
2.1 Visi Kementerian Pertanian .....	50
2.2 Misi Kementerian Pertanian .....	50
2.3 Tujuan .....	51
<b>III. TARGET UTAMA KEMENTERIAN PERTANIAN, TAHUN 2010 - 2014</b> .....	54
3.1 Target Utama Kementerian Pertanian .....	54
3.1.1 Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan .....	54
3.1.1.1 Langkah Operasional Mencapai Swasembada Kedelai dan Swasembada Berkelanjutan Padi dan Jagung .....	57
3.1.1.2 Langkah Operasional Mencapai Swasembada Gula dan Peningkatan Produksi Perkebunan .....	61
3.1.1.3 Langkah Operasional Mencapai Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Produksi Peternakan .....	68
3.1.1.4 Langkah Operasional Peningkatan Produksi Hortikultura .....	72
3.1.1.5 Kebutuhan Pupuk .....	77
3.1.1.6 Subsidi .....	77
1). Subsidi Pupuk .....	77
2). Subsidi Benih .....	79
3). Subsidi Bunga/Kredit .....	80
3.1.1.7 Sasaran Perluasan Lahan Pertanian .....	81
3.1.1.8 Antisipasi, Mitigasi, dan Adaptasi Terhadap Variabilitas dan Perubahan Iklim Serta Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca .....	82
3.1.2 Peningkatan Diversifikasi Pangan .....	88
3.1.3 Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor .....	93
3.1.4 Peningkatan Kesejahteraan Petani .....	97
3.2 Sasaran Makro .....	101
3.2.1 Produk Domestik Bruto (PDB) .....	101
3.2.2 Neraca Perdagangan .....	103
3.2.3 Investasi Pertanian .....	104
3.2.4 Tenaga Kerja .....	105
3.2.5 Nilai Tukar Petani (NTP) .....	105
<b>IV ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI</b> .....	108
4.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional .....	108

4.1.1	Arah Kebijakan Umum .....	108
4.1.2	Prioritas Nasional .....	109
4.1.3	Arah Kebijakan Bidang-Bidang Pembangunan .....	112
4.2	Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian .....	115
4.2.1	Arah Kebijakan Kementerian Pertanian .....	115
4.2.2	Strategi Pembangunan Pertanian .....	116
4.2.2.1	Revitalisasi Lahan .....	118
4.2.2.2	Revitalisasi Perbenihan dan Perbibitan .....	120
4.2.2.3	Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana .....	122
4.2.2.4	Revitalisasi Sumberdaya Manusia .....	123
4.2.2.5	Revitalisasi Pembiayaan Petani .....	127
4.2.2.6	Revitalisasi Kelembagaan Petani .....	128
4.2.2.7	Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir .....	129
<b>V.</b>	<b>PROGRAM, KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN</b> .....	<b>140</b>
5.1	Program dan Kegiatan Kementerian Pertanian .....	140
5.2	Pembiayaan Pembangunan Pertanian .....	147
<b>VI.</b>	<b>PENJABARAN EMPAT TARGET SUKSES KE DALAM PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PERTANIAN 2010-2014</b> .....	<b>182</b>
6.1	Swasembada Dan Swasembada Berkelanjutan .....	184
6.1.1	Swasembada Berkelanjutan Padi .....	184
6.1.2	Swasembada Berkelanjutan Jagung .....	188
6.1.3	Swasembada Kedelai .....	190
6.1.4	Swasembada Gula .....	192
6.1.5	Swasembada Daging Sapi .....	194
6.2	Peningkatan Diversifikasi Pangan .....	198
6.3	Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Dan Ekspor Produk Pertanian .....	201
6.4	Peningkatan Kesejahteraan Petani .....	206
<b>VII.</b>	<b>DUKUNGAN SEKTOR LAIN UNTUK PEMBANGUNAN PERTANIAN</b> .....	<b>214</b>
	<b>PENUTUP</b> .....	<b>224</b>
	<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>228</b>

# DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Pertanian, 2005-2009 .....	8
Tabel 1.2	Tenaga Kerja Pertanian, 2005-2009 .....	9
Tabel 1.3	Neraca Perdagangan Pertanian, 2005-2009 .....	12
Tabel 1.4	Produksi Komoditas Tanaman Pangan, 2005-2009 .....	15
Tabel 1.5	Produksi Komoditas Perkebunan, 2005-2009 .....	16
Tabel 1.6	Produksi Komoditas Peternakan, 2005-2009 .....	16
Tabel 1.7	Produksi Komoditas Hortikultura, 2005-2009 .....	17
Tabel 1.8	Alokasi APBN Kementerian Pertanian, 2005-2009 .....	18
Tabel 1.9	Alokasi Anggaran Subsidi Pupuk Kementerian Pertanian, 2005-2009 .....	18
Tabel 1.10	Alokasi Anggaran Subsidi Benih Kementerian Pertanian, 2005-2009 .....	19
Tabel 1.11	Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian, 2005-2009 .....	19
Tabel 3.1	Target, Sasaran Produksi dan Pertumbuhan Lima Komoditas Pangan Utama, Tahun 2014 .....	56
Tabel 3.2	Komoditas Unggulan Nasional .....	56
Tabel 3.3	Sasaran Produksi Tanaman Pangan, 2010-2014 .....	60
Tabel 3.4	Pencapaian Swasembada Gula Nasional, 2010-2014 .....	61
Tabel 3.5	Sasaran Produksi Perkebunan, 2010-2014 .....	67
Tabel 3.6	Sasaran Produksi Peternakan, 2010-2014 .....	69
Tabel 3.7	Sasaran Produksi Hortikultura, 2010-2014 .....	72
Tabel 3.8	Kelompok Komoditas Hortikultura, 2010-2014 .....	74
Tabel 3.9	Proyeksi Kebutuhan Pupuk Sektor Pertanian .....	77
Tabel 3.10	Perkiraan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, 2010-2014 .....	79
Tabel 3.11	Ringkasan Fitur Skim Kredit Program ( Subsidi Bunga dan Penjaminan ) .....	81
Tabel 3.12	Sasaran Perluasan Areal Lahan Pertanian 2 Juta Hektar .....	82
Tabel 3.13	Indikator Utama, Strategi dan Rencana Aksi Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan .....	86
Tabel 3.14	Sasaran Persentase Konsumsi Energi Terhadap Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH), 2010-2014 .....	90
Tabel 3.15	Sasaran Konsumsi Pangan Utama, 2010-2014 .....	91
Tabel 3.16	Indikator Utama, Strategi dan Rencana Aksi Peningkatan Diversifikasi Pangan .....	92

Tabel 3.17 Indikator Utama, Strategi dan Rencana Aksi Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor Produk Pertanian.....	95
Tabel 3.18 Indikator Utama, Strategi dan Rencana Aksi Peningkatan Kesejahteraan Petani.....	100
Tabel 3.19 Sasaran Pertumbuhan PDB Sektor dan Sub Sektor Pertanian, 2010-2014.....	102
Tabel 3.20 Neraca Perdagangan Pertanian, 2010-2014.....	103
Tabel 3.21 Sasaran Investasi PMDN dan PMA, 2010-2014.....	104
Tabel 3.22 Sasaran Tenaga Kerja, 2010-2014.....	105
Tabel 5.1 Target Pembangunan Dan Kebutuhan Pembiayaan Apbn Tahun 2012-2014 Kementerian Pertanian.....	148

# DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Pertumbuhan PDB Pertanian, 2005 - 2009 .....	9
Grafik 1.2	Tenaga Kerja Pertanian, 2005 - 2009 .....	10
Grafik 1.3	Nilai Tukar Petani (NTP), 2005 - 2009 .....	11
Grafik 1.4	Realisasi Investasi PMDN Sektor Pertanian, 2005 - 2009 .....	13
Grafik 1.5	Realisasi Investasi PMA Sektor Pertanian, 2005 - 2009 .....	14
Grafik 3.1	Sasaran Pertumbuhan PDB Sektor dan Sub Sektor Pertanian, 2010 - 2014 .....	102
Grafik 3.2	Neraca Perdagangan Pertanian, 2010 - 2014 .....	103
Grafik 3.3	Sasaran Investasi PMDN dan PMA, 2010 - 2014 .....	104
Grafik 3.4	Sasaran Tenaga Kerja Pertanian, 2010 - 2014 .....	105

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Peta Sebaran Sentra Produksi Padi .....	58
Gambar 3.2	Peta Sebaran Sentra Produksi Jagung .....	59
Gambar 3.3	Peta Sebaran Sentra Produksi Kedele .....	60
Gambar 3.4	Peta Sebaran Sentra Produksi Gula .....	62
Gambar 3.5	Peta Sebaran Sentra Produksi Daging Sapi .....	71
Gambar 4.1	7 Gema Revitalisasi .....	117
Gambar 6.1	Alur Kebijakan Pembangunan Pertanian .....	182
Gambar 6.2	Keterkaitan Empat Target Dengan 12 Program Kegiatan .....	183



# DAFTAR BOKS

Boks 1.1	Permasalahan Mendasar Sektor Pertanian .....	27
Boks 1.2	Tantangan Pembangunan Pertanian.....	38
Boks 3.1	Empat Target Utama Kementerian Pertanian, 2010-2014 .....	55
Boks 4.1	Kaitan antara Strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dengan Strategi Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010-2014.....	114
Boks 5.1	Pokok-pokok Reformasi Perencanaan dan Penganggaran .....	141

# DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Sasaran Produksi Padi, Tahun 2010-2014 .....	228
Lampiran 2.	Sasaran Produksi Jagung, Tahun 2010-2014 .....	229
Lampiran 3.	Sasaran Produksi Kedelai, Tahun 2010-2014 .....	230
Lampiran 4.	Sasaran Produksi Kacang Tanah, 2010-2014 .....	231
Lampiran 5.	Sasaran Produksi Kacang Hijau ,Tahun 2010-2014 .....	232
Lampiran 6.	Sasaran Produksi Ubi Kayu, Tahun 2010-2014 .....	233
Lampiran 7.	Sasaran Produksi Ubi Jalar, Tahun 2010-2014 .....	234
Lampiran 8.	Sasaran Produksi Kelapa Sawit, Tahun 2010-2014 .....	235
Lampiran 9.	Sasaran Produksi Karet, Tahun 2010-2014 .....	236
Lampiran 10.	Sasaran Produksi Kelapa, Tahun 2010-2014 .....	237
Lampiran 11.	Sasaran Produksi Kopi, Tahun 2010-2014 .....	238
Lampiran 12.	Sasaran Produksi Kakao, Tahun 2010-2014 .....	239
Lampiran 13.	Sasaran Produksi Lada, Tahun 2010-2014 .....	240
Lampiran 14.	Sasaran Produksi Cengkeh, Tahun 2010-2014 .....	241
Lampiran 15.	Sasaran Produksi Jambu Mete, Tahun 2010-2014 .....	242
Lampiran 16.	Sasaran Produksi Tembakau, Tahun 2010-2014 .....	243
Lampiran 17.	Sasaran Produksi Kapas, Tahun 2010-2014 .....	244
Lampiran 18.	Sasaran Produksi Teh, Tahun 2010-2014 .....	245
Lampiran 19.	Sasaran Produksi Gula, Tahun 2010-2014 .....	246
Lampiran 20.	Sasaran Produksi Jarak Pagar,Tahun 2010-2014 .....	247
Lampiran 21.	Sasaran Produksi Nilam, Tahun 2010-2014 .....	248
Lampiran 22.	Sasaran Produksi Daging Sapi Tahun 2010-2014 .....	249
Lampiran 23.	Sasaran Produksi Daging Kerbau Tahun 2010-2014 .....	250
Lampiran 24.	Sasaran Produksi Daging Kambing Tahun 2010-2014 .....	251
Lampiran 25.	Sasaran Produksi Daging Domba Tahun 2010-2014 .....	252
Lampiran 26.	Sasaran Produksi Daging Babi Tahun 2010-2014 .....	253
Lampiran 27.	Sasaran Produksi Daging Ayam Buras Tahun 2010-2014 .....	254
Lampiran 28.	Sasaran Produksi Daging Itik Tahun 2010-2014 .....	255
Lampiran 29.	Sasaran Produksi Susu Tahun 2010-2014 .....	256

Lampiran 30.	Sasaran Produksi Cabe Tahun 2010-2014 .....	257
Lampiran 31.	Sasaran Produksi Bawang Merah Tahun 2010-2014 .....	258
Lampiran 32.	Sasaran Produksi Kentang Tahun 2010-2014 .....	259
Lampiran 33.	Sasaran Produksi Mangga Tahun 2010-2014 .....	260
Lampiran 34.	Sasaran Produksi Pisang Tahun 2010-2014 .....	261
Lampiran 35.	Sasaran Produksi Jeruk Tahun 2010-2014 .....	262
Lampiran 36.	Sasaran Produksi Durian Tahun 2010-2014 .....	263
Lampiran 37.	Sasaran Produksi Manggis Tahun 2010-2014 .....	264
Lampiran 38.	Sasaran Produksi Rimpang Tahun 2010-2014 .....	265
Lampiran 39.	Sasaran Produksi Tanaman Hias Tahun 2010-2014 .....	266
Lampiran 40.	Proyeksi Kebutuhan Pupuk Sektor Pertanian 2010-2014 .....	267
Lampiran 41.	Target Perluasan Areal Pertanian 2 Juta Ha Tahun 2010-2014 Untuk Lahan Sawah 250.000 Ha .....	268
Lampiran 42.	Target Perluasan Areal Pertanian 2 Juta Ha Tahun 2010-2014 Untuk Lahan Kering 400.000 Ha .....	269
Lampiran 43.	Target Perluasan Areal Pertanian 2 Juta Ha Tahun 2010-2014 Untuk Lahan Hortikultura 400.000 Ha .....	271
Lampiran 44.	Target Perluasan Areal Pertanian 2 Juta Ha Tahun 2010-2014 Untuk Lahan Perkebunan 585.430 Ha .....	272
Lampiran 45.	Target Perluasan Areal Pertanian 2 Juta Ha Tahun 2010-2014 Untuk Lahan Kebun Hijauan Makanan Ternak (HMT) 351.000 Ha .....	273
Lampiran 46.	Target Perluasan Areal Pertanian 2 Juta Ha Tahun 2010-2014 Untuk Lahan Padang Penggembalaan 13.570 Ha .....	274
Lampiran 47.	Susunan Pola Konsumsi Pangan Tahun 2010-2014 .....	275
Lampiran 48.	Rancangan Pengembangan Industri Hilir Pertanian .....	280
Lampiran 49.	Target Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2010-2014 .....	284
Lampiran 50.	Target Pembangunan dan Kebutuhan Pembiayaan APBN Tahun 2010-2014 Kementerian Pertanian .....	287

# DAFTAR SINGKATAN

AKG	: Angka Kecukupan Gizi	HET	: Harga Eceran Tertinggi
Alsintan	: Alat Mesin Pertanian	HKTI	: Himpunan Kerukunan Tani Indonesia
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	HMT	: Hijauan Makanan Ternak
APL	: Area Penggunaan Lain	HPP	: Harga Pembelian Pemerintah
ARAM	: Angka Ramalan	HTI	: Hutan Tanaman Industri
ASUH	: Aman, Sehat, Utuh dan Halal	HTR	: Hutan Tanaman Rakyat
BBP2TP	: Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan	IB	: Inseminasi Buatan
BKP	: Badan Ketahanan Pangan	ICVAR	: <i>Incremental Capital Value-Added Ratio</i>
BMKG	: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	IFAD	: <i>International Fund for Agricultural Development</i>
BLBU	: Bantuan Langsung Benih Unggul	IJP	: Imbal Jasa Penjaminan
BLP	: Bantuan Langsung Pupuk	INKA	: Intensifikasi Kawin Alam
BLM	: Bantuan Langsung Masyarakat	IP	: Indeks Pertanaman
BMCM	: Batas Maksimum Cemaran Mikroba	IPTEK	: Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
BMR	: Batas Maksimal Residu	JIDES	: Jaringan Irigasi Desa
B POM	: Badan Pengawas Obat dan Makanan	JITUT	: Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani
BPP	: Balai Penyuluh Pertanian	JUT	: Jalan Usaha Tani
BPS	: Badan Pusat Statistik	KKP-E	: Kredit Ketahanan Pangan dan Energi
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara	KPEN-RP	: Kredit Pembangunan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan
CBN	: Cadangan Benih Nasional	KP3	: Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida
DAU	: Dana Alokasi Umum	KTT	: Konperensi Tingkat Tinggi
DAK	: Dana Alokasi Khusus	KUPS	: Kredit Usaha Pembibitan Sapi
DAS	: Daerah Aliran Sungai	KUR	: Kredit Usaha Rakyat
DBH	: Dana Bagi Hasil	LDPM	: Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
DEM	: Digital Elevation Model	LIPI	: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
DPI	: Dampak Perubahan Iklim	LKM-A	: Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis
Gapoktan	: Gabungan Kelompok Tani	LM3	: Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat
GAP	: <i>Good Agricultural Practices</i>	LPK	: Lembaga Penilaian Kesesuaian
GFP	: <i>Good Farming Practices</i>	LS	: Lembaga Sertifikasi
GIS	: <i>Geographical Information System</i>	MDG	: <i>Millenium Development Goals</i>
GKG	: Gabah kering Giling	MOCAF	: <i>Modified Cassava Flour</i>
GRK	: Gas Rumah Kaca		

MRV	: <i>Measurable, Reportable, Verifiable</i>	RPJPN	: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
NTP	: Nilai Tukar Petani	RPP	: Reformasi Perencanaan dan Penganggaran
OKKP	: Otoritas Kompeten Keamanan Pangan	RPU	: Rumah Potong Unggas
P3GI	: Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia	Satker	: Satuan Kerja
P4S	: Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya	SDA	: Sumber Daya Alam
PBT	: Pengawas Benih Tanaman/Bibit Ternak	SDA & LH	: Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
PDB	: Produk Domestik Bruto	SDM	: Sumber Daya Manusia
PG	: Pabrik Gula	SIG	: Sistem Informasi Geografi
PHT	: Pengendalian Hama Terpadu	SITT	: Sistem Integrasi Tanaman Ternak
PIDRA	: <i>Participatory Integrated Development in Rainfeed Areas</i>	SITTBL	: Sistem Integrasi Tanaman Ternak Bebas Limbah
PK	: Pipilan Kering	SJMKP	: Standar Jaminan Mutu Komoditas Pertanian
PLTB	: Pembangkit Listrik Tenaga Bayu	SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
PLP2B	: Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	SKPG	: Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi
PMA	: Penanaman Modal Asing	SL-PTT	: Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu
PMD	: Penggerak Membangun Desa	SMD	: Sarjana Membangun Desa
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri	SPS	: Sanitary and Phytosanitary
POPT	: Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman	WTO	: World Trade Organization
PPH	: Pola Pangan Harapan	SOP	: <i>Standard Operating Procedure</i>
PSO	: <i>Public Service Obligation</i>	SRI	: <i>System Rice Intensification</i>
PTPN	: PT Perkebunan Nasional	STA	: Sub Terminal Agribisnis
PTT	: Pengelolaan Tanaman Terpadu	TAM	: Tata Air Mikro
PUAP	: Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan	THL	: Tenaga Harian Lepas
RAN-PE-GRK	: Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	TPR	: Tanaman Perkebunan Rakyat
RDKK	: Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok	UK/UPT	: Unit Kerja/Unit Pelaksana Tugas
RIHP	: Rumpun Ilmu Hayati Pertanian	UMKM-K	: Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi
RPH	: Rumah Potong Hewan	VBC	: <i>Village Breeding Centre</i>
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional	VUB	: Varietas Unggul Baru
		WNPG	: Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi



# BAB I PENDAHULUAN



## I. PENDAHULUAN

Sesuai amanat dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, saat ini memasuki periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap ke-2 (2010-2014), setelah periode RPJMN tahap ke-1 (2005-2009) berakhir. Pada RPJMN tahap ke-2 (2010-2014), pembangunan pertanian tetap memegang peran yang strategis dalam perekonomian nasional. Peran strategis pertanian tersebut digambarkan melalui kontribusi yang nyata melalui pembentukan kapital, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bio-energi, penyerap tenaga kerja, sumber devisa negara, dan sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usahatani yang ramah lingkungan.

Upaya pemenuhan kebutuhan pangan sebagai salah satu peran strategis pertanian merupakan tugas yang tidak ringan, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang besar yaitu 230.632.700 orang (tahun 2009) dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,25 persen per tahun (tahun 2009) dan tingkat konsumsi beras 102,2 kg/kapita/tahun (tahun 2009). Berdasarkan kondisi tersebut, selama lima tahun ke depan, Kementerian Pertanian menempatkan beras, jagung, kedelai, daging sapi dan gula sebagai lima komoditas pangan utama. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan utama tersebut, target Kementerian Pertanian selama 2010-2014 adalah pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan. Pencapaian swasembada ditujukan untuk kedelai, daging sapi dan gula dengan target sasaran produksi adalah kedelai 2,70 juta ton, daging sapi 0,66 juta ton, dan gula 3,45 juta ton pada tahun 2014. Karena padi dan jagung sudah pada posisi swasembada, maka target pencapaian selama 2010-2014 adalah swasembada berkelanjutan dengan sasaran produksi padi sebesar 76,57 juta ton GKG dan jagung 29 juta ton jagung pipilan kering pada tahun 2014. Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun untuk keperluan peningkatan ekspor, dikembangkan juga komoditas pertanian lain yang mencakup antara lain telur, susu, buah-buahan, sayuran, karet, kelapa sawit, teh, kelapa, kakao, kopi, lada, jambu mete, tanaman hias dan biofarmaka.

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat, maka kebutuhan terhadap jenis dan kualitas produk juga



semakin meningkat dan beragam. Oleh karena itu, selain upaya untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan, peningkatan diversifikasi pangan menjadi sangat penting, terutama untuk mengurangi konsumsi beras dan terigu. Selama 2010-2014, konsumsi beras ditargetkan turun 1,5 persen/tahun, yang diimbangi dengan peningkatan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, buah-buahan dan sayuran. Dengan penurunan konsumsi beras 1,5 persen/tahun tersebut maka tingkat konsumsi beras Indonesia yang saat ini cukup tinggi yaitu 102,2 kg/kapita/tahun (tahun 2009) diupayakan turun menjadi 95 kg/kapita/tahun pada



tahun 2014. Dalam rangka diversifikasi pangan, sekaligus juga diupayakan tercapainya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dicerminkan oleh meningkatnya skor Pola Pangan Harapan (PPH) dari 86,4 pada tahun 2010 menjadi 93,3 pada tahun 2014.

Pembangunan pertanian lima tahun ke depan juga dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis baik domestik maupun internasional yang dinamis sehingga menuntut produk pertanian yang mampu berdaya saing di pasar global. Untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian Indonesia, maka dibutuhkan efisiensi dalam sistem produksi, pengolahan dan pengendalian mutu serta kesinambungan produk. Dengan peningkatan daya saing, disertai upaya promosi dan pemasaran, maka ditargetkan surplus neraca perdagangan meningkat dari US\$ 24,33 milyar pada tahun 2010 menjadi US\$ 54,51 milyar pada tahun 2014.

Berdasarkan hasil evaluasi atas pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan sampai saat ini, masih banyak persoalan mendasar yang harus dipecahkan dan memerlukan penanganan yang cermat dan tepat, seperti meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global, terbatasnya ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air, kecilnya status dan luas kepemilikan lahan, belum optimalnya sistem perbenihan dan perbibitan nasional, terbatasnya akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usahatani, masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh, masih rawannya ketahanan pangan dan energi, belum berjalannya diversifikasi pangan dengan baik, masih rendahnya nilai tukar petani dan kurang harmonisnya koordinasi kerja antar sektor terkait pembangunan pertanian.

Di samping itu, pembangunan pertanian ke depan juga menghadapi banyak tantangan yang tidak mudah, antara lain bagaimana meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk dengan sistem pertanian yang ramah lingkungan, membudayakan penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah, memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air serta perbenihan dan perbibitan, membuka akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah bagi petani/peternak kecil, mengupayakan pencapaian *Millenium Development Goals* (MDG's) yang mencakup angka kemiskinan, pengangguran, dan rawan pangan, menciptakan kebijakan harga (*pricing policies*) yang proporsional untuk produk-produk pertanian khusus, memperkuat kemampuan untuk bersaing di pasar global serta mengatasi pelemahan pertumbuhan ekonomi akibat krisis global, memperbaiki citra petani dan pertanian agar kembali diminati generasi penerus, memperkuat kelembagaan usaha ekonomi produktif di perdesaan, menciptakan sistem penyuluhan pertanian yang efektif, dan memenuhi kebutuhan pangan, serta mengembangkan komoditas unggulan hortikultura, peternakan, dan perkebunan.

Dalam upaya mencapai target dan sasaran seperti diuraikan di atas, dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang dihadapi selama ini serta menjawab tantangan di masa depan, maka strategi yang akan dilakukan Kementerian Pertanian untuk 5 tahun mendatang adalah Revitalisasi Pertanian yang dibingkai dalam 7 GEMA Revitalisasi, yaitu (1) Revitalisasi Lahan, (2) Revitalisasi Perbenihan dan Perbibitan,



(3) Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana, (4) Revitalisasi Sumber Daya Manusia, (5) Revitalisasi Pembiayaan Petani; (6) Revitalisasi Kelembagaan Petani dan (7) Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir.

Begitu kompleksnya permasalahan, tantangan, dan besarnya lingkup pekerjaan yang harus dilakukan dalam pembangunan pertanian, maka jelas bahwa pembangunan pertanian tidak bisa dilakukan hanya oleh Kementerian Pertanian. Pembangunan pertanian memerlukan dukungan dari semua pemangku kepentingan yang mencakup sektor atau kementerian/lembaga lain, perguruan tinggi, pemerintah daerah baik propinsi, kabupaten maupun kota, dunia usaha, perbankan, lembaga-lembaga pembiayaan bukan bank, organisasi profesi dan masyarakat, serta peran aktif dari semua petani, pekebun dan peternak di seluruh tanah air sebagai pelaku utama pembangunan pertanian.

Bersamaan dengan penyusunan dokumen Renstra ini, Pemerintah juga mencanangkan Reformasi Perencanaan dan Penganggaran (RPP) yang mengharuskan Kementerian/Lembaga merestrukturisasi program dan kegiatan dalam kerangka penganggaran berbasis kinerja. Untuk itu, program dan kegiatan yang dituangkan dalam dokumen ini dilengkapi dengan indikator kinerja yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Reformasi Birokrasi yang akan dilakukan oleh Kementerian Pertanian dalam kurun waktu 5 tahun mendatang.

Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010-2014 ini merupakan dokumen perencanaan yang berisi: visi, misi, tujuan, target, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian selama lima tahun ke depan (2010-2014). Oleh karena itu, dokumen Renstra ini merupakan acuan dan arahan bagi Jajaran Birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pertanian periode 2010-2014 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi baik di dalam maupun antar sektor terkait.

## **1.1 Kondisi Umum Pembangunan Pertanian 2005-2009**

Selama periode 2005-2009, pembangunan pertanian terus mencatat berbagai keberhasilan. Salah satu yang patut disyukuri dan membanggakan

adalah Indonesia berhasil mencapai swasembada beras sejak tahun 2007, serta swasembada jagung dan gula konsumsi rumah tangga di tahun 2008. Mantapnya produksi beras yang merupakan pangan utama dalam negeri sangat membantu menstabilkan harga pangan, sehingga Indonesia bisa terhindar dari krisis pangan yang melanda banyak negara pada periode tersebut. Pada saat terjadinya krisis keuangan global, harga pangan internasional meningkat terutama di negara-negara produsen, sedangkan harga komoditas pangan dalam negeri lebih stabil jika dibandingkan dengan harga internasional.

Selain produksi padi yang meningkat, bahkan telah mencapai swasembada, selama periode pembangunan lima tahun terakhir pembangunan pertanian juga mencatat sejumlah keberhasilan seperti: peningkatan produksi beberapa komoditas pertanian, ketersediaan energi dan protein, membaiknya skor Pola Pangan Harapan (PPH), dan semakin banyaknya hasil penelitian dan pengembangan pertanian.

Selama tahun 2005-2008, rata-rata pertumbuhan produksi yang cukup tinggi setiap tahunnya ditunjukkan oleh gula (3,82 persen), kelapa sawit (18,92 persen), kakao (2,47 persen), jambu mete (5,30 persen), tembakau (3,42 persen), daging sapi (3,95 persen), daging ayam buras (4,01 persen), susu segar (8,30 persen), mangga (14,22 persen), durian (8,77 persen), bawang merah (5,23 persen) dan anggrek (28,79 persen). Ketersediaan energi dan protein per tahun meningkat sebesar 2,6 persen untuk energi dan 2,3 persen untuk protein. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) meningkat dari 74 pada tahun 2006 menjadi 81,9 pada tahun 2008. Di bidang penelitian dan pengembangan, telah dihasilkan 191 varietas unggul padi, 46 varietas unggul jagung, dan 64 varietas unggul kedelai, serta inovasi pola tanam, pemupukan, bioteknologi, Pengendalian Hama Terpadu (PHT), alat mesin pertanian, dan lain sebagainya.

Pada tataran makro, pembangunan pertanian juga memperlihatkan kinerja yang menggembirakan. PDB sektor pertanian terus tumbuh dan mencapai 5,16 persen di tahun 2008. Pada tahun 2008, neraca perdagangan pertanian mencatatkan surplus sebesar US\$ 17,97 milyar yang telah melampaui target yang ditetapkan sebesar US\$ 13,13 milyar. Angkatan kerja pertanian mencapai lebih dari 40 juta orang setiap tahun selama 2005-2009. Hal ini menunjukkan bahwa pertanian berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja nasional.

Semua capaian pembangunan pertanian ini merupakan bentuk nyata dari hasil kerja keras dan kerjasama yang baik dan terus menerus dari para pelaku pembangunan pertanian, yaitu petani, penyuluh, pelaku usaha di bidang pertanian bersama dengan Pemerintah (Pusat dan Daerah). Sektor pertanian kembali membuktikan dapat bertahan menghadapi terpaan krisis ekonomi sebagaimana yang dialami Indonesia pada tahun 1997.

Kondisi umum pembangunan pertanian di Indonesia selama tahun 2005-2009 secara lebih lengkap dapat dilihat dari capaian indikator makro, produksi komoditas pertanian, dan pencapaian kinerja pertanian lainnya yang akan digambarkan berikut ini.

### 1.1.1 Indikator Makro

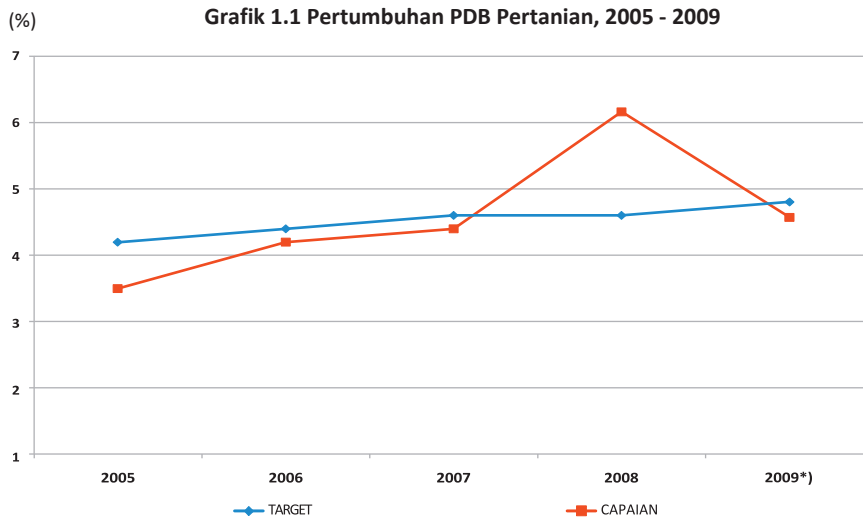
#### 1.1.1.1 Produk Domestik Bruto (PDB)

Sektor pertanian memperlihatkan kinerja pertumbuhan ekonomi yang mengembirakan. Selama 2005-2009, pertumbuhan PDB pertanian (di luar perikanan dan kehutanan) memperlihatkan kenaikan setiap tahunnya yaitu rata-rata 3,57 persen. Meski di awal periode masih dibawah target, tetapi pertumbuhan PDB pertanian terus meningkat, bahkan di tahun 2008 berhasil melampaui target yang ditetapkan (Tabel 1.1).

**Tabel 1.1** Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Pertanian, 2005-2009

TAHUN	TARGET (%)	CAPAIAN (%)
2005	3,20	2,50
2006	3,40	3,20
2007	3,60	3,40
2008	3,60	5,16
2009	3,80	3,57 <sup>1)</sup>
<b>Rata-rata</b>	<b>3,52</b>	<b>3,57</b>

Keterangan : <sup>1)</sup> angka sementara



Keterangan: \*) Capaian tahun 2009 masih angka sementara

### 1.1.1.2 Tenaga Kerja

Dari besarnya angka tenaga kerja, pertanian masih tetap menjadi sektor andalan mata pencaharian bagi sebagian besar penduduk Indonesia. Besarnya angkatan kerja yang bekerja di sektor pertanian tentu saja memberatkan pertanian primer sehingga diperlukan upaya keras untuk mendorong perpindahan tenaga kerja pertanian primer ke sektor industri pertanian atau non pertanian. Jumlah tenaga kerja pertanian (pertanian, perikanan, dan kehutanan) berada pada kisaran 40% dari angkatan kerja nasional dan cenderung terus meningkat setiap tahunnya selama periode 2005-2009 (Tabel 1.2).

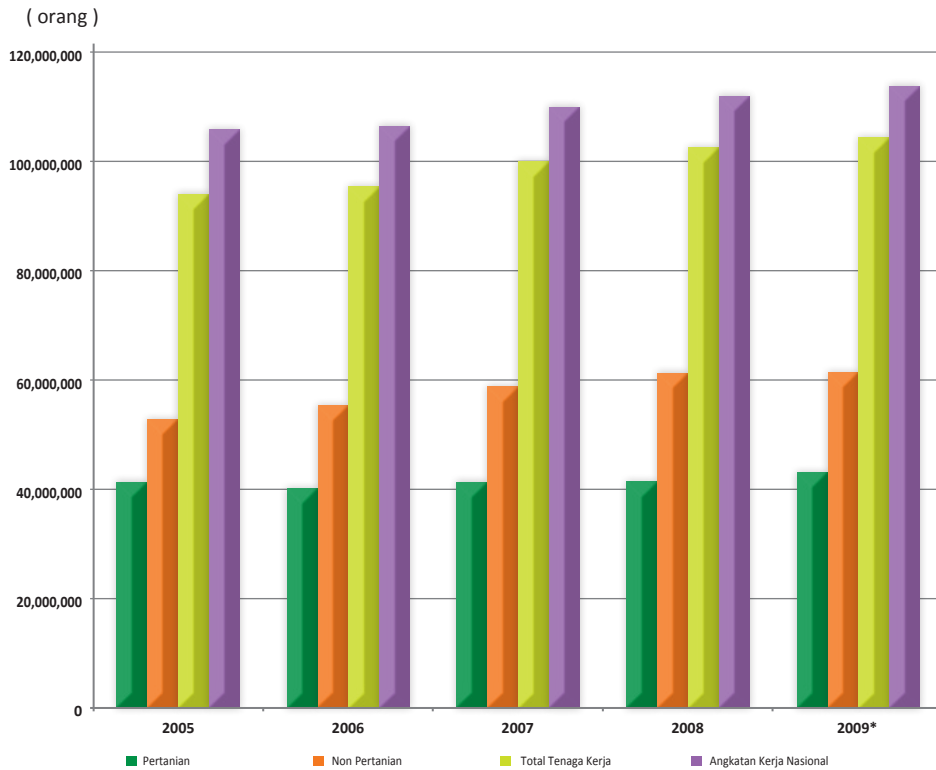
**Tabel 1.2 Tenaga Kerja Pertanian, 2005-2009**

Tahun	Tenaga Kerja (Orang)		Total Tenaga Kerja (orang)	Pangsa Pertanian Terhadap Total (%)	Tidak Bekerja (orang)	Angkatan Kerja Nasional (orang)
	Pertanian**	Non Pertanian				
2005	41.309.776	52.648.611	93.958.387	43,97	11.899.266	105.857.653
2006	40.136.242	55.320.693	95.456.935	42,05	10.932.000	106.388.935
2007	41.206.474	58.723.743	99.930.217	43,66	10.011.142	109.941.359
2008	41.331.706	61.221.044	102.552.750	40,30	9.394.515	111.947.265
2009*	43.029.493	61.455.951	104.485.444	41,18	9.258.964	113.744.408

Keterangan: \* angka sementara (Peb 2009), \*\* mencakup pertanian, perikanan dan kehutanan)

Sumber : BPS

**Grafik 1.2 Tenaga Kerja Pertanian, 2005 - 2009**



Keterangan: \* angka sementara (Peb 2009), \*\* mencakup pertanian, perikanan dan kehutanan

Sumber : BPS

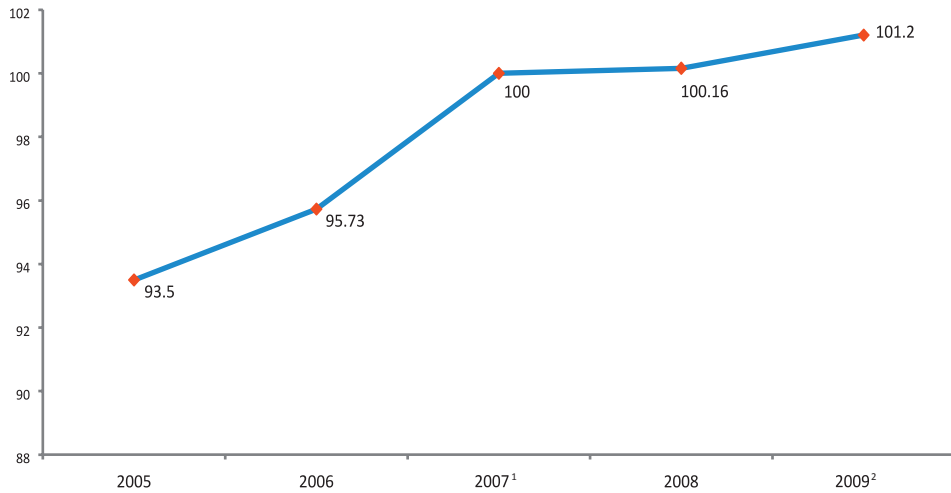
### 1.1.1.3 Nilai Tukar Petani (NTP)

Meskipun NTP belum dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya dari kesejahteraan petani, namun NTP sampai saat ini masih merupakan salah satu indikator untuk mengukur kesejahteraan petani. Oleh karena itu, NTP disebut salah satu indikator relatif yang menunjukkan tingkat kesejahteraan petani. NTP dihitung dengan cara membandingkan antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani.

Kinerja NTP selama tahun 2005-2009 memperlihatkan kecenderungan yang tren yang cenderung meningkat. NTP meningkat mendekati 100 selama tahun 2005-2006, sama dengan 100 pada tahun 2007 dan lebih dari 100 pada tahun 2008-2009. Nilai NTP yang lebih dari 100 menunjukkan bahwa yang dibelanjakan petani masih lebih besar dari yang didapatkan (Grafik 1.3).



Grafik 1.3 Nilai Tukar Petani (NTP)<sup>3</sup>, 2005 - 2009



Keterangan : <sup>1)</sup> Mulai bulan Juni 2008, NTP secara nasional menggunakan tahun dasar 2007 = 100.

<sup>2)</sup> Sampai dengan Desember 2009.

<sup>3)</sup> NTP mencakup lima sub sektor yaitu: tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat (TPR), peternakan dan perikanan.

Sumber: BPS



### 1.1.1.4 Neraca Perdagangan

Realisasi neraca perdagangan pertanian, selama periode 2005-2009, tumbuh sangat mengesankan. Pada Tabel 1.4 dapat dilihat bahwa tahun 2005, surplus neraca perdagangan baru US\$ 6.447,51 juta, namun tiga tahun kemudian telah naik tiga kali lipat menjadi US\$ 17.971,58 juta di tahun 2008 (Tabel 1.3).

**Tabel 1.3 Neraca Perdagangan Pertanian, 2005-2009**

Sub Sektor	2005	2006	2007	2008	2009
	(US\$ 000)				
<b>1 Tanaman Pangan</b>					
- Ekspor	286.744	264.155	289.049	348.914	321.280
- Impor	2.115.140	2.568.453	2.729.147	3.526.961	2.737.862
- Neraca	-1.828.396	-2.304.299	-2.440.098	-3.178.047	-2.416.582
<b>2 Hortikultura</b>					
- Ekspor	227.974	238.063	254.765	432.727	378.627
- Impor	367.425	527.415	795.846	909.669	1.063.120
- Neraca	-139.451	-289.352	-541.081	-476.942	-684.493
<b>3 Perkebunan</b>					
- Ekspor	10.673.186	13.972.064	19.948.923	27.369.363	21.581.670
- Impor	1.532.520	1.675.067	3.379.875	4.535.918	3.949.191
- Neraca	9.140.666	12.296.997	16.569.048	22.833.445	17.632.479
<b>4 Peternakan</b>					
- Ekspor	396.526	388.939	748.531	1.148.170	754.914
- Impor	1.121.832	1.190.396	1.696.459	2.352.219	2.132.800
- Neraca	-725.306	-801.457	-947.928	-1.204.049	-1.337.886
<b>5 Pertanian</b>					
- Ekspor	11.584.429	14.863.221	21.241.268	29.299.174	23.036.491
- Impor	5.136.916	5.961.331	8.601.327	11.324.767	9.882.973
- Neraca	6.447.513	8.901.890	12.639.941	17.974.407	13.153.518

Keterangan : <sup>1)</sup> angka kumulatif s/d September 2009.

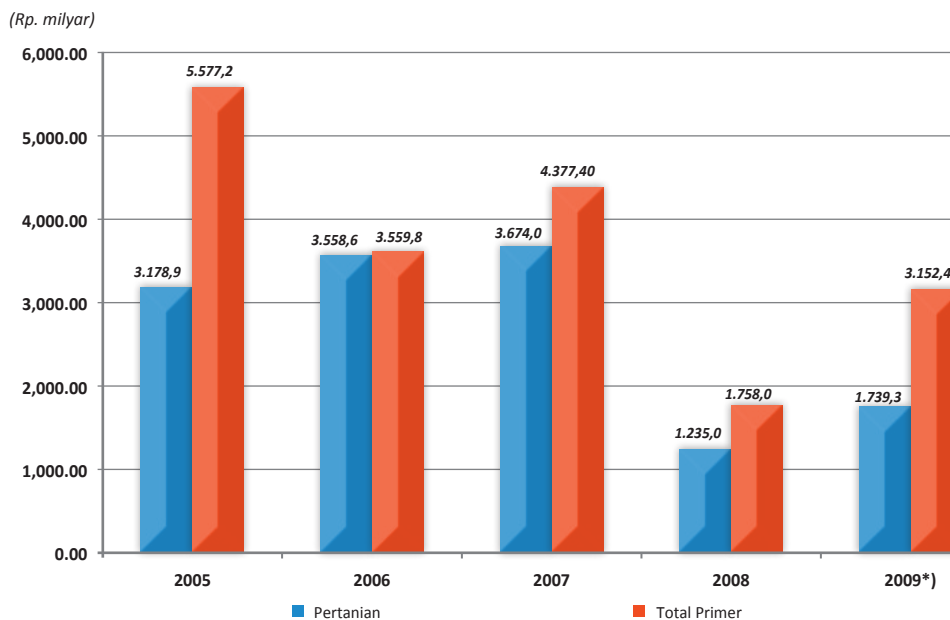
Sumber : BPS diolah Pusdatin Deptan.

### 1.1.1.5 Investasi

Salah satu indikator investasi pertanian dapat dilihat dari realisasi investasi PMDN dan PMA. Dari Grafik 1.4 dan Grafik 1.5 dapat dilihat bahwa investasi pertanian sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 cenderung meningkat, namun pada tahun 2008 terjadi penurunan karena krisis keuangan global yang juga dialami oleh Indonesia. Walau demikian, realisasi investasi PMDN dan PMA di tahun 2009 (sampai bulan September) sudah melebihi tahun 2008. Hal ini menunjukkan bahwa daya tarik investasi pertanian Indonesia sudah membaik kembali. Pada dasarnya investasi pertanian yang dominan berasal dari petani, namun sampai saat ini belum ada perhitungan yang dapat memperlihatkan investasi dari petani ini.

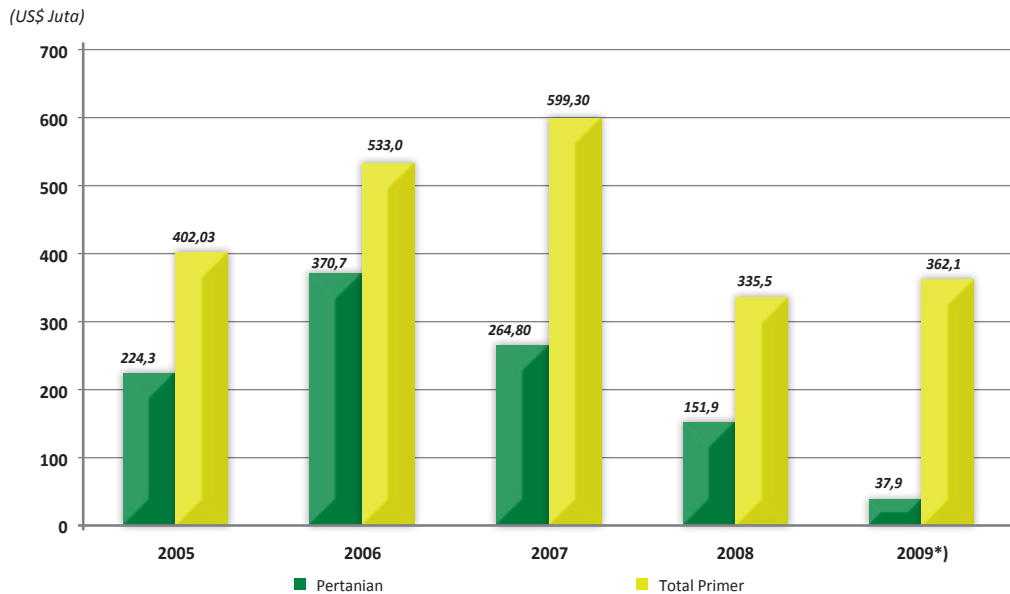
Grafik 1.4 dan Grafik 1.5 berikut adalah realisasi investasi PMDN dan PMA sektor pertanian selama kurun waktu 2005-2009.

**Grafik 1.4 Realisasi Investasi PMDN Sektor Pertanian, 2005 - 2009**



Keterangan: \*) angka sampai September 2009

Sumber: Pusat Data Pertanian

**Grafik 1.5 Realisasi Investasi PMA Sektor Pertanian, 2005 - 2009**

Keterangan: \*) angka sampai September 2009

Sumber: Pusat Data Pertanian

### 1.1.2 Produksi Komoditas Pertanian

Capaian produksi komoditas pertanian selama tahun 2005-2008 telah menunjukkan prestasi sangat baik, antara lain: peningkatan produksi padi dari 54,15 juta ton GKG tahun 2005 menjadi 60,33 juta ton GKG pada tahun 2008, atau meningkat rata-rata 3,69 persen setiap tahun. Target produksi padi 2009 sebesar 63,5 juta ton GKG, sementara berdasarkan ARAM III (Oktober 2009) produksi padi telah mencapai 63,8 juta ton GKG atau mencapai 100,5 % dari target tahun 2009. Peningkatan produksi ini telah menempatkan Indonesia meraih kembali status swasembada beras sejak tahun 2007 dan terhindar dari krisis pangan seperti terjadi di banyak negara ketika krisis keuangan global melanda dunia. Keberhasilan swasembada ini sudah diakui dunia dan bahkan banyak negara menyatakan keinginan untuk mempelajari strategi yang telah diterapkan Indonesia.

Peningkatan produksi jagung juga cukup pesat selama 2005-2008, yaitu mencapai rata-rata 9,98% setiap tahun. Produksi jagung meningkat dari 12,52 juta ton pipilan kering tahun 2005 menjadi 16,32 juta ton

pipilan kering tahun 2008. Perhitungan sementara berdasarkan ARAM III (Oktober 2009) produksi jagung akan mencapai 17,66 juta ton pipilan kering, sementara target produksi jagung yang ditetapkan untuk tahun 2009 adalah 19,44 juta ton pipilan kering. Secara lebih lengkap, capaian produksi tanaman pangan selama 2005-2009 dapat dilihat pada Tabel 1.4.

**Tabel 1.4 Produksi Komoditas Tanaman Pangan, 2005-2009**

NO	KOMODITAS	2005	2006	2007	2008	2009 <sup>1)</sup>	Pertumbuhan 2005-2008 (%)
		(ribu ton)					
1.	Padi	54.151	54.455	57.157	60.326	63.840	3,69
2.	Jagung	12.524	11.609	13.288	16.317	17.659	9,98
3.	Kedele	808	748	593	776	966	0,90
4.	Kacang Tanah	836	838	789	770	785	-2,67
5.	Kacang Hijau	321	316	322	298	314	-2,37
6.	Ubi Kayu	19.321	19.987	19.988	21.757	22.376	4,10
7.	Ubi Jalar	1.857	1.854	1.887	1.882	2.027	0,45

Keterangan : <sup>1)</sup> Aram III (Oktober 2009).

Sumber : BPS.

Peningkatan produksi perkebunan selama 2005-2008 menunjukkan hasil yang juga menggembirakan, seperti gula tumbuh 3,85 persen pertahun, kelapa sawit 14,38 persen pertahun, dan jambu mete 2,38 persen pertahun. Sejak tahun 2008 Indonesia sudah swasembada untuk komoditas gula konsumsi langsung rumah tangga, sementara swasembada gula untuk industri ditargetkan tercapai pada tahun 2014. Capaian produksi perkebunan selama 2005-2009 lebih lanjut dapat dilihat pada Tabel 1.5.



**Tabel 1.5 Produksi Komoditas Perkebunan, 2005-2009**

NO	KOMODITAS	2005	2006	2007	2008	2009 <sup>1)</sup>	Pertumbuhan 2005-2008 (%)
		(ribu ton)					
1.	Kelapa Sawit	11.862	17.351	17.665	17.540	19.324	14,39
2.	Karet	2.271	2.637	2.755	2.751	2.440	2,28
3.	Kelapa	3.097	3.131	3.193	3.240	3.258	1,27
4.	Kakao	749	769	740	803	809	2,04
5.	Kopi	640	682	676	698	683	1,70
6.	Jambu Mete	135	149	146	157	147	2,38
7.	Gula <sup>2)</sup>	2.242	2.052	2.624	2.668	2.517	3,85
8.	Tembakau	153	146	165	168	176	3,75
9.	Cengkeh	78	61	80	70	82	3,50

Keterangan: <sup>1)</sup> angka tetap; <sup>2)</sup> Hablur

Sumber: Pusat Data Pertanian dan Direktorat Jenderal Perkebunan, Deptan.

Pertumbuhan yang membanggakan juga diperlihatkan oleh komoditas peternakan dan hortikultura selama 2005-2008, antara lain daging sapi 3,95 persen, daging kambing/domba 7,58 persen, daging itik 21,84 persen, susu segar 8,30 persen, mangga (14,22 persen) dan anggrek (28,79 persen). Capaian produksi peternakan dan hortikultura dalam kurun 2005-2009 tersebut dapat dilihat secara lebih lengkap pada Tabel 1.6 dan Tabel 1.7.

**Tabel 1.6 Produksi Komoditas Peternakan, 2005-2009**

NO	KOMODITAS	2005	2006	2007	2008	2009 <sup>1)</sup>	Pertumbuhan 2005-2008 (%)
		(ribu ton)					
1.	Daging Sapi	359	396	339	393	405	3,95
2.	Daging Kerbau	38	44	42	39	41	1,37
3.	Daging Kambing / Domba	98	140	120	113	123	7,58
4.	Daging Babi	174	196	226	210	220	6,96
5.	Daging Ayam Buras	301	341	355	336	345	4,01
6.	Daging Itik	21	25	44	31	32	21,84
7.	Sapi Perah (Susu Segar)	1.052	1.204	1.370	1.324	1.405	8,30

Keterangan: <sup>1)</sup> angka sementara. Sumber : Pusat Data Pertanian.

**Tabel 1.7 Produksi Komoditas Hortikultura**

NO	KOMODITAS	2005	2006	2007	2008	2009 <sup>1)</sup>	Pertumbuhan 2005-2008 (%)
		(ribu ton) <sup>2)</sup>					
1.	Kentang	1.009	1.012	1.004	1.072	1.076	2,06
2.	Cabe	1.058	1.185	1.129	1.153	1.379	3,31
3.	Bawang Merah	733	795	803	854	965	5,23
4.	Mangga	1.413	1.622	1.819	2.105	2.243	14,22
5.	Pisang	5.178	5.037	5.454	6.005	6.374	5,21
6.	Manggis	65.000	73.000	113.000	79.000	106.000	34,17
7.	Durian	566	748	5 95	682	798	8,77
8.	Jeruk	2.214	2.566	2.626	2.468	2.132	4,06
9.	Rimpang	322	417	444	399	408	7,82
10.	Tanaman Hias	7.902	10.903	9.485	15.309	15.375	28,79
	Anggrek <sup>1)</sup>	7.902	10.903	9.484	15.310	16.205	28,79
	Krisan <sup>1)</sup>	47,466	63,716	66,979	101,777	107,847	30,44

Keterangan : <sup>1)</sup> Satuan dalam ribu tangkai

Sumber : BPS.

### 1.1.3 Pendukung Peningkatan Produksi

Selain dalam bentuk indikator makro dan produksi, kinerja Kementerian Pertanian dapat dilihat dari capaian dalam bentuk dukungan peningkatan produksi, antara lain sebagai berikut:

#### 1.1.3.1 APBN Kementerian Pertanian

Selama periode tahun 2005-2009, alokasi APBN ke Kementerian Pertanian memperlihatkan peningkatan yang cukup tajam. APBN Kementerian Pertanian tercatat sebesar Rp 4,02 triliun di tahun 2005, kemudian meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi Rp 8,17 triliun di tahun 2009 (Tabel 1.8).

**Tabel 1.8 Alokasi APBN Kementerian Pertanian 2005-2009**

No	ESELON I	2005	2006	2007	2008	2009
		<i>(juta rupiah)</i>				
1	SEKRETARIAT JENDERAL <sup>*)</sup>	227.868	762.185	1.664.487	1.490.145	1.531.866
	- BIRO - BIRO	227.868	212.655	360.912	293.405	433.639
	- PUSAT - PUSAT		549.530	1.303.575	1.196.740	1.098.226
2	INSPEKTORAT JENDERAL	32.986	37.775	57.149	51.350	61.097
3	DITJEN TANAMAN PANGAN	823.673	498.880	1.743.284	1.099.995	1.003.719
4	DITJEN PERKEBUNAN	457.182	452.698	387.202	445.855	424.116
5	DITJEN PETERNAKAN	372.386	596.996	548.742	755.598	708.002
6	DITJEN PENGOLAHAN & PEMASARAN HASIL PERTANIAN	56.110	379.803	413.298	662.582	373.959
7	DITJEN PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR	89.439	1.005.726	1.015.089	1.015.309	925.469
8	DITJEN HORTIKULTURA	320.461	251.770	288.860	261.329	269.261
9	BADAN LITBANG PERTANIAN	761.157	730.778	830.140	793.636	859.561
10	BADAN PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN	355.885	590.950	878.135	940.433	1.227.047
11	BADAN KETAHANAN PANGAN	331.658	696.520	587.421	419.114	399.289
12	BADAN KARANTINA PERTANIAN	195.998	281.002	375.810	370.171	387.390
<b>TOTAL</b>		<b>4.024.804</b>	<b>6.285.084</b>	<b>8.789.618</b>	<b>8.305.517</b>	<b>8.170.774</b>

Keterangan : \*) Mencakup kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) sebesar Rp 1 triliun masing-masing untuk tahun 2008 dan tahun 2009.

Anggaran subsidi pertanian juga meningkat pesat selama tahun 2005-2009. Subsidi pupuk meningkat hampir tujuh kali lipat dari Rp 2,59 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp 17,44 triliun pada tahun 2009, yang terbagi untuk subsidi harga dan subsidi langsung, sebagaimana pada tabel 1.9 berikut.

**Tabel 1.9 Alokasi Anggaran Subsidi Pupuk Kementerian Pertanian 2005-2009**

NO	Jenis Subsidi	2005	2006	2007	2008	2009
		<i>(milyar rupiah)</i>				
1	Subsidi Harga	2.593	4.182	6.797	14.101	16.458
2	BLP <sup>1)</sup>	-	-	-	0,80	0,96
3	Pengawasan	-	-	-	18,87	20,00
<b>Jumlah</b>		<b>2.593</b>	<b>4.182</b>	<b>6.797</b>	<b>14.922</b>	<b>17.441</b>

Keterangan : 1) BLP = Bantuan Langsung Pupuk.



Untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pemakaian benih bagi petani, maka disediakan subsidi dalam bentuk subsidi tidak langsung (subsidi harga) dan subsidi langsung. Subsidi langsung benih dilaksanakan dalam bentuk Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) dan Cadangan Benih Nasional (CBN). Subsidi benih meningkat dari Rp 125,29 milyar pada tahun 2005 menjadi Rp 1,32 trilyun pada tahun 2009, atau meningkat lebih dari sepuluh kali lipat (Tabel 1.10).

**Tabel 1.10 Alokasi Anggaran Subsidi Benih Kementerian Pertanian 2005-2009**

No	Jenis Subsidi	2005	2006	2007	2008	2009
		<i>(juta rupiah)</i>				
1	Subsidi Harga	80.002	99.006	81.597	112.512	122.377
2	CBN	45.291	37.886	37.950	190.535	375.620
3	BLBU	-	-	222.368	682.202	817.403
	Jumlah	125.294	136.893	341.915	985.249	1.315.400

Disamping subsidi, APBN juga ada yang ditransfer ke daerah seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Untuk DAK bidang pertanian, selama 2005-2009 juga mengalami peningkatan yang cukup besar. DAK Bidang Pertanian meningkat dari Rp 170 milyar di tahun 2005 menjadi Rp 1,5 trilyun di tahun 2009 atau meningkat hampir sembilan kali lipat (Tabel 1.11).

**Tabel 1.11 Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian 2005-2009**

Jenis Dana	2005	2006	2007	2008	2009
	<i>(Rp milyar)</i>				
DAK	170,0	1.094,8	1.492,2	1.492,2	1.492,2

### 1.1.3.2 Pembangunan Infrastruktur Pertanian

Untuk mendukung peningkatan produksi pertanian, Kementerian Pertanian telah melakukan perbaikan dan pembangunan infrastruktur pertanian yang mencakup: Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), Jaringan Irigasi Desa (JIDES), Tata Air Mikro (TAM), Jalan Usaha Tani (JUT), Jalan Produksi, konservasi Daerah Aliran Sungai (DAS), embung, sawah, sumur, dam parit, dan konservasi lahan.

Dari tahun 2005 sampai 2009, telah dibangun JITUT seluas 388.106 ha; JIDES seluas 227.282 ha; TAM seluas 116.702 ha; optimasi, konservasi dan reklamasi lahan seluas 80.457 ha, JUT dan jalan produksi sepanjang 3.992,24 km, konservasi DAS Hulu seluas 30.050 ha; perluasan sawah sebanyak 82.514 ha; embung sebanyak 1.885 unit; sumur serapan sebanyak 2.469 unit; dan Dam Parit sejumlah 295 unit. Di samping itu, selama periode yang sama juga telah dikembangkan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) sebanyak 3.941 unit.

### **1.1.3.3 Pembangunan Kelembagaan dan Penguatan Modal Petani**

Bantuan penguatan modal dan pengembangan kelembagaan merupakan upaya untuk mengatasi keterbatasan modal dan kapasitas yang dimiliki petani. Melalui kegiatan Bantuan Langsung Masyarakat - Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLM-PUAP), satu unit Gapoktan dapat menerima bantuan penguatan modal sebesar Rp 100 juta. Sampai tahun 2008 telah diberikan bantuan penguatan modal kepada 10.542 Gapoktan. Untuk tahun 2009, sebanyak 10.000 Gapoktan ditargetkan akan menerima bantuan BLM-PUAP.

Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) adalah suatu upaya pengembangan agribisnis melalui pemberdayaan sumberdaya manusia, kemitraan, peningkatan akses terhadap sumberdaya, teknologi dan pasar yang ditujukan khusus bagi kelembagaan keagamaan yang berkembang di masyarakat seperti pondok pasantren, gereja, pura dan lain-lain. Sejak tahun 2007-2009 telah disalurkan bantuan modal ke 4.292 LM3, yang meliputi kegiatan: tanaman pangan sebanyak 569 LM3, hortikultura sebanyak 984 LM3, peternakan 1.726 LM3 dan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian sebanyak 994 LM3.

Dalam rangka peningkatan efektifitas kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), maka dikembangkan Dana Penguatan Modal untuk Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP). Sampai tahun 2008 telah disalurkan dana penguatan modal di 1.841 LUEP pada 27 Provinsi sentra produksi padi/jagung. Mulai tahun 2009, dilakukan perubahan pendekatan program yaitu difokuskan kepada pemberdayaan Gapoktan melalui kegiatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM).

Sedangkan dalam rangka memberdayakan masyarakat di daerah rawan pangan, telah dikembangkan Desa Mandiri Pangan, yang menjangkau

1.746 desa rawan pangan di 350 kabupaten. Selanjutnya, bekerjasama dengan International Fund for Agriculture Development (IFAD) telah dikembangkan pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat di lahan kering (PIDRA = *Participatory Integrated Development in Rainfed Areas*) di propinsi Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat sebanyak 2.330 Kelompok dan 237 Federasi/Gapoktan.

Penguatan modal dan pengembangan kelembagaan petani yang lain adalah: Sarjana Masuk Desa (SMD) yang sekarang berkembang menjadi Penggerak Membangun Desa (PMD), Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT), dan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM).

#### **1.1.3.4 Pengolahan Produk Pertanian dan Pengembangan Pasar**

Untuk memberikan nilai tambah yang lebih besar, maka usahatani tidak cukup hanya sampai tahap menghasilkan produk primer saja, melainkan harus dilakukan kegiatan pengolahan dan pemasaran. Dalam upaya mendorong kegiatan pengolahan dan pemasaran oleh petani, selama periode 2005-2009, Kementerian Pertanian telah melakukan pembangunan pasar tani di 32 Kabupaten/Kota, Sub Terminal Agribisnis (STA) di 61 Kabupaten/Kota di 16 Provinsi, Pasar Ternak di 74 Kabupaten/Kota di 25 Provinsi, pengembangan pengolahan hasil hortikultura di 116 Kabupaten/Kota, pengolahan hasil perkebunan di 40 Kabupaten/Kota, pengolahan pakan ternak di 78 Kabupaten/Kota, pengolahan susu di 27 Kabupaten/Kota, dan pengolahan daging di 88 Kabupaten/Kota. Inseminasi Buatan (IB) 300 unit dan pelayanan investasi hortikultura di 32 kawasan di Indonesia.

#### **1.1.3.5 Ketahanan Pangan**

Secara umum, pembangunan ketahanan pangan 2005-2008 memperlihatkan kecenderungan yang membaik, yaitu ketersediaan energi meningkat 2,6% per tahun dan ketersediaan protein meningkat 2,3% per tahun. Tingkat ketersediaan energi sudah mencapai 3.032 kkal/kap/hari dan ketersediaan protein sekitar 76,9 gram/kap/hari. Adapun tingkat konsumsi energi masyarakat meningkat menjadi 2.038 kkal/kapita/hari dan konsumsi protein meningkat menjadi 57,49 gram/kapita/hari pada tahun 2008. Meskipun tingkat konsumsi energi dan protein sudah melebihi Angka Kecukupan Gizi (AKG) yaitu 2.000 kkal/kapita/hari untuk energi dan 52 gram/kapita/hari untuk protein, tetapi kualitas konsumsi pangan

masyarakat belum dapat mencapai kondisi ideal, yaitu dengan Skor PPH sebesar 100. Pencapaian Skor PPH tahun 2008 sebesar 81,9.

#### **1.1.3.6 Penelitian dan Pengembangan**

Penelitian dan pengembangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan pertanian yang telah berhasil dicapai Kementerian Pertanian selama ini. Kegiatan penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan Kementerian Pertanian selama tahun 2005-2009 mencatat keberhasilan inovasi teknologi yang mencakup: 196 varietas unggul padi, 46 varietas unggul jagung, 64 varietas unggul kedelai, 7 galur baru kambing, domba, ayam dan itik, 13 teknologi vaksin, 8 antigen, 10 kit diagnostik dan teknik pengujian penyakit, dan 15 Varietas Unggul Baru (VUB) tebu. Selanjutnya, juga telah dikembangkan inovasi pola tanam, pendekatan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) seluas 2 juta ha pada tahun 2007, yang adopsinya dipercepat dengan Sekolah Lapang (SL-PTT), dimana sejak tahun 2008-2009 dilaksanakan melalui SL-PTT padi, jagung dan kedelai, yang meliputi untuk SL-PTT hibrida seluas 156,9 ribu ha dan SL-PTT non hibrida seluas 3,6 juta ha. Disamping itu juga dikembangkan Sistem Integrasi Tanaman Ternak Bebas Limbah (SITTBL), pemupukan, pupuk produk bio, bioteknologi, Pengendalian Hama Terpadu (PHT), Alat Mesin Pertanian (Alsintan), pasca panen, dan lain-lain.

#### **1.1.3.7 Subsidi Bunga untuk Kredit Petani**

Salah satu keterbatasan petani untuk pengembangan usahatani adalah modal. Dalam upaya membantu petani mengatasi masalah kesulitan modal, Kementerian Pertanian mengembangkan berbagai skim kredit pertanian, seperti: Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Kredit Pembangunan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP) dan Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), serta memperluas pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Subsidi bunga yang disediakan untuk masing-masing skim kredit tersebut bervariasi antara 8-10%. Khusus untuk KUPS, beban bunga bagi peminjam ditetapkan sebesar 5 persen. Sementara untuk KUR, meskipun menggunakan bunga komersial tetapi mensyaratkan agunan yang relatif mudah.

Subsidi bunga program revitalisasi perkebunan (KPEN-RP) yang dimulai sejak tahun 2006 telah berhasil meningkatkan serapan kredit perbankan

sebesar Rp. 4,0 triliun sampai dengan tahun 2008. Bunga kredit yang diberikan kepada pekebun sebesar 10% dan selisih bunga menjadi beban Pemerintah. Luas areal yang telah dicapai melalui Skim KPEN-RP sebesar 115.169 ha yang meliputi kelapa sawit (111.977 ha), karet (1.972 ha) dan kakao (1.220 ha). Jumlah petani peserta program revitalisasi perkebunan ini telah mencapai 53.299 orang mulai dari tahun 2006 sampai 2009.

## 1.2 Potensi, Permasalahan dan Tantangan

### 1.2.1 Potensi Pertanian Indonesia

#### 1.2.1.1 Keanekaragaman Hayati dan Agroekosistem

Indonesia memiliki potensi sumberdaya alam, termasuk plasma nutfah, yang melimpah (*mega biodiversity*). *Bio-diversity* darat Indonesia merupakan terbesar nomor dua di dunia setelah Brasil, sedangkan bila termasuk *bio-diversity* laut maka Indonesia merupakan terbesar nomor satu di dunia. Hal ini dapat dilihat dengan beragamnya jenis komoditas pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang sudah sejak lama diusahakan sebagai sumber pangan dan pendapatan masyarakat.



Keaneka ragaman hayati yang didukung dengan sebaran kondisi geografis berupa dataran rendah dan tinggi; limpahan sinar matahari dan intensitas curah hujan yang hampir merata sepanjang tahun di sebagian wilayah; serta keaneka ragaman jenis tanah memungkinkan dibudidayakannya aneka jenis tanaman dan ternak asli daerah tropis, serta komoditas introduksi dari daerah sub tropis secara merata sepanjang tahun di Indonesia.

Aneka ragam dan besarnya jumlah plasma nutfah tanaman dan hewan, baik yang asli daerah tropis maupun komoditas introduksi yang sudah beradaptasi dengan iklim tropis, di sisi lain merupakan sumber materi genetik yang dapat direkayasa untuk menghasilkan varietas dan klon tanaman unggul serta bangsa ternak.

#### 1.2.1.2 Lahan Pertanian

Indonesia memiliki potensi ketersediaan lahan yang cukup besar dan belum dimanfaatkan secara optimal. Data dari kajian akademis yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Kementerian Pertanian pada tahun 2006 memperlihatkan bahwa total luas daratan Indonesia adalah sebesar 192 juta ha, terbagi atas 123 juta ha (64,6 persen) merupakan kawasan budidaya dan 67 juta ha sisanya (35,4 persen) merupakan kawasan lindung. Dari total luas kawasan budidaya, yang berpotensi untuk areal pertanian seluas 101 juta ha, meliputi lahan basah seluas 25,6 juta ha, lahan kering tanaman semusim 25,3 juta ha dan lahan kering tanaman tahunan 50,9 juta ha. Sampai saat ini, dari areal yang berpotensi untuk pertanian tersebut, yang sudah dibudidayakan menjadi areal pertanian sebesar 47 juta ha, sehingga masih tersisa 54 juta ha yang berpotensi untuk perluasan areal pertanian.



Jumlah luasan dan sebaran hutan, sungai, rawa dan danau serta curah hujan yang cukup tinggi dan merata sepanjang tahun sesungguhnya merupakan potensi alamiah untuk memenuhi kebutuhan air pertanian apabila dikelola dengan baik. Waduk, bendungan, embung dan air tanah serta air permukaan lainnya sangat potensial untuk mendukung pengembangan usaha pertanian.

### **1.2.1.3 Tenaga Kerja Pertanian**

Tingginya jumlah penduduk yang sebagian besar berada di pedesaan dan memiliki kultur budaya kerja keras merupakan potensi tenaga kerja pertanian. Sampai saat ini, lebih dari 43 juta tenaga kerja nasional masih menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian. Besarnya jumlah tenaga kerja tersebut belum tersebar secara proporsional sesuai dengan sebaran luas potensi lahan serta belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk pengembangan pertanian yang berdaya saing.

Apabila keberadaan penduduk yang besar di suatu wilayah dapat ditingkatkan pengetahuannya dan keterampilannya untuk dapat berkerja dan berusaha di sektor produksi, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian, maka dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas produksi aneka komoditas pertanian bagi pemenuhan kebutuhan pasar nasional dan dunia. Peningkatan kapasitas penduduk dalam hal pengetahuan dan ketrampilan pertanian dapat juga dilakukan melalui penempatan tenaga kerja pertanian terlatih di daerah yang masih kurang penduduknya dan penyediaan fasilitasi pertanian dalam bentuk faktor produksi, bimbingan teknologi serta pemberian jaminan pasar yang baik.

### **1.2.1.4 Teknologi**

Saat ini, sudah cukup banyak tersedia paket teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan oleh petani untuk meningkatkan kuantitas, kualitas dan produktifitas aneka produk pertanian. Berbagai varietas, klon dan bangsa ternak berdaya produksi tinggi; teknologi produksi pupuk dan produk bio; alat dan mesin pertanian; serta aneka teknologi budidaya, pasca panen dan pengolahan hasil pertanian sudah banyak dihasilkan para peneliti di lembaga penelitian, masyarakat petani dan swasta. Namun demikian, berbagai paket teknologi ini masih belum sepenuhnya dapat diadopsi oleh masyarakat petani, karena berbagai keterbatasan yang dihadapi dan

dimiliki petani seperti: proses diseminasi, kelembagaan dan skala usaha, keterampilan serta tingginya biaya untuk menerapkan teknologi.

#### **1.2.1.5 Pertumbuhan Jumlah dan Daya Beli Penduduk serta Pasar**

Jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar merupakan pasar dalam negeri yang potensial bagi produk-produk pertanian yang dihasilkan petani. Pada tahun 2009 jumlah penduduk Indonesia tercatat sebesar 230.632.700 jiwa dengan pertumbuhan 1,25 persen per tahun. Saat ini, tingkat konsumsi aneka produk hasil pertanian Indonesia, kecuali beras, gula dan minyak goreng, masih relatif rendah. Rendahnya tingkat konsumsi produk pertanian ini, terutama disebabkan masih rendahnya tingkat pendapatan per kapita penduduk Indonesia sehingga mempengaruhi daya beli.

Seiring dengan keberhasilan pembangunan ekonomi yang saat ini tengah giat dijalankan, maka pendapatan per kapita penduduk juga akan meningkat. Peningkatan pendapatan di satu sisi, maka dapat terjadi peningkatan permintaan produk, termasuk pertanian di sisi lain. Permintaan pasar domestik, di samping jumlahnya yang semakin meningkat, juga membutuhkan keragaman produk yang bervariasi, sehingga akan membuka peluang yang lebih besar terhadap diversifikasi produk.

Sejalan dengan era globalisasi dan pemberlakuan pasar bebas, produk pertanian Indonesia juga berpeluang untuk dipasarkan ke pasar internasional, baik produk segar maupun olahan. Apabila peluang pasar dalam negeri dan luar negeri dapat dimanfaatkan, maka hal ini akan menjadi pasar yang sangat besar bagi produk pertanian Indonesia.

### **1.2.2 Permasalahan**

Pembangunan periode jangka menengah tahap II (2010-2014) pada dasarnya merupakan kelanjutan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan pada periode jangka menengah sebelumnya. Agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan memenuhi target sasaran yang ditetapkan diperlukan gambaran permasalahan yang akan dihadapi pada periode pembangunan jangka waktu lima tahun ke depan.



Berdasarkan hasil evaluasi atas pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan sampai saat ini, persoalan mendasar yang diperkirakan masih dihadapi sektor pertanian di masa yang akan datang, khususnya jangka waktu 2010-2014, mencakup aspek seperti: kerusakan lingkungan dan perubahan iklim, infrastruktur, sarana prasarana, lahan dan air; kepemilikan lahan; sistem perbenihan dan perbibitan nasional; akses petani terhadap permodalan kelembagaan petani dan penyuluh; ketahanan pangan dan energi; Nilai Tukar Petani (NTP); keterpaduan antar sektor, dan kinerja pelayanan birokrasi pertanian.

Secara lebih lengkap, permasalahan mendasar tersebut di atas diuraikan sebagai berikut:

#### **Boks 1.1 Permasalahan Mendasar Sektor Pertanian**

1. Meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global
2. Ketersediaan infrastruktur, sarana prasarana, lahan, dan air
3. Status dan luas kepemilikan lahan (9,55 juta KK < 0.5 Ha)
4. Sistem perbenihan dan perbibitan nasional belum berjalan optimal
5. Keterbatasan akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usahatani
6. Lemahnya kapasitas dan kelembagaan petani dan penyuluh
7. Masih rawannya ketahanan pangan dan ketahanan energi
8. Belum berjalannya diversifikasi pangan dengan baik
9. Rendahnya nilai tukar petani (NTP)
10. Belum padunya antar sektor dalam menunjang pembangunan pertanian
11. Kurang optimalnya kinerja dan pelayanan birokrasi pertanian.

#### **1.2.2.1 Meningkatnya Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim Global**

Ancaman dan krisis pangan dunia beberapa tahun terakhir memiliki kaitan sangat erat dengan perubahan iklim global. Dampak perubahan iklim global adalah terjadinya gangguan terhadap siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan, kenaikan permukaan

laut, peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam yang dapat menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan. Sejak tahun 1998 telah terjadi kenaikan suhu yang mencapai 1 derajat celsius, sehingga diprediksi akan terjadi lebih banyak curah hujan dengan perubahan 2-3 persen per tahun. Dalam 5 tahun terakhir rata-rata luas lahan sawah yang terkena banjir dan kekeringan masing-masing sebesar 29.743 Ha terkena banjir (11.043 Ha diantaranya puso karena banjir) dan 82.472 Ha terkena kekeringan (8.497 Ha diantaranya puso karena kekeringan). Kondisi ini kecenderungannya akan terus meningkat pada tahun-tahun ke depan.

Bagi sektor pertanian, dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati, eksplosi hama dan penyakit tanaman dan hewan, serta pada akhirnya adalah penurunan produksi pertanian. Oleh karena itu, diperlukannya upaya khusus untuk pemetaan daerah rawan banjir dan kekeringan. Namun di tingkat lapangan, kemampuan para petugas lapangan dan petani dalam memahami data dan informasi prakiraan iklim masih sangat terbatas, sehingga kurang mampu menentukan awal musim tanam serta melakukan antisipasi, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang dapat terjadi.

Tantangan ke depan dalam menyikapi dampak perubahan iklim global adalah bagaimana meningkatkan kemampuan petani dan petugas lapangan dalam melakukan prakiraan iklim serta melakukan langkah antisipasi, mitigasi dan adaptasi yang diperlukan. Untuk membangun kemampuan petani dalam melakukan antisipasi dan mitigasi dampak perubahan iklim adalah melalui Sekolah Lapang Iklim serta membangun sistem informasi iklim dan modifikasi pola dan kalender tanam yang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah. Disamping itu, perlu menciptakan teknologi tepat guna dan menciptakan varietas yang memiliki potensi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) rendah, toleran kenaikan suhu, kekeringan, banjir /genangan dan salinitas.

#### **1.2.2.2 Ketersediaan Infrastruktur, Sarana Prasarana, Lahan dan Air**

Salah satu prasarana pertanian yang saat ini keberadaannya sangat memprihatinkan adalah jaringan irigasi. Kurangnya pembangunan waduk dan jaringan irigasi yang baru serta rusaknya jaringan irigasi yang ada



mengakibatkan daya dukung irigasi bagi pertanian sangat menurun. Kerusakan ini terutama diakibatkan banjir dan erosi, kerusakan sumberdaya alam di daerah aliran sungai, bencana alam serta kurangnya pemeliharaan jaringan irigasi hingga ke tingkat usaha tani. Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan prasarana pengairan adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan daerah aliran sungai; pemeliharaan jaringan irigasi pedesaan; pengembangan sumber-sumber air alternatif dan berskala kecil antara lain melalui pemanfaatan teknologi pengambilan air permukaan dan bawah tanah; pembangunan dan pemeliharaan embung dan bendungan serta pemanfaatan sumber air tanah, danau, rawa dan air hujan.

Prasarana usahatani lain yang sangat dibutuhkan masyarakat dan pedagang komoditas pertanian namun keberadaannya masih terbatas adalah jalan usahatani, jalan produksi, pelabuhan yang dilengkapi dengan pergudangan berpendingin udara, laboratorium dan kebun percobaan bagi penelitian, laboratorium pelayanan uji standar dan mutu, pos dan laboratorium perkarantina, kebun dan kandang untuk penangkaran benih dan bibit, klinik konsultasi kesehatan tanaman dan hewan, balai informasi dan promosi pertanian, balai-balai penyuluhan serta pasar-pasar yang spesifik bagi komoditas. Tantangan yang harus dihadapi ke depan adalah bagaimana menyediakan semua prasarana yang dibutuhkan petani ini dalam jumlah yang cukup, berada dekat dengan sentra produksi, dan biaya pelayanan yang terjangkau.

Di sisi sarana produksi, permasalahan yang dihadapi adalah belum cukup tersedianya benih/bibit unggul bermutu, pupuk, pakan, pestisida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat usaha tani, serta belum berkembangnya kelembagaan pelayanan penyedia sarana produksi. Belum berkembangnya usaha penangkaran benih/bibit secara luas hingga di sentra produksi mengakibatkan harga benih/bibit menjadi mahal, bahkan mengakibatkan banyak beredarnya benih/bibit palsu di masyarakat yang pada akhirnya sangat merugikan petani.

Pupuk merupakan komoditas yang seringkali menjadi langka pada saat dibutuhkan, terutama pupuk bersubsidi. Sistem distribusi yang belum baik serta margin harga dunia yang relatif tinggi dibandingkan dengan harga pasar domestik mengakibatkan banyak terjadinya praktek penyelundupan pupuk bersubsidi ke luar negeri. Dengan keterbatasan penyediaan pupuk

kimia, ternyata pengetahuan dan kesadaran petani untuk menggunakan dan mengembangkan pupuk organik sendiri, sebagai pupuk alternatif juga masih sangat kurang.

Tantangan untuk mengembangkan sarana produksi pertanian ke depan adalah bagaimana mengembangkan penangkar benih/bibit unggul dan bermutu, menumbuhkembangkan kelembagaan penyedia jasa alat dan mesin pertanian, mendorong petani memproduksi dan meningkatkan pemakaian pupuk organik, serta mendorong petani untuk menggunakan pestisida dan obat-obatan tanaman/hewan yang ramah lingkungan.

### **1.2.2.3 Status dan Luas Kepemilikan Lahan**

Berdasarkan sensus Pertanian tahun 2003, dari sisi skala penguasaan lahan, sejak tahun 1993 jumlah rumah tangga petani gurem yang kepemilikan lahannya kurang dari 0,5 hektar meningkat dari 10,9 juta rumah tangga menjadi 13,7 juta rumah tangga pada tahun 2003. Dari hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian pada tahun 2008, rata-rata kepemilikan lahan petani di pedesaan sebesar 0,41 ha di Jawa dan 0,96 ha di Luar Jawa. Dalam periode 1995 – 2007 rata-rata kepemilikan lahan cenderung menurun. Kondisi kepemilikan lahan tersebut antara lain disebabkan oleh meningkatnya konversi lahan pertanian untuk keperluan pemukiman dan fasilitas umum serta terjadinya fragmentasi lahan karena proses pewarisan, khususnya untuk lahan beragroekosistem sawah dan lahan kering tanaman pangan. Di sisi lain, menurunnya rata-rata luas kepemilikan lahan diikuti pula dengan meningkatnya ketimpangan distribusi kepemilikan lahan khususnya untuk agroekosistem persawahan di Jawa.

Status penguasaan lahan oleh sebagian besar petani belum memiliki legalitas yang kuat dalam bentuk sertifikat, sehingga lahan belum bisa dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh modal usaha melalui perbankan. Data dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) pada tahun 2003 menunjukkan bahwa hingga saat ini sertifikat tanah yang telah diterbitkan baru mencapai jumlah 24,5 juta persil atau sekitar 30 persen dari seluruh persil yang ada di Indonesia ( $\pm 75$  juta persil). Dari jumlah yang telah memperoleh sertifikat tersebut, 50 persen adalah tanah di perkotaan (pemukiman dan industri) yang luas arealnya tidak lebih dari 3 juta ha. Sedangkan lahan pertanian di pedesaan yang luasnya lebih dari 25 juta ha baru memperoleh sertifikat 50 persen dari seluruh sertifikat

yang sudah diterbitkan atau  $\pm$  12 juta persil. Tantangan ke depan untuk mengatasi terbatasnya pemilikan dan lemahnya status penguasaan lahan adalah bagaimana meningkatkan efisiensi dan produktifitas usaha tani, penataan kelembagaan pengelolaan lahan, pengendalian pertumbuhan penduduk, reformasi agraria serta penguatan status kepemilikan lahan.

Konversi sawah menjadi lahan non pertanian dari tahun 1999 – 2002 mencapai 563.159 ha atau 187.719,7 ha/tahun. Antara tahun 1981 – 1999, neraca pertambahan lahan sawah seluas 1,6 juta ha, namun antara tahun 1999 – 2002 terjadi penciutan luas lahan seluas 0,4 juta ha atau 141.285 ha/tahun. Data dari Biro Pusat Statistik tahun 2004 menunjukkan bahwa besaran laju alih fungsi lahan pertanian dari lahan sawah ke non sawah sebesar 187.720 ha per tahun, dengan rincian alih fungsi ke non pertanian sebesar 110.164 ha per tahun dan alih fungsi ke pertanian lainnya sebesar 77.556 ha per tahun. Adapun alih fungsi lahan kering pertanian ke non pertanian sebesar 9.152 ha per tahun.

Konversi lahan pertanian terutama lahan sawah tidak hanya menyebabkan kapasitas produksi pangan turun, tetapi merupakan salah satu bentuk kerugian investasi, degradasi agroekosistem, degradasi tradisi dan budaya pertanian, dan merupakan salah satu sebab semakin sempitnya luas garapan usahatani serta turunnya kesejahteraan petani sehingga kegiatan usaha tani yang dilakukan petani tidak dapat menjamin tingkat kehidupan yang layak baginya. Tantangan untuk menekan laju konversi lahan pertanian ke depan adalah bagaimana melindungi keberadaan lahan pertanian melalui perencanaan dan pengendalian tata ruang; meningkatkan optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan; meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian serta pengendalian pertumbuhan penduduk.

#### **1.2.2.4 Sistem Perbenihan dan Perbibitan Nasional Belum Berjalan Optimal**

Berdasarkan penelitian dan praktek di lapangan, penggunaan benih/bibit unggul diakui telah menjadi satu faktor kunci keberhasilan peningkatan produksi. Swasembada beras, jagung dan tebu yang telah dicapai selama ini, utamanya dikarenakan penggunaan benih unggul. Sampai saat ini, benih unggul banyak diimpor seperti: padi hibrida, sayuran dan tanaman hias, serta bibit sapi. Untuk bibit sapi, belum ada satu lembaga perbibitan yang menonjol.



Peran benih sebagai sarana utama agribisnis sangat penting. Agar usaha agribisnis dapat maju dan berkembang, maka sistem dan usaha perbenihan harus tangguh. Sistem perbenihan didukung oleh beberapa subsistem yang terdiri dari: subsistem pengembangan varietas untuk mengantisipasi perubahan dan perkembangan selera masyarakat; subsistem produksi dan distribusi benih; subsistem perbaikan mutu melalui sertifikasi dan pelabelan; dan subsistem kelembagaan dan peningkatan SDM. Keberhasilan dalam menggerakkan seluruh komponen tersebut sangat dipengaruhi oleh komponen pendukung antara lain lembaga perbenihan, sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, kebijakan pemerintah, sistem informasi, dan kesadaran konsumen dalam menggunakan benih bermutu.

Saat ini, infrastruktur perbenihan sulit berkembang karena memerlukan investasi yang cukup besar. Tidak banyak swasta yang mau menanamkan investasi di perusahaan perbenihan/perbibitan. Perlu ada upaya yang serius untuk membangkitkan kelembagaan perbenihan nasional mulai dari pusat sampai daerah, termasuk peningkatan kapasitas kemampuan penangkar benih lokal.

#### **1.2.2.5 Keterbatasan Akses Petani Terhadap Permodalan dan masih Tingginya Suku Bunga Usaha Tani**

Hingga saat ini kondisi masyarakat petani dihadapkan pada kecilnya skala penguasaan dan pengusahaan lahan petani yang mengakibatkan terbatasnya kemampuan petani untuk melakukan pemupukan modal melalui tabungan dan investasi. Di sisi lain petani juga belum memiliki kemampuan untuk mengakses sumber permodalan/lembaga keuangan formal, diantaranya diakibatkan oleh tidak mudahnya prosedur pengajuan kredit dan ketiadaan agunan yang dipersyaratkan, sehingga petani lebih memilih "rentenir" yang menyediakan pinjaman modal dengan cepat walau dengan tingkat bunga yang lebih tinggi dibanding lembaga keuangan formal. Kondisi ini, pada akhirnya semakin memperburuk kondisi arus tunai (*cash flow*) dan kesejahteraan petani.

Tantangan ke depan yang harus dikembangkan adalah bagaimana menjembatani kesenjangan manajemen antara lembaga perbankan formal yang kebanyakan berada di daerah perkotaan dengan masyarakat petani yang tersebar di perdesaan. Sementara menunggu perbankan



lebih berpihak kepada pertanian, maka pemberdayaan kelembagaan usaha kelompok untuk menjadi cikal bakal lembaga keuangan mikro di pedesaan perlu dilakukan. Pada akhirnya lembaga ini diharapkan dapat berkembang menjadi lembaga mandiri milik masyarakat petani pedesaan. Namun pengembangan lembaga ini membutuhkan dukungan pemerintah dalam bentuk pembinaan manajemen dan *seed capital* kepada kelompok atau gabungan kelompok yang sudah benar-benar siap dirintis untuk tumbuh menjadi lembaga keuangan mikro di pedesaan.

#### 1.2.2.6 Lemahnya Kapasitas dan Kelembagaan Petani dan Penyuluh

Kondisi organisasi petani saat ini lebih bersifat budaya dan sebagian besar berorientasi hanya untuk mendapatkan fasilitas pemerintah, belum sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan aksesibilitas terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan bagi pengembangan usahatani dan usaha pertanian. Di sisi lain, kelembagaan usaha yang ada di pedesaan, seperti koperasi belum dapat sepenuhnya mengakomodasi kepentingan petani/kelompok tani sebagai wadah pembinaan teknis. Berbagai kelembagaan petani yang sudah ada seperti Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Perhimpunan Petani Pemakai Air dan Subak dihadapkan pada tantangan ke depan untuk merevitalisasi diri dari kelembagaan yang saat ini lebih dominan hanya sebagai wadah pembinaan teknis dan sosial menjadi kelembagaan yang juga berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha yang berbadan hukum atau dapat berintegrasi dalam koperasi yang ada di pedesaan.





### 1.2.2.7 Masih Rawannya Ketahanan Pangan dan Ketahanan Energi

Tercapainya swasembada komoditas pangan utama seperti padi dan jagung pada kenyataannya belum menjamin kemampuan individu di tingkat rumah tangga untuk dapat memperoleh bahan pangan dengan jumlah yang cukup. Kondisi ini bukan saja disebabkan lemahnya daya beli sebagian anggota masyarakat terhadap bahan pangan, tetapi juga dalam arti yang sebenarnya di beberapa daerah terpencil distribusi bahan pangan sulit dilakukan, terutama pada musim paceklik. Sulitnya memperoleh bahan pangan akibat kemiskinan tidak hanya terjadi di perkotaan, tetapi juga di pedesaan. Secara teknis dan sosial ekonomis penyebab menurunnya daya beli masyarakat terhadap pangan yang pernah terjadi adalah diakibatkan oleh gagal panen, akibat bencana alam, perubahan iklim maupun serangan hama dan penyakit maupun jatuhnya harga pasar produk yang dihasilkan petani. Di sebagian wilayah menurunnya daya beli petani terhadap pangan disebabkan oleh gagal panen atau anjoknya harga jual komoditas yang ditanam secara mono kultur.

Tantangan ke depan yang harus dihadapi adalah bagaimana membangun kelembagaan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) masyarakat, terutama di daerah-daerah rawan pangan. Di samping itu pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan Desa Mandiri Pangan dan pengembangan lumbung pangan diarahkan untuk pemantapan ketahanan pangan masyarakat serta pola-pola integrasi komoditas, pengendalian hama terpadu maupun pengenalan iklim diharapkan dapat membantu masyarakat dari gagal panen yang dapat mengakibatkan menurunnya kemampuan rumah tangga petani untuk memperoleh bahan pangan.

Dengan makin terbatasnya ketersediaan energi dari fosil, maka harus dicarikan sumber energi alternatif lain. Dari hasil penelitian, beberapa tanaman, seperti kelapa sawit, jagung, ubi kayu, tebu, tanaman jarak dan kotoran ternak dapat diolah menjadi sumber energi. Apabila energi sumber nabati ini dapat dikembangkan masyarakat terutama di pedesaan maka akan diciptakan masyarakat yang mandiri energi terutama untuk memenuhi kebutuhan energi rumah tangga sehari-hari. Harus diakui bahwa sampai saat ini ongkos produksi energi terbarukan masih lebih mahal dibandingkan dengan energi fosil.

#### **1.2.2.8 Belum Berjalannya Diversifikasi Pangan dengan baik**

Pola konsumsi pangan masyarakat masih didominasi oleh beras, sebagaimana digambarkan pada tahun 2009 tingkat konsumsi beras sebesar 102,2 kg/kapita/tahun. Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan beras untuk konsumsi masyarakat akan semakin bertambah, dan apabila keadaan ini terus berlangsung serta tidak ada upaya diversifikasi pangan, maka akan membebani masyarakat dan negara serta mengancam ketahanan pangan nasional. Belum optimalnya upaya diversifikasi pangan, disebabkan antara lain belum berkembangnya pangan lokal berbasis teknologi pengolahan pangan, pola konsumsi pangan masyarakat serta belum optimalnya dukungan dari program sektor lain dalam percepatan diversifikasi pangan.

#### **1.2.2.9 Rendahnya Nilai Tukar Petani (NTP)**

Petani Indonesia pada umumnya tidak memiliki modal besar. Dengan usahatani berskala kecil dan subsisten, akses petani terhadap sumber permodalan menjadi terbatas. Kondisi ini ditambah dengan petani kurang memiliki fasilitas penyimpanan hasil pasca panen, sementara produk pertanian bersifat mudah rusak. Akibatnya banyak petani terlibat ke dalam sistem ijon dan/atau tengkulak. Meskipun hasil survei statistik menghasilkan perhitungan NTP di atas 100, dimana artinya penerimaan lebih besar dari pembelanjaan, tetapi nilai NTP saat ini masih sangat kecil untuk menyatakan bahwa kesejahteraan petani sudah baik.

#### **1.2.2.10 Belum Padunya Antar Sektor dalam Menunjang Pembangunan Pertanian**

Pembangunan sektor tidak bisa berdiri sendiri, melainkan melibatkan banyak sektor terkait. Pertemuan koordinasi antar sektor sudah sering dilakukan, hanya saja mengintegrasikan secara fisik kegiatan antar sektor sangat sulit dilaksanakan. Hal ini karena memerlukan waktu dan tenaga untuk menelaah kegiatan antar sektor, wilayah, komoditas, dan waktu, sehingga tidak tumpang tindih. Kebijakan fiskal yang tidak berpihak kepada penumbuhan industri pengolahan pertanian di dalam negeri, misalnya, menyebabkan hilangnya kesempatan bangsa Indonesia untuk menambah pendapatan dan memperluas lapangan kerja.

### **1.2.2.11 Kurang Optimalnya Kinerja dan Pelayanan Birokrasi Pertanian**

Seperti kebanyakan institusi pemerintah pada umumnya, sumberdaya manusia aparat Pemerintah masih jauh dari memuaskan. Kondisi ini ditambah dengan penempatan aparatur Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota yang tidak tepat dan sesuai dengan kompetensinya. Penyuluh yang merupakan ujung tombak pembangunan pertanian merupakan aparat Pemerintah Kabupaten/Kota, dimana sebagian besar Pemerintah Kabupaten/Kota kurang memberikan perhatian pada peningkatan kemampuan, fasilitas dan sarana kerja

Di sisi lain, organisasi Kementerian Pertanian tidak sesuai/pas dengan SKPD pertanian yang ada di daerah sehingga perlu diselaraskan. Dengan diterbitkannya PP No. 41 tahun 2007, maka terjadi perubahan nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Untuk SKPD pertanian, nomenklatur ini tidak selaras dengan nomenklatur Eselon I di lingkup Kementerian Pertanian. Hal ini berdampak pada banyaknya Satuan Kerja (Satker) Kementerian di Daerah. Karena jumlah Satker sangat besar, maka sulit melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Akibatnya persentasi jumlah pelaporan yang masuk dan serapan anggaran APBN pertanian masih relatif rendah.

### **1.2.3 Tantangan Pembangunan Pertanian 2010-2014**

Disamping permasalahan mendasar, pembangunan pertanian ke depan juga menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan penanganan yang cermat dan tepat yaitu menyangkut produksi dan produktivitas, penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang, infrastruktur lahan dan air, perbenihan/perbibitan, pembiayaan, pemenuhan kebutuhan pangan, *Millenium Development Goals* (MDGs), kebijakan harga, kelembagaan usaha ekonomi produktif, penyuluhan, citra pertanian, dan persaingan global.



### **Boks 1.2 Tantangan Pembangunan Pertanian**

1. Peningkatan produktivitas dan nilai tambah produk pertanian di beberapa sentra produksi dengan menciptakan sistem pertanian yang ramah lingkungan.
2. Penggunaan pupuk kimiawi dan organik secara berimbang untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah.
3. Perbaikan dan pembangunan infrastruktur lahan dan air serta perbenihan dan perbibitan.
4. Kemudahan akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah bagi petani/peternak kecil.
5. Pencapaian *Millenium Development Goals* (MDG's) yang mencakup angka kemiskinan, pengangguran, dan rawan pangan
6. Penciptaan *pricing policies* yang proporsional untuk produk-produk pertanian khusus.
7. Persaingan global serta pelemahan pertumbuhan ekonomi akibat krisis global.
8. Perbaikan citra petani dan pertanian agar kembali diminati generasi penerus.
9. Kelembagaan usaha ekonomi produktif yang kokoh di perdesaan.
10. Sistem penyuluhan pertanian yang efektif.
11. Pemenuhan kebutuhan pangan, disamping pengembangan komoditas unggulan hortikultura dan peternakan, serta peningkatan komoditas ekspor perkebunan.

#### **1.2.3.1 Peningkatan Produktivitas, Mutu dan Nilai Tambah Produk Pertanian di Beberapa Sentra Produksi dengan Menciptakan Sistem Pertanian yang Ramah Lingkungan.**

Kondisi produktivitas komoditas pertanian primer yang diproduksi petani di sentra-sentra produksi masih jauh di bawah potensi genetiknya, karena belum diterapkannya aplikasi paket teknologi sesuai anjuran. Hal ini antara lain diakibatkan karena keterbatasan kemampuan permodalan petani untuk membeli sarana produksi, terutama benih/bibit unggul, pupuk kimia dan pestisida. Harga pupuk dan pestisida kimia yang cenderung terus meningkat juga semakin membebani biaya produksi. Penerapan pestisida

kimia secara terus menerus mengakibatkan organisme pengganggu tanaman menjadi semakin kebal dan membutuhkan dosis pestisida yang semakin tinggi, predator/musuh alami hama-penyakit juga ikut musnah akibat penggunaan pestisida yang kurang selektif. Degradasi lahan dan sumber air juga terjadi akibat budidaya produksi yang mengabaikan kaidah konservasi lingkungan, terutama dalam pembukaan lahan dan budidaya tanaman di daerah lereng-lereng perbukitan dan pegunungan.

Di sisi lain, sebagian besar produksi pertanian masih belum mampu memahamistandarmutu untukmemenuhipasar domestikmaupun ekspor. Untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan mutu melalui penerapan budaya yang berdasarkan standar prosedur baku, melaksanakan prinsip-prinsip *Good Agriculture Practices* (GAP) dan pengembangan sistem penelusuran balik (*trace ability*).

Untuk dapat meningkatkan produktivitas tanaman sekaligus meningkatkan nilai tambah melalui pengurangan biaya pembelian sarana produksi seperti pupuk dan pestisida kimia serta menjaga produktivitas lahan dan sumber air, maka diperlukan upaya - upaya untuk mendorong petani agar menerapkan teknologi pertanian organik yang ramah lingkungan dengan sedapat mungkin memproduksi sendiri pupuk organik yang dihasilkan dari limbah pertanian, penerapan sistem pengendalian hama terpadu, pembukaan lahan tanpa bakar serta penerapan teknologi budidaya konservasi di lahan kering.

### **1.2.3.2 Penggunaan Pupuk Kimiawi dan Organik secara Berimbang untuk Memperbaiki dan Meningkatkan Kesuburan Tanah.**

Revolusi hijau melalui penggunaan benih unggul produktivitas tinggi yang mensyaratkan penggunaan pupuk kimia dosis tinggi dan diabaikannya penggunaan pupuk organik telah mengakibatkan degradasi lahan yang menurunkan kapasitas produksi lahan pertanian. Kondisi ini semakin diperparah dengan menipisnya kearifan lokal dalam pengaturan pola tanam dan penggunaan pupuk organik. Struktur fisik dan kimia tanah di lahan pertanian, terutama lahan sawah menjadi masif dan kurang respon terhadap penggunaan input produksi, sehingga peningkatan produktifitas menjadi stagnan (*levelling off*) bahkan cenderung menurun. Tantangan ke depan untuk mengatasi dan mengantisipasi degradasi sumber daya lahan adalah



bagaimana melakukan rehabilitasi dan konservasi lahan secara teknis, dan biologis (vegetatif) melalui penerapan teknologi budidaya pertanian yang ramah lingkungan serta pengaturan dan pengendalian tata ruang kawasan.

Saat ini produktivitas beberapa komoditas pertanian primer yang diproduksi petani sudah mencapai titik jenuh (*leveling off*)

yang diakibatkan oleh menurunnya kesuburan fisik tanah pertanian, terutama di lahan sawah. Struktur tanah semakin masif akibat penerapan pupuk kimia dalam jangka waktu yang lama. Di samping itu penyebab tidak bertambahnya produktivitas tanaman adalah kecenderungan petani yang masih menggunakan salah satu pupuk tunggal secara berlebihan, terutama pupuk nitrogen (N), sementara penggunaan jenis pupuk lainnya (P, K dan unsur mikro) masih sangat kurang.

Untuk meningkatkan produktivitas tanaman dan lahan sekaligus mengurangi konsumsi pupuk N, diperlukan upaya antara lain: (1) mencanangkan gerakan nasional penggunaan pupuk majemuk secara berimbang, (2) menurunkan proporsi penggunaan pupuk kimia, dan (3) meningkatkan penggunaan pupuk organik untuk memperbaiki kesuburan fisik tanah.

### 1.2.3.3 Perbaikan dan Pembangunan Infrastruktur Lahan dan Air Serta Perbenihan dan Perbibitan.

Lahan dan air merupakan faktor produksi utama pertanian, sedangkan benih/bibit merupakan sarana produksi utama produksi pertanian. Keberadaan dan berfungsinya infrastruktur lahan, air serta benih/bibit merupakan prasyarat bagi kelangsungan proses produksi pertanian. Saat ini, kondisi infrastruktur lahan dan air pertanian sangat memprihatinkan. Jaringan jalan produksi dan usahatani dari dan ke sentra produksi pertanian masih sangat terbatas. Alat dan mesin pertanian kesulitan keluar masuk daerah pertanian untuk membawa sarana produksi maupun memasarkan hasil pertanian secara efisien. Ladang penggembalaan luasnya semakin mengecil, karena perubahan fungsi maupun ketidakjelasan status lahannya (antara milik negara atau milik adat). Demikian pula dengan waduk-waduk dan jaringan irigasi dan drainase yang ada semakin menurun kapasitasnya, akibat pendangkalan dan kurangnya perawatan. Sementara pembangunan waduk dan embung besar yang baru masih jauh dari memadai untuk mendukung tuntutan peningkatan produksi komoditas pertanian, terutama di daerah sub optimal seperti di lahan kering dan lahan rawa. Lebih lanjut, keberadaan infrastruktur pendukung usaha penangkaran benih dan bibit juga masih sangat kurang, laboratorium sertifikasi dan pengujian mutu, balai benih, kebun bibit maupun kebun induk juga belum tersebar merata hingga ke seluruh daerah sentra produksi utama.



#### **1.2.3.4 Kemudahan Akses Pembiayaan Pertanian dengan Suku Bunga Rendah Bagi Petani/Peternak Kecil.**

Usaha pertanian rakyat berskala kecil dan tersebar serta keterbatasannya dalam menyediakan agunan mengakibatkan perbankan kurang berminat untuk membangun jaringan hingga ke pelosok-pelosok desa, sehingga proporsi alokasi dan tingkat penyerapan pembiayaan usaha kecil di bidang pertanian relatif rendah, termasuk yang dibiayai dari kredit program. Di sisi lain, kelembagaan kelompok usaha tani yang belum solid serta tingkat pendidikan petani yang rendah juga merupakan faktor pembatas dalam menyusun proposal/rencana usaha dan mengelola administrasi keuangan yang merupakan pra syarat dalam pengajuan pinjaman ke perbankan. Sehingga perlu upaya-upaya untuk mendorong keberpihakan Pemerintah dan perbankan agar dapat memberikan kredit program dan kredit komersial berbunga rendah yang disertai dengan upaya memperluas jaringan pelayanannya hingga ke pelosok pedesaan. Di samping itu, diperlukan juga upaya pendampingan dan penguatan kelembagaan usaha kelompok, peningkatan kemampuan dalam menyusun rencana usaha dan manajemen pengelolaan keuangan serta penumbuhan, pengembangan kelembagaan keuangan mikro pedesaan, pengembangan Koperasi Unit Desa maupun koperasi khusus pertanian di perdesaan. Pencapaian sasaran dilakukan melalui pendekatan jalur ganda (*twin track approach*) yaitu (a) Membangun ekonomi berbasis pertanian dan pedesaan untuk meningkatkan produksi pangan dan pertanian, penyediaan lapangan kerja dan pendapatan serta (b) Memenuhi pangan bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan melalui pemberian bantuan langsung pangan dan pemberdayaan masyarakat.

#### **1.2.3.5 Pencapaian *Millenium Development Goals* (MDG's) yang Mencakup Angka Kemiskinan, Pengangguran, dan Rawan Pangan.**

Hingga saat ini sebagian besar masyarakat masih menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian dengan tingkat produktivitas dan pendapatan usaha yang relatif rendah, sehingga kemiskinan, pengangguran dan rawan pangan banyak terdapat di pedesaan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan rawan pangan harus dilakukan dengan membangun pertanian dan pedesaan. Hal tersebut merupakan upaya yang harus dilaksanakan untuk mencapai komitmen



global pada tahun 2015 sebagaimana yang dicanangkan dalam *Millenium Development Goals (MDG's)* melalui pembangunan pertanian dengan segala karakteristik dan spesifikasi masalahnya yang tersebar merata hampir di seluruh wilayah pedesaan.

#### **1.2.3.6 Penciptaan *Pricing Policies* yang Proporsional untuk Produk-Produk Pertanian Khusus.**

Rantai tata niaga hampir seluruh produk pertanian primer relatif panjang dan dikuasai oleh pedagang perantara, pedagang pengumpul dan pedagang besar, sehingga margin harga antara produk di tingkat usahatani dengan di tingkat konsumen relatif tinggi, petani adalah juga pihak yang paling menderita apabila terjadi resiko kegagalan pasar (*market failure*). Skala usaha yang kecil dengan permodalan yang terbatas mengakibatkan kenaikan harga sarana produksi akan meningkatkan proporsi biaya produksi dalam struktur ongkos secara keseluruhan. Sehingga perlu diupayakan bagaimana menciptakan formula kebijakan harga eceran tertinggi (*ceiling price*) terhadap sarana produksi serta harga pembelian terendah (*floor price*) terhadap hasil panen di tingkat usaha tani yang penerapannya disesuaikan dengan gejala fluktuasi harga yang terjadi di lapangan, terutama pada saat menjelang masa tanam dan saat panen raya di sentra-sentra produksi utama.

#### **1.2.3.7 Persaingan Global serta Pelemahan Pertumbuhan Ekonomi Akibat Krisis Global**

Karakteristik pertanian adalah berskala kecil dan lokasinya tersebar dengan tingkat produktivitas dan mutu produk yang rendah dan beragam. Dengan semakin terbukanya pasar dalam negeri terhadap produk impor pertanian sejenis serta ketatnya standar mutu di pasar ekspor sebagai instrumen *non tariff barrier* yang kerap diberlakukan banyak negara di era globalisasi ini, maka kondisi tersebut akan semakin menekan dan mengancam daya saing produk-produk pertanian, baik di pasar domestik maupun ekspor. Kondisi tersebut akan semakin diperparah apabila terjadi pelemahan daya beli konsumen pada saat terjadinya krisis ekonomi dalam skala global. Ke depan perlu diupayakan bagaimana meningkatkan daya saing produk pertanian melalui peningkatan mutu dan produktivitas, pengembangan produk, derivasi produk serta memperluas pangsa dan negara tujuan ekspor yang didorong dengan upaya peningkatan kerjasama ekonomi antar wilayah (kawasan), baik dalam skala nasional (antar daerah) maupun kerja sama regional (antar negara).

### **1.2.3.8 Perbaiki Citra Petani dan Pertanian Agar Kembali Diminati Generasi Penerus.**

Belum berkembangnya agroindustri di pedesaan, sehingga usaha tani masih dominan di aspek produksi *on-farm* dengan tingkat pendapatan yang relatif kecil dan belum berkembangnya usaha jasa pelayanan permodalan, dan teknologi, mengakibatkan citra petani dan pertanian lebih sebagai aktifitas sosial budaya tradisional, bukan sosial ekonomi yang dinamis dan menantang. Kondisi ini pada akhirnya kurang menarik minat generasi muda di pedesaan untuk bekerja dan berusaha di bidang pertanian, terlebih bagi mereka yang telah mengikuti pendidikan sekolah menengah ke atas. Oleh karena itu kedepan perlu upaya pemantapan pengembangan agroindustri di pedesaan, diantaranya melalui pengembangan kawasan agropolitan atau Kota Terpadu Mandiri, sehingga menumbuhkembangkan usaha penyediaan barang dan jasa pendukung yang merupakan peluang usaha dan lapangan kerja bagi angkatan kerja baru di pedesaan. Disamping itu, perlu juga mendorong pengembangan mekanisasi pertanian (alsin tepat guna) agar bidang pertanian lebih menarik generasi muda selain untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, nilai tambah, efisiensi dan daya saing produksi komoditas pertanian.

### **1.2.3.9 Kelembagaan Usaha Ekonomi Produktif Yang Kokoh di Pedesaan.**

Hingga saat ini, petani dengan skala usaha mikro (rumah tangga) dihadapkan kepada keterbatasan aksesibilitas terhadap sumber pembiayaan, teknologi, serta pasar dan informasi pasar. Kondisi ini membutuhkan penguatan kelembagaan usaha, pembinaan dan pendampingan serta kemudahan fasilitasi pelayanan penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam proses produksi. Kelembagaan usaha kelompok yang ada saat ini banyak yang sudah tidak berfungsi, sementara sebagian besar yang masih ada juga belum mampu berperan dalam mendukung peningkatan pendapatan petani secara nyata. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya pemantapan bagaimana memperkuat kelembagaan usaha kelompok dan gabungan usaha kelompok untuk mampu berperan sebagai media dalam meningkatkan kapasitas anggota, sehingga mampu meningkatkan aksesibilitas kelompok maupun anggotanya terhadap sumber pembiayaan, teknologi, pasar dan informasi pasar serta mempermudah pembinaan dan fasilitasi yang diberikan pemerintah dan masyarakat.

### 1.2.3.10 Sistem Penyuluhan Pertanian yang Efektif.

Tingkat penguasaan teknologi petani yang relatif terbatas di tengah persaingan pasar yang semakin ketat membutuhkan pendampingan pembinaan teknis dan manajemen secara intensif dan berkesinambungan. Hal tersebut juga menuntut adanya kapasitas aparat pembina teknis yang mampu melayani bimbingan teknologi secara spesifik (komoditas) sesuai dengan kebutuhan petani serta mampu berperan sebagai mediator terhadap sumber pembiayaan dan pasar, kemudian dapat berkomunikasi dan berkoordinasi dengan stakeholder termasuk petugas lapang lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan keluarga. Luasnya wilayah kerja penyuluhan pertanian dan banyaknya individu/kelompok petani yang harus dilayani juga membutuhkan ratio petani dan penyuluh yang ideal serta terpenuhinya sarana transportasi, komunikasi, alat peraga dan biaya operasional pembinaan yang memadai. Sehingga diperlukan upaya-upaya untuk mewujudkan sistem penyuluhan yang efektif melalui terbangunnya kelembagaan penyuluhan yang didukung dengan kapasitas dan jumlah penyuluh yang proporsional, sarana kerja dan fasilitas operasional yang memadai, pembinaan yang berkesinambungan serta terbuka bagi masyarakat yang berminat untuk berperan serta dalam kegiatan penyuluhan. Dalam memenuhi kebutuhan penyuluh pertanian untuk pembangunan pertanian dan ketahanan, tidak hanya ditugaskan dengan penyuluh berstatus pegawai negeri sipil, tetapi harus melibatkan penyuluh swadaya dari masyarakat secara partisipatif dan sukarela.



### **1.2.3.11 PemenuhanKebutuhanPangan,disampingPengembangan Komoditas Unggulan Hortikultura dan Peternakan, serta Peningkatan Komoditas Ekspor Perkebunan.**

Harus diakui bahwa nilai tambah usaha pertanian tanaman pangan, terlebih produksi produk primer adalah relatif lebih rendah dibandingkan peluang perolehan nilai tambah dari produk pertanian lainnya, sehingga usaha pertanian tanaman pangan didominasi oleh pertanian rakyat. Masih sangat sedikit investor yang tertarik untuk mengembangkan usahanya pada bidang usaha pertanian tanaman pangan. Di sisi lain, meningkatnya harga domestik dan ekspor beberapa produk pertanian non pangan, mengakibatkan banyak petani tanaman pangan yang beralih komoditi, sehingga dalam jangka panjang dapat berpotensi mengurangi luas areal pertanian tanaman pangan. Untuk menekan laju alih fungsi lahan tersebut, perlu menyusun rancang bangun pewayalahan komoditas yang menjamin terpenuhinya kebutuhan pasokan produksi komoditas pangan dengan tetap memberikan keuntungan yang memadai bagi petani produsen adalah melalui pemberian berbagai insentif produksi dan jaminan harga pasar hasil panen yang layak. Di samping itu diperlukan upaya untuk menarik investor swasta untuk membuka kawasan pertanian tanaman pangan (*food estate*), terutama di wilayah pengembangan baru melalui penyediaan dukungan infrastruktur dan insentif investasi.







# BAB II

## VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2010-2014



## II. VISI, MISI, DAN TUJUAN KEMENTERIAN PERTANIAN

### 2.1 VISI Kementerian Pertanian

Terwujudnya Pertanian Industrial Unggul Berkelanjutan Yang Berbasis Sumberdaya Lokal Untuk Meningkatkan Kemandirian Pangan, Nilai Tambah, Daya Saing, Ekspor dan Kesejahteraan Petani.

### 2.2 MISI Kementerian Pertanian

1. Mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan yang efisien, berbasis iptek dan sumberdaya lokal, serta berwawasan lingkungan melalui pendekatan sistem agribisnis.
2. Menciptakan keseimbangan ekosistem pertanian yang mendukung keberlanjutan peningkatan produksi dan produktivitas untuk meningkatkan kemandirian pangan.
3. Mengamankan plasma-nutfah dan meningkatkan pendayagunaannya untuk mendukung diversifikasi dan ketahanan pangan.
4. Menjadikan petani yang kreatif, inovatif, dan mandiri serta mampu memanfaatkan iptek dan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk pertanian berdaya saing tinggi.
5. Meningkatkan produk pangan segar dan olahan yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) dikonsumsi.
6. Meningkatkan produksi dan mutu produk pertanian sebagai bahan baku industri.
7. Mewujudkan usaha pertanian yang terintegrasi secara vertikal dan horisontal guna menumbuhkan usaha ekonomi produktif dan menciptakan lapangan kerja di pedesaan.



8. Mengembangkan industri hilir pertanian yang terintegrasi dengan sumberdaya lokal untuk memenuhi permintaan pasar domestik, regional dan internasional.
9. Mendorong terwujudnya sistem kemitraan usaha dan perdagangan komoditas pertanian yang sehat, jujur dan berkeadilan.
10. Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.

### 2.3 Tujuan

1. Mewujudkan sistem pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal.
2. Meningkatkan dan memantapkan swasembada berkelanjutan.
3. Menumbuhkembangkan ketahanan pangan dan gizi termasuk diversifikasi pangan.
4. Meningkatkan nilai tambah, daya saing dan ekspor produk pertanian.
5. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

# Lima Komoditas Pangan Utama 2010-2014



# BAB III TARGET UTAMA KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN 2010-2014



## III. TARGET UTAMA KEMENTERIAN PERTANIAN

### 3.1 Target Utama Kementerian Pertanian

Selama lima tahun ke depan (2010-2014), dalam membangun pertanian di Indonesia, Kementerian Pertanian mencanangkan 4 (empat) target utama, yaitu:

1. Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan.
2. Peningkatan Diversifikasi Pangan.
3. Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor.
4. Peningkatan Kesejahteraan Petani.

Ke empat target utama tersebut diuraikan sebagai berikut:

#### 3.1.1 Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan

Swasembada ditargetkan untuk tiga komoditas pangan utama yaitu: kedelai, gula dan daging sapi. Agar tercapai swasembada, sasaran produksi kedelai, gula dan daging sapi pada tahun 2014 adalah kedelai sebesar 2,70 juta ton biji kering, gula 3,45 juta ton dan daging sapi dan kerbau 664 ribu ton; atau masing-masing meningkat rata-rata 20,05 persen per tahun (kedelai), 10,80 persen per tahun (gula) dan 7,13 persen per tahun (daging sapi dan kerbau).

Adapun swasembada berkelanjutan ditargetkan untuk komoditas padi dan jagung. Agar posisi swasembada padi dan jagung dapat berkelanjutan, maka sasaran peningkatan produksinya harus dipertahankan minimal sama dengan peningkatan permintaan dalam negeri. Dengan memperhitungkan proyeksi laju pertumbuhan penduduk nasional, permintaan bahan baku industri dalam negeri, kebutuhan stok nasional dan peluang ekspor, maka sasaran produksi padi pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 76,57 juta ton gabah kering giling (GKG) dan jagung 29 juta ton pipilan kering atau masing-masing tumbuh 3,56 persen per tahun (padi) dan 10,02 persen per tahun (jagung).

### Boks 3.1 Empat Target Utama Kementerian Pertanian 2010-2014

#### 4 TARGET UTAMA

#### Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan

- Swasembada
  - Kedelai: produksi 2,7 juta ton di tahun 2014 (kenaikan rata-rata 20,05 % per tahun)
  - Gula: produksi 3,45 juta ton di tahun 2014 (kenaikan rata-rata 10,80 % per tahun)
  - Daging sapi dan kerbau: produksi 0,66 juta ton di tahun 2014 (kenaikan rata-rata 7,13 % per tahun)
- Swasembada Berkelanjutan
  - Padi: produksi 76,57 juta ton di tahun 2014 (kenaikan rata-rata 3,56 % per tahun)
  - Jagung: produksi 29 juta ton di tahun 2014 (kenaikan rata-rata 10,02 % per tahun)

#### Dukungan utama:

- Penyediaan pupuk:
  - Kebutuhan pupuk (subsidi dan non-subsidi): urea 35,15 juta ton, SP-36 22,23 juta ton, ZA 6,29 juta ton, KCL 13,18 juta ton, NPK 45,99 juta ton, dan organik 53,09 juta ton.
- Subsidi: pupuk, benih/bibit dan kredit/bunga.
- Perluasan lahan baru 2 juta ha untuk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan makanan ternak dan padang penggembalaan.
- Investasi pemerintah dan swasta di bidang pertanian\*).
- Dukungan Kementerian/Lembaga lain.

Pencapaian target utama Kementerian Pertanian 2010-2014 dibarengi dengan upaya antisipasi, mitigasi dan adaptasi terhadap fenomena variabilitas dan perubahan iklim (seperti perakitan teknologi adaptif dan pemetaan daerah rentan perubahan iklim) dan menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 84,9 juta ton CO<sub>2</sub> selama 2010-2014.

#### Peningkatan Diversifikasi Pangan

- Konsumsi beras menurun sekurang-kurangnya 1,5 % per tahun, dibarengi peningkatan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, buah-buahan, dan sayuran.
- Skor Pola Pangan Harapan naik dari 86,4 (2010) menjadi 93,3 (2014).
- Peningkatan keamanan pangan.

#### Dukungan utama:

- Investasi pemerintah dan swasta di bidang pertanian\*).
- Dukungan Kementerian/Lembaga lain.

#### Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor

- Tersertifikasinya semua produk pertanian organik, kakao fermentasi, dan bahan olahan karet pada 2014 (pemberlakuan sertifikat wajib).
- Meningkatnya produk olahan yang diperdagangkan dari 20% (2010) menjadi 50% (2014)
- Pengembangan tepung-tepungan untuk mensubstitusi 20% gandum/terigu impor pada 2014.
- Memenuhi semua sarana pengolahan kakao fermentasi bermutu untuk industri coklat dalam negeri (2014).
- Meningkatnya surplus neraca perdagangan US\$ 24,3 milyar (2010) menjadi US\$ 54,5 milyar (2014).

#### Dukungan utama:

- Investasi pemerintah dan swasta di bidang pertanian\*).
- Dukungan Kementerian/Lembaga lain.

#### Peningkatan Kesejahteraan Petani

- Pendapatan per kapita pertanian Rp 7,93 juta di tahun 2014.
- Rata-rata laju peningkatan pendapatan per kapita 11,10 persen per tahun.

#### Dukungan utama:

- Investasi pemerintah dan swasta di bidang pertanian.
- Dukungan Kementerian/Lembaga lain yang berpihak ke petani.

\*) Target investasi untuk mendukung pencapaian target 1, 2 dan 3 selama 2010-2014 adalah: Rp. 1.021.907 milyar untuk PMDN dan Rp. 377.071 milyar untuk PMA.

Target, sasaran produksi dan rata-rata pertumbuhan tiap tahun selama 2010-2014 untuk lima komoditas pangan utama sebagaimana Tabel 3.1 berikut:

**Tabel 3.1 Target, Sasaran Produksi dan Pertumbuhan Lima Komoditas Pangan Utama Tahun 2010 - 2014**

KOMODITAS	TARGET	Produksi Th 2009 (Juta Ton)	Sasaran Produksi (Juta Ton)		Rata-rata Pertumbuhan/ Tahun (%)
			2010	2014	
1. Padi <sup>1)</sup>	Swasembada berkelanjutan	63,84 <sup>4)</sup>	66,47	76,57	3,56
2. Jagung <sup>2)</sup>	Swasembada berkelanjutan	17,66 <sup>4)</sup>	19,80	29,00	10,02
3. Kedelai <sup>2)</sup>	Swasembada 2014	1,00 <sup>4)</sup>	1,30	2,70	20,05
4. Gula	Swasembada 2014	2,85 <sup>5)</sup>	2,29	3,45	10,80
5. Daging sapi <sup>3)</sup> / Kerbau	Swasembada 2014	0,47 <sup>5)</sup>	0,5	0,66	7,13

Keterangan : 1) GKG, 2) Pipilan Kering (PK), 3) Karkas, 4) Angka Ramalan III, 5) Angka Target

Dalam rangka peningkatan produksi pertanian pada periode lima tahun ke depan (2010-2014), di samping prioritas pada lima komoditas pangan utama, juga akan dikembangkan 34 komoditas lainnya sehingga berjumlah 39 komoditas yang disebut komoditas unggulan nasional. Komoditas unggulan nasional tersebut terdiri dari 7 komoditas tanaman pangan, 10 komoditas hortikultura, 15 komoditas perkebunan, dan 7 komoditas peternakan (Tabel 3.2).

**Tabel 3.2 Komoditas Unggulan Nasional**

Komoditas	Pangan	Non-Pangan
1. Tanaman Pangan (7)	padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar	
2. Hortikultura (11)	cabe, bawang merah, kentang, mangga, pisang, jeruk, durian, manggis	rimpang (temulawak), tanaman hias (anggrek dan krisan)
3. Perkebunan (15)	kelapa sawit, kelapa, kakao, kopi, lada, jambu mete, teh, tebu	karet, kapas, tembakau, cengkeh, jarak pagar, nilam, kemiri sunan
4. Peternakan (7)	sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing/domba, babi, ayam buras, itik	

Dari ke-39 komoditas unggulan nasional tersebut, ada 19 komoditas yang peningkatan produksinya akan lebih diprioritaskan untuk tujuan penerimaan devisa/ekspor, pemenuhan kebutuhan bahan baku industri dalam negeri dan substitusi impor. Komoditas yang dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan ekspor yaitu kelapa sawit, karet, kakao, kopi, lada, cengkeh, tembakau, teh, jarak pagar, dan nilam. Di samping itu, komoditas yang termasuk *emerging product* yang mempunyai peluang pasar yang luas baik internasional maupun domestik mencakup mangga, manggis, pisang, rimpang dan tanaman hias. Sedangkan komoditas seperti jeruk, susu (sapi perah) dan kapas ditujukan untuk substitusi impor. Untuk ubi kayu, disamping untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, ubi kayu dikembangkan sebagai bahan baku tepung dalam rangka substitusi impor (terigu). Adapun jarak pagar sebagai salah satu tanaman penghasil nabati yang secara bersama-sama dengan kelapa sawit dan kemiri sunan diharapkan mampu mensubstitusi bahan bakar fosil sebesar 3 persen pada tahun 2014.

Langkah operasional pencapaian sasaran produksi ke-39 komoditas unggulan nasional yang dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok komoditas subsektor, yaitu: tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan hortikultura tersebut di atas selama 2010-2014 digambarkan pada penjelasan berikut ini.

#### **3.1.1.1 Langkah Operasional Mencapai Swasembada Kedelai dan Swasembada Berkelanjutan Padi dan Jagung**

Strategi untuk mencapai swasembada kedelai akan diupayakan melalui: (1) peningkatan luas areal tanam melalui upaya khusus (Upsus) seluas 1,15 juta Ha dan utamanya diarahkan untuk tumpang sari di areal pertanaman jagung dan tanaman perkebunan (sawit, tebu); perluasan areal dilakukan di areal hutan tanaman industri (HTI), hutan tanaman rakyat (HTR), dan PT Perkebunan Nasional (PTPN); serta (2) peningkatan Indeks Pertanaman.

Sedangkan strategi untuk mencapai swasembada berkelanjutan padi, yaitu akan dilakukan melalui: (1) percepatan peningkatan produktivitas padi sawah, padi rawa/lebak dan padi gogo dengan fokus pada lokasi yang masih mempunyai produktivitas dibawah rata-rata nasional/propinsi/kabupaten, dan (2) perluasan areal tanam terutama untuk padi gogo dan

padi rawa/lebak melalui pemanfaatan lahan peremajaan Perhutani dan Inhutani maupun pembukaan lahan/cetak sawah.

Adapun untuk mencapai swasembada berkelanjutan jagung, maka strategi yang akan dikembangkan utamanya adalah meningkatkan komposisi pertanaman jagung hibrida. Target sasaran komposisi pertanaman jagung pada tahun 2014 adalah 75 persen jagung hibrida, 15 persen jagung komposit unggul bermutu dan 10 persen jagung lokal dari sasaran luas panen nasional sekitar 5 juta ha dengan produktivitas rata-rata nasional 58 ku/ha.

Gambar 3.1

## PETA SEBARAN SENTRA PRODUKSI PADI



Pendekatan yang dilakukan dalam pencapaian sasaran produksi padi, jagung dan kedelai selama 2010-2014 tetap akan dilakukan melalui penerapan Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) yang diikuti upaya pengamanan produksi dengan mengantisipasi peningkatan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI) melalui pengawalan ketat, pemberdayaan petugas, koordinasi dengan instansi terkait, gerakan pengendalian, peningkatan kewaspadaan, dan penyiapan sarana dan prasarana. SL-PTT diharapkan akan tetap mendapat dukungan benih melalui Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) dan Cadangan Benih Nasional (CBN) dan dukungan pupuk melalui Bantuan Langsung Pupuk (BLP) yang akan difokuskan di lokasi-lokasi yang



masih memiliki rata-rata produktivitas di bawah rata-rata produktivitas nasional/propinsi/kabupaten.

Badan Litbang Pertanian akan melakukan pendampingan minimum 60 % dari jumlah unit SL-PTT pada tahun 2010. Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten diminta memberikan rekomendasi lokasi unit SL-PTT 2010 yang perlu mendapatkan pendampingan dari Badan Litbang Pertanian. Badan Litbang akan melakukan Demo-plot uji adaptasi varietas unggul baru seluas 0,25 ha di setiap unit SL-PTT 2010 yang mendapat pendampingan dari Badan Litbang. Demo-plot tersebut akan dilakukan berdekatan atau bersebelahan dengan lokasi SL-PTT. Untuk selanjutnya, perlu atau tidaknya pendampingan dan demo plot pada 2011-2014, tergantung pada evaluasi terhadap pelaksanaan 2010 dan tergantung juga pada kemampuan Badan Litbang Pertanian dalam mengalokasikan anggaran untuk kegiatan pendampingan dan demo-plot SL-PTT.

Gambar 3.2

## PETA SEBARAN SENTRA PRODUKSI JAGUNG



Untuk mendukung perluasan areal tanam padi, jagung dan kedelai Pemerintah Daerah (Provinsi/kabupaten/kota) akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mengidentifikasi potensi lahan di wilayahnya masing-masing dan secara nasional dikoordinasikan oleh Kementerian Pertanian.

Sebaran sentra produksi padi, jagung, dan kedelai bisa dilihat pada Gambar 3.1, Gambar 3.2, dan Gambar 3.3.

Secara keseluruhan, sasaran produksi komoditas tanaman pangan dan pertumbuhannya selama 2010-2014 dapat dilihat pada Tabel 3.3.

**Tabel 3.3 Sasaran Produksi Tanaman Pangan, 2010-2014**

KOMODITAS	2010	2011	2012	2013	2014	PERTUMBUHAN (%/tahun)
	(ribu ton)					
1. Padi <sup>1)</sup>	66.469	65.722	67.825	72.064	76.568	3,56
2. Jagung <sup>2)</sup>	19.800	22.000	24.000	26.000	29.000	10,02
3. Kedelai <sup>2)</sup>	1.300	1.560	1.900	2.250	2.700	20,05
4. Kacang Tanah	882	970	1.100	1200	1.300	10,20
5. Kacang Hijau	360	370	390	410	430	4,55
6. Ubi kayu	22.248	22.400	25.000	26.300	27.600	5,54
7. Ubi jalar	2.000	2.150	2.300	2.450	2.600	6,78

Keterangan : 1) GKG ; 2) Pipilan Kering (PK)

**Gambar 3.3**

## PETA SEBARAN SENTRA PRODUKSI KEDELAI



Sasaran produksi tanaman pangan yang terbagi atas propinsi di Indonesia secara lebih lengkap dapat dilihat pada Lampiran 1 sampai dengan Lampiran 7.

### 3.1.1.2 Langkah Operasional Mencapai Swasembada Gula dan Peningkatan Produksi Perkebunan

Pencapaian swasembada gula dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Swasembada gula konsumsi untuk memenuhi kebutuhan langsung rumah tangga telah dicapai pada tahun 2009.
- Swasembada gula konsumsi langsung rumah tangga, industri dan sekaligus menutup defisit neraca perdagangan gula nasional diupayakan akan dicapai pada tahun 2014.

Indikator pencapaian swasembada gula nasional 2010-2014 sebagaimana digambarkan pada Tabel 3.4.

**Tabel 3.4 Pencapaian Swasembada Gula Nasional 2010-2014**

No.	Capaian	2010	2011	2012	2013	2014
1	Luas areal (ha)	465,00	439.763	463.156	472.956	487.320
2	Produksi tebu (ton)	37.450,00	34.431.096	37.350.477	39.291.788	40.916.958
3	Produktivitas tebu (ton/ha)	80,60	78.29	80.64	83.08	83.96
4	Rendemen (%)	8,00	7.47	7.94	8.17	8.42
5	Produksi hablur (ton)	2.996,00	2.571.181	2.964.096	3.208.881	3.445.953
6	Produktivitas hablur (ton/ha)	6,45	5,85	6,40	6,78	7,07

Langkah-langkah operasional untuk mengimplementasikan strategi pencapaian swasembada gula tersebut difokuskan pada:

1. Peningkatan produktivitas
  - 1) Rasionalisasi/penataan varietas
  - 2) Penerapan teknologi budidaya
  - 3) Percepatan bongkar/rawat ratoon
  - 4) Efisiensi hara dan penggunaan pupuk organik
  - 5) Suplesi air (embung dan pompa)
2. Perluasan areal
  - 1) Kebun bibit untuk pabrik gula (PG) baru
  - 2) Optimalisasi/pemanfaatan lahan
  - 3) Penyediaan lahan pertanaman tebu

3. Revitalisasi dan pembangunan industri gula berbasis tebu
  - 1) Rehabilitasi/peningkatan kapasitas giling PG dan mutu produk
  - 2) Optimalisasi/efisiensi hari giling
  - 3) Pemanfaatan idle capacity PG
  - 4) Pembangunan PG baru
4. Kelembagaan dan pembiayaan
  - 1) Penguatan kelembagaan riset dan pengembangan (P3GI = Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia)
  - 2) Penguatan kelembagaan usaha petani
  - 3) Penyiapan pengembangan SDM
  - 4) Fasilitasi KKP-E/guliran PUMK
  - 5) Pembiayaan untuk revitalisasi dan pembiayaan PG baru
5. Kebijakan pemerintah
  - 1) Pengaturan tata niaga (penetapan BPP/HPP, stabilisasi harga)
  - 2) Tax/perpajakan
  - 3) Infrastruktur

Peta sebaran sentra produksi gula bisa dilihat pada Gambar 3.4.

Gambar 3.4

## PETA SEBARAN SENTRA PRODUKSI GULA



Adapun rencana aksi pengembangan komoditas perkebunan unggulan nasional lainnya meliputi:

1. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan
  - 1) Mengembangkan budidaya tanaman perkebunan melalui penerapan IPTEK dan 4-ASI (Intensifikasi, Rehabilitasi, Ekstensifikasi dan Diversifikasi), yang didukung dengan sistem penyuluhan dan pendampingan yang intensif.
  - 2) Mengoptimalkan dukungan penyediaan benih unggul bermutu dan sarana produksi, dukungan perlindungan perkebunan dan penanganan gangguan usaha perkebunan serta dukungan manajemen dan teknis lainnya.
2. Investasi usaha perkebunan
  - 1) Fasilitasi, advokasi dan bimbingan dalam memperoleh kemudahan akses untuk pelaksanaan investasi usaha perkebunan.
  - 2) Mendorong pelaksanaan pemanfaatan dana perbankan untuk pengembangan perkebunan terutama untuk usaha kecil dan menengah.
  - 3) Mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif, mencakup: pengembangan sistem pelayanan prima, jaminan kepastian dan keamanan berusaha.
  - 4) Memfasilitasi tersedianya sumber dana dari komoditi dan sumber lainnya untuk pengembangan usaha perkebunan.



- 5) Mendorong lembaga penjamin kredit untuk berpartisipasi dalam pembangunan perkebunan.
3. Pengembangan dukungan terhadap pengelolaan SDA dan lingkungan hidup
  - 1) Meningkatkan penerapan sistem pertanian konservasi pada wilayah-wilayah perkebunan termasuk lahan kritis, DAS Hulu dan pengembangan perkebunan di kawasan penyangga sesuai kaidah-kaidah konservasi tanah dan air.
  - 2) Meningkatkan penerapan paket teknologi ramah lingkungan.
  - 3) Meningkatkan pemanfaatan pupuk organik, pestisida nabati, agens pengendali hayati serta teknologi pemanfaatan limbah usaha perkebunan yang ramah lingkungan.
  - 4) Meningkatkan kampanye peran perkebunan dalam kontribusi penyerapan karbon dan penyedia oksigen dan peningkatan peran serta fungsi hidro-orologis.
4. Peningkatan dukungan terhadap pembangunan sistem ketahanan pangan
  - 1) Meningkatkan pengembangan diversifikasi usahatani dengan komoditi bahan pangan di areal perkebunan secara intensif dan berkelanjutan.
  - 2) Meningkatkan penyediaan protein hewani melalui integrasi cabang usahatani ternak yang sesuai pada areal perkebunan.
  - 3) Mendorong ketersediaan dan keterjangkauan sumber pangan yang berasal dari perkebunan.
5. Pengembangan komoditi
  - 1) Mendorong pengembangan komoditas unggulan nasional dan lokal sesuai dengan peluang pasar, karakteristik dan potensi wilayah dengan penerapan teknologi budidaya yang baik.
  - 2) Optimasi pemanfaatan sumberdaya lahan, seperti lahan pekarangan, lahan pangan, lahan cadangan dan sisa asset lahan lainnya dengan pengembangan cabang usahatani lain yang sesuai.

- 3) Menumbuhkembangkan kawasan komoditas unggulan berbasis pedesaan dengan pengelolaan dari hulu sampai hilir dalam satu kawasan.
  - 4) Mendorong pengembangan usaha budidaya tanaman perkebunan untuk mendukung penumbuhan sentra-sentra kegiatan ekonomi pada wilayah khusus antara lain wilayah perbatasan dan penyangga (*bufferzone*), wilayah konflik/pasca konflik, wilayah bencana alam serta wilayah pemekaran.
  - 5) Mendorong pengembangan aneka produk (*product development*) perkebunan serta upaya peningkatan mutu untuk memperoleh peningkatan nilai tambah.
  - 6) Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana pendukung pengembangan perkebunan.
6. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Perkebunan
- 1) Mengembangkan sistem informasi, mencakup kemampuan menyusun, memperoleh dan menyebar luaskan informasi yang lengkap mengenai SDM, teknologi, peluang pasar, manajemen, permodalan, usaha perkebunan untuk mendorong dan menumbuhkan minat pelaku usaha, petani dan masyarakat.
  - 2) Meningkatkan jejaring kerja dengan institusi terkait.
7. Pengembangan SDM
- 1) Petugas
    - a) Meningkatkan kualitas, moral dan etos kerja petugas.
    - b) Meningkatkan lingkungan kerja yang kondusif dan membangun sistem pengawasan yang efektif.
    - c) Meningkatkan penerapan sistem *recruitment* dan karir yang terprogram serta transparan untuk mewujudkan petugas yang profesional.
    - d) Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan sikap prakarsa petugas yang pro-aktif dalam mewujudkan pelayanan prima sesuai kebutuhan pelaku usaha.

- 2) SDM Petani dan Masyarakat
  - a) Meningkatkan kemampuan dan kemandirian petani untuk mengoptimalkan usahanya secara berkelanjutan.
  - b) Memfasilitasi dan mendorong kemampuan petani untuk dapat mengakses berbagai peluang usaha dan sumberdaya dalam memperkuat/mempertangguh usaha taninya.
  - c) Menumbuhkan kebersamaan dan mengembangkan kemampuan petani dalam mengelola kelembagaan petani dan kelembagaan usaha serta menjalin kemitraan.
  
8. Pengembangan Kelembagaan dan Kemitraan Usaha
  - 1) Mendorong peningkatan kemampuan dan kemandirian kelembagaan petani untuk menjalin kerjasama usaha dengan mitra terkait serta mengakses berbagai peluang usaha dan sumberdaya yang tersedia.
  - 2) Mendorong terbentuknya kelembagaan komoditi yang tumbuh dari bawah.
  - 3) Mendorong penumbuhan kelembagaan keuangan pedesaan.
  - 4) Meningkatkan fungsi pendampingan kepada petani dan kelembagaan usahanya.
  - 5) Mendorong kemitraan yang saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, saling memperkuat dan saling ketergantungan antara petani, pengusaha, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan.

Sasaran produksi dan pertumbuhan tahunan tanaman perkebunan selama 2010-2014 dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Sasaran produksi perkebunan per propinsi di Indonesia selama 2010-2014 dapat dilihat pada Lampiran 8 sampai dengan Lampiran 21.



Tabel 3.5 Sasaran Produksi Perkebunan, 2010-2014

	KOMODITAS	2010	2011	2012	2013	2014	PERTUMBUHAN (%/tahun)
		(ribu ton)					
1	Sawit (CPO)	23.200	24.429	25.710	27.046	28.439	5,22
2	Karet (karet kering)	2.681	2.711	2.741	2.771	2.801	1,10
3	Kelapa (kopra)	3.266	3.291	3.317	3.348	3.380	0,86
4	Kopi (biji kering)	704	634	748	763	771	2,77
5	Kakao (biji kering)	838	712	833	958	1.054	6,75
6	Lada (lada kering)	83	85	87	89	92	2,51
7	Cengkeh (bunga kering)	78	80	83	84	86	2,47
8	Jambu Mete (gelondong kering)	145	148	152	156	159	2,36
9	Tembakau	181	182	183	183	184	0,41
10	Kapas (daun kering)	26	33	40	57	63	24,99
11	Teh (daun kering)	157	141	152	160	165	1,5
12	Tebu (Gula)	2,290	2,571	2,964	3,209	3,446	10,80
13	Jarak Pagar (biji kering)	15	20	24	29	35	23,71
14	Nilam (daun kering)	91	97	106	116	124	8,05
15	Kemiri Sunan (biji kering)	5	5	5	5	6	5



### 3.1.1.3 Langkah Operasional Mencapai Swasembada Daging dan Peningkatan Produksi Peternakan

Pencapaian swasembada daging sapi akan diupayakan melalui 5 (lima) kegiatan pokok, yaitu:

1. Penyediaan bakalan/daging sapi lokal;
2. Peningkatan produktivitas dan reproduktivitas ternak sapi lokal;
3. Pencegahan pemotongan sapi betina produktif;
4. Penyediaan bibit sapi; dan
5. Pengaturan stok daging sapi dalam negeri.

Dalam implementasinya kelima kegiatan pokok tersebut dijabarkan ke dalam 13 (tiga belas) kegiatan operasional, yaitu:

1. Pengembangan usaha pembiakan dan penggemukan sapi lokal;
2. Pengembangan pupuk organik dan biogas;
3. Pengembangan integrasi ternak sapi dan tanaman;
4. Pemberdayaan dan peningkatan kualitas RPH (Rumah Potong Hewan);
5. Optimalisasi IB (Inseminasi Buatan) dan INKA (Intensifikasi Kawin Alam);
6. Penyediaan dan pengembangan pakan dan air;
7. Penanggulangan gangguan reproduksi dan peningkatan pelayanan kesehatan hewan;
8. Penyelamatan betina produktif;
9. Penguatan wilayah sumber bibit dan kelembagaan usaha pembibitan;
10. Pengembangan pembibitan sapi potong melalui VBC (*Village Breeding Centre*);
11. Penyediaan bibit melalui subsidi bunga (KUPS = Kredit Usaha Pembibitan Sapi);
12. Pengaturan stok sapi bakalan dan daging sapi; dan
13. Pengaturan distribusi dan pemasaran sapi dan daging.

Sasaran swasembada daging dan peningkatan produksi komoditas peternakan selama kurun 2010-2014 seperti tergambar pada Tabel 3.6.

**Tabel 3.6 Sasaran Produksi Peternakan, 2010-2014**

KOMODITAS	2010	2011	2012	2013	2014	PERTUMBUHAN (%/tahun)
	(ribu ton karkas)					
1. Daging Sapi	468	482	517	566	624	7.49
2. Daging Kerbau	36	37	38	39	40	2.08
3. Daging Kambing/Domba	133	138	145	152	161	4.95
4. Daging Babi	232	235	239	243	247	1.66
5. Ayam Buras	324	342	364	378	401	5.47
6. Itik	29	29	30	31	33	3.71
7. Sapi Perah (susu segar)	1.013	1.104	1.208	1.329	1.47	9.74

Adapun kebijakan yang dikembangkan untuk pencapaian sasaran 7 komoditas unggulan peternakan sebagaimana pada Tabel 3.6 tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan peningkatan ketersediaan dan mutu benih dan bibit
2. Kebijakan peningkatan populasi dan optimalisasi produksi ternak ruminansia
3. Kebijakan peningkatan populasi dan optimalisasi produksi ternak non-ruminansia
4. Kebijakan peningkatan dan mempertahankan status kesehatan hewan
5. Kebijakan peningkatan jaminan keamanan produk hewan
6. Kebijakan peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat

Langkah operasional pencapaian produksi peternakan adalah:

1. Peningkatan ketersediaan dan perbaikan mutu benih dan bibit ternak dengan optimalisasi kelembagaan perbibitan dan sertifikasi, penjarangan, pemurnian dan persilangan ternak bibit dan benih lokal melalui penerapan perbibitan yang baik, serta penggunaan teknologi inseminasi buatan dan embrio transfer.

2. Peningkatan populasi dan optimasi produksi ternak ruminansia melalui penerapan good farming practices (GFP), pengaturan perwilayahan, integrasi ternak dan tanaman, pendayagunaan bahan pakan lokal serta pemberdayaan peternak.
3. Peningkatan populasi dan optimalisasi produksi ternak non-ruminansia melalui restrukturisasi perunggasan, percepatan peningkatan populasi unggas local, optimalisasi produksi ternak unggas, penataan usaha babi ramah lingkungan, pengembangan ternak puyuh, kelinci, dan rusa, pemberdayaan peternak, peningkatan ketahanan dan keamanan pakan unggas dan pengembangan alat dan mesin.
4. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular dan gangguan reproduksi serta mempertahankan dan memperluas status wilayah Indonesia bebas penyakit hewan menular strategis.
5. Pencegahan dan pengamanan bahaya pencemaran produk hewan, zoonosis dan produk rekayasa genetik, serta peningkatan penerapan kesejahteraan hewan.
6. Pendayagunaan peran dan fungsi kelembagaan serta Sumber Daya Manusia peternakan untuk kebijakan dan pengambilan keputusan.

Di dalam penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan dilaksanakan melalui:

1. Penguatan peran dan fungsi lembaga otoritas veteriner,
2. Peningkatan jaminan produk hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) dan daya saing produk hewan,
3. Tersosialisasikannya resiko residu dan cemaran pada produk hewan serta zoonosis kepada masyarakat,
4. Tersedianya profil keamanan produk hewan nasional dan peta zoonosis, serta peningkatan penerapan kesehatan hewan di Rumah Potong Hewan (RPH) dan Rumah Potong Unggas (RPU) melalui peningkatan penerapan fungsi otoritas veteriner, UPT pelayanan dan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner melalui pusat kesehatan hewan, terpenuhinya persyaratan dan standar keamanan dan mutu produk hewan pangan dan non pangan, penurunan persentase produk asal hewan yang diatas Batas Maksimum Cemaran

Mikroba (BMCM) dan Batas Maksimal Residu (BMR), penurunan prevalensi dan/atau insidensi zoonosis serta peningkatan persentase jumlah RPH yang menerapkan kesejahteraan hewan (kesrawan) dan peningkatan persentase jumlah RPU yang menerapkan kesrawan.

Sasaran produksi peternakan per propinsi di Indonesia selama periode tahun 2010-2014 dapat dilihat pada Lampiran 22 sampai dengan Lampiran 29.

Peta sebaran sentra produksi daging sapi bisa dilihat pada Gambar 3.5.

Gambar 3.5

## PETA SEBARAN SENTRA PRODUKSI DAGING SAPI 2010 - 2014



**(I) Provinsi Prioritas IB:**

1. Jawa Timur
2. Jawa Barat
3. Jawa Tengah
4. DIY
5. Bali

**(II) Provinsi Prioritas**

**Campuran (IB dan INKA):**

1. NAD
2. Sumut
3. Sumbar
4. Sumsel
5. Lampung
6. Gorontalo
7. Kalsel
8. NTB
9. Sulsel
10. Kalbar
11. Jambi
12. Riau

**(III) Provinsi Prioritas INKA:**

1. NTT
2. Sulteng
3. Sultra

**(IV) Propinsi Pertumbuhan Baru:**

1. Bengkulu
2. Kaltim
3. Kalteng
4. Banten
5. Babel
6. Kepri
7. Sulut
8. Sulbar
9. Maluku
10. Malut
11. Papua
12. Papua Barat
13. DKI

### 3.1.1.4 Langkah Operasional Peningkatan Produksi Hortikultura

Komoditas hortikultura merupakan komoditas yang sangat penting dan strategis karena merupakan komponen penting dari Pola Pangan Harapan, yang harus tersedia setiap saat, dalam jumlah yang cukup, mutu yang layak, aman konsumsi, harga yang terjangkau, serta dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat Indonesia yang merupakan konsumen di dalam negeri, merupakan pasar yang sangat potensial, yang dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk Indonesia.

Usaha agribisnis hortikultura (buah-buahan, sayuran, tanaman hias dan tanaman biofarmaka) merupakan sumber pendapatan tunai bagi masyarakat dan petani baik berskala kecil, menengah maupun besar, karena didukung dengan keunggulan berupa nilai jualnya yang tinggi, jenisnya beragam, tersedianya sumberdaya lahan dan teknologi, serta potensi serapan pasar di dalam negeri dan internasional yang terus meningkat. Pasokan produk hortikultura nasional saat ini telah mampu memenuhi kebutuhan konsumen dalam negeri, baik melalui pasar tradisional maupun pasar modern, maupun pasar luar negeri (ekspor).

Sasaran produksi hortikultura dan pertumbuhannya selama 2010-2014 dapat dilihat pada Tabel 3.7.

**Tabel 3.7 Sasaran Produksi Hortikultura, 2010-2014**

KOMODITAS	2010	2011	2012	2013	2014	PERTUMBUHAN (%/tahun)
	(ribu ton)					
1. Cabe	1.329	1.375	1.424	1.473	1.525	3,50
2. Bawang Merah	1.049	1.085	1.122	1.161	1.202	3,46
3. Kentang	1.061	1.093	1.128	1.168	1.211	3,37
4. Mangga	1.287	1.842	2.351	2.467	2.598	20,24
5. Pisang	5.755	6.361	6.399	6.715	7.070	5,34
6. Jeruk	2.029	2.116	2.139	2.244	2.363	3,90
7. Durian	492	568	766	804	847	15,15
8. Manggis	85	97	102	107	113	7,64
9. Temulawak	27	28	29	30	32	4,44
10. Anggrek*	14.050	14.492	14.949	15.420	15.907	3,24
11. Krisan*	185.232	193.132	201.369	209.957	218.911	4,27

Keterangan: \* dalam ribu tangkai.

Secara lebih lengkap sasaran produksi 10 komoditas unggulan hortikultura tersebut per propinsi selama 2010-2014 dapat dilihat pada Lampiran 30 sampai dengan Lampiran 39.

Sepuluh komoditas hortikultura seperti pada Tabel 3.7 di atas merupakan unggulan nasional, dimana pengembangannya akan mendapat prioritas dari APBN. Secara keseluruhan, jumlah komoditas hortikultura berjumlah 323 komoditas, namun yang tercatat di BPS baru mencapai 90 komoditas. Kinerja PDB hortikultura dihitung berdasarkan kinerja ke sembilan puluh komoditas tersebut.



Tabel 3.8 di bawah ini menggambarkan pengelompokan ke-sembilanpuluh komoditas hortikultura tersebut beserta sasaran produksinya untuk jangka waktu lima tahun, 2010-2014:

**Tabel 3.8 Kelompok Komoditas Hortikultura, 2010-2014**

KOMODITAS		2010	2011	2012	2013	2014	(%/thn)
<b>I.</b>	<b>Buah-Buahan (ribu ton)</b>						
1.	Jeruk (ton)	2,028,904	2,116,089	2,138,688	2,244,162	2,362,991	3.90
2.	Mangga (ton)	1,287,287	1,842,036	2,351,473	2,467,440	2,598,092	20.24
3.	Manggis (ton)	84,538	97,487	102,361	107,409	113,096	7.64
4.	Durian (ton)	492,139	567,519	766,150	803,935	846,503	15.14
5.	Pisang (ton)	5,755,073	6,360,565	6,399,335	6,714,930	7,070,489	5.34
6.	Buah Pohon dan Perdu lainnya (ton)	3,127,169	3,695,150	3,705,287	3,888,023	4,093,880	7.17
7.	Buah Semusim dan Merambat (ton)	633,017	752,976	762,001	799,576	841,930	7.59
8.	Buah Terna lainnya (ton)	2,082,246	2,431,179	2,445,805	2,566,425	2,702,318	6.90
	<b>Total Buah</b>	<b>15,490,373</b>	<b>17,863,000</b>	<b>18,671,100</b>	<b>19,591,900</b>	<b>20,629,300</b>	<b>7.52</b>
<b>II.</b>	<b>Sayuran (ribu ton)</b>	<b>7.267,8</b>	<b>7.580,6</b>	<b>7.918,3</b>	<b>8.285,4</b>	<b>8.687,5</b>	<b>4,56</b>
4.	Sayuran Umbi lainnya (ribu ton)	448,5	469,9	494,6	523,4	557,4	5,59
5.	Sayuran Daun (ribu ton)	3.114,6	3.211,1	3.313,1	3.420,9	3.535,0	3,22
6.	Sayuran Buah lainnya (ribu ton)	3.643,3	3.835,5	4.043,5	4.270,8	4.521,3	5,55
7.	Jamur (ribu ton)	61,4	64,1	67,1	70,3	73,8	4,71
<b>III.</b>	<b>Tanaman Florikultura</b>						
10.	Tan. Hias Bunga dan Daun lainnya (tangkai)	198.217,0	206.433,3	215.205,2	224.321,5	233.786,5	4.21
11.	Tan. Pot dan Tan. Taman (pohon)	14.561,6	15.130,7	15.711,9	16.317,4	16.958,8	3.88
12.	Tan. Bunga Tabur (melati) (kg)	21.600,4	22.741,1	23.943,1	25.209,8	26.544,6	5.29
<b>IV.</b>	<b>Tanaman Obat (ribu kg)</b>	<b>418,7</b>	<b>435,7</b>	<b>454,2</b>	<b>474,8</b>	<b>498,2</b>	<b>4,57</b>
13.	Temulawak (ribu ton)	27	28	29	30	32	4,35
14.	Tanaman Obat Rimpang lainnya (ton)	324,5	337,5	351,6	367,6	386,0	4,44
15.	Tanaman Obat Non Rimpang (ton)	67,5	70,5	73,6	76,9	80,5	4,48

*Keterangan:*

*Sasaran produksi ke dua belas kelompok komoditas hortikultura (sembilan-puluh komoditas) secara rinci per propinsi selama 2010-2014 dijabarkan pada Rencana Strategis Direktorat Jenderal Hortikultura.*



Pengembangan hortikultura dalam perspektif paradigma baru tidak hanya terfokus pada upaya peningkatan produksi saja tetapi terkait juga dengan isu-isu strategis seperti mutu, keamanan pangan dan lingkungan dalam rangka meningkatkan daya saing dan akses pasar.

Kebijakan dan strategi pengembangan hortikultura yang dilaksanakan secara simultan dan terintegrasi antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Fokus dari pengembangan hortikultura adalah pengembangan dan penguatan kawasan yang memiliki rantai pasokan (*supply chain management*) yang terstruktur.

Upaya peningkatan produktivitas, mutu dan nilai produk pada kawasan pengembangan dilakukan dengan Penerapan Budidaya Pertanian yang Baik (*Good Agricultural Practices/GAP*) dan *Standard Operating Procedure* (SOP), serta pengembangan dan penguatan kelembagaan usaha. Seluruh upaya tersebut di atas diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan domestik, peningkatan konsumsi dan ekspor.

Untuk memacu upaya peningkatan investasi pada subsektor hortikultura dibutuhkan dukungan dari seluruh *stakeholders* terkait baik vertikal maupun horizontal. Dukungan secara vertikal dimulai dari *on farm* (ketersediaan benih bermutu, pupuk yang memadai, pengendalian OPT dan ketersediaan alat dan mesin yang tepat guna), penanganan pascapanen, *handling, logistic* dan distribusi/transportasi, serta aspek pemasaran sampai tingkat konsumen. Sedangkan secara horizontal diperlukan dukungan dari seluruh instansi baik dilingkungan pemerintah maupun non pemerintah dan dunia usaha. Hal tersebut dapat diwadahi dan dilaksanakan melalui Fasilitas Terpadu Investasi Hortikultura.

Beberapa langkah operasional untuk pengembangan hortikultura yang dilaksanakan adalah :

1. Pengembangan kawasan perkotaan, untuk lebih mendekatkan lokasi pengembangan (seperti kawasan kota/pekarangan) hortikultura dengan konsumen.
2. Kerjasama petani dengan swasta untuk percepatan perluasan areal tanaman semusim (melon, semangka) untuk memenuhi permintaan ekspor.

3. Pengembangan kawasan sentra, dengan membentuk skala luasan ekonomis minimal 50 ha per kecamatan, terutama komoditas sayuran (bawang merah, cabai) dan buah-buahan (manggis, jeruk, durian, alpukat, dll), terutama di agroekosistem yang memungkinkan untuk produksi di masa *off season*.
4. Peningkatan investasi swasta, melalui ekspansi usaha (HGU) dan kemitraan petani baik dengan swasta maupun BUMN.
5. Perbaikan mutu produk, antara lain melalui penerapan GAP serta GHP, penerapan teknologi budidaya ramah lingkungan, fasilitasi sarana panen dan pasca panen.
6. Penguatan sistem perlindungan tanaman, melalui pengembangan penerapan PHT, antara lain dengan memperkuat *surveillance* dengan dukungan teknologi informasi, pengembangan agroklinik, fasilitasi sarana lab.
7. Penguatan sistem perbenihan melalui peningkatan produksi/ ketersediaan benih yang murah, tepat waktu dan mudah dijangkau petani serta peningkatan kapasitas kelembagaan (BPSB dan BBH).
8. Penguatan kelembagaan, antara lain melalui perbaikan manajemen kelembagaan petani (gapoktan, asosiasi, koperasi) dan pemberdayaan.
9. Fasilitasi kemitraan dengan eksportir, pemasok pasar modern dan industri pengolahan.
10. Akselerasi akses pembiayaan melalui kredit khusus (KKPE, KUR) dan meningkatkan peran swasta untuk investasi hortikultura.
11. Fasilitasi bantuan peralatan pascapanen dan penataan rantai distribusi berupa peralatan pascapanen (rak kemasan, alat petik, *mobile cooling box*, gerobak, copper).
12. Pengaturan pola produksi terutama sayuran utama (cabe dan bawang merah).
13. Pemasarakatan produk hortikultura nasional melalui media cetak dan elektronik, pameran dan gerakan konsumsi buah dan sayur.

### 3.1.1.5 Kebutuhan Pupuk

Dalam mendukung upaya peningkatan produksi untuk pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan diperlukan dukungan sarana produksi baik benih, pupuk, obat-obatan, alat dan mesin pertanian. Khusus untuk pupuk selama 5 tahun (2010-2014) diperkirakan kebutuhan urea 35,15 juta ton, SP-36 22,23 juta ton, ZA 6,29 juta ton, KCL 13,18 juta ton, NPK 45,99 juta ton dan Organik 53,09 juta ton (Tabel 3.9).

**Tabel 3.9 Proyeksi Kebutuhan Pupuk Sektor Pertanian\*)**

Jenis Pupuk	2010	2011	2012	2013	2014	Total
	(juta ton)					
Urea	7,10	7,07	7,03	7,00	6,96	35,15
SP-36	4,53	4,53	4,44	4,39	4,34	22,23
ZA	1,21	1,23	1,26	1,28	1,31	6,29
KCL	2,82	2,73	2,64	2,55	2,45	13,18
NPK	8,07	8,63	9,20	9,74	10,35	45,99
Organik	10,42	10,51	10,61	10,72	10,82	53,09

Keterangan: \* Pupuk subsidi dan non-subsidi

Lebih lanjut, perhitungan proyeksi kebutuhan pupuk untuk masing-masing subsektor (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan) selama 2010-2014 dapat dilihat pada Lampiran 40.

### 3.1.1.6 Subsidi

#### 1. Subsidi Pupuk

Fasilitasi pemberian subsidi pupuk telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan produksi pertanian khususnya dalam pencapaian swasembada padi dan jagung berkelanjutan. Untuk itu, subsidi pupuk masih sangat diperlukan dalam peningkatan ketahanan pangan nasional.

Saat ini, skim subsidi pupuk adalah subsidi harga yang penyalurannya dilaksanakan dengan pola tertutup menggunakan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Sistem penyaluran subsidi pupuk yang dilaksanakan melalui subsidi harga masih dihadapkan pada berbagai permasalahan baik dari sisi teknis dalam penyaluran pupuk bersubsidi maupun dari sistem penganggarannya. Dalam rangka perbaikan sistem

penyaluran pupuk bersubsidi yang saat ini dilaksanakan dengan pola tertutup menggunakan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), maka peran aktif Pemerintah Daerah sangat diharapkan yaitu melalui :

1. Penerbitan Peraturan Gubernur dan Bupati/Walikota tentang aloksi kebutuhan pupuk bersubsidi sebagai penjabaran Peraturan Menteri Pertanian tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian,
2. Pengawasan dan pendampingan serta validasi data RDKK
3. Optimalisasi peran Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) dalam pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di masing-masing wilayahnya.

Melalui fasilitasi subsidi pupuk secara tertutup dapat diterapkan efisiensi penggunaan pupuk anorganik yang terindikasi dengan peningkatan penggunaan pupuk majemuk NPK dan penggunaan pupuk organik.



Ke depan, perlu dilakukan penyempurnaan sistem penyaluran subsidi pupuk bagi petani baik menyangkut cakupan penerima subsidi, skim subsidi melalui subsidi tidak langsung (subsidi harga) atau subsidi langsung kepada petani. Perubahan kebijakan subsidi pupuk harus dilakukan secara hati-hati dan komprehensif. Tabel 3.10 memperlihatkan perkiraan kebutuhan pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian selama 2010-2014.



Tabel 3.10 Perkiraan Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, 2010-2014

No	JENIS PUPUK	2010	2011	2012	2013	2014
		(juta ton)				
1	UREA	6,00	5,80	5,60	5,40	5,20
2	SP-36	1,00	0,97	0,80	1,00	1,00
3	ZA	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
4	NPK	2,20	2,50	3,00	3,50	4,00
5	ORGANIK	0,91	1,10	1,30	0,91	0,91
<b>JUMLAH</b>		<b>11,06</b>	<b>11,32</b>	<b>11,65</b>	<b>11,76</b>	<b>12,06</b>

## 2. Subsidi Benih

Sebagaimana pupuk, benih juga merupakan sarana produksi penting yang penggunaannya perlu terus didorong agar petani menggunakan benih unggul dalam usahatani. Salah satu insentif bagi petani agar menggunakan benih unggul adalah dengan memberikan subsidi benih unggul, benih subsidi langsung maupun tidak langsung. Subsidi tidak langsung seperti yang telah berjalan selama ini yaitu melalui subsidi harga terhadap produksi benih yang dihasilkan oleh BUMN benih PT Sang Hyang Seri dan PT Pertani.

Selain subsidi harga, juga diperlukan subsidi langsung seperti hibah benih kepada petani yang ditimpa bencana alam. Dalam 3 tahun terakhir (sejak TA 2007) juga disediakan subsidi langsung melalui fasilitas penyediaan anggaran ke BUMN dalam bentuk PSO (*Public Service Obligation*) yang

dilaksanakan oleh BUMN. Di Kementerian Pertanian, bantuan langsung benih dalam bentuk PSO ini dikenal dengan sebutan Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU).

Dengan adanya subsidi/PSO benih ternyata dapat meningkatkan produksi dalam mendukung pencapaian/kelestarian swasembada pangan. Bantuan benih varietas unggul bermutu merupakan satu langkah untuk menyentuh kisi kecil dalam input produksi yang besar, tetapi memiliki *multiplier effect* positif yang besar dalam proses produksi, sehingga besar perannya dalam meningkatkan produksi. Nilai biaya benih hanya sekitar 5% dari biaya total biaya input produksi.

### **3. Subsidi Bunga/Kredit**

Subsidi bunga kredit adalah selisih bunga antara bunga yang diterima perbankan dengan bunga yang dibayar petani. Subsidi bunga merupakan salah satu insentif bagi petani/peternak yang ada pada skim kredit program.

Setidaknya ada tiga skim kredit program yang mendapat subsidi bunga saat ini, dan akan terus dilanjutkan pada 5 tahun kedepan dan dioptimalkan pemanfaatannya bagi para petani dan peternak. Kementerian Pertanian bersama Kementerian/Lembaga terkait akan terus memperjuangkan pemberian subsidi bunga kepada para petani dan peternak serta pelaku pembangunan pertanian.

Tiga skim kredit program saat ini adalah:

1. Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E)
2. Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP)
3. Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS)

KKP-E adalah kredit modal kerja dan atau investasi yang diberikan oleh Perbankan kepada petani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan (tebu), peternakan, koperasi dalam rangka pengadaan pangan dan kelompok tani dalam rangka pengadaan alat dan mesin pertanian. Lahan yang dibiayai sampai 4 Ha dengan plafon maksimum Rp. 50 juta per debitur. Suku bunga kepada petani tebu 7 persen dan kepada petani non tebu 6 persen per tahun.

KPEN-RP merupakan kredit investasi yang diberikan oleh Perbankan kepada petani sawit, kakao, dan karet yang didukung dengan subsidi bunga oleh pemerintah kepada petani. Jangka waktu kredit untuk sawit dan kakao 13 tahun dengan masa tenggang 5 tahun, untuk karet 15 tahun dengan masa tenggang 7 tahun. Suku bunga kepada petani sawit dan kakao 7 persen per tahun, kepada petani karet 6 persen per tahun.

KUPS merupakan kredit yang diberikan oleh Perbankan kepada pelaku usaha peternakan (kelompok/gabungan kelompok, koperasi, dan perusahaan) yang didukung dengan subsidi pemerintah. Jangka waktu kredit 6 tahun dengan masa tenggang 2 tahun. Pelaku usaha yang memanfaatkan KUPS wajib melakukan kemitraan. Suku bunga kepada pelaku usaha 5 persen per tahun.

Di samping itu, juga ada skim kredit program dengan fasilitas penjaminan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Fasilitas pemerintah yang diberikan kepada debitur Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM-K) termasuk sektor pertanian adalah dalam bentuk Imbal Jasa Penjaminan (IJP) atau premi dan penjaminan sebesar 70 persen dari kredit yang disalurkan, melalui Lembaga Penjamin.

Tabel 3.11 di berikut ini menggambarkan fitur skim kredit program dengan fasilitas subsidi bunga dan program penjaminan.

**Tabel 3.11 Ringkasan Fitur Skim Kredit Program (Subsidi Bunga dan Penjaminan)**

Keterangan	KKP-E	KPEN-RP	KUPS	KUR
1. Bunga dibayar petani/debitur	6 – 7 %	6 – 7%	5%	Maks 14-22%
2. Bunga diterima bank	12 – 13%	12%	13%	Maks 14-22%
3. Subsidi bunga	5 – 7%	5 – 6%	8%	-
4. Maksimum kredit per debitur	Rp 50 juta	Rp 172 juta	Rp 66 milyar	Rp. 500 juta
5. Jangka waktu kredit (maks)	5 tahun	13 – 15 tahun	6 tahun	3-5 tahun
6. Komoditas yang dibiayai	Pangan, horti, tebu, ternak, alsintan	sawit, kakao, dan karet	Pembibitan sapi	Semua jenis Komoditas

### 3.1.1.7 Sasaran Perluasan Lahan Pertanian

Untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan sebagaimana diuraikan di atas, disamping diupayakan melalui peningkatan produktivitas

juga diupayakan melalui perluasan areal lahan pertanian baru seluas 2 (dua) juta hektar, dengan rincian selama lima tahun ke depan (2010-2014) adalah sebagai berikut: 250.000 ha cetak sawah, 400.000 ha pembukaan lahan kering, 400.000 ha perluasan areal hortikultura, 585.430 ha perluasan areal perkebunan rakyat, 351.000 ha pengembangan areal Hijauan Makanan Ternak (HMT) dan padang penggembalaan seluas 13.570 ha (Tabel 3.12).

**Tabel 3.12 Sasaran Perluasan Areal Lahan Pertanian 2 Juta Hektar**

Tipologi Lahan	2010	2011	2012	2013	2014	Total
	(Ha)					
Cetak Sawah	12.025	62.000	100.650	100.000	100.000	374.675
Pembukaan Lahan Kering	1.050	98.950	100.000	100.000	100.000	400.000
Perluasan Areal Hortikultura	3.525	96.475	100.000	100.000	100.000	400.000
Perluasan Areal Perkebunan Rakyat	10.200	143.670	143.850	143.850	143.850	585.430
Pengembangan Areal Hijauan Makanan Ternak (HMT)	5.705	90.000	85.295	85.000	85.000	351.000
Pengembangan Padang Pengembalaan	1.070	2.500	3.750	3.750	2.500	13.570
<b>Total</b>	<b>33.575</b>	<b>519.570</b>	<b>533.388</b>	<b>533.093</b>	<b>531.843</b>	<b>2.124.675</b>

Secara lebih lengkap, sasaran perluasan areal lahan pertanian per propinsi selama tahun 2010-2014 dapat dilihat pada Lampiran 41 sampai dengan Lampiran 46.

### 3.1.1.8 Antisipasi, Mitigasi dan Adaptasi terhadap Variabilitas dan Perubahan Iklim serta Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca

Pencapaian keempat target utama pembangunan pertanian akan sangat dipengaruhi oleh fenomena variabilitas dan perubahan iklim yang sudah menjadi isu global yang diyakini akan sangat berdampak luas terhadap aktivitas manusia dan kelangsungan berbagai sektor pembangunan, Perubahan iklim pada Sektor Pertanian berpengaruh secara runtut terhadap sistem sumberdaya, terutama lahan dan air, dan sistem produksi pertanian serta terhadap sistem sosial ekonomi petani. Tanaman pangan merupakan subsektor yang paling rentan terhadap perubahan iklim, sehingga tanpa antisipasi atau intervensi, maka target swasembada dan swasembada berkelanjutan dikuatirkan akan terancam.



Untuk mengantisipasi perubahan iklim di sektor pertanian diperlukan: (a) analisis dan deliniasi wilayah terkait dengan tingkat kerentanan serta dampaknya terhadap sektor pertanian, (b) penyusunan road map strategi sektor pertanian menghadapi perubahan iklim dan lingkungan, baik dalam upayaantisipasi, maupun mitigasi dan adaptasi.

Strategi dan Kebijakan Umum penanggulangan dampak perubahan iklim pada sektor pertanian adalah: (a) Program aksi adaptasi pada sub-sektor tanaman pangan dalam upaya melestarikan dan memantapkan ketahanan pangan nasional sebagai prioritas utama, (b) Program aksi mitigasi pada sub-sektor perkebunan melalui pengembangan teknologi ramah lingkungan dan penurunan emisi GRK, sebagai komitmen nasional, dan (c) Sub-sektor lain melakukan adaptasi dan mitigasi dengan bertitik tolak pada prioritas pencapaian sasaran pembangunan.

Sedangkan strategiteknisnya adalah: (1) Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Lahan dan Air/irigasi; (2) Penyesuaian Pola Tanam/Pengelolaan, terutama tanaman pangan;; (3) Perakitan dan penyiapan Teknologi Adaptif serta berbagai pedoman/tool; (4) Penerapan Teknologi Adaptif dan Ramah Lingkungan.

Rencana Aksi Antisipasi dan Adaptasi Perubahan Iklim adalah:

1. Pemetaan daerah rentan perubahan iklim (terutama rawan bencana banjir, kekeringan, penciptan dan degradasi lahan, dan lain-lain), serta deliniasi wilayah/lahan berdasarkan tingkat dampaknya;
2. Penyusunan panduan/tool (seperti atlas kalender tanam dinamik, peta wilayah prioritas penanganan bencana banjir dan kekeringan, sistem, dan lain-lain) serta pengembangan sistem informasi iklim dan bencana dan sistem peringatan dini banjir dan kekeringan;
3. Perbaikan dan pengembangan jaringan irigasi dan drainase, normalisasi dan peningkatan kapasitas waduk/bangunan penyimpanan air, reklamasi, rehabilitasi dan konservasi sumberdaya lahan terlantar/terdegradasi/ kritis, konservasi DAS (Daerah Aliran Sungai) kritis hulu utama di Jawa, Sulawesi dan Sumatera, antara lain melalui pengembangan tanaman pohon (perkebunan/buah);

4. Perakitan teknologi adaptif, seperti varietas unggul, (toleran genangan, kekeringan, salinitas, umurgenjah, Organisme Pengganggu Tanaman-OPT), pupuk organik/hayati, amelioran/pembenah tanah, teknologi pengelolaan lahan/tanah/ pemupukan dan air, teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) serta berbagai teknologi rendah emisi dan ramah lingkungan;
5. Sosialisasi dan pengembangan teknologi dan model untuk adaptasi perubahan iklim; seperti *System Rice Intensification (SRI)* dan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT), Sistem Integrasi Tanaman Ternak (SITT), serta teknologi hemat air, dll.

Dalam rangka menindaklanjuti KTT Perubahan Iklim di Copenhagen pada tanggal 1-17 Desember 2009, Pemerintah RI telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dari gambut, energi, limbah, kehutanan, industri dan pertanian sebesar 26 persen pada tahun 2020 (dengan kemampuan sendiri). Penurunan tersebut ditingkatkan menjadi 41 persen (apabila negara-negara maju dan/atau lembaga-lembaga internasional ikut membantu).

Selaras dengan komitmen pemerintah tersebut, Kementerian Pertanian mendapat tugas menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29,3 juta ton CO<sub>2</sub> pada sektor pertanian dan 55,6 juta ton CO<sub>2</sub> di lahan gambut, sehingga total menjadi 84,9 juta ton CO<sub>2</sub> selama 2010-2014.

Kementerian Pertanian telah menetapkan 9 Program Utama Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-PE-GRK) Sektor Pertanian dan Lahan Gambut, sebagai berikut:

1. Penyiapan lahan tanpa bakar dan optimalisasi pemanfaatan lahan;
2. Penerapan teknologi budidaya tanaman ramah lingkungan;
3. Pengembangan dan pemanfaatan pupuk organik dan biopestisida;
4. Pengembangan areal perkebunan di lahan tidak berhutan, terlantar dan terdegradasi (APL = area penggunaan lain);
5. Pemanfaatan kotoran/urine ternak dan limbah pertanian untuk bio energi dan pupuk organik;



6. Penelitian dan pengembangan teknologi rendah emisi, metodologi MRV (measurable, reportable, verifiable) sektor pertanian;
7. Pengelolaan lahan gambut untuk pertanian berkelanjutan;
8. Rehabilitasi, reklamasi dan revitalisasi lahan gambut terlantar/ terdegradasi pada areal pertanian; dan
9. Penelitian dan pengembangan teknologi serta metodologi MRV pada areal pertanian di lahan gambut.

Semua rencana aksi tersebut merupakan program terintegrasi dalam Renstra 2010-2014 Kementerian Pertanian dan dilaksanakan secara sinergis oleh berbagai sub sektor terkait, serta menjadi komitmen dan program bersama dengan daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) terkait.

Indikator utama, strategi, dan rencana aksi dalam rangka pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan pada periode lima tahun ke depan (2010-2014) seperti tercantum pada Tabel 3.13.

**Tabel 3.13 Indikator Utama, Strategi, dan Rencana Aksi Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan**

INDIKATOR UTAMA	STRATEGI	RENCANA AKSI	DUKUNGAN K/L LAIN
Rata-rata peningkatan produksi per tahun dalam kurun waktu 2010-2014: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Padi 3,56 %</li> <li>● Jagung 10,02 %</li> <li>● Kedelai 20,05 %</li> <li>● Gula 10,48 %</li> <li>● Daging sapi dan kerbau 7,13 %</li> </ul>	7 Gema Revitalisasi, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revitalisasi Lahan,</li> <li>2. Revitalisasi Perbenihan dan Perbibitan,</li> <li>3. Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana,</li> <li>4. Revitalisasi SDM,</li> <li>5. Revitalisasi Pembiayaan Petani,</li> <li>6. Revitalisasi Kelembagaan Petani, dan</li> <li>7. Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir</li> </ol>	A. Peningkatan Produktivitas: <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Penyediaan benih unggul tanaman dan bibit ternak</li> <li>(2) Penyediaan pupuk, benih/bibit, sarana pasca panen bersubsidi secara tepat waktu, tepat jumlah dan terjangkau.</li> <li>(3) Perlindungan tanaman dan ternak dari OPT, penyakit ternak dan bencana alam</li> <li>(4) Pelayanan dan pengawasan sarana produksi tanaman dan ternak.</li> <li>(5) Perakitan paket teknologi dan diseminasi teknologi tepat guna spesifik lokasi serta didukung paket kebijakan pertanian yang kondusif bagi petani/peternak</li> <li>(6) Pelayanan dan proteksi melalui perkarantina tanaman dan hewan/ternak</li> <li>(7) Pelayanan penyuluhan dan pelatihan dalam rangka peningkatan SDM petani dan peternak</li> <li>(8) Peningkatan pelayanan pasca panen dan pengolahan dalam rangka meningkatkan mutu dan standar produk tanaman dan ternak</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Kementerian Koordinator Perekonomian</u>: Penataan mekanisme subsidi</li> <li>2. <u>Kementerian Keuangan</u>: Kebijakan fiskal</li> <li>3. <u>Kementerian PU</u>: Pengawasan Penetapan RUTR; pengembangan jaringan transportasi di sentra produksi; jaringan irigasi primer &amp; sekunder; pembangunan pergudangan di pasar &amp; pelabuhan</li> <li>4. <u>Kementerian Kehutanan</u>: Penyediaan lahan usaha pertanian</li> <li>5. <u>BPN</u>: Pengendalian konversi lahan &amp; sertifikasi lahan pertanian</li> </ol>

INDIKATOR UTAMA	STRATEGI	RENCANA AKSI	DUKUNGAN K/L LAIN
		<p>B. Subsidi: pupuk, benih, kredit/bunga</p> <p>C. Investasi Pemerintah dan Swasta:</p> <p>(1) Penanaman modal dalam negeri di bidang pertanian.</p> <p>(2) Penanaman modal asing di bidang pertanian.</p> <p>D. Harga Produk/Output:</p> <p>(1) Penetapan HPP untuk produk pertanian</p> <p>(2) Pengembangan kemitraan antara swasta dan petani</p> <p>E. Tambahan Lahan Pertanian:</p> <p>(1) Perluasan areal pertanian serta optimalisasi pemanfaatan lahan dan air.</p> <p>(2) Penyelesaian PP dari UU No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian berkelanjutan.</p> <p>F. Antisipasi, mitigasi dan adaptasi menghadapi perubahan iklim dan penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK)</p> <p>G. Rencana lainnya sesuai Kontrak Kinerja Kementerian Pertanian:</p> <p>(1) Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian, pengembangan areal pertanian baru seluas 2 juta hektar, dan penertiban serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar.</p> <p>(2) Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan, pengairan, jaringan listrik, serta teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya.</p> <p>(3) Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil penelitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi.</p> <p>(4) Melakukan langkah-langkah konkrit terkait adaptasi dan antisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim.</p> <p>(5) Mengkaji dan mengusulkan penyempurnaan kebijakan dan peraturan mengenai subsidi pupuk sebelum Juni 2010 dan memastikan efektivitas peraturan yang disempurnakan tersebut sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.</p> <p>(6) Mencapai sasaran-sasaran Renstra Kementerian 2009-2014.</p>	<p>6. <u>Kementerian BUMN</u>: Penyediaan pupuk, revitalisasi dan pembangunan pabrik gula, penyediaan benih unggul</p> <p>7. <u>Kementerian Dalam Negeri</u> Perumusan kebijakan dan pemantauan distribusi dan harga pangan;</p> <p>8. <u>Kementerian Perhubungan</u> Kelancaran arus transportasi</p> <p>9. <u>Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi</u> Pengembangan wilayah transmigrasi</p> <p>10. <u>Badan Meteorologi dan Klimatologi</u> Penyediaan informasi prakiraan perubahan dan anomali iklim serta bencana alam</p> <p>11. <u>Perum BULOG</u> Stabilisasi harga pangan</p> <p>12. <u>Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)</u> Kebijakan dan Penyediaan informasi Investasi bagi penanaman modal usaha pertanian</p> <p>13. <u>Kementerian Lingkungan Hidup</u></p> <p>14. <u>Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Badan Pengkajian &amp; Penerapan Teknologi</u> Pembinaan kapasitas lembaga dan peneliti, melindungi dan memasyarakat hasil penelitian, mengembangkan kerjasama dengan Lembaga peneliti, Perguruan tinggi dan industri.</p>

### 3.1.2 Peningkatan Diversifikasi Pangan

Diversifikasi pangan merupakan salah satu strategi untuk mencapai ketahanan pangan. Salah satu upaya peningkatan diversifikasi pangan adalah percepatan penganeekaragaman konsumsi pangan adalah tercapainya pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman, yang dicerminkan oleh tercapainya skor Pola Pangan Harapan (PPH) sekurang-kurangnya 93,3 pada tahun 2014. Konsumsi umbi-umbian, sayuran, buah-buahan, pangan hewani ditingkatkan dengan mengutamakan produksi lokal, sehingga konsumsi beras diharapkan turun sekitar 1,5 persen per tahun.

Data menunjukkan bahwa rakyat Indonesia mengkonsumsi beras lebih banyak daripada asupan karbohidrat yang dibutuhkan, yakni mencapai 62,2 persen untuk tahun 2007. Menurut rekomendasi pada Widyakarya Pangan dan Gizi VIII tahun 2004 bahwa konsumsi padi-padian untuk mencukupi karbohidrat itu cukup 50 persen saja, dan sisanya umbi-umbian.



Peraturan Presiden Republik Indonesia No.22 tahun 2009 menetapkan Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal. Tujuan utama Peraturan Presiden tersebut adalah meningkatkan permintaan masyarakat terhadap aneka pangan, baik pangan segar, olahan maupun siap saji melalui internalisasi kepada seluruh komponen masyarakat, dengan melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran gizi seimbang sejak usia dini serta pengembangan pemberdayaan ekonomi rumah tangga. Disamping itu, juga perlu diupayakan ketersediaan aneka pangan segar dan olahan melalui pengembangan bisnis dan industri pengolahan aneka pangan sumber karbohidrat non beras dan non terigu, nabati dan hewani, serat, vitamin dan mineral yang menggerakkan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Termasuk di dalam Peraturan Presiden tersebut adalah penguatan dan peningkatan partisipatif Pemerintah Daerah dalam pengembangan dan pelaksanaan program penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal.

Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) VIII tahun 2004 menganjurkan konsumsi energi dan protein penduduk Indonesia masing-masing adalah 2000 kkal/kapita/hari dan 52 gram/kapita/hari. Pada rekomendasi WNPG VII tahun 2000, angka kecukupan energi adalah 2.100 kkal/kapita/hari dan kecukupan protein sebesar 56 gram/kapita/hari.

Penilaian kualitas atau mutu konsumsi pangan seperti ini dilakukan dengan menggunakan skor keanekaragaman pangan yang dikenal dengan skor PPH. Nilai/skor mutu PPH ini dapat memberikan informasi mengenai pencapaian kuantitas dan kualitas konsumsi, yang menggambarkan pencapaian ragam (diversifikasi) konsumsi pangan. Semakin besar skor PPH maka kualitas konsumsi pangan dalam artian jumlah dan konsumsi dinilai semakin baik. Upaya pemulihan ekonomi telah meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang ditunjukkan dengan peningkatan skor PPH dari 79,1 pada tahun 2005 meningkat kembali menjadi 83,1 pada tahun 2007. Laju peningkatan skor PPH yang lebih tinggi mengindikasikan bahwa telah terjadi perubahan dalam pola konsumsi pangan yang mengarah pada pola konsumsi yang semakin beragam dan bergizi seimbang. Sasaran Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 2010-2014 dapat dilihat pada Tabel 3.14.

**Tabel 3.14 Sasaran Persentase Konsumsi Energi Terhadap Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tahun 2010-2014**

Kelompok Pangan	2010	2011	2012	2013	2014
	(%)				
Padi - padian	54,9	53,9	52,9	51,9	51,0
Umbi - umbian	5,0	5,2	5,4	5,6	5,8
Pangan Hewani	9,6	10,1	10,6	11,1	11,5
Minyak dan Lemak	10,1	10,1	10,1	10,0	10,0
Buah / Biji Berminyak	2,8	2,9	2,9	2,9	3,0
Kacang - kacangan	4,3	4,4	4,6	4,7	4,9
Gula	4,9	4,9	5,0	5,0	5,0
Sayur dan Buah	5,2	5,4	5,5	5,7	5,8
Lain – lain	2,9	2,9	2,9	2,9	3,0
Persentase Total konsumsi energi terhadap Angka Kecukupan Gizi (AKG)	99,75	99,80	99,85	99,90	99,95
<b>SKOR PPH</b>	<b>86,4</b>	<b>88,1</b>	<b>89,8</b>	<b>91,5</b>	<b>93,3</b>

*Keterangan:*

*Proyeksi menggunakan data dasar Susenas 2002, BPS; dengan asumsi tidak ada perubahan pola konsumsi pangan masyarakat*

Salah satu upaya untuk mencapai pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman yang dicerminkan dengan skor PPH adalah melalui peningkatan keanekaragaman konsumsi pangan dengan cara menurunkan konsumsi padi-padian (khususnya beras dan terigu), serta peningkatan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, serta sayur dan buah. Dengan demikian konsumsi pangan masyarakat Indonesia dapat mencapai skor PPH yang dianjurkan sebesar 93.3 pada tahun 2014.

Konsumsi komoditas pangan utama yang menghasilkan karbohidrat diharapkan menurun setiap tahunnya dan meningkatkan konsumsi penghasil protein baik nabati maupun hewani. Sasaran konsumsi komoditas pangan utama lima tahun ke depan (2010-2014) dapat dilihat pada Tabel 3.15.



**Tabel 3.15 Sasaran Konsumsi Pangan Utama Tahun 2010-2014**

Komoditas		2010	2011	2012	2013	2014
		(kg/kapita/tahun)				
1	Beras	101,1	99,6	98,1	96,6	95,0
2	Jagung	3,0	2,8	2,7	2,6	2,5
3	Terigu	7,4	7,1	6,8	6,4	6,1
4	Umbi-umbian <sup>1)</sup>	25,4	26,3	27,3	28,3	29,3
5	Daging <sup>2)</sup>	6,6	6,9	7,1	7,3	7,7
6	Telur	5,7	5,9	6,0	6,2	6,3
7	Susu	12,0	12,7	13,4	14,1	14,9
8	Kedelai	9,8	10,1	10,2	10,2	10,2
9	Gula Pasir	9,4	9,5	9,5	9,5	9,6
10	Sayuran <sup>3)</sup>	53,0	54,3	55,6	57,0	58,0
11	Buah <sup>3)</sup>	29,3	30,2	31,1	32,0	33,2

Keterangan :

- 1) Umbi-umbian terdiri dari singkong, ubi jalar, kentang dan sagu
- 2) Daging terdiri dari daging ruminansia dan daging unggas
- 3) Sayur dan buah dihitung berdasarkan realisasi konsumsi tahun 2002-2009

Secara rinci sasaran konsumsi kelompok pangan dan komoditas pangan per kapita per tahun secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 47.



Adapun indikator utama, strategi, dan rencana aksi dalam rangka diversifikasi pangan untuk periode lima tahun ke depan (2010-2014) dapat dilihat pada Tabel 3.16.

**Tabel 3.16 Indikator Utama, Strategi, dan Rencana Aksi Peningkatan Diversifikasi Pangan**

INDIKATOR UTAMA	STRATEGI	RENCANA AKSI	DUKUNGAN K/L LAIN
<ul style="list-style-type: none"> <li>Menurunnya konsumsi beras per kapita per tahun sebesar 1,5 % diimbangi dengan kenaikan konsumsi sumber protein hewani dan nabati</li> <li>Menu makan sehari-hari makin beragam, bergizi seimbang dan aman,</li> <li>Meningkatnya peran swasta dan pemerintah dalam memanfaatkan keragaman sumberdaya lokal</li> <li>Tersedianya aneka ragam makanan berbasis sumberdaya lokal dan meningkatnya citra pangan lokal</li> <li>Berkembangnya teknologi kuliner dan bisnis bidang makanan berskala mikro, kecil dan menengah berdasarkan kearifan dan budaya lokal</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir</li> <li>Revitalisasi Sumber Daya Manusia</li> <li>Revitalisasi Kelembagaan Petani</li> <li>Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana</li> <li>Revitalisasi Pembiayaan Petani</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) serta Promosi                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan melalui promosi, pendidikan dan penyuluhan di 10.000 desa dan 350 kabupaten</li> <li>Penanganan Keamanan Pangan Segar tingkat produsen dan konsumen di 350 kabupaten</li> </ol> </li> <li>Peningkatan investasi agroindustri pangan berbasis pangan lokal                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan bisnis pangan lokal bagi UKM</li> <li>Pengembangan kemitraan dengan dunia usaha</li> <li>Pengembangan gerai atau outlet pangan lokal</li> </ol> </li> <li>Pengembangan teknologi pengolahan pangan lokal</li> <li>Memastikan peningkatan keanekaragaman pangan sesuai karakteristik daerah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li><u>Kementerian Koordinator Kesra</u> Koordinasi penurunan penduduk miskin</li> <li><u>Bappenas</u> Koordinasi kebijakan ketahanan pangan nasional dan wilayah (Dewan Ketahanan Pangan).</li> <li><u>Kementerian Kesehatan</u> Penerapan estandar keamanan mutu pangan pada industri rumah tangga dan UMKM berbasis sumber daya lokal</li> <li><u>Kementerian Dalam Negeri:</u> Koordinasi pemerintah daerah untuk mendukung Diversifikasi Pangan</li> <li><u>Kementerian Pendidikan Nasional</u> Pendidikan pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman secara sistematis melalui pendidikan formal dan non-formal</li> <li><u>Kementerian Perindustrian:</u> Pengembangan bisnis pangan lokal, fasilitasi UMKM</li> <li><u>BPOM:</u> Penerapan standard mutu dan keamanan pangan industri UMKM</li> <li><u>Biro Pusat Statistik</u> Kerjasama penyusunan peta ketahanan pangan dan kerentanan pangan (FSVA); penyusunan neraca ketersediaan dan kebutuhan pangan (NBM, PPH).</li> <li><u>Pemerintah Daerah</u> Pengawasan penetapan peraturan daerah Perumusan kebijakan dan pemantauan distribusi dan harga pangan.</li> </ol>

### 3.1.3 Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor

Dari perspektif komoditas atau produk, nilai tambah dapat diartikan sebagai nilai yang diberikan (*attributed*) kepada produk sebagai hasil dari proses tertentu (proses produksi, penyimpanan, pengangkutan). Oleh karena itu, nilai yang terbentuk tergantung pada banyaknya tahapan pengolahan yang dilakukan. Secara teoritis, semakin ke hilir penerapan proses akan semakin besar nilai tambah yang dibentuk.

Daya saing bersifat dinamis dan akan mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu bergantung pada tingkat kompetisi, perubahan perilaku permintaan, dan kemampuan dasar industri. Daya saing produk dicapai melalui konversi keunggulan komparatif menjadi keunggulan kompetitif dengan penerapan teknologi, pengelolaan dan pengembangan pasar dari produk tersebut terhadap jenis produk yang sama. Banyak faktor mempengaruhi daya saing produk (keunggulan sumberdaya, Sumber Daya Manusia, teknologi, karakteristik produk, infrastruktur).

Peningkatan nilai tambah akan difokuskan pada peningkatan kualitas dan jumlah olahan produk pertanian untuk mendukung peningkatan daya saing dan ekspor. Peningkatan kualitas produk pertanian (segar dan olahan) diukur dari peningkatan jumlah produk pertanian yang mendapatkan sertifikasi jaminan mutu (SNI, Organik, *Good Agricultural Practices*, *Good Handling Practices*, *Good Manufacturing Practices*). Pada akhir 2014 semua produk pertanian organik, kakao fermentasi, dan bahan olah karet (bokar) sudah harus tersertifikasi dengan pemberlakuan sertifikasi wajib. Peningkatan jumlah olahan diukur dari rasio produk segar olahan. Saat ini, sekitar 80 persen produk pertanian diperdagangkan dalam bentuk bahan mentah, sedangkan 20 persen dalam bentuk olahan sehingga nilai tambahnya sangat kecil. Pada akhir 2014 ditargetkan bahwa 50 persen produk pertanian diperdagangkan dalam bentuk olahan.

Peningkatan daya saing akan difokuskan pada pengembangan produk berbasis sumberdaya lokal yang (1) bisa meningkatkan pemenuhan permintaan untuk konsumsi dalam negeri; dan (2) bisa mengurangi ketergantungan impor (substitusi impor). *Indikatornya adalah besarnya pangsa pasar (market share) di pasar dalam negeri dan penurunan net impor.*

Produk berbasis sumberdaya lokal yang dijadikan prioritas adalah susu yang selama ini impornya mencapai 73 persen untuk memenuhi kebutuhan domestik. Pada tahun 2014, diupayakan 50 persen kebutuhan susu segar dipasok dari produksi dalam negeri. Untuk mengurangi besarnya impor gandum/terigu yang mencapai 6,7 juta ton per tahun akan dikembangkan tepung-tepungan berbasis sumberdaya lokal, yang ditargetkan pada akhir 2014 sudah bisa mensubstitusi 20 persen impor gandum/terigu impor. Untuk kakao, ditargetkan pada akhir 2014 semua kebutuhan sarana pengolahan kakao fermentasi bermutu untuk industri coklat dalam negeri bisa dipenuhi dari produksi dalam negeri dan 50 persen produk kakao dalam bentuk bentuk fermentasi bermutu sesuai SNI.

Peningkatan ekspor akan difokuskan pada pengembangan produk yang punya daya saing di pasar internasional, baik segar maupun olahan, yang kebutuhan di pasar dalam negeri sudah tercukupi, seperti sawit, karet, kakao dan daging ayam serta komoditas dalam kelompok *emerging product* yang meliputi buah tropika (mangga, manggis, pisang), produk biofarmaka, tanaman hias anggrek dan non anggrek serta minyak atsiri. Sedangkan jeruk, susu (bersama tepung tepungan) ditujukan untuk substitusi impor. *Indikatornya adalah pertumbuhan volume ekspor.*

Untuk mendukung terhadap peningkatan ekspor dan mengurangi laju impor maka perlu penguatan sistem perkarantina dengan menyempurnakan sistem dan prosedur operasional, standar, teknik, metode, serta peningkatan kemampuan identifikasi resiko terhadap ancaman kelestarian sumber daya pertanian dan perekonomian nasional.

Indikator utama, strategi, dan rencana aksi dalam rangka peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor produk pertanian pada periode lima tahun ke depan (2010-2014) dapat dilihat pada Tabel 3.17.



**Tabel 3.17 Indikator Utama, Strategi, dan Rencana Aksi Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor Produk Pertanian**

INDIKATOR UTAMA	STRATEGI	RENCANA AKSI	DUKUNGAN K/L LAIN
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100% produk pertanian strategis berorientasi ekspor (segar dan olahan) mendapatkan sertifikasi.</li> <li>• Rasio produk dengan nilai tambah meningkat dari 80:20 ke 50:50.</li> <li>• Substitusi impor: 20% tepung, 25% susu, 100% SNI <i>cocoa bean</i> pada 2014.</li> <li>• Peningkatan net ekspor rata-rata 15% per tahun</li> <li>• Jumlah dan skala industri hilir pertanian tumbuh 6% setiap tahunnya</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir</li> <li>2. Revitalisasi Sumber Daya Manusia</li> <li>3. Revitalisasi Kelembagaan Petani</li> <li>4. Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana</li> <li>5. Revitalisasi Pembiayaan Petani</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revisi PP 17 tahun 1986 tentang kewenangan pembinaan agroindustri.</li> <li>2. Pengembangan industri hilir: beras, tepung local (<i>modified cassava flour</i>- MOCAF, sagu, ganyong), jagung, kedelai, buah-buahan; biofarmaka, sawit, kakao, karet, kopi, tebu, susu, mete, pakan ternak skala kecil; pengolahan produk pangan fermentasi dan non fermentasi, derivasi produk.</li> <li>3. Pengembangan alsintan, RMU, <i>grading &amp; packaging house</i>, manajemen pergudangan &amp; <i>cool chain</i>, revitalisasi silo.</li> <li>4. Sosialisasi penerapan SNI wajib, RSPQ, penerapan sistem jaminan mutu (GAP, GHP, GMP), <i>precision farming</i> dan sertifikasi (GI) produk komoditi strategis.</li> <li>5. Menyusun usulan penyesuaian kebijakan fiskal, investasi, pembiayaan &amp; insentif untuk mendorong pengembangan agroindustri olahan dalam negeri dan ekspor, stabilisasi harga, tarif bea keluar, registrasi impor, importasi susu, SPS, revitalisasi pabrik</li> <li>6. Pengembangan pasar &amp; SI pasar: intensifikasi promosi, diplomasi, negosiasi, <i>market intelligence</i>, misi dagang, kerjasama kedutaan/ATPC, advokasi <i>negative campagne</i>, kemitraan pola cluster dan kerjasama pemasaran; penataan rantai pasokan, efisiensi transportasi, sistem tunda jual,</li> <li>7. Penguatan kajian survey data industri hilir pertanian</li> <li>8. Pengembangan metodologi, teknologi multi guna &amp; tepat guna: produksi, panen, pasca panen produk segar &amp; olahan</li> <li>9. Pengembangan kelembagaan usaha tani dan pemasaran penyangga harga</li> <li>10. Pengembangan SDM petani dan pembina teknis (SL-PPHP)</li> <li>11. Penguatan sistem pemenuhan persyaratan teknis perdagangan internasional produk-produk pertanian.</li> <li>12. Penguatan sistem perkarantinaaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Kementerian Perindustrian</u>: Pengembangan kompetensi inti industri nasional dan daerah yang mendukung produksi primer dan olahan komoditas pertanian</li> <li>2. <u>Kementerian Keuangan</u> Kebijakan Fiskal dan moneter</li> <li>3. <u>Kementerian Perdagangan</u>: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penataan kerja sama pemasaran internasional dan dalam negeri, pengaturan pajak dan prosedur ekspor dan impor</li> <li>• Kerjasama promosi, diplomasi, negosiasi, market intelligence</li> </ul> </li> <li>4. <u>Kementerian BUMN</u>: Pengembangan investasi agroindustri, revitalisasi pabrik</li> <li>5. <u>BKPM</u> : Penyediaan informasi investasi komoditas unggulan; pengembangan komoditas unggulan nasional; insentif investasi primer &amp; olahan produk Pertanian</li> <li>7. <u>Kementerian Negara dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM)</u> Penataan dan kelembagaan usaha tani menjadi koperasi, usaha pengolahan, perdagangan, aneka jasa dan permodalan usaha</li> <li>8. <u>Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral</u> Kebijakan pengembangan penyediaan bahan baku energi alternatif berbasis komoditas dan limbah pertanian</li> </ol>

INDIKATOR UTAMA	STRATEGI	RENCANA AKSI	DUKUNGAN K/L LAIN
		<p>13. Investasi Pemerintah dan Swasta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Penanaman modal dalam negeri di bidang pertanian.</li> <li>(2) Penanaman modal asing di bidang pertanian.</li> </ul> <p>Rencana Aksi Lainnya sesuai Kontrak Kinerja Kementerian Pertanian:</p> <p>14. Memastikan peningkatan investasi di bidang pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah, penyediaan pembiayaan yang terjangkau, serta sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan terjangkau.</p> <p>15. Memastikan dukungan atas program pengembangan energi terbarukan antara lain bio-energi melalui penyediaan bahan baku.</p> <p>16. Mengkaji ulang dan mengusulkan perbaikan kebijakan peraturan dan proses pelaksanaan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan umum yang diberikan kementeriannya secara tuntas sebelum Juni 2010 serta memastikan efektivitas implementasi perbaikan peraturan tersebut sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk Presiden untuk memimpin reformasi pelayanan umum.</p> <p>17. Mengkaji dan mengusulkan perbaikan peraturan-peraturan yang menghambat atau berpotensi menghambat investasi sebelum Juni 2010 dan memastikan efektivitas perbaikan peraturan tersebut sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan.</p>	

Adapun rancangan pengembangan industri hilir yang berbasis komoditas, khususnya beras, tepung local (*modified cassava flour*-MOCAF, sagu, ganyong), jagung, kedelai, buah-buahan tropis; biofarmaka, sawit, kakao, karet, kopi, tebu, dan susu berikut rencana aksi dan lokasinya secara lebih lengkap dapat dilihat pada Lampiran 48.

### 3.1.4 Peningkatan Kesejahteraan Petani

Unsur penting yang berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan petani adalah tingkat pendapatan petani. Walaupun demikian tidak selalu upaya peningkatan pendapatan petani secara otomatis diikuti dengan peningkatan kesejahteraan petani, karena kesejahteraan petani juga tergantung pada nilai pengeluaran yang harus dibelanjakan keluarga petani serta faktor-faktor non-finansial seperti faktor sosial budaya. Walaupun demikian, sisi pendapatan petani merupakan sisi yang terkait secara langsung dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Pertanian. Oleh karena itu, dalam kerangka peningkatan kesejahteraan petani, prioritas utama Kementerian Pertanian adalah upaya meningkatkan pendapatan petani.

Saat ini rata-rata pendapatan per kapita pertanian hanya sekitar Rp 4,69 juta per tahun. Pada tahun 2014 Kementerian Pertanian menargetkan pendapatan petani per kapita tersebut dapat meningkat menjadi Rp 7.93 juta per tahun. Hal ini berarti harus diupayakan kenaikan pendapatan petani per kapita 11,1 persen setiap tahunnya.

Sebagai gambaran umum, pendapatan petani dapat pula dilihat dari PDB Pertanian per rumah tangga petani. PDB Pertanian dalam arti sempit (di luar perikanan dan kehutanan) tahun 2008 adalah Rp 21,6 juta/rumah tangga/tahun. Untuk tahun 2009 (s/d triwulan III), PDB Pertanian (di luar perikanan dan kehutanan) adalah Rp 19,8 juta/rumah tangga ( *belum lengkap 1 tahun*). Data RTP (Rumah Tangga Pertanian) yang digunakan adalah data hasil sensus pertanian 2003. Sementara itu, PDB total per rumah tangga nasional tahun 2008 sebesar Rp 93,6 juta/rumah tangga dan tahun 2009 s/d triwulan III sebesar Rp 78,1 juta/rumah tangga. Hal ini mencerminkan betapa kecilnya pendapatan rumah tangga sektor pertanian dibandingkan sektor non-pertanian.



Nilai pendapatan petani dapat bersumber dari usaha pertanian dan usaha non-pertanian. Nilai pendapatan yang bersumber dari usaha pertanian akan diperoleh dari selisih nilai penjualan komoditas usahatani yang dihasilkan dengan biaya usahatani yang dikeluarkan. Nilai penjualan hasil usahatani akan ditentukan oleh volume produksi yang dihasilkan serta harga jual. Makin besar volume produksi yang dihasilkan makin besar pula volume fisik yang dapat dijual. Sementara itu, walaupun komoditas pertanian berhasil ditingkatkan produksinya, hal tersebut hanya akan secara nyata meningkatkan nilai penjualan manakala harga jual juga meningkat atau paling tidak konstan. Oleh karena itu, hal fundamental yang perlu diupayakan dalam rangka peningkatan nilai jual ini adalah mempertahankan agar harga jual tidak mengalami penurunan.

Agar harga jual tidak mengalami penurunan, maka Kementerian Pertanian menyusun sejumlah rencana aksi guna menjamin peningkatan pendapatan petani. Rencana aksi dimaksud antara lain:

1. Tetap dilanjutkannya subsidi, baik subsidi pupuk, benih/bibit dan kredit/bunga
2. Meningkatkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), khususnya komoditas padi, agar petani mendapat jaminan kepastian harga jual padi yang mereka hasilkan.
3. Melanjutkan upaya intervensi stabilisasi harga melalui pembelian dari BULOG khususnya untuk komoditi beras pada saat panen,
4. Melanjutkan dan menerapkan secara intensif sistem pembelian dengan resi gudang,
5. Mengembangkan kelembagaan sistem tunda jual yang memungkinkan petani mendapatkan harga jual produk pertanian yang wajar.
6. Mendorong Pemerintah Daerah untuk menciptakan *captive market* bagi produk pertanian melalui sistem kontrak yang tidak merugikan petani.
7. Melakukan proteksi terhadap serbuan impor hasil-hasil pertanian, baik melalui instrumen tarif dan non tarif. Hal ini sangat dibutuhkan untuk melindungi kejatuhan harga pertanian akibat perdagangan internasional yang tidak adil (*unfair market*).



8. Mengembangkan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan lumbung pangan yang bisa menjadi alat pelindung bagi petani dari kejatuhan harga akibat tidak memiliki gudang penyimpanan, serta untukantisipasi masa paceklik dan bencana alam.

Upaya mengatasi kejatuhan harga jual baru merupakan satu sisi yang dapat dilakukan Kementerian Pertanian untuk mengupayakan peningkatan pendapatan petani. Upaya dari sisi lain adalah menekan biaya produksi pertanian agar margin keuntungan petani dapat meningkat. Rencana aksi yang akan ditempuh Kementerian Pertanian untuk menekan biaya produksi pertanian (selain upaya peningkatan produktivitas pertanian) adalah:

1. Pemberian subsidi input, khususnya pupuk dan benih/bibit.
2. Melakukan upaya koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memungkinkan diberikannya keringanan pajak terhadap barang-barang modal atau sarana yang digunakan untuk berusaha.
3. Mengupayakan pemberian skim subsidi bunga kredit dan penjaminan untuk investasi dan modal kerja usahatani.
4. Memberikan bantuan sosial terhadap petani yang mengalami bencana alam atau gangguan produksi lainnya agar biaya usahatani yang mereka keluarkan tidak menjadi terlalu besar.

Selain berbagai upaya yang berhubungan secara langsung dengan nilai input dan output pertanian, pendapatan petani juga masih memungkinkan untuk ditingkatkan melalui:

1. Pengembangan infrastruktur oleh Pemerintah yang dilakukan secara padat karya dengan melibatkan petani yang menjadi sasaran kegiatan.
2. Mengembangkan berbagai aktivitas off-farm yang mampu membangkitkan penghasilan bagi petani dengan basis kegiatan yang terkait usahatani, seperti wisata agro, industri rumah tangga berbahan baku hasil pertanian dan industri rumah tangga yang dapat menghasilkan peralatan pertanian sederhana.
3. Mengupayakan insentif bagi tumbuhnya industri hulu dan hilir pertanian.
4. Mengupayakan adanya payung hukum bagi bertumbuhnya Lembaga Pembiayaan Pertanian yang tersedia di perdesaan.

Indikator utama, strategi, dan rencana aksi dalam rangka peningkatan kesejahteraan petani pada periode lima tahun ke depan (2010-2014) dapat dilihat pada Tabel 3.18.

**Tabel 3.18 Indikator Utama, Strategi, dan Rencana Aksi Peningkatan Kesejahteraan Petani**

INDIKATOR UTAMA	STRATEGI	RENCANA AKSI	DUKUNGAN K/L LAIN
<p><input type="checkbox"/> Pendapatan per kapita pertanian tahun 2014 sebesar Rp 7,93 juta per tahun<sup>1)</sup></p> <p><input type="checkbox"/> Rata-rata laju peningkatan pendapatan per kapita 11,10 persen</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Revitalisasi SDM</li> <li>2. Revitalisasi Pembiayaan Petani</li> <li>3. Revitalisasi Kelembagaan Petani</li> <li>4. Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir.</li> <li>5. Revitalisasi Perbenihan dan Perbibitan</li> <li>6. Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana</li> <li>7. Revitalisasi Lahan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), khususnya komoditas padi, agar petani mendapat jaminan kepastian harga jual padi yang mereka hasilkan.</li> <li>2. Mengembangkan kelembagaan sistem tunda jual yang memungkinkan petani mendapatkan harga jual produk pertanian yang wajar.</li> <li>3. Melakukan proteksi terhadap serbuan impor hasil-hasil pertanian, baik melalui instrumen tarif dan non tarif. Hal ini sangat dibutuhkan untuk melindungi kejatuhan harga pertanian akibat perdagangan internasional yang tidak adil (<i>unfair market</i>).</li> <li>4. Mendorong Pemerintah Daerah untuk menciptakan <i>captive market</i> bagi produk pertanian melalui sistem kontrak yang tidak merugikan petani.</li> <li>5. Pengembangan Desa Mandiri Pangan untuk memberdayakan ketahanan pangan masyarakat di daerah miskin dan rawan pangan</li> <li>6. Mengembangkan kelembagaan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dan lumbung pangan yang bisa menjadi alat pelindung bagi petani dari kejatuhan harga akibat tidak memiliki gudang penyimpanan, serta untukantisipasi masa paceklik dan bencana alam.</li> <li>7. Memberdayakan pekarangan/ kebun sebagai lumbung hidup bagi keluarga petani.</li> <li>8. Pemberian subsidi input, khususnya pupuk dan benih/bibit.</li> <li>9. Melakukan upaya yang memungkinkan diberikannya keringanan pajak terhadap barang-barang modal atau sarana yang digunakan untuk berusaha.</li> <li>10. Mengupayakan pemberiakan subsidi bunga kredit untuk investasi dan modal kerja usahatani.</li> <li>11. Memberikan bantuan sosial terhadap petani yang mengalami bencana alam atau gangguan produksi lainnya</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>Kementerian Koordinator Perekonomian</u>: Penataan mekanisme subsidi, penjaminan, perpajakan, investasi, alokasi dan dana perimbangan khusus pertanian</li> <li>2. <u>Kementerian Keuangan</u> Kebijakan makro yaitu fiskal dan moneter</li> <li>3. <u>BULOG</u>: Stabilisasi harga pangan; pemberdayaan kelompok tani dalam pemasaran produk pertanian.</li> <li>4. <u>Kementerian Perdagangan</u>: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penataan kerja sama pemasaran internasional dan dalam negeri, pengaturan pajak dan prosedur ekspor dan impor, perlindungan harga produk lokal</li> <li>• Kerjasama promosi, diplomasi, negosiasi, market intelligence</li> </ul> </li> <li>5. Kementerian Perikanan dan Kelautan Pelestarian sumber daya air di darat (danau&amp; situ), pengembangan integrasi budidaya perikanan tumpang sari (usaha mina)</li> <li>6. <u>Kementerian Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)</u> Penataan dan kelembagaan usaha tani menjadi koperasi, usaha pengolahan, perdagangan, aneka jasa dan permodalan usaha</li> </ol>

INDIKATOR UTAMA	STRATEGI	RENCANA AKSI	DUKUNGAN K/L LAIN
		12. Pengembangan infrastruktur oleh Pemerintah yang dilakukan secara padat karya. 13. Mengembangkan berbagai aktivitas <i>off-farm</i> yang mampu membangkitkan penghasilan bagi petani dengan basis kegiatan yang terkait usahatani. <b>Rencana Aksi Lainnya sesuai Kontrak Kinerja Kementerian Pertanian:</b> 14. Memastikan konsolidasi kebijakan penanganan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum secara menyeluruh di bawah satu atap dan pengelolaan tataruang secara terpadu. 15. Memastikan konsolidasi struktural dan peningkatan kapasitas kementerian/lembaga terkait pemanfaatan tanah dan penataan ruang bagi kepentingan rakyat banyak selambat-lambatnya 2011.	

Keterangan: \*) perhitungan berdasar PDB per kapita sektor pertanian luas.

Untuk mencapai 4 (empat) target utama seperti diuraikan di atas yaitu: 1) Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan, 2) Peningkatan Diversifikasi Pangan, 3) Peningkatan Nilai Tambah, daya Saing dan Ekspor, dan 4) Peningkatan Kesejahteraan Petani, maka diperlukan peran dan dukungan penelitian dan pengembangan. Kegiatan penelitian dan pengembangan pertanian yang akan dikembangkan untuk mendukung pencapaian 4 (empat) target tersebut selama 5 (lima) tahun ke depan (2010-2014) secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran 49.

## 3.2 Sasaran Makro

Sasaran makro pembangunan pertanian selama tahun 2010-2014 mencakup pertumbuhan PDB Pertanian, Neraca Perdagangan, Investasi, Tenaga Kerja, dan Nilai Tukar Petani.

### 3.2.1 Produk Domestik Bruto (PDB)

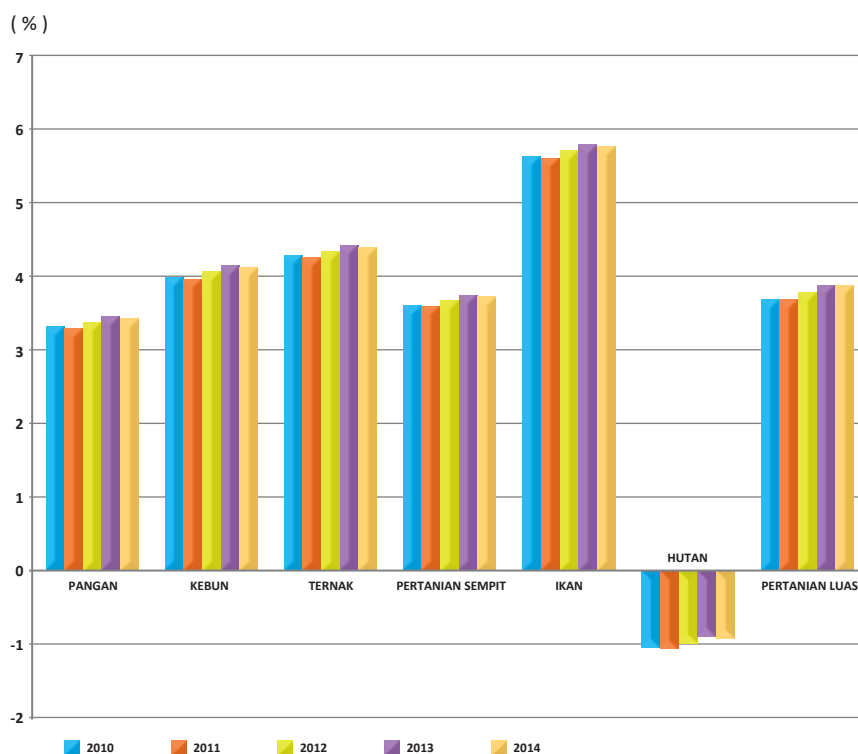
Selama periode 2010-2014, pertumbuhan PDB sektor pertanian dalam arti luas setiap tahunnya diharapkan tumbuh dengan kisaran 3,70-3,90 persen. Sementara itu, PDB pertanian dalam arti sempit (di luar perikanan dan kehutanan) diproyeksikan tumbuh dalam kisaran 3,62-3,75 (Tabel 3.19).

**Tabel 3.19 Sasaran Pertumbuhan PDB Sektor dan Sub Sektor Pertanian, 2010-2014**

TAHUN	PANGAN	KEBUN	TERNAK	PERTANIAN SEMPIT	IKAN	HUTAN	PERTANIAN LUAS
	(%)						
2010	3,33	4,01	4.31	3,62	5,66	-1,05	3,70
2011	3,31	3,99	4.34	3,61	5,64	-1,07	3,70
2012	3,39	4,08	4.37	3,69	5,73	-0,99	3,80
2013	3,47	4,16	4.41	3,77	5,81	-0,91	3,90
2014	3,45	4,14	4.53	3,75	5,79	-0,93	3,90

**Grafik 3.1**

**Sasaran Pertumbuhan PDB Sektor dan Sub Sektor Pertanian, 2010 - 2014**



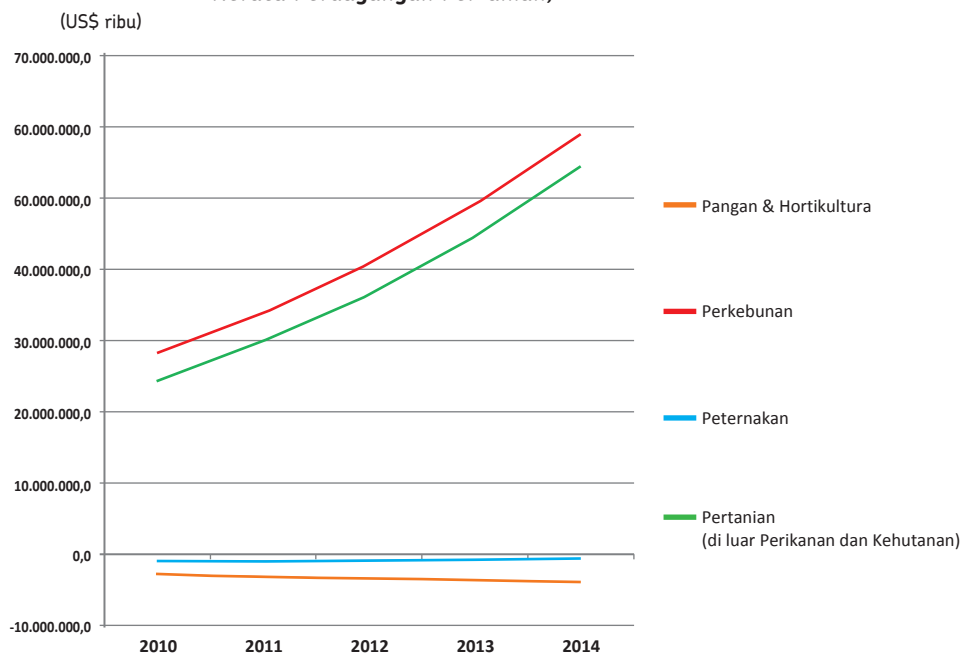
### 3.2.2 Neraca Perdagangan

Neraca perdagangan pertanian diupayakan terus surplus, dimana kontribusi terbesar masih diharapkan dari subsektor perkebunan. Walaupun untuk pangan, hortikultura dan peternakan masih defisit, namun sasaran neraca perdagangan pertanian (di luar perikanan dan kehutanan) selama tahun 2010-2014 menunjukkan tren surplus yang terus meningkat mulai dari US\$ 24,3 milyar di tahun 2010 menjadi US\$ 54,5 milyar di tahun 2014 sebagaimana terlihat pada Tabel 3.20.

**Tabel 3.20 Neraca Perdagangan Pertanian, 2010-2014**

Tahun	Pangan & Hortikultura	Perkebun	Peternakan	Pertanian (di luar Perikanan dan Kehutanan)
	(US\$ ribu)			
2010	-2.917.534,1	28.222.465,6	-972.452,2	24.332.495,3
2011	-3.142.956,6	33.964.947,5	-942.907,5	29.879.083,3
2012	-3.373.603,8	40.773.156,0	-883.209,9	36.516.342,4
2013	-3.613.727,9	49.100.846,7	-782.220,8	44.704.898,1
2014	-3.852.651,4	58.996.502,4	-630.125,6	54.513.725,4

**Grafik 3.2**  
**Neraca Perdagangan Pertanian, 2010 - 2014**



### 3.2.3 Investasi Pertanian

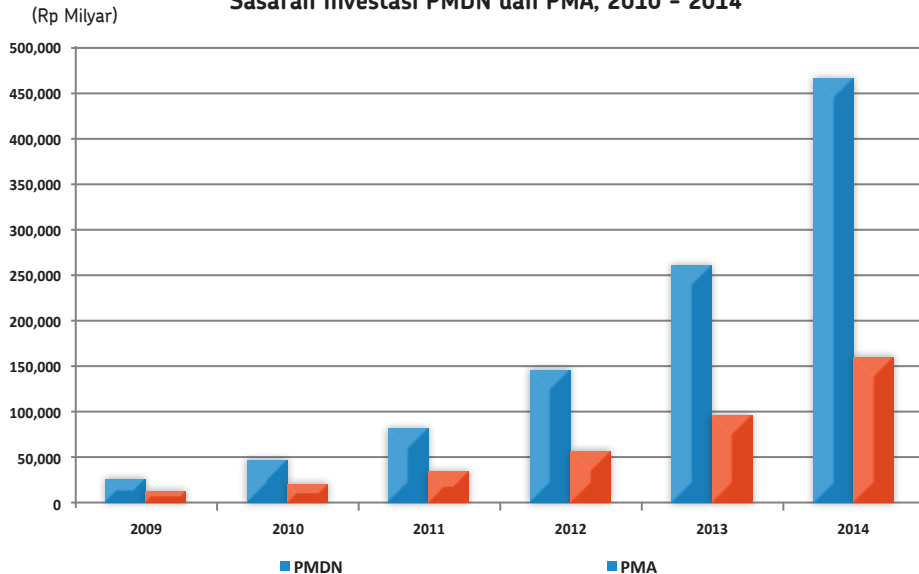
Investasi pertanian yang dimaksud dalam hal ini adalah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Proyeksi sasaran investasi pertanian PMDN dan PMA selama lima tahun ke depan (2010-2014) adalah: untuk PMDN sebesar Rp. 45,9 Trilyun pada tahun 2010 dan Rp. 464,9 Trilyun pada tahun 2014, sementara untuk PMA sebesar Rp. 20,3 Trilyun pada tahun 2010 dan Rp 159,6 Trilyun pada tahun 2014 (Tabel 3.21).

**Tabel 3.21 Sasaran Investasi PMDN dan PMA , 2010-2014**

TAHUN	PMDN		PMA	
	(Rp milyar)	Laju (%)	(Rp milyar)	Laju (%)
2010	45.978	76,7	20.344	70,2
2011	81.118	76,4	33.683	70,0
2012	144.424	78,0	56.281	71,5
2013	259.460	79,7	94.901	73,1
2014	464.905	79,2	159.594	72,6

Keterangan: US\$ 1 = Rp. 9.315 (28 Januari 2010).

**Grafik 3.3 Sasaran Investasi PMDN dan PMA, 2010 - 2014**



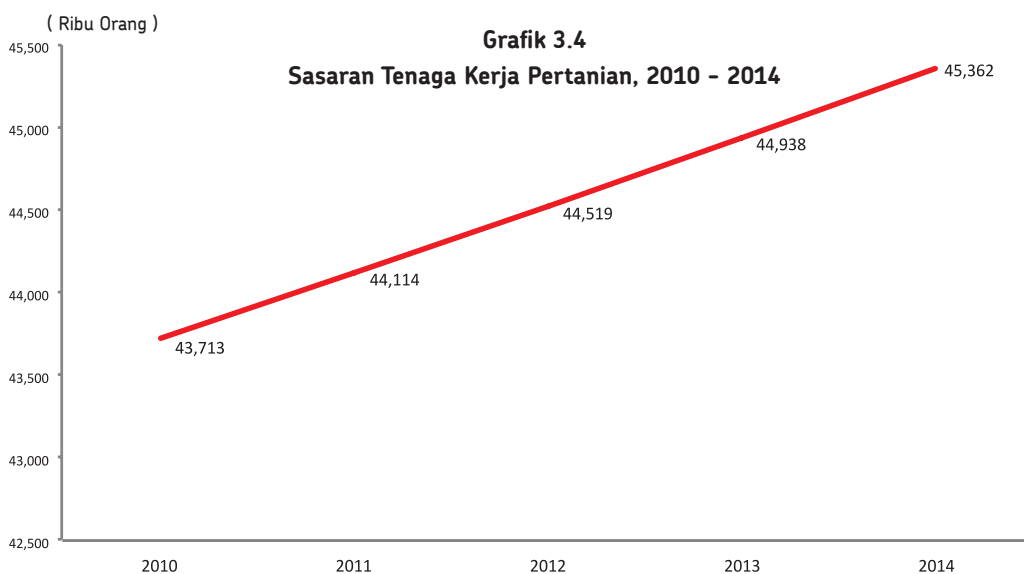
Keterangan: US\$ 1 = Rp. 9.315 (28 Januari 2010).

### 3.2.4 Tenaga Kerja

Sektor Pertanian masih menjadi tumpuan penyerapan tenaga kerja. Untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian, seyogyanya sektor pertanian tidak menanggung angkatan kerja yang besar. Berdasarkan catatan statistik tenaga kerja periode sebelumnya, diperkirakan masih akan banyak angkatan kerja nasional yang bekerja di sektor pertanian. Selama lima tahun ke depan (2010-2014), proyeksi sasaran penyerapan tenaga kerja pertanian tumbuh dalam kisaran 0,89-0,94 % setiap tahunnya (Tabel 3.22).

**Tabel 3.22 Sasaran Tenaga Kerja Pertanian (Ribuan Orang), 2010-2014**

Tahun	Pertanian* (ribu orang)	Pertumbuhan (%)
2010	43.713	0,89
2011	44.114	0,92
2012	44.519	0,92
2013	44.938	0,94
2014	45.362	0,94



### 3.2.5 Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) menggambarkan perbandingan antara indeks penerimaan dan indeks pengeluaran petani. Untuk periode tahun 2010-2014, sasaran angka NTP berkisar antar 115-120, yang berarti bahwa penerimaan petani diharapkan semakin lebih besar dari pengeluaran.





# BAB IV

# ARAH KEBIJAKAN

# DAN STRATEGI



## IV. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### 4.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-1 (2005-2009), RPJM ke-2 (2010-2014) ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk pengembangan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.

Sasaran utama pembangunan nasional RPJMN 2010-2014 mencakup: 1) kesejahteraan rakyat, 2) perkuatan pembangunan demokrasi, dan 3) penegakan hukum. Lebih lanjut, sasaran pembangunan kesejahteraan rakyat meliputi: (1) ekonomi, (2) pendidikan, (3) kesehatan, (4) pangan, (5) energi, dan (6) infrastruktur.

Sasaran pembangunan ekonomi pada RPJMN ke-2 ini adalah: (1) pertumbuhan ekonomi rata-rata 6,3 – 6,8 persen per tahun, dan sebelum tahun 2014 tumbuh 7 persen, (2) inflasi rata-rata 4 – 6 persen, (3) tingkat pengangguran (terbuka) 5 – 6 persen pada akhir tahun 2014, dan (4) tingkat kemiskinan 8 – 10 persen pada akhir tahun 2014.

Selanjutnya, sasaran pembangunan pangan adalah pertumbuhan komoditas pangan utama: (1) produksi padi 3,22 persen per tahun, (2) produksi jagung 10,02 persen per tahun, (3) kedelai 20,05 persen per tahun, (4) gula 12,55 persen per tahun, dan (5) daging sapi 7,40 persen per tahun.

#### 4.1.1 Arah Kebijakan Umum

Mengacu pada permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia baik dewasa ini maupun dalam lima tahun mendatang, maka arah kebijakan umum pembangunan nasional 2010-2014 adalah sebagai berikut:

1. Melanjutkan pembangunan mencapai Indonesia yang sejahtera. Indonesia yang sejahtera tercermin dari peningkatan tingkat

kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam bentuk percepatan pertumbuhan ekonomi yang didukung oleh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengurangan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran yang diwujudkan dengan bertumpu pada program perbaikan kualitas sumber daya manusia, perbaikan infrastruktur dasar, serta terjaganya dan terpeliharanya lingkungan hidup secara berkelanjutan.

2. Memperkuat pilar-pilar demokrasi dengan penguatan yang bersifat kelembagaan dan mengarah pada tegaknya ketertiban umum, penghapusan segala macam diskriminasi, pengakuan dan penerapan hak asasi manusia serta kebebasan yang bertanggung jawab.
3. Memperkuat dimensi keadilan dalam semua bidang termasuk pengurangan kesenjangan pendapatan, pengurangan kesenjangan pembangunan antar daerah (termasuk desa-kota), dan kesenjangan gender. Keadilan juga hanya dapat diwujudkan bila sistem hukum berfungsi secara kredibel, bersih, adil dan tidak pandang bulu. Demikian pula kebijakan pemberantasan korupsi secara konsisten diperlukan agar tercapai rasa keadilan dan pemerintahan yang bersih.

#### **4.1.2 Prioritas Nasional**

Untuk menjawab berbagai tantangan yang dihadapi oleh bangsa dan negara di masa mendatang, pembangunan nasional diprioritaskan untuk menjamin implementasi dari 11 prioritas nasional yaitu: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur; (7) iklim investasi dan usaha; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan paskakonflik; serta (11) kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi.

Dari 11 Prioritas Nasional tersebut, yang terkait langsung dengan Kementerian Pertanian yang utamanya adalah Prioritas ke-5, yaitu *Ketahanan Pangan*. TEMA Prioritas Ketahanan Pangan adalah Peningkatan ketahanan pangan dan lanjutan revitalisasi pertanian untuk mewujudkan kemandirian pangan, peningkatan daya saing produk pertanian, peningkatan pendapatan petani, serta kelestarian lingkungan

dan sumber daya alam. Peningkatan pertumbuhan PDB sektor pertanian sebesar 3,7% dan Indeks Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 115-120 pada tahun 2014.

Substansi inti program aksi ketahanan pangan adalah sebagai berikut:

1. Lahan, Pengembangan Kawasan dan Tata Ruang Pertanian: Penataan regulasi untuk menjamin kepastian hukum atas lahan pertanian, pengembangan areal pertanian baru seluas 2 juta hektar, penertiban serta optimalisasi penggunaan lahan terlantar;
2. Infrastruktur: Pembangunan dan pemeliharaan sarana transportasi dan angkutan, pengairan, jaringan listrik, serta teknologi komunikasi dan sistem informasi nasional yang melayani daerah-daerah sentra produksi pertanian demi peningkatan kuantitas dan kualitas produksi serta kemampuan pemasarannya;
3. Penelitian dan Pengembangan: Peningkatan upaya penelitian dan pengembangan bidang pertanian yang mampu menciptakan benih unggul dan hasil penelitian lainnya menuju kualitas dan produktivitas hasil pertanian nasional yang tinggi;
4. Investasi, Pembiayaan, dan Subsidi: Dorongan untuk investasi pangan, pertanian, dan industri perdesaan berbasis produk lokal oleh pelaku usaha dan pemerintah, penyediaan pembiayaan yang terjangkau, serta sistem subsidi yang menjamin ketersediaan benih varietas unggul yang teruji, pupuk, teknologi dan sarana pasca panen yang sesuai secara tepat waktu, tepat jumlah, dan terjangkau;
5. Pangan dan Gizi: Peningkatan kualitas gizi dan keanekaragaman pangan melalui peningkatan pola pangan harapan;
6. Adaptasi Perubahan Iklim: Pengambilan langkah-langkah kongkrit terkait adaptasi danantisipasi sistem pangan dan pertanian terhadap perubahan iklim.

Di samping sebelas prioritas nasional tersebut di atas, upaya untuk mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Nasional juga melalui pencapaian prioritas nasional lainnya yaitu di bidang politik, hukum, dan keamanan, di bidang perekonomian, dan di bidang kesejahteraan rakyat.



### 4.1.3 Arah Kebijakan Bidang-Bidang Pembangunan

Pembangunan Nasional dilakukan secara menyeluruh di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Untuk itu, perencanaan pembangunan nasional dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) bidang pembangunan menurut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, yaitu:

1. Bidang Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama
2. Bidang Ekonomi
3. Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
4. Bidang Sarana dan Prasarana
5. Bidang Politik
6. Bidang Pertahanan dan Keamanan
7. Bidang Hukum dan Aparatur
8. Bidang Wilayah dan Tataruang
9. Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Sinergi antar bidang pembangunan sangat penting untuk kelancaran pelaksanaan dan tercapainya berbagai sasaran dalam RPJMN 2010-2014. Pada dasarnya pembangunan di setiap bidang untuk mencapai keberhasilan, tidak dapat berdiri sendiri, tetapi saling terkait dengan pembangunan di bidang lainnya. Dengan pembiayaan yang terbatas, untuk mencapai efektifitas, efisiensi dan hasil yang maksimal dalam mencapai sasaran pembangunan, harus dilakukan sinkronisasi pembangunan di setiap bidang, sehingga kegiatan di setiap bidang saling terpadu, mendukung dan saling memperkuat.

Selanjutnya, di dalam melaksanakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMN terdapat prinsip pengarusutamaan yang menjadi landasan operasional bagi seluruh pelaksanaan pembangunan. Prinsip-prinsip pengarusutamaan ini diarahkan untuk dapat tercermin di dalam keluaran pada kebijakan pembangunan, yang mencakup: (1) pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan; (2) pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik; dan (3) pengarusutamaan gender. Prinsip-prinsip pengarusutamaan ini akan menjadi jiwa dan semangat yang mewarnai berbagai kebijakan pembangunan di setiap bidang pembangunan. Dengan dijiwai prinsip-prinsip pengarusutamaan ini, pembangunan jangka menengah ini akan memperkuat upaya mengatasi berbagai permasalahan yang ada.

RPJMN 2010-2014 ini juga diarahkan untuk menjadi sebuah rencana kerja jangka menengah yang bersifat menyeluruh. Persoalan yang bersifat lintas bidang harus ditangani secara holistik dan tidak terfragmentasi sehingga dapat menyelesaikan persoalan yang sebenarnya. Pencapaian kinerja pembangunan tersebut menjadi komitmen semua pihak khususnya instansi pemerintah untuk dapat merealisasikannya secara sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu disusun pula rencana kerja yang bersifat lintas bidang meliputi (1) penanggulangan kemiskinan ; (2) perubahan iklim global; (3) pembangunan kelautan berdimensi kepulauan, dan (4) perlindungan anak. Kebijakan lintas bidang ini akan menjadi sebuah rangkaian kebijakan antarbidang yang terpadu meliputi prioritas, fokus prioritas serta kegiatan prioritas lintas bidang untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan yang semakin kompleks.

Disamping terlibat dalam pencapaian Prioritas Nasional (RPJMN 2010-2014, Buku I), pembangunan pertanian ditempatkan pada kelompok pembangunan Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup (SDA dan LH) (RPJMN 2010-2014, Buku II).

Dalam lima tahun ke depan (2010–2014), pembangunan SDA dan LH masih terus diarahkan kepada dua kelompok (kluster), yaitu (i) pemanfaatan SDA yang mendukung pembangunan ekonomi, dan (ii) peningkatan kualitas dan kelestarian LH. Pemanfaatan SDA dalam mendukung pembangunan ekonomi dijabarkan pada tiga prioritas, yaitu (1) Peningkatan Ketahanan Pangan, Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; (2) Peningkatan Ketahanan dan Kemandirian Energi; dan (3) Peningkatan pengelolaan Sumber Daya Mineral dan Pertambangan. Kemudian pembangunan SDA dan LH untuk meningkatkan kualitas dan kelestarian LH ditekankan pada empat prioritas, yaitu (1) perbaikan kualitas lingkungan hidup; (2) peningkatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya hutan; (3) peningkatan pengelolaan sumber daya kelautan; (4) peningkatan kualitas informasi iklim dan bencana alam serta kapasitas adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

Dari 7 Prioritas Bidang tersebut, yang terkait langsung dengan Kementerian Pertanian utamanya adalah *Peningkatan Ketahanan Pangan, dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan.*

Ketahanan pangan nasional merupakan pondasi utama pembangunan nasional lima tahun ke depan. Kondisi ketahanan pangan nasional yang akan dicapai adalah terpenuhinya kebutuhan pangan yang cukup, bergizi seimbang, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat. Pencapaian ketahanan pangan nasional memerlukan dukungan penuh dari revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan. Sementara itu, revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan juga dilaksanakan untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan daya saing di pasar global secara efisien dan modern untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

**Boks 4.1**

**Kaitan antara Strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dengan Strategi Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010-2014**

RPJMN 2010-2014		RENSTRA KEMTAN 2010-2014	
<b>BUKU I RPJMN 2010-2014</b>		<b>7 GEMA REVITALISASI</b>	
Dari 11 Prioritas Nasional, yang terkait dengan pembangunan pertanian adalah Prioritas No. 5: KETAHANAN PANGAN, dengan 6 Substansi Inti:		1.	Revitalisasi Lahan
		2.	Revitalisasi Perbenihan dan Perbibitan
		3.	Revitalisasi Infrastruktur dan Sarana
		4.	Revitalisasi Sumber Daya Manusia
		5.	Revitalisasi Pembiayaan Petani
		6.	Revitalisasi Kelembagaan Petani
		7.	Revitalisasi Teknologi dan Industri Hilir
1.	Lahan, Pengembangan Kawasan dan Tata Ruang Pertanian	<b>4 TARGET UTAMA KEMENTERIAN PERTANIAN</b>	
2.	Infrastruktur	1.	Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan
3.	Penelitian dan Pengembangan	2.	Peningkatan Diversifikasi Pangan
4.	Investasi, Pembiayaan dan Subsidi	3.	Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor
5.	Pangan dan Gizi	4.	Peningkatan Kesejahteraan Petani
6.	Adaptasi Perubahan Iklim	<i>Adaptasi iklim masuk di Target 1.                      Investasi dan subsidi masuk di Target 1,2,3 dan 4</i>	
<b>BUKU II RPJMN 2010-2014</b>			
Dari 9 Bidang pembangunan nasional, yang terkait langsung dengan pembangunan pertanian adalah Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDA-LH)			
Dari 7 Prioritas Bidang SDA-LH, yang terkait langsung dengan pembangunan pertanian adalah Prioritas Bidang No. 1: Peningkatan Ketahanan Pangan dan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan			



## 4.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pertanian

### 4.2.1 Arah Kebijakan Kementerian Pertanian

1. Melanjutkan dan memantapkan kegiatan tahun sebelumnya yang terbukti sangat baik kinerja dan hasilnya, antara lain bantuan benih/bibit unggul, subsidi pupuk, alsintan, Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT), Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) dan pola sekolah lapang lainnya.
2. Melanjutkan dan memperkuat kegiatan yang berorientasi pemberdayaan masyarakat seperti Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP), Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3), Sarjana Membangun Desa (SMD) dan Penggerak Membangun Desa (PMD), dan rekrutmen tenaga pendamping lapang guna mempercepat pertumbuhan industri pertanian di perdesaan.
3. Pemantapan swasembada beras, jagung, daging ayam, telur, dan gula konsumsi melalui peningkatan produksi yang berkelanjutan.
4. Pencapaian swasembada kedelai, daging sapi, dan gula industri.
5. Peningkatan produksi susu segar, buah lokal, dan produk-produk substitusi komoditas impor.
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas *public goods* melalui perbaikan dan pengembangan infrastruktur pertanian seperti irigasi, embung, jalan desa, dan jalan usahatani.
7. Jaminan penguasaan lahan produktif.
8. Pembangunan sentra-sentra pupuk organik berbasis kelompok tani.
9. Penguatan kelembagaan perbenihan dan perbibitan nasional.
10. Pemberdayaan masyarakat petani miskin melalui bantuan sarana, pelatihan, dan pendampingan.
11. Penguatan akses petani terhadap iptek, pasar, dan permodalan bunga rendah.
12. Mendorong minat investasi pertanian dan kemitraan usaha melalui promosi yang intensif dan dukungan iklim usaha yang kondusif.
13. Pembangunan kawasan komoditas unggulan terpadu secara vertikal dan/atau horizontal dengan konsolidasi usahatani produktif berbasis

lembaga ekonomi masyarakat yang berdaya saing tinggi di pasar lokal maupun internasional.

14. Pengembangan *bio-energi* berbasis bahan baku lokal terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat khususnya di perdesaan dan mensubstitusi BBM.
15. Pengembangan diversifikasi pangan dan pembangunan lumbung pangan masyarakat untuk mengatasi rawan pangan dan stabilisasi harga di sentra produksi.
16. Peningkatan keseimbangan ekosistem dan pengendalian hama penyakit tumbuhan dan hewan secara terpadu.
17. Peningkatan perlindungan dan pendayagunaan plasma-nutfah nasional.
18. Penguatan sistem perkarantinaaan pertanian.
19. Penelitian dan pengembangan berbasis sumberdaya spesifik lokasi (kearifan lokal) dan sesuai agro-ekosistem setempat dengan teknologi unggul yang berorientasi kebutuhan petani.
20. Pengembangan industri hilir pertanian di perdesaan yang berbasis kelompok tani untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan keseimbangan ekonomi desa-kota.
21. Berperan aktif dalam melahirkan kebijakan makro yang berpihak kepada petani seperti perlindungan tarif dan non tarif perdagangan internasional, penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi.
22. Peningkatan promosi citra petani dan pertanian guna menumbuhkan minat generasi muda menjadi wirausahawan agribisnis.
23. Peningkatan dan penerapan manajemen pembangunan pertanian yang akuntabel dan *good governance*.

#### **4.2.2 Strategi Pembangunan Pertanian**

Sejalan dengan arah pembangunan pertanian yang telah direncanakan dan dalam upaya mencapai target sasaran yang ditetapkan, strategi pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan Kementerian Pertanian selama periode 2010-2014 adalah melakukan revitalisasi pertanian

dengan fokus pada tujuh aspek dasar yang disebut dengan TUJUH GEMA REVITALISASI, yang terdiri dari: (1) Lahan, (2) Perbenihan dan perbibitan, (3) Infrastruktur dan sarana, (4) Sumber daya manusia, (5) Pembiayaan petani, (6) Kelembagaan petani, dan (7) Teknologi dan industri hilir.

Gambar 4.1

### TUJUH GEMA REVITALISASI



Implementasi dari revitalisasi ketujuh aspek dasar ini merupakan kelanjutan, perluasan dan pendalaman dari usaha-usaha yang telah dilaksanakan sebelumnya dengan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi yang semakin terpadu dan disesuaikan dengan dukungan sumberdaya alam, sosial budaya setempat, perubahan dinamis internal dan eksternal yang berpengaruh nyata, serta dengan memperhatikan potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi bagi pembangunan pertanian saat ini dan ke depan.

Penjabaran dari **TUJUH GEMA REVITALISASI** tersebut adalah sebagai berikut :

#### 4.2.2.1 REVITALISASI LAHAN

Dalam rangka revitalisasi lahan, dalam lima tahun mendatang akan dilaksanakan rencana aksi sebagai berikut:

1. Audit Lahan  
Membangun database baik tabular maupun spasial yang lengkap dan akurat melalui re-inventarisasi dan re-evaluasi potensi sumber daya lahan pertanian dengan pengembangan sistem informasi geografi (SIG) atau pemetaan tanah sistematis dan tematik.
2. Mengimplementasikan secara efektif Undang-Undang No. 41/2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) dengan Peraturan Pemerintah. UU PLP2B dan Peraturan Pemerintah pendukungnya merupakan perangkat hukum untuk melindungi lahan pangan produktif dan menekan laju konversi lahan pertanian.
3. Melakukan upaya-upaya perlindungan, pelestarian dan perluasan areal pertanian terutama di luar Jawa sebagai kompensasi alih fungsi lahan terutama di Jawa :
  - 1) melakukan upaya pengendalian alih fungsi lahan melalui penyusunan dan penerapan perangkat peraturan perundangan.
  - 2) melestarikan dan/atau mempertahankan kesuburan lahan-lahan produktif dan intensif.
  - 3) melakukan upaya rehabilitasi dan konservasi lahan terutama pada lahan pertanian Daerah Aliran Sungai (DAS) Hulu.



- 4) melakukan upaya reklamasi dan optimasi lahan pada lahan-lahan marginal dan sementara tidak diusahakan atau bernilai Indeks Pertanaman (IP) rendah.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian terlantar yang meliputi lahan pertanian yang selama ini tidak dibudidayakan (lahan tidur atau bongkor), dan kawasan hutan yang telah dilepas untuk keperluan pertanian tetapi belum dimanfaatkan, atau lahan pertanian yang masih dalam kawasan hutan (wewenang sektor kehutanan).
5. Membantu petani dalam sertifikasi lahan, mendorong pengelolaan dan konsolidasi lahan, advokasi petani dalam pengelolaan warisan agar tidak terbagi menjadi lahan sempit dalam upaya mengurangi segmentasi lahan, dan/atau menjadi lahan non-pertanian. Upaya-upaya tersebut dimaksudkan untuk menekan laju alih fungsi lahan pertanian dan segmentasi lahan serta serta mendorong pengembangan usahatani berskala ekonomi.
6. Mempertahankan kesuburan tanah dan memperbaiki kondisi lahan marjinal dengan upaya-upaya yang akan dilakukan adalah :
  - 1) Melakukan perbaikan dan pencegahan kerusakan tanah dengan menerapkan teknologi konservasi tanah dan air untuk mengurangi erosi dan mencegah longsor serta meningkatkan produktivitas lahan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No.47/Permentan/OT.140/10/2006, tentang Pedoman Umum Budidaya Pertanian Pada Lahan Pegunungan.
  - 2) Melakukan penanaman tanaman pohon (buah-buahan) dan perkebunan) di daerah kawasan aliran sungai, dan turut serta



dalam sistem komunikasi dan koordinasi lintas sektor dalam upaya mengurangi pembabatan dan kerusakan hutan dan rangka memperbaiki dan meningkatkan kualitas sumberdaya lahan dan air serta lingkungan di kawasan hulu.

- 3) Mendorong petani untuk menggunakan sistem pemupukan berimbang yang diintegrasikan dengan pupuk organik, dan menerapkan praktek budidaya pertanian yang tepat guna dan ramah lingkungan.
7. Optimalisasi sumberdaya air yang eksisting dan pengembangan sumber air alternatif baik air tanah maupun permukaan, melalui:
- 1) Rehabilitasi, optimalisasi, dan peningkatan/pengembangan jaringan irigasi baik tingkat utama maupun usahatani.
  - 2) Upaya peningkatan efisiensi penyaluran dan pemanfaatan air.
  - 3) Perbaikan struktur fisik tanah dan penambahan bahan organik, serta penerapan berbagai teknologi koservasi tanah dan air.
  - 4) Pengembangan dan memantapkan kelembagaan petani pemakai air, serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, penyadaran, kepedulian dan partisipasi petani.

#### **4.2.2.2 REVITALISASI PERBENIHAN DAN PERBIBITAN**

Dalam rangka revitalisasi perbenihan dan perbibitan, dalam lima tahun mendatang akan dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Menata kembali kelembagaan perbenihan/perbibitan nasional mulai dari tingkat pusat sampai daerah.
2. Melindungi, memelihara dan memanfaatkan sumberdaya genetik nasional untuk pengembangan varietas unggul lokal.
3. Memperkuat tenaga pemulia dan pengawas benih tanaman.
4. Memberdayakan penangkar dan produsen benih berbasis lokal.
5. Meningkatkan peran swasta dalam membangun industri perbenihan/perbibitan.
6. Membangun industri perbenihan dengan arah sebagai berikut:



- 1) Kemandirian industri benih nasional yang mencakup kemandirian produksi benih dan industri varietas.
  - 2) Kemandirian penyediaan benih berbasis kawasan.
  - 3) Industri benih berbasis komunitas.
  - 4) Riset berbasis perbenihan.
7. Untuk mendorong berkembangnya industri benih di dalam negeri, maka *importir pedagang benih* diharuskan mengembangkan perbenihan di dalam negeri sehingga menjadi *importir produsen benih* dalam upaya untuk menahan laju benih impor.
8. Menyediakan sumber bahan tanaman perkebunan melalui pembangunan dan pemeliharaan kebun induk/entres serta penguatan kelembagaan usaha (usaha perbenihan kecil dan besar) dan kelembagaan UPJA perkebunan.
9. Khusus untuk membangun perbibitan ternak, peran swasta diarahkan pada kelangsungan perbibitan ayam ras mulai dari keberadaan *grand parent stock*, *parent stock* sampai *final stock*. Sedangkan peran pemerintah diperlukan untuk meningkatkan ketersediaan bibit melalui penerapan sistem perbibitan, yaitu perbaikan mutu benih dan bibit ternak, optimalisasi kelembagaan perbibitan, sertifikasi, penjaringan, pemurnian, dan persilangan melalui penggunaan teknologi inseminasi buatan dan embrio transfer.

#### 4.2.2.3 REVITALISASI INFRASTRUKTUR DAN SARANA

Dalam rangka pembangunan pertanian, tersedianya infrastruktur dan sarana adalah bersifat mutlak, tanpa adanya infrastruktur yang memadai maka sistem usahatani tidak akan bisa berjalan dengan baik. Terkait dengan sistem usaha tani, ada infrastruktur yang dibutuhkan oleh petani di areal usahatani seperti jalan usahatani, jalan produksi, jaringan irigasi tingkat (JITUT), jaringan irigasi desa (JIDES), jaringan irigasi tersier dan kuarter, disamping itu juga diperlukan infrastruktur di luar areal usahatani seperti jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, jalan kabupaten, jalan propinsi, jalan negara, pelabuhan, bandara, sarana transportasi, jaringan listrik, jaringan komunikasi dan lain sebagainya.

Revitalisasi infrastruktur dan sarana yang akan dilakukan selama 2010-2014 adalah revitalisasi infrastruktur baik di areal usahatani maupun



di luar wilayah usahatani, sehingga revitalisasi infrastruktur dan sarana bukan hanya yang akan dilakukan oleh Kementerian Pertanian, tetapi juga yang akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota maupun oleh masyarakat.

Dengan terbatasnya anggaran Kementerian Pertanian, revitalisasi infrastruktur dan sarana yang akan dilakukan oleh Kementerian Pertanian adalah diprioritaskan pada jalan usahatani, jalan produksi, jaringan irigasi tingkat usahatani, jaringan irigasi desa, jaringan irigasi tersier dan kuarter serta infrastruktur usahatani yang terkait dengan upaya perluasan lahan dua juta hektar.

Untuk infrastruktur jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier serta waduk sebagai sumber air dan juga sarana jalan lintas negara diharapkan Kementerian Pekerjaan Umum dapat menyediakan infrastruktur tersebut. Sedangkan prasarana perhubungan seperti pelabuhan, pergudangan, bandara dan sarana transportasi diharapkan dari Kementerian Perhubungan dapat menyediakan prasarana tersebut.

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Propinsi/Kabupaten/Kota) adalah membangun dan memelihara infrastruktur publik yang tidak mampu dibangun oleh petani dan tidak diminati swasta. Oleh karena itu, ke depan pemerintah akan mengupayakan bagaimana merencanakan, mengelola dan memelihara infrastruktur dasar di wilayah sentra produksi dan wilayah pengembangan baru di tengah keterbatasan anggaran dengan melibatkan sebesar-besarnya partisipasi masyarakat.

#### **4.2.2.4 REVITALISASI SUMBERDAYA MANUSIA**

Manusia merupakan sumberdaya yang sangat vital karena merupakan pelaku utama pembangunan, termasuk pertanian. Tanpa pelaku yang handal dan berkompeten, maka pembangunan pertanian tidak dapat berjalan secara optimal. Ada 3 komponen SDM pertanian yang perlu dikembangkan kapasitasnya:

1. Non-aparatur yang meliputi petani/tenaga kerja pertanian dan pelaku agribisnis lainnya

2. Aparatur pertanian, baik fungsional maupun struktural yang lebih berperan sebagai fasilitator, motivator dan dinamisator dalam proses pembangunan pertanian,
3. Lembaga petani pedesaan seperti kelompok tani, gabungan kelompok tani (gapoktan), Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya (P4S), koperasi, Lembaga Keuangan Mikro, Kios Sarana Produksi, dan Lembaga Pemasaran.

Guna mendukung upaya pembangunan pertanian yang terfokus pada 4 (empat) target utama pembangunan pertanian 2010-2014, maka arah kebijakan pengembangan SDM pertanian difokuskan pada:

1. Pengembangan Penyuluh Pertanian Polivalen di tingkat lapangan dan Penyuluh Pertanian Spesialis di tingkat Kabupaten/Kota, Propinsi dan Pusat untuk mendukung Program Utama Pembangunan Pertanian.
2. Pelatihan bagi aparatur sesuai dengan kebutuhan jenjang karir Pegawai Negeri Sipil (PNS).
3. Pelatihan bagi pengelola P4S dan Pengurus Gapoktan serta pelaku agribisnis lainnya dilaksanakan oleh UPT Pelatihan, sedangkan Pelatihan bagi petani pelaku utama agribisnis dilaksanakan oleh P4S.
4. Pendidikan Tinggi bidang Rumpun Ilmu Hayati Pertanian (RIHP) diarahkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga fungsional Penyuluh Pertanian, Pengamat Organisme Pengganggu Tanaman (POPT), Paramedik Veteriner, Pengawas Bibit Ternak (PBT), Pengawas Mutu Pakan Ternak, Pengawas Mutu Hasil Pertanian, dan Karantina.
5. Pendidikan Menengah Kejuruan di bidang pertanian diarahkan untuk memenuhi tenaga teknisi menengah dan menyiapkan wirausahawan muda di bidang pertanian.

Lima arah kebijakan tersebut akan di implementasikan dalam bentuk empat rencana aksi yang terdiri dari: (1) Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian, (2) Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian, (3) Revitalisasi Pendidikan Pertanian, dan (4) Pemantapan Sistem Administrasi dan Manajemen Pengembangan SDM Pertanian.

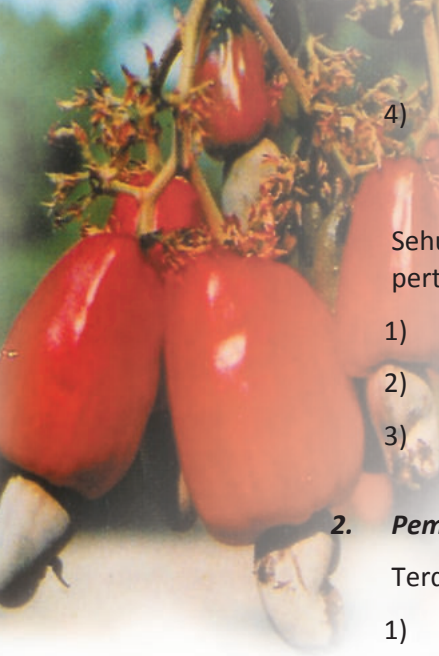
### **1. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian**

Penyuluh pertanian dan petugas lapang yang lain seperti Pengendali OPT (POPT), Pengawas Benih Tanaman (PBT) merupakan aparatur yang paling dekat tugasnya dengan petani. Namun demikian, sejak otonomi daerah, keberadaan dan kelembagaan-kelembagaan penyuluhan, proteksi tumbuhan maupun perbenihan kurang mendapatkan kesempatan yang memadai. Keberadaan dan peran serta kelembagaan penyuluhan, proteksi tumbuhan dan perbenihan sangat beragam sesuai dengan kebijakan daerah masing-masing. Sebagian besar tenaga penyuluh, POPT dan PBT sudah mendekati masa purna bakti, tetapi tanpa diikuti oleh kebijakan perekrutan tenaga pengganti yang memadai. Dengan berbagai keterbatasan yang ada, perekrutan tenaga penyuluh, POPT dan PBT dilakukan dengan model Tenaga Harian Lepas (THL).



Untuk memperkuat peran penting petugas lapang, baik penyuluh, POPT maupun PBT di masa datang dilakukan upaya-upaya:

- 1) Meningkatkan jumlah formasi petugas lapang, baik penyuluh, POPT maupun PBT.
- 2) Mendorong munculnya tenaga-tenaga penyuluh swadaya.
- 3) Memberikan bimbingan teknis dan usahatani produktif dalam mengakses informasi teknologi dan pasar.

- 
- 4) Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah berkaitan dengan perekrutan dan pembiayaan petugas lapang pertanian.

Sehubungan dengan itu, ditetapkan strategi pementapan penyuluhan pertanian sebagai berikut:

- 1) Penataan dan Penguatan Kelembagaan Penyuluhan
- 2) Pementapan Ketenagaan Penyuluhan
- 3) Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian

## **2. Pementapan Sistem Pelatihan Pertanian**

Terdiri atas kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pementapan Kelembagaan Pelatihan
- 2) Peningkatan Kapasitas Tenaga Kepelatihan Pertanian
- 3) Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pelatihan
- 4) Pengembangan Jejaring Kerjasama Pelatihan Pertanian

## **3. Revitalisasi Sistem Pendidikan Pertanian**

Terdiri atas kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penataan Kelembagaan Pendidikan
- 2) Peningkatan Kualitas Ketenagaan Pendidikan Pertanian
- 3) Peningkatan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan
- 4) Pengembangan Kerjasama Teknis Pendidikan Pertanian

## **4. Pementapan Sistem Administrasi dan Manajemen Pengembangan SDM Pertanian**

Terdiri atas kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penerapan Sistem dan Prosedur Perencanaan
- 2) Penerapan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan dan Perlengkapan

- 3) Pengembangan Peraturan Perundangan, Sistem dan Prosedur Organisasi, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian
- 4) Pengembangan Sistem dan Prosedur Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan

#### 4.2.2.5 REVITALISASI PEMBIAYAAN PETANI

Persoalan mendasar yang dihadapi petani dan peternak adalah akses permodalan kepada lembaga keuangan formal dan suku bunga yang sangat tinggi. Untuk memperbaiki dan mengatasi kondisi tersebut diperlukan upaya-upaya :

1. Optimalisasi pemanfaatan skim kredit program yang sudah ada (Kredit Ketahanan Pangan dan Energi/KKP-E, Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan/KPEN-RP, Kredit Usaha Pembibitan Sapi/KUPS dan Kredit Usaha Rakyat/KUR) melalui sosialisasi, koordinasi dan sinkronisasi di tingkat lapangan yang lebih intensif.
2. Pengembangan Skim Kredit Program yang semula hanya untuk usaha budidaya, diperluas mencakup usaha pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil.
3. Memperluas Lembaga Penjamin dan komoditas yang di fasilitasi oleh skim *Risk-Sharing* dalam skim KKP-E.
4. Mengintegrasikan skim kredit bersubsidi (KKP-E) dengan skim kredit penjaminan (KUR) sehingga pangsa kredit pertanian menjadi lebih besar.
5. Menumbuhkembangkan kelembagaan petani, kelompok tani, gapoktan, asosiasi dan koperasi tani) sebagai “*Channeling Agent*” Lembaga Keuangan formal, baik perbankan maupun non perbankan, untuk membiayai permodalan petani.
6. Meningkatkan fungsi penyuluh sebagai fasilitator pembiayaan petani.
7. Mengembangkan pola kerjasama kemitraan tertutup antara Perbankan, Pemerintah Daerah (Dinas Teknis), Penjamin Pasar (*Off-Taker*) dan Penjamin Kredit (Avalis) dalam rangka mengatasi keterbatasan agunan yang dimiliki oleh petani.

8. Menumbuhkembangkan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) di perdesaan sebagai jejaring lembaga pembiayaan formal.
9. Memfasilitasi pembiayaan bagi petani dan gapoktan melalui program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) sesuai potensi wilayah.
10. Mengembangkan skim perlindungan usaha petani dan mitigasi resiko usaha melalui asuransi pertanian.

#### **4.2.2.6 REVITALISASI KELEMBAGAAN PETANI**

Kegiatan pertanian secara alami melibatkan sumberdaya manusia (petani) yang cukup banyak, sarana produksi dan permodalan yang cukup besar. Selain itu juga sangat berhubungan erat dengan sumber inovasi teknologi dan informasi pasar mulai dari hulu sampai hilir. Dengan karakteristik seperti ini maka untuk mempermudah melakukan koordinasi sangat diperlukan kelembagaan petani. Melalui kelembagaan petani, mereka dengan mudah melakukan koordinasi diantara mereka dan antara kelompok. Demikian juga melalui kelompok mereka akan menjadi kuat untuk bisa mengakses pasar dan informasi.

Menyadari manfaat keberadaan kelompok tani maka ke depan upaya-upaya yang perlu dilakukan adalah:

1. Terus memperbanyak kelompok dan gabungan kelompok tani;
2. Memberikan bimbingan dan pendampingan teknis untuk memperkuat kemampuan baik dari segi aspek budidaya maupun dalam aspek pemasaran;
3. Memperluas jenis kelompok tani sesuai dengan bidang usaha, misalnya kelompok Pengendalian Hama Terpadu, Inseminasi Buatan, Perhimpunan Petani Pemakai Air, Revitalisasi Perkebunan ;
4. Memperkuat modal usaha bagi kelompok/gabungan kelompok melalui pemberian bantuan modal, dan memperkuat jaringan kelompok tani dengan penyuluh lapangan.
5. Meningkatkan kemampuan manajemen kelompok, mencakup aspek budidaya (produksi komoditas), penyediaan prasarana dan sarana produksi serta penanganan pasca panen dan pemasaran hasil pertanian.

#### 4.2.2.7 REVITALISASI TEKNOLOGI DAN INDUSTRI HILIR

##### 1. *Revitalisasi Teknologi*

Arah revitalisasi teknologi pertanian lima tahun ke depan adalah:

- 1) Penguatan inovasi teknologi pertanian yang berorientasi ke depan, memecahkan masalah, berwawasan lingkungan, aman bagi kesehatan dan menjamin keselamatan manusia serta dihasilkan dalam waktu yang relatif cepat, efisien dan berdampak luas.
- 2) Optimalisasi sumber daya penelitian dalam rangka memacu peningkatan produktivitas dan kualitas penelitian untuk meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah dan pengembangan industri hilir sesuai dengan preferensi pasar untuk kesejahteraan petani.
- 3) Optimalisasi kapasitas unit kerja untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas penelitian dalam rangka menghasilkan produk berwawasan lingkungan, sehat dan aman serta dihasilkan dalam waktu yang singkat, efisien dan berdampak luas.
- 4) Peningkatan pemanfaatan rekomendasi kebijakan antisipatif dan responsif dalam kerangka pembangunan pertanian untuk memecahkan berbagai masalah dan isu-isu aktual dalam pembangunan pertanian.
- 5) Peningkatan aliansi strategis/kerja sama penelitian dan pengembangan dengan lembaga internasional/nasional berkelas dunia dalam rangka memacu peningkatan produktivitas dan kualitas penelitian untuk memenuhi peningkatan kebutuhan pengguna dan pasar.

Revitalisasi penelitian dan pengembangan di atas akan diimplementasikan dalam bentuk rencana aksi sebagai berikut:

- 1) Perakitan varietas tanaman pangan umur ultra genjah, toleran terhadap cekaman biotik/abiotik, dan adaptif untuk daerah tropis. Selain itu, juga dirakit inovasi teknologi untuk



peningkatan produktivitas benih F1 hibrida padi dan jagung serta akselerasi penyebaran benih sumber untuk mempercepat adopsi varietas unggul baru. Sejalan dengan hal tersebut, juga diprogramkan penelitian untuk menghasilkan teknologi pendukung peningkatan produktivitas.

- 2) Pemuliaan dan pengelolaan sumberdaya genetik hortikultura sebagai bahan perakitan varietas unggul baru adaptif daerah tropis (*genjah, better eating quality, seedles, trendsetter*), serta inovasi teknologi modern yang efektif, efisien dan ramah lingkungan berbasis sumberdaya lokal yang dapat mengantisipasi perubahan iklim dan menanggulangi permasalahan OPT.





- 3) Penelitian dan pengembangan tanaman perkebunan dilakukan dalam konteks kebijakan prioritas komoditas melalui kegiatan pemuliaan dan pengelolaan sumberdaya genetik, inovasi teknologi budidaya dan pengolahan hasil, serta rekomendasi kebijakan berbasis pada : (1) pengembangan bahan bakar nabati (jarak pagar, kemiri sunan, sagu, aren, bunga matahari), (2) penghasil serat (kapas, kenaf), (3) kelapa dan palma lain, (4) biofarmaka dan aromatik, (5) rempah dan tanaman industri, serta (6) komoditas sawit, karet, kakao, kopi, tebu, teh dan kina.
- 4) Penelitian peternakan dan veteriner dilaksanakan melalui eksplorasi sumber daya genetik, pengembangan sistem perbibitan ternak ruminansia besar melalui *twinning* serta perakitan *grand parent stock* ayam lokal, perakitan bangsa ternak dan tanaman pakan dengan konsep *low external input*. Guna pengembangan sistem perbibitan diperlukan pengembangan sistem integrasi ternak dengan komoditas pangan dan perkebunan. Sedangkan penelitian veteriner dilaksanakan untuk mendukung populasi ruminansia besar, meningkatkan status kesehatan hewan dan keamanan pangan dan pengendalian penyakit zoonosis.
- 5) Inventarisasi dan evaluasi potensi sumber daya lahan pertanian meliputi pemetaan tanah sistematis dan pemetaan tematik di lokasi terpilih, yang dilakukan dengan memanfaatkan citra satelit, digital elevation model (DEM) berbasis GIS. Penelitian optimalisasi pemanfaatan sumber daya lahan, berupa pengembangan inovasi teknologi pengelolaan sumber daya lahan pertanian (sawah, lahan kering, lahan rawa, iklim dan air), formulasi pupuk (anorganik, organik dan hayati) dan formulasi pembenah tanah. Sementara kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan lingkungan pertanian terdiri dari perakitan teknologi mengantisipasi pencemaran lingkungan pertanian, perubahan iklim global dan lahan terdegradasi.
- 6) Pengkayaan, pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya genetik pertanian; Perbaikan sifat unggul (produktivitas, adaptabilitas, tahan cekaman biotik, dan mutu) ternak, tanaman dan mikroba pertanian melalui teknik kultur *in vitro*, rekayasa

genetik, dan marka molekuler serta pemanfaatan bioteknologi untuk pembentukan varietas, perbanyak bibit, pengolahan produk dan limbah pertanian.

- 7) Menghasilkan pengetahuan, data dan informasi, serta analisis yang berkaitan dengan hasil: (1) pengkajian kebijakan penguatan dan perlindungan usaha pertanian, (2) pengkajian kebijakan sumberdaya alam, infratraktur dan investasi pertanian, (3) pengkajian kebijakan kelembagaan dan regulasi pertanian, (4) pengkajian kebijakan ekonomi makro, ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan dan pembangunan pedesaan, (5) penelitian dinamika ekonomi pertanian dan pedesaan, (6) pelaksanaan evaluasi dan tanggap cepat atas isu kebijakan aktual.
- 8) Perekayasa/penelitian dan pengembangan mekanisasi meliputi lima kegiatan utama, yaitu perekayasa/penelitian teknologi mekanisasi pertanian untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi pemanfaatan sumberdaya pertanian, peningkatan kualitas dan nilai tambah produk pertanian, pemanfaatan limbah dan sumber daya energi terbarukan di bidang pertanian, pengembangan dan penerapan teknologi mekanisasi pertanian berbasis kemitraan dan analisis dan sintesis kebijakan untuk percepatan pengembangan mekanisasi pertanian.
- 9) Kegiatan penelitian dan pengembangan pascapanen difokuskan untuk menghasilkan inovasi teknologi penanganan dan pengolahan hasil pertanian mendukung pencapaian target diversifikasi pangan, peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor. Kegiatan dilakukan baik dalam skala laboratorium, pilot maupun skala operasional meliputi : penanganan segar produk hortikultura dan ternak, diversifikasi pangan dan substitusi pangan impor, serta pengembangan produk baru (*product development*) untuk meningkatkan nilai tambah.
- 10) Pengkajian dan percepatan diseminasi inovasi pertanian diharapkan dapat menjembatani apa yang dilaksanakan Puslit/BB/LRPI dengan apa yang dibutuhkan pengguna di berbagai tingkatan di daerah. Upaya memadukan apa yang dihasilkan berbagai UK/UPT litbang dengan lokal genius yang dikembangkan masyarakat merupakan inti dari program pengkajian dan percepatan diseminasi inovasi pertanian.

- 11) Pengembangan kelembagaan mencakup pengembangan budaya kerja inovatif berorientasi bisnis, pengembangan sumber daya Litbang (SDM, sarana dan prasarana) diikuti pengembangan standardisasi dan akreditasi lembaga dan pranata Litbang. Guna memacu tercapainya output yang optimal, maka diperlukan pengembangan manajemen teknologi informasi dan sistem informasi serta koordinasi jaringan kerja sama penelitian dan pengkajian, penyempurnaan sistem perencanaan, pendanaan, monitoring dan evaluasi.
- 12) Pengembangan perpustakaan digital lingkup Kementerian Pertanian dilakukan untuk lebih meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan informasi. Peningkatan penyebarluasan teknologi pertanian terus dilakukan melalui berbagai media diseminasi, antara lain media elektronik, tercetak, pameran dan seminar serta media tradisional yang berkembang di masyarakat.

## 2. *Revitalisasi Industri Hilir*

Dalam rangka revitalisasi industri hilir, dipilih komoditas yang bisa dijadikan sebagai penghela tumbuhnya industri pedesaan yang mempunyai potensi untuk peningkatan nilai tambah dan daya saing serta mempunyai *multiplier effect* yang luas terhadap peningkatan industri pedesaan.

Untuk itu, revitalisasi Industri Hilir pertanian akan dilakukan melalui upaya-upaya:

- 1) Penumbuhkembangan industri pedesaan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian yang akan dilakukan melalui:
  - (1) Perbaikan dan penguatan teknologi dari industri pedesaan yang sudah ada.
  - (2) Pertumbuhan industri pedesaan yang dapat memanfaatkan hasil samping secara optimal.
  - (3) Penumbuhan industri pengolahan yang mampu dikerjakan oleh kelompok tani, gabungan kelompok tani dan koperasi pertanian.



- (4) Penumbuhan industri perdesaan penanganan produk segar hortikultura.
- 2) Prioritas komoditas yang akan dikembangkan selama 2010-2014 adalah beras, tepung lokal (mocaf = *modified cassava flour*, sagu, ganyong), jagung, kedelai, buah-buahan, tanaman obat, sawit, kakao, karet, kopi, tebu, susu, mete, pakan ternak skala kecil, pengolahan produk pangan fermentasi dan non fermentasi serta derivasi produk.
- 3) Peningkatan daya saing produk pertanian melalui penguatan posisi tawar pertanian yang akan dilakukan melalui upaya:
  - (1) Penerapan HPP untuk komoditas strategis.
  - (2) Peningkatan citra produk pertanian Indonesia.
  - (3) Kampanye yang dapat mendorong peningkatan konsumsi produk lokal.
- 4) Peningkatan kapasitas POKTAN/GAPOKTAN untuk memperkuat posisi tawar dalam perdagangan produk pertanian yang akan dilakukan melalui :
  - (1) Penguatan kelembagaan (aspek legal dalam bentuk koperasi).
  - (2) Pengembangan kemitraan POKTAN dengan pihak ketiga (industri pengolahan, eksportir, BULOG, dan lain-lain).
  - (3) Penguatan kemampuan poktan untuk melakukan penanganan bahan segar dan pengolahan produk pertanian
- 5) Peningkatan kualitas SDM penyuluh, petani dan pelaku industri perdesaan untuk peningkatan efisiensi biaya produksi dan peningkatan mutu yang akan dilakukan melalui upaya:
  - (1) Pelatihan TOT untuk penyuluh pertanian
  - (2) Pelatihan dan pendampingan
- 6) Pemberian insentif untuk menunjang berkembangnya industri hilir seperti:

- (1) Insentif penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah produk.
  - (2) Insentif untuk mengembangkan produk-produk pertanian yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat seperti kedelai atau yang mempunyai potensial ekspor yang sangat baik.
  - (3) Insentif skema pembiayaan dengan bunga rendah yang dapat terjangkau petani dan industri perdesaan.
- 7) Peningkatan dan pengamanan mutu produk pertanian dengan menerapkan standarisasi dan keamanan pangan mulai dari proses produksi hingga produk di tangan konsumen melalui upaya:
- (1) Penguatan dan perbaikan teknologi produksi dari hulu sampai hilir.
  - (2) Pengembangan/penerapan Standar Jaminan Mutu Komoditas Pertanian (SJMKP) dan Standar Jaminan Mutu (SJM) pada penanganan produk segar dan produk olahan pertanian, serta pada komoditas yang mempunyai prospek pasar luar negeri.
  - (3) Peningkatan jumlah dan peran Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK) yang meliputi : Lembaga Sertifikasi (LS Produk, LS sistem mutu, LS Personel, LS Pangan Organik); Laboratorium Uji, Lembaga Inspeksi dan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) sesuai kebutuhan daerah.









# BAB V PROGRAM, KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN



## V. PROGRAM, KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN PERTANIAN

### 5.1 Program dan Kegiatan Kementerian Pertanian

Sesuai pedoman dalam Reformasi Perencanaan dan Penganggaran (RPP), setiap eselon I mempunyai satu program dan nama program mencerminkan nama eselon I, sehingga di lingkup Kementerian Pertanian ditetapkan 12 program.

Dua belas program yang dilaksanakan Kementerian Pertanian untuk periode 2010-2014 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan
2. Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan
3. Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
4. Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal.
5. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
6. Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian
7. Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
8. Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing
9. Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani
10. Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati
11. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian
12. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian

**Boks 5.1**

**Pokok-Pokok Reformasi Perencanaan dan Penganggaran  
(SEB Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS dan  
Menteri Keuangan, No. 0142/M.PPN/06/2009 tanggal 19 Juni 2009)**

- Penganggaran berbasis kinerja (tiap pejabat atau unit kerja melaksanakan kegiatan sesuai TUPOKSI organisasi)
- Kerangka pengeluaran jangka menengah

Unit Kerja	Basis Penyusunan Kinerja	Instrumen	Indikator Kinerja
Menteri	Tupoksi		Impact <sup>5)</sup>
Eselon I	Tupoksi	Program <sup>1)</sup>	Outcome <sup>4)</sup>
Eselon II	Tupoksi	Kegiatan <sup>2)</sup>	Output <sup>3)</sup>

*Keterangan:*

- 1). Nama program mencerminkan nama unit organisasi Eselon I yang bersangkutan.*
- 2). Nama kegiatan mencerminkan nama unit organisasi Eselon II yang bersangkutan.*
- 3). Output merupakan keluaran atau hasil dari kegiatan*
- 4). Outcome mencerminkan hasil keseluruhan dari kegiatan*
- 5). Impact menggambarkan hasil pencapaian outcome*

Pokok-pokok Reformasi Perencanaan dan Penganggaran (RPP) dijabarkan lebih rinci dalam bentuk tabel keterkaitan Program, Kegiatan, Sasaran, Indikator, Target dan Pendanaan sebagaimana pada Lampiran 50.

Uraian kegiatan dari masing-masing program adalah sebagai berikut:

**1. PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, DAN MUTU TANAMAN PANGAN UNTUK MENCAPAI SWASEMBADA & SWASEMBADA BERKELANJUTAN**

- Dukungan Manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
- Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia;
- Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi;
- Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan;
- Penanganan Pascapanen tanaman pangan;

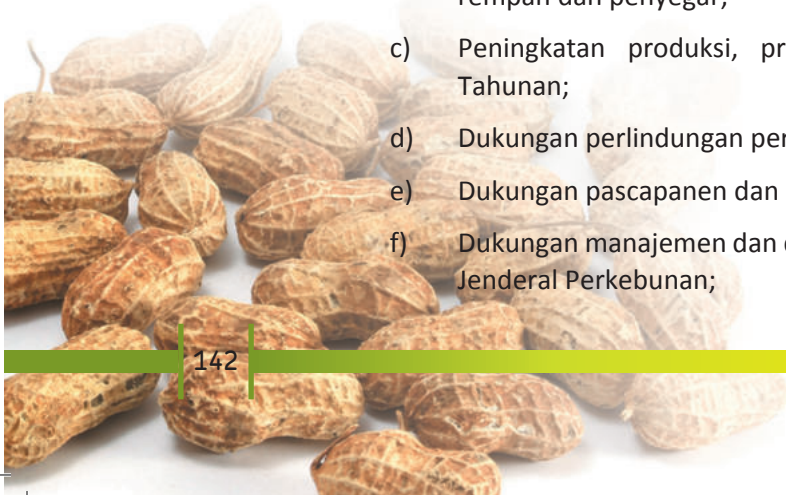
- f) Penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT;
- g) Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih;
- h) Pengembangan Peramalan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan.

**2. PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, DAN MUTU PRODUK TANAMAN HORTIKULTURA BERKELANJUTAN**

- a) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan;
- b) Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan;
- c) Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan;
- d) Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura;
- e) Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura;
- f) Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura.

**3. PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS, DAN MUTU TANAMAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN**

- a) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim;
- b) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar;
- c) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman Tahunan;
- d) Dukungan perlindungan perkebunan;
- e) Dukungan pascapanen dan pembinaan usaha perkebunan;
- f) Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Perkebunan;



- g) Dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan (BBP2TP Surabaya, Medan dan Ambon).

**4. PENCAPAIAN SWASEMBADA DAGING SAPI DAN PENINGKATAN PENYEDIAAN PANGAN HEWANI YANG AMAN, SEHAT, UTUH, DAN HALAL**

- a) Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumber daya lokal;
- b) Peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal;
- c) Peningkatan produksi pakan ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal;
- d) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis;
- e) Penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan;
- f) Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Peternakan.

**5. PENINGKATAN NILAI TAMBAH, DAYA SAING, INDUSTRI HILIR, PEMASARAN DAN EKSPOR HASIL PERTANIAN**

- a) Pengembangan pengolahan hasil pertanian;
- b) Pengembangan mutu dan standardisasi pertanian;
- c) Pengembangan usaha dan investasi;
- d) Pengembangan pemasaran domestik;
- e) Pengembangan pemasaran internasional;
- f) Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.

**6. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN**

- a) Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian;
- b) Pengelolaan air irigasi untuk pertanian;
- c) Penyaluran pupuk bersubsidi;
- d) Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian;
- e) Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP);
- f) Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Prasarana dan sarana pertanian.

**7. PROGRAM PENCIPTAAN TEKNOLOGI DAN VARIETAS UNGGUL BERDAYA SAING**

- a) Dukungan manajemen, fasilitasi dan instrumen teknis dalam pelaksanaan kegiatan litbang pertanian;
- b) Penelitian dan pengembangan tanaman pangan;
- c) Penelitian dan pengembangan tanaman hortikultura;
- d) Penelitian dan pengembangan tanaman perkebunan;
- e) Penelitian dan pengembangan peternakan;
- f) Penelitian/analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian;
- g) Pengembangan perpustakaan dan penyebaran teknologi pertanian;
- h) Penelitian/perekayasaan dan pengembangan mekanisasi pertanian;
- i) Penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian;
- j) Penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian;
- k) Penelitian dan pengembangan pasca panen pertanian;

- l) Pengkajian dan percepatan diseminasi inovasi teknologi pertanian.

**8. PENGEMBANGAN SDM PERTANIAN DAN KELEMBAGAAN PETANI**


- a) Revitalisasi Pendidikan Pertanian ,Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian;
- b) Pengembangan Pendidikan Menengah Pertanian;
- c) Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian;
- d) Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian;
- e) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya.

**9. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**

- a) Pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar;
- b) Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan;
- c) Pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
- d) Dukungan Manajemen dan teknis lainnya pada Badan Ketahanan Pangan.

**10. PENINGKATAN KUALITAS KARANTINA PERTANIAN DAN PENGAWASAN KEAMANAN HAYATI**

- a) Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewani;
- b) Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati;
- c) Peningkatan Kepatuhan, Kerjasama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinaan;
- d) Peningkatan Kualitas Pelayanan karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati;

- 
- e) Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan laboratorium Uji Standar dan Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian;
  - f) Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Badan Karantina Pertanian.

**11. PENGAWASAN DAN PENINGKATAN AKUNTABILITAS APARATUR KEMENTERIAN PERTANIAN**

- a) Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Inspektorat Jenderal;
- b) Peningkatan pelaksanaan pengawasan pada Satker lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian;
- c) Peningkatan pelaksanaan pengawasan pada Satker lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian serta Badan Ketahanan Pangan;
- d) Peningkatan pelaksanaan pengawasan pada Satker lingkup Ditjen Perkebunan, Ditjen P2HP dan Badan Litbang Pertanian;
- e) Peningkatan pelaksanaan pengawasan pada Satker lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian;
- f) Peningkatan pelaksanaan pengawasan tujuan tertentu pada Satker lingkup Kementerian Pertanian.

**12. DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KEMENTERIAN PERTANIAN**

- a) Koordinasi dan pembinaan perencanaan Kementerian Pertanian;
- b) Pengelolaan keuangan, perlengkapan dan kearsipan Kementerian Pertanian;
- c) Pembinaan hukum dan pengelolaan informasi publik;
- d) Peningkatan kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian;



- e) Penyelenggaraan ketatausahaan Kementerian Pertanian, kerumahtanggaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat di bidang pertanian;
- f) Pengembangan kerjasama luar negeri untuk bidang pangan dan pertanian dalam kerangka bilateral, regional dan multilateral;
- g) Pengembangan perstatistik dan sistem informasi pertanian;
- h) Perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian.

## 5.2 Pembiayaan Pembangunan Pertanian

Dengan menggunakan pendekatan ICVAR (*Incremental Capital Value-Added Ratio*), untuk mencapai target yang telah ditetapkan, maka investasi yang dibutuhkan untuk pembangunan pertanian guna mencapai target yang telah ditetapkan selama periode jangka waktu 2010-2014 adalah sangat besar, yaitu sekitar Rp 220 triliun lebih setiap tahunnya. Sebagian besar (85-90 persen) merupakan pembiayaan yang bersumber dari swasta, perbankan dan masyarakat. Sebagian kecil (sekitar 10-15 persen) anggaran tersebut disediakan oleh pemerintah baik melalui APBN maupun APBD. Besaran pembiayaan pembangunan pertanian selama 2010-2014 yang tercantum dalam Renstra Kementerian Pertanian ini hanya yang berasal dari pendanaan APBN khusus Bagian Anggaran 18 (tidak termasuk subsidi, DAK atau sumber pendanaan lainnya di luar BA 18).

Target pembangunan dan kebutuhan pendanaan pembangunan pertanian yang akan dilaksanakan Kementerian Pertanian tahun 2010-2014 berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/RC.110/1/2010 di uraikan lebih rinci pada Lampiran 50.

Sedangkan target pembangunan dan kebutuhan pendanaan pembangunan pertanian hasil revisi yang disesuaikan dengan perubahan organisasi Kementerian Pertanian 2012-2014 di uraikan lebih rinci pada tabel 5.1.

**TABEL 5.1**  
**TARGET PEMBANGUNAN DAN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN APBN TAHUN 2012-2014, KEMENTERIAN PERTANIAN**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Milyar Rp)			
				2012	2013	2014	2012	2013	2014		
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian	Meningkatnya pelaksanaan kegiatan Kementerian Pertanian melalui dukungan koordinasi, pembinaan, kerjasama luar negeri dan pelayanan administrasi	1	Persentase pencapaian Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP)	A	AA	AA	677,34	745,06	819,57	
			2	Peringkat Integritas Pelayanan Publik	1	1	1				
			3	Persentase Peningkatan pengelolaan keuangan dan perlengkapan yang dilaksanakan	WTP	WTP	WTP				
			4	Pelayanan perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian	100%	100%	100%				
1.1	Koordinasi dan pembinaan perencanaan Kementerian Pertanian	Peningkatan koordinasi dan pembinaan penyusunan rencana kerja kebijakan dan program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, sesuai siklus perencanaan serta ketatausahaan Kementerian	1	Jumlah dokumen kebijakan, program dan wilayah	25	27	30	44,00	48,40	53,24	
			2	Jumlah dokumen anggaran	27	30	31				
			3	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi	20	20	20				
			4	Jumlah laporan kinerja Kementerian Pertanian	158	15	15				
<i>Sub Total</i>											
								<b>44,00</b>	<b>48,40</b>	<b>53,24</b>	
1.2	Pengelolaan keuangan, perlengkapan, dan kearsipan Kementerian Pertanian	Pengelolaan keuangan dan perlengkapan secara akuntabel dan transparan serta pengelolaan kearsipan secara tertib	1	Jumlah dokumen penetapan pejabat pengelola keuangan Kementerian Pertanian, proses penyelesaian kerugian negara, dan realisasi pendapatan PNBG	4	4	4	80,11	88,12	96,93	
			2	Jumlah laporan verifikasi dokumen sumber laporan keuangan dan laporan keuangan dengan Sistem Akuntansi Instansi lingkup Kementerian Pertanian	3	3	3				
			3	Jumlah dokumen penyelesaian usulan penghapusan, pemanfaatan dan pengelolaan BMN Kementerian Pertanian	6	6	6				
			4	Laporan pelaksanaan penataan arsip, pembinaan fungsional arsiparis dan elektronisasi arsip	3	3	3				
			5	Laporan pengelolaan keuangan Sekretariat Jenderal dan pelaksanaan kegiatan Biro	7	7	7				
<i>Sub Total</i>											
								<b>80,11</b>	<b>88,12</b>	<b>96,93</b>	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Milyar Rp)			
				2012	2013	2014	2012	2013	2014		
				2012	2013	2014	2012	2013	2014		
1.3	Pembinaan hukum dan pengelolaan informasi publik	Tersedianya produk hukum dan perundang-undangan di bidang pertanian, pemasyarakatan pertanian melalui berbagai media dan terlaksananya komunikasi publik di bidang informasi pembangunan pertanian	1	Jumlah dokumen peraturan perundang-undangan bidang pertanian yang diterbitkan (dokumen)	5	5	5	21,00	23,10	25,41	
			2	Jumlah naskah perjanjian yang dihasilkan (dokumen)	3	3	3				
			3	Jumlah bantuan hukum yang dilaksanakan (laporan)	4	4	4				
			4	Kualitas layanan informasi publik bidang pertanian (persen)	80	85	90				
			5	Jumlah kompendium hukum, himpunan peraturan menteri, dan penempatan dalam berita negara (laporan)	8	8	8				
			6	Kelengkapan prasarana dan sarana pendukung di Biro Hukum dan Informasi Publik (persen)	70	75	80				
<b>Sub Total</b>											
1.4	Peningkatan kualitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian	Penataan kelembagaan, pelayanan administrasi dan perencanaan serta pengembangan pegawai dan mutasi	1	Jumlah dokumen penataan kelembagaan yang dihasilkan	4	4	4	24,00	26,40	29,04	
			2	Jumlah laporan pembinaan jabatan fungsional, pelayanan publik dan budaya kerja	6	6	6				
			3	Jumlah dokumen ketatalaksanaan dan reformasi birokrasi yang dihasilkan	8	8	8				
			4	Jumlah dokumen perencanaan pengembangan dan mutasi pegawai yang dihasilkan	28	28	28				
<b>Sub Total</b>											
1.5	Penyelenggaraan ketatausahaan Kementerian Pertanian, kerumahtanggaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat di bidang pertanian	Peningkatan pelayanan administrasi, perlengkapan yang akurat,ibel dan transparan, dan terlaksananya pemasyarakatan program pembangunan pertanian dan komunikasi pembangunan pertanian	1	Jumlah laporan ketatausahaan pimpinan dan Kementerian	3	3	3	411,29	452,42	497,66	
			2	Jumlah laporan finalisasi kerumahtanggaan Kementerian Pertanian	3	3	3				
			3	Jumlah laporan penyebarluasan informasi dan pemasyarakatan program pembangunan pertanian	11	11	12				
			4	Jumlah laporan Hubungan Antar Lembaga	3	3	3				

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITY (Milyar Rp)		
				2012	2013	2014	2012	2013	2014
				5	2	2			
<i>Sub Total</i>									
1.6	Pengembangan kerjasama luar negeri untuk bidang pangan dan pertanian dalam kerangka bilateral, regional dan multilateral	Peningkatan kerja sama luar negeri di bidang pertanian melalui forum bilateral, regional dan multilateral serta PBB	1 Jumlah dokumen pembinaan dan penyelenggaraan kerjasama internasional 2 Jumlah laporan Nota Kesepakatan kerjasama pertanian dalam kerangka bilateral, regional dan multilateral, serta PBB untuk pangan dan pertanian	6	7	8	411,29	26,88	497,66
				12	13	14	24,44		29,57
<i>Sub Total</i>									
1.7	Pengembangan perstatistikan dan sistem informasi pertanian	Tersedianya data metodologi, hasil analisis dan sistem informasi pertanian, serta ketatausahaan	1 Laporan data pertanian (hulu, on-farm, dan hilir) 2 Laporan analisis data pertanian 3 Laporan pengembangan sistem dan teknologi informasi pertanian 4 Petugas pengelola dan pengumpul data pertanian yang dilatih	25	25	25	24,44	26,88	29,57
				19	19	19	54,66	60,13	66,14
				25	25	21			
				1.537	1.537	1.503			
<i>Sub Total</i>									
1.8	Perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian	Pelayanan perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian	1 Jumlah pelayanan permohonan hak PVT 2 Jumlah Tanda Daftar Varietas dan SDG Tanaman 3 Jumlah pelayanan hukum PVT/PP 4 "Jumlah surat izin bidang pertanian" 5 Jumlah rekomendasi teknis bidang pertanian 6 Jumlah laporan pengelolaan administrasi dan dukungan manajemen lainnya PVT/PP	50	50	39	17,83	19,61	21,57
				135	200	5			
				32	36	109			
				2000	1200	37			
				2200	2000	4			
				4	4	2.300			
<i>Sub Total</i>									
<i>Sub Total</i>									
2	Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertanian	95 ▲	95	95	95	70,49	77,53	85,28

# Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010 - 2014

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Milyar Rp)		
				2012	2013	2014	2012	2013	2014	
2.1	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Inspektorat Jenderal	Meningkatnya kapasitas manajemen administrasi, sumberdaya, sarana dan prasarana, anggaran serta piranti lunak organisasi lingkup Inspektorat Jenderal	1	Dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang disusun	10	10	10	37,74	41,51	45,66
			2	Laporan Keuangan Inspektorat Jenderal yang disusun sesuai Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP)	2	2	2			
			3	Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Laporan Hasil Audit (LHA) %	70	80	90			
			4	Penerapan Sistem Pengendalian Intern di Kementerian Pertanian	5	5	5			
2.2	Peningkatan pelaksanaan pengawasan pada Satker lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	1	Reviu Laporan Keuangan (LK) pada satker lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dan Reviu LK Kementerian (Laporan)	8	8	8	8,21	9,03	9,93
			2	Pengawasan dan evaluasi program/kegiatan strategis pada satker lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (Laporan)	2	2	2			
			3	Audit kinerja pada Satker lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (Satker)	100	102	104			
			4	Evaluasi AKIP pada Satker lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian dan Reviu AKIP Kementerian (Laporan)	4	4	4			
2.3	Peningkatan pelaksanaan pengawasan pada Satker lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian serta Badan Ketahanan Pangan	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian serta Badan Ketahanan Pangan	1	Reviu Laporan Keuangan pada satker lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dan Badan Ketahanan Pangan (Laporan)	6	6	6	6,16	6,78	7,46
			2	Pengawasan dan evaluasi program/kegiatan strategis pada satker lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dan Badan Ketahanan Pangan (Laporan)	2	2	2			

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITY (Milyar Rp)			
				2012	2013	2014	2012	2013	2014	
2.4	Peningkatan pelaksanaan pengawasan pada Satker lingkup Ditjen Perkebunan, Ditjen P2HP dan Badan Litbang Pertanian	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkup Ditjen Perkebunan, Ditjen P2HP dan Badan Litbang Pertanian	3	Audit kinerja pada Satker lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dan Badan Ketahanan Pangan (Satker)	100	102	104			
			4	Evaluasi AKIP pada Satker lingkup Ditjen Tanaman Pangan, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, dan Badan Ketahanan Pangan (Laporan)	3	3	3			
			1	Revisi Laporan Keuangan pada satker Ditjen Perkebunan, Ditjen P2HP dan Badan Litbang Pertanian (Laporan)	6	6	6	6,16	6,78	7,46
			2	Pengawasan dan evaluasi program/kegiatan strategis pada satker Ditjen Perkebunan, Ditjen P2HP dan Badan Litbang Pertanian (Laporan)	2	2	2			
2.5	Peningkatan pelaksanaan pengawasan pada Satker lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan & Kesehatan Hewan, dan Badan Karantina Pertanian	3	Audit kinerja pada Satker lingkup Ditjen Perkebunan, Ditjen P2HP dan Badan Litbang Pertanian (Satker)	100	102	104			
			4	Evaluasi AKIP pada Satker lingkup Ditjen Perkebunan, Ditjen P2HP dan Badan Litbang Pertanian (Laporan)	3	3	3			
			1	Revisi Laporan Keuangan pada satker Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian (Laporan)	6	6	6	6,12	6,73	7,40
			2	Pengawasan dan evaluasi program/kegiatan strategis pada satker Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian (Laporan)	2	2	2			
2.5	Peningkatan pelaksanaan pengawasan pada Satker lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan & Kesehatan Hewan, dan Badan Karantina Pertanian	3	Audit kinerja pada Satker lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian (Satker)	100	102	104			
			4	Evaluasi AKIP pada Satker lingkup Inspektorat Jenderal, Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, Badan Karantina Pertanian (Laporan)	3	3	3			

# Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010 - 2014

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Milyar Rp)		
				2012	2013	2014	2012	2013	2014	
				2.6	Peningkatan pelaksanaan pengawasan tujuan tertentu pada Setter lingkup Kementerian Pertanian	1 Meningkatnya pelaksanaan pengawasan tujuan tertentu pada satket di lingkup Kementerian Pertanian	1	1	1	6,09
3	Program peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman pangan untuk mencapai swasembada dan swasembada berkelanjutan	1 Mewujudkan pencapaian produksi secara berkelanjutan dalam rangka penyediaan kebutuhan nasional	1 Jumlah Produksi (ribu ton) ● Padi (ribu ton) ● Jagung (ribu ton) ● Kedelai (ribu ton) ● Kacang Tanah (ribu ton) ● Kacang Hijau (ribu ton) ● Ubi Kayu (ribu ton) ● Ubi Jalar (ribu ton)	67.825 24.000 1.900 1.100 390 25.000 2.300	72.064 26.000 2.250 1.200 410 26.300 2.450	76.568 29.000 2.700 1.300 430 27.600 2.600	3.115,49	4.027,46	5.213,02	
		2 Mengamankan potensi kehilangan hasil akibat serangan OPT dan terkena DPI	2 Luas areal tanaman pangan yang ditoleransi terserang OPT dan terkena DPI (ribu Ha)	88	88	88				
		3 Mengamankan kehilangan (susut) hasil produksi	3 Susut Hasil Produksi (%) ● Susut Hasil Produksi Padi ● Susut Hasil Produksi Jagung ● Susut Hasil Produksi Kedelai	1,53 0,25 0,50	1,79 0,25 0,75	1,70 0,25 1,00				
3.1	Dukungan Manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	1 Meningkatkan kinerja lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	1 Dokumen manajemen perencanaan, keuangan, umum serta evaluasi dan pelaporan (Paket)	1	1	1	173,21	225,18	292,73	
		2 Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan tanaman pangan	2 Bantuan bencana alam dalam rangka pengamanan produksi (Paket)	1	1	1	45,60	45,60	45,60	
		3 Bantuan Modal untuk LM3 (paket)	3 Bantuan Modal untuk LM3 (paket)	1	1	1	30,00	30,00	30,00	
<i>Sub Total</i>							<b>248,81</b>	<b>300,78</b>	<b>368,33</b>	

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITYAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITYAS (Milyar Rp)			
				2012	2013	2014	2012	2013	2014	
3.2	Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia	Mendorong peningkatan produktivitas melalui pelaksanaan Sekolah Lapangan (SL) dan Dem Area	1	Luas SLPTT Padi meningkat produktivitas 0.5-1 ku/ha (ribu ha)	3.557.600	4.624.880	6.012.344	805,12	1.046,66	1.360,65
			2	Luas SLPTT jagung meningkat produktivitas 0.30 ku/ha (ribu ha)	200.000	260.000	338.000	49,33	64,13	83,37
			3	Pengembangan, pembinaan dan pengawalan (Paket)	1	1	1	89,84	116,79	151,82
<i>Sub Total</i>							<b>944,29</b>	<b>1.227,57</b>	<b>1.595,85</b>	
3.3	Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	Mendorong peningkatan produktivitas melalui pelaksanaan Sekolah Lapangan (SL) dan Dem Area	1	Luas SLPTT Kedelai meningkat produktivitas 0,20 ku/ha (ribu ha)	350.000	455.000	591.500	137,55	178,81	232,46
			2	Pengembangan, pembinaan dan pengawalan (Paket)	1	1	1	38,20	49,66	64,56
<i>Sub Total</i>							<b>175,74</b>	<b>228,47</b>	<b>297,02</b>	
3.4	Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	Meningkatnya penggunaan benih unggul sehingga dapat mendorong peningkatan produksi	1	Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU) untuk kawasan SLPTT dan non SLPTT						
				BLBU Padi (ton)	84.500	109.850	142.805	938,25	1.219,72	1.585,64
				BLBU Jagung (ton)	3.000	3.900	5.070	120,00	156,00	202,80
				BLBU Kedelai (ton)	14.000	18.200	23.660	189,00	245,70	319,41
			2	Pengembangan Penanganan Benih (ha)	10.000	13.000	16.900	35,00	45,50	59,15
			3	Pengembangan, pembinaan dan pengawalan (Paket)	1	1	1	171,00	222,30	288,99
<i>Sub Total</i>							<b>1.453,25</b>	<b>1.889,27</b>	<b>2.455,99</b>	
3.5	Penguatan Pascapanenan tanaman pangan	Mengamankan kehilangan hasil produksi pada saat pascapanenan (susut)	1	Jumlah Bantuan Sarana Pasca Panen (unit)	443	487	536	67,41	87,63	113,92
			2	Pengembangan, pembinaan dan pengawalan (Paket)	1	1	1	23,12	30,06	39,08
<i>Sub Total</i>							<b>90,54</b>	<b>117,70</b>	<b>153,00</b>	
3.6	Penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan OPT dan DPI	Mengendalikan serangan OPT dan terkena DPI di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat	1	SLPHT dan SU (unit)	2.071	2.692	3.500	41,60	54,08	70,30
			2	Jumlah Bantuan Sarana Pengendalian OPT (paket)	1	1	1	9,90	12,87	16,73
			3	Pengembangan, pembinaan dan pengawalan (paket)	1	1	1	134,70	175,11	227,64
<i>Sub Total</i>							<b>186,20</b>	<b>242,06</b>	<b>314,68</b>	



NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITY (Milyar Rp)				
				2012	2013	2014	2012	2013	2014		
3.7	Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih	<p>▲ Meningkatkan metode pengujian mutu benih tanaman pangan</p>	1	Jumlah laboratorium yang menerapkan sistem mutu	1	1	1	7,30	9,49	12,34	
			2	Jumlah Laboratorium peserta uji profisiensi	1	1	1				
			3	Jumlah pelaksanaan uji petik mutu benih yang beredar	1	1	1				
<i>Sub Total</i>											
3.8	Pengembangan Peramalan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan	<p>▲ Meningkatkan metode pengamatan serangan OPT</p>	1	Jumlah informasi peramalan serangan OPT	1	1	1	9,35	12,16	15,81	
			2	Jumlah teknologi pengamatan, peramalan, dan pengendalian OPT	1	1	1				
<i>Sub Total</i>											
4.	<p>▲ Program Peningkatan, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan</p>	<p>Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman hortikultura yang aman konsumsi berdaya saing dan berkelanjutan</p>	1	Produksi Hortikultura							
			a	Buah							
			1)	Jeruk (ton)	2.138.688	2.244.162	2.362.991				
			2)	Mangga (ton)	2.351.473	2.467.440	2.598.092				
			3)	Manggis (ton)	102.361	107.409	113.096				
			4)	Durian (ton)	766.150	803.935	846.503				
			5)	Pisang (ton)	6.399.335	6.714.930	7.070.489				
			6)	Buah Pohon dan Perdu lainnya (ton)	3.705.287	3.888.023	4.093.880				
			7)	Buah Semusim dan Merambat (ton)	762.001	799.576	841.930				
			8)	Buah Terna lainnya (ton)	2.445.805	2.566.425	2.702.318				
			<b>Total Buah (ton)</b>		<b>18.671.100</b>	<b>19.591.900</b>	<b>20.629.300</b>				
			b	Sayuran							
			1)	Cabe (ton)	1.423.500	1.473.300	1.524.700				
			2)	Bawang Merah (ton)	1.122.000	1.161.300	1.201.900				
3)	Kentang (ton)	1.128.100	1.167.600	1.211.400							
4)	Jamur (ton)	67.100	70.300	73.800							
<i>Sub Total</i>											
							<b>581,88</b>	<b>627,31</b>	<b>670,27</b>		

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Milyar Rp)		
				2012	2013	2014	2012	2013	2014	
			5) Sayuran Umbil lainnya (ton)	494.600	523.400	557.400				
			6) Sayuran Daun (ton)	3.313.100	3.420.900	3.535.000				
			7) Sayuran Buah lainnya (ton)	4.049.500	4.270.800	4.521.300				
			<b>Total Sayuran (ton)</b>	<b>11.591.900</b>	<b>12.087.600</b>	<b>12.625.500</b>				
			<b>c Tanaman Obat</b>							
			1) Temulawak (ton)	28.903	30.218	31.729				
			2) Tanaman Obat Rimpang lainnya (ton)	351.636	367.636	386.018				
			3) Tanaman Obat Non Rimpang (ton)	73.625	76.946	80.462				
			<b>Total Tanaman Obat (ton)</b>	<b>454.200</b>	<b>474.800</b>	<b>498.200</b>				
			<b>d Tanaman Florikultura</b>							
			1) Anggrek (Tangkal)	14.948.699	15.419.999	15.906.749				
			2) Krisan (Tangkal)	201.368.750	209.956.535	218.910.706				
			3) Tan. Hias Bunga dan Daun lainnya (Tangkal)	215.205.222	224.321.553	233.786.499				
			4) Tan. Pot dan Tan. Taman (pohon)	15.711.863	16.317.374	16.958.842				
			5) Tan. Bunga Tabur (melati) (kg)	23.943.123	25.209.799	26.544.647				
			<b>2 Jumlah Ketersediaan Benih bermutu (%).</b>							
			a) Benih Buah (%):	3	4	4				
			b) Benih Sayur (%):	2	4	4				
			c) Benih Tanaman Obat (%):	1	2	2				
			d) Benih Florikultura (%):	2	3	3				
			<b>3 Luas serangan OPT utama hortikultura terhadap total luas panen (%).</b>	Maksimal 5% terhadap luas panen	Maksimal 5% terhadap luas panen	Maksimal 5% terhadap luas panen				

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Milyar Rp)			
				2012	2013	2014	2012	2013	2014	
4.1	Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan (Prioritas Nasional dan Bidang)	Meningkatnya luas areal, perbaikan pengelolaan kebun dan penanganan pascapanenan buah	1	Kawasan tanaman buah (Ha)	5.900	6.000	6.100			
			2	Registrasi kebun tanaman buah (kebun)	800	850	900			
			3	Fasilitas pengelolaan pasca panen tanaman buah (Unit)	64	84	100			
			4	Perbaikan mutu pengelolaan kebun tanaman buah (kelompok)	418	-	-			
			5	Pengembangan Registrasi Packing House	26	-	-			
			6	Peningkatan Jumlah Kelembagaan Usaha Tanaman Buah (lembaga)	253	-	-			
<b>Sub Total</b>							<b>146,29</b>	<b>117,00</b>	<b>121,00</b>	
4.2	Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan (Prioritas Bidang)	Meningkatnya luas areal, perbaikan pengelolaan lahan usaha dan penanganan pascapanenan tanaman florikultura	1	Kawasan Tanaman Florikultura (m2)	356.850	412.563	474.447			
			2	Registrasi lahan usaha tanaman florikultura (Unit usaha)	29	20	16			
			3	Fasilitas pengelolaan pasca panen tanaman florikultura (Unit)	141	160	175			
			4	Perbaikan mutu pengelolaan unit usaha tanaman florikultura (kelompok)	132	-	-			
			5	Peningkatan Jumlah Kelembagaan Usaha Tanaman Florikultura (lembaga)	100	-	-			
<b>Sub Total</b>							<b>49,34</b>	<b>57,60</b>	<b>64,00</b>	
4.3	Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelanjutan (Prioritas Nasional dan Bidang)	Meningkatnya luas areal dan perbaikan pengelolaan lahan usaha dan penanganan pascapanenan sayuran dan tanaman obat	1	Kawasan tanaman sayuran (Ha)	4.556	4.732	4.969			
			2	Kawasan tanaman obat (Ha)	707	720	750			
			3	Registrasi lahan usaha tanaman sayuran dan tanaman obat (lahan usaha)	630	925	1.200			
			4	Fasilitas pengelolaan pasca panen sayuran dan tanaman obat (unit)	470	525	550			
			5	Perbaikan mutu pengelolaan lahan usaha tanaman sayuran dan tanaman obat (kelompok)	278	-	-			
			6	Pengembangan Registrasi Packing House (unit)	9	-	-			

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITYAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITYAS (Milyar Rp)			
				2012	2013	2014	2012	2013	2014	
			7	Peningkatan Jumlah Kelembagaan Usaha Tani- man Sayuran dan Tanaman Obat (lembaga)	274	-	-	103,06	109,00	114,00
<i>Sub Total</i>										
4.4	Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura (Prioritas Bidang)	Berkembangnya sistem perbenihan hortikultura dalam mendukung pengembangan kawasan hortikultura	1 2 3 4 5 6	Benih tanaman sayuran bermutu (kg) Benih tanaman florikultura bermutu (Benih) Benih tanaman obat bermutu (kg) Benih tanaman buah bermutu (batang) Lembaga perbenihan hortikultura (Unit) Peningkatan kapasitas laboratorium perbenihan hortikultura (unit)	467.292 10.143.982 10.737 929.860 133 427	711.516 5.986.978 10.951 1.022.846 163 -	1.014.974 6.106.717 11.061 1.053.531 170 -			
<i>Sub Total</i>										
4.5	Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura (Prioritas Nasional dan Bidang)	Terkebihnya serangan OPT dalam pengamanan produksi hortikultura dan terpenuhinya persyaratan teknis yang terkait dengan perlindungan tanaman dalam mendukung ekspor hortikultura	1 2 3 4 5 6	Fasilitas Pengelolaan OPT (kali) Rekomendasi Dampak Perubahan Iklim (Rekomendasi) Lembaga perlindungan tanaman hortikultura (Unit) Draft Pest List persyaratan teknis SPS (draft pest list) SLPHT (Kelompok) Peningkatan kapasitas laboratorium perlindungan tanaman hortikultura (unit)	1.077 65 172 13 537 125	1.550 72 127 15 600 -	1.700 72 127 15 660 -			126,71
<i>Sub Total</i>										
4.6	Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Hortikultura	Meningkatnya kapasitas manajemen administrasi, sarana sumberdaya manusia, sarana dan prasarana anggaran serta piranti lunak organisasi pengembangan produksi hortikultura	1 2 3 4	Pelayanan Manajemen (Bulan) Laporan Kinerja (Laporan) Dokumen Manajemen (Dokumen) Lembaga Pengembangan Hortikultura Pengerak Membangun Desa (PMD)/Kelom- poka petani pada area perurban (Kelompok)	12 7 22 220	12 7 22 240	12 7 22 260			75,00
<i>Sub Total</i>										
								65,00	75,00	82,50

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITY (Milyar Rp)			
				2012	2013	2014	2012	2013	2014	
			Lembaga Mandiri dan Mengakar di Masyarakat (LM3) (Lembaga)	80	100	120				
<i>Sub Total</i>										
5	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan yang berkelanjutan	1	Produksi tanaman unggulan perkebunan (ribu ton):	134,00	142,00	149,00	1.488,77	701,36	771,50
				- Tebu (hablur)	2.964	3.209	3.446			
				- Kapas (kapas berbiji)	40	57	63			
				- Cengkeh (bunga kering)	83	84	86			
				- Tembakau (daun kering)	183	183	184			
				- Nilam (daun kering)	106	116	124			
				- Kakao (biji kering)	833	958	1.054			
				- Kopi (biji kering)	748	763	771			
				- Teh (daun kering)	152	160	165			
				- Lada (lada kering)	87	89	92			
				- Karet (karet kering)	2.741	2.771	2.801			
				- Kelapa (setara kopra)	3.317	3.348	3.380			
				- Kelapa Sawit (CPO)	25.710	27.046	28.439			
				- Jambu mete (gelondong kering)	152	156	159			
				- Jarak pagar (biji kering)	24	29	35			
				- Kemiri Sunan (biji kering)	5	5	6			
			2	Produktivitas tanaman unggulan perkebunan (kg/ha)						
				- Tebu (hablur)	6.400	6.780	7.070			
				- Kapas (kapas berbiji)	2.000	2.200	2.500			
				- Cengkeh (bunga kering)	281	284	300			
				- Tembakau (daun kering)	890	892	893			
				- Nilam (daun kering)	6.500	6.550	6.600			

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Milyar Rp)			
				2012	2013	2014	2012	2013	2014	
5.1	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim (Prioritas Nasional dan Bidang)	Peningkatan luas areal tananaman semusim	1 Luas areal tananaman semusim (ribu hektar) ● Swasembada Gula Nasional - Tebu 463 473 487 ● Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi Dalam Negeri - Kapas 20 24 25 ● Pengembangan Komoditas Ekspor - Tembakau 205 205 205 - Nilam 16 17 18	925	1.000	1.200				
				- Kopi (biji kering)	743	750	758			
				- Teh (daun kering)	1.569	1.616	1.673			
				- Lada (lada kering)	722	734	760			
				- Karet (karet kering)	579	616	640			
				- Kelapa (setara kopra)	1.135	1.151	1.200			
				- Kelapa Sawit (CPO)	4.109	4.225	4.344			
				- Jambu mete (gelondong kering)	1.009	1.014	1.019			
				- Jarak pagar (biji kering)	1.500	1.750	2.000			
				- Kemiri Sunan (biji kering)	16.000	16.000	16.000			
				231,41			162,16		178,38	
<b>Sub Total</b>				<b>231,41</b>			<b>162,16</b>		<b>178,38</b>	
5.2	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar (Prioritas Nasional dan Bidang)	Peningkatan luas areal tananaman rempah dan penyegar	1 Luas areal tananaman rempah dan penyegar (ribu hektar) ● Pengembangan Komoditas Ekspor - Kakao 1.709 1.753 1.806 - Kopi 1.306 1.333 1.365 - Teh 124 131 136	719,56			61,32		67,45	

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITY		
				2012	2013	2014	2012	2013	2014	
				- Lada	194	195	196			
				● <i>Pengembangan Komoditas Pemenuhan Konsumsi Dalam Negeri</i>						
				- Cengkeh	474	479	484			
				● <i>Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional (ribu ha)</i>						
				- Rehabilitasi	15	15	10			
				- Intensifikasi	15	20	20			
				- Peremajaan	5	5	5			
				<b>Sub Total</b>				<b>719,56</b>	<b>61,32</b>	<b>67,45</b>
5.3	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman Tahunan (Priority Nasional dan Bidang)	▲ Peningkatan luas areal tanaman tahunan	1	Luas areal tanaman tahunan (ribu hektar)	204,44	214,66	225,40			
				● <i>Pengembangan Komoditas Ekspor</i>						
				- Karet	3.466	3.476	3.487			
				- Kelapa	3.820	3.827	3.833			
				- Kelapa sawit	8.557	8.772	8.987			
				- Jambu Mete	575	576	577			
				● <i>Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bio energi)</i>						
				- Jarak Pagar	15	18	21			
				- Kemiri sunan	1,5	2	2			
				● <i>Revisulasi perkebunan</i>						
				- Karet	5	5	5			
				- Kelapa sawit	31	30	30			
				- Kakao	2	2	2			
				<b>Sub Total</b>				<b>204,44</b>	<b>214,66</b>	<b>225,40</b>
5.4	Dukungan perlindungan perkebunan (Priority Bidang)	▲ Penurunan luas areal yang terserang OPT	▲	Dukungan Pengembangan Tanaman Perkebunan Berkelanjutan Luas areal pengendalian OPT Perkebunan (hektar)	59.730	59.430	54.876	26,76	29,44	32,38
				<b>Sub Total</b>				<b>26,76</b>	<b>29,44</b>	<b>32,38</b>

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Milyar Rp)		
				2012	2013	2014	2012	2013	2014	
5.5	Dukungan pascapanen dan pembinaan usaha perkebunan	▲ Peningkatan mutu produk perkebunan dan usaha perkebunan berkelanjutan  ▲	Dukungan Pengembangan Tanaman Perkebunan berkelanjutan	110	120	130	25,17	27,68	30,45	
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah kelompok tani yang menerapkan penanganan pasca panen sesuai GHP (kelompok tani)</li> </ul>							
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Yang Layak Mengikuti Permbanan Sertifikat ISO</li> </ul>	180	306	334				
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah penanganan kasus gangguan usaha perkebunan (perusahaan)</li> </ul>	40	42	44				
<b>Sub Total</b>										
5.6	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Perkebunan	▲ Peningkatan pelayanan dan pembinaan di bidang manajemen dan teknis pembangunan perkebunan  ▲	Dukungan Pengembangan Tanaman Perkebunan berkelanjutan	32	32	32	217,76	247,90	281,39	
<b>Sub Total</b>										
5.7	Dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan BBP2TP Surabaya	▲ Peningkatan pengawasan dan pengujian benih tanaman perkebunan dan penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan  ▲	Dukungan Pengembangan Tanaman Perkebunan berkelanjutan	13.551	14.239	14.950	18,78	19,01	19,95	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah bibit yang disertifikasi (ribu batang)</li> <li>Jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan (paket)</li> </ul>	6	6	6					
5.8	Dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan BBP2TP Medan	▲ Peningkatan pengawasan dan pengujian benih tanaman perkebunan dan penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan  ▲	Dukungan Pengembangan Tanaman Perkebunan berkelanjutan	218.761	228.938	240.384	28,21	37,41	39,28	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah bibit yang disertifikasi (ribu batang)</li> <li>Jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan (paket)</li> </ul>	8	9	10					
5.9	Dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan BBP2TP Ambon	▲ Peningkatan pengawasan dan pengujian benih tanaman perkebunan dan penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan  ▲	Dukungan Pengembangan Tanaman Perkebunan berkelanjutan	465	486	535	16,69	17,50	18,37	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah bibit yang disertifikasi (ribu batang)</li> <li>Jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan (paket)</li> </ul>	9	9	9					
<b>Sub Total</b>										
							<b>63,68</b>	<b>73,92</b>	<b>77,60</b>	



# Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010 - 2014

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITY (Milyar Rp)			
				2012	2013	2014	2012	2013	2014		
6	Program Pencapaian Swasembada Daging, Sapi dan Peningkatan, Penyediaan Pangan, Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal	1	Meningkatnya ketersediaan pangan hewani (daging, telur, susu)	1	Produksi daging meningkat 4,25% per tahun (ton)	2.412.938	2.513.248	2.660.464	2.598,88	2.858,77	3.138,66
			2	Produksi telur meningkat 4,42% per tahun (ton)	1.647.973	1.720.833	1.791.609				
			3	Produksi susu meningkat 9,74% per tahun (ton)	1.208.379	1.329.472	1.470.237				
		2	Meningkatnya kontribusi ternak domestik dalam penyediaan pangan hewani (daging dan telur)	1	Kontribusi daging sapi domestik terhadap total produksi daging nasional meningkat (%)	21.4	22.5	23.5			
2	Kontribusi daging ayam buras terhadap total produksi daging nasional meningkat (%)		15.1	15.1	15.1						
6.1	Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumber daya lokal (Priority Bidang)	3	Meningkatnya ketersediaan protein hewani asal ternak	Ketersediaan protein hewani asal ternak per kapita meningkat 3,58 % per tahun (g/kapita/hr)	6.7	6.9	7.2				
			4	Tersedianya daging sapi domestik sebesar 90 persen	Produksi daging sapi domestik terhadap total penyediaan daging sapi nasional (%)	82.5	86.2	90.3			
				1	Peningkatan produksi perbenihan (ribu dosis semen)	7.160	7.976	8.820	1.016,60	1.041,29	1.168,01
			2	Peningkatan produksi bibit (ekor)	491.005	568.938	680.839				
6.2	Peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal (Priority Nasional dan Bidang)	Tercapainya peningkatan produksi dan populasi ternak	3	Peningkatan produksi embrio ternak (embrio)	580	640	700				
			4	Pengendalian sapi/kerbau betina produktif (klpk)	1.300	1.000	700				
			1	Peningkatan kelahiran ternak (juta ekor)	3.0	3.1	3.2	823,41	864,39	900,85	
			2	Peningkatan usaha budidaya ternak (klpk)	1.244	1.577	1.685				
6.3	Peningkatan produksi pakan ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal	Tercapainya peningkatan produksi pakan ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal	1	Pengembangan pakan ternak asal lumbuan dan hewan (kelompok)	10	10	13	132,88	179,84	191,47	
			2	Pengembangan hijauan pakan (klpk)	210	262	300				
			3	Pengembangan pakan olahan	145	152	172				
			4	Pengawasan mutu pakan dan pengembangan laboratorium pakan daerah	32	33	33				

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITY (Milyar Rp)		
				2012	2013	2014	2012	2013	2014	
6.4	Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis (Priority Nasional dan Bidang)	Terkendali dan tertanggulangnya penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis	1	Pengendalian, pencegahan dan pemberantasan Penyakit Hewan Menular Strategis Zoonosis (PMKSZ), Viral, Bakterial, Parasit dan Gangguan Reproduksi ( dosis)	7.964.752	8.976.802	10.133.173	362,11	377,95	412,41
			2	Penguatan Otoritas Veteriner (unit)	37	37	37			
6.5	Penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan (Priority Nasional dan Bidang)	Terjaminnya pangan asal hewan yang ASUH dan pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan	1	Pengendalian penyakit zoonosis dan kesrawan serta pelayanan veteriner (unit)	513	516	518	111,44	200,00	243,05
			2	Unit Usaha produk pangan asal hewan yang memenuhi persyaratan teknis kesmavet (paket)	108	88	90			
6.6	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Peternakan	Terjaminnya dukungan manajemen dan teknis	1	Jumlah dokumen pendukung pencapaian swasembada daging sapi sapi/kerbau dan penyediaan pangan hewani yang ASUH (perencanaan program, anggaran dan kerjasama; pemantauan dan evaluasi program/ kegiatan, data/informasi; kepegawalan, organisasi, hukum dan administrasi perkantoran; administrasi keuangan dan aset )	56	56	56	152,44	195,30	222,87
			2	Penyelesaian PP, Perpres, Kepmentan Turunan dari UU No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kewan	10	15	15			
7	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian	Meningkatnya usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian berkelanjutan	3	Pelaksanaan Pendataan Ternak	1	1	1			
			1	peningkatan produk olahan hasil pertanian yang bermutu untuk ekspor dan pasar domestik (persen/tahun)	5	5	5	519,62	1.434,37	1.664,03
7.1	Pengembangan pengolahan hasil pertanian (Priority Nasional dan Bidang)	Meningkatnya usaha pengolahan hasil pertanian yang berkelanjutan	2	Peningkatan net ekspor komoditas segar dan olahan (persen/tahun)	15	15	15			
			3	peningkatan jumlah lembaga pemasaran petani dalam rangka penyerapan pasar hasil pertanian di pasar domestik (persen/tahun)	5	5	5			
7.1	Pengembangan pengolahan hasil pertanian (Priority Nasional dan Bidang)	Meningkatnya usaha pengolahan hasil pertanian yang berkelanjutan	4	Peningkatan jumlah usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian (persen/tahun)	6	6	6			
			1	Jumlah unit usaha pengolahan hasil tanaman pangan (unit usaha)	95	4630	4660	230,36	1.000,00	1.119,00
			2	Jumlah unit usaha pengolahan hasil hortikultura (unit usaha)	45	65	75			

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Milyar Rp)		
				2012	2013	2014	2012	2013	2014	
				3	Jumlah unit usaha pengolahan hasil perkebunan (unit usaha)	90	95	100		
4	Jumlah unit usaha pengolahan hasil peternakan (unit usaha)	75	85	90						
7.2	Pengembangan mutu dan standarisasi pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)	Meningkatnya mutu hasil pertanian	1	Jumlah rancangan SNI produk pertanian (dokumen)	25	27	30	80,99	100,00	125,00
			2	Jumlah unit usaha yang menerapkan sistem jaminan mutu (unit usaha)	200	100	100			
			3	Jumlah laboratorium pengujian dan lembaga penilaian kesesuaian (unit/laboratorium)	43	43	43			
			4	Jumlah kerjasama standar mutu dan harmonisasi standar mutu (kerjasama)	6	6	6			
			5	Jumlah pengujian dan sertifikasi alintan (unit/ lembaga)	192	225	250			
			6	Jumlah pengawasan jaminan mutu (unit)	20	30	35			
7.3	Pengembangan usaha dan investasi (Prioritas Nasional dan Bidang)	Meningkatnya usaha, kemitraan, kewirausahaan dan investasi di sektor pertanian	1	Jumlah unit usaha binaan kemitraan dan kewirausahaan di sektor pertanian (laporan)	35	35	35	37,47	60,37	87,53
			2	Jumlah fasilitas investasi di sektor pertanian (laporan)	7	10	12			
			3	Jumlah pameran, promosi, ekshibisi dan perlombaan dalam negeri maupun luar negeri (kali)	20	22	24			
7.4	Pengembangan pemasaran domestik (Prioritas Bidang)	Meningkatnya pemasaran hasil pertanian di pasar domestik	1	Jumlah kelembagaan pemasaran bagi petani (unit pasar)	205	100	105	70,98	125,00	149,00
			2	Jumlah komoditi dalam pemantauan dan stabilisasi harga komoditas pertanian utama (komoditi)	8	10	12			
			3	Jumlah kerjasama dan jaringan pasar (laporan)	12	13	15			
			4	Jumlah unit pelayanan informasi pasar komoditi pertanian (lokasi)	450	600	700			
7.5	Pengembangan pemasaran internasional (Prioritas Nasional dan Bidang)	Meningkatnya pemasaran internasional hasil pertanian	1	Jumlah bahan posisi Delfi sebagai bahan perundingan dalam negosiasi kerjasama pemasaran forum bilateral, regional dan multilateral komoditi pertanian (laporan)	33	36	40	13,64	34,00	44,50

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITY			
				2012	2013	2014	2012	2013	2014		
				25	25	25					
				12	12	12					
				21	29	37					
7.6	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	Terselenggaranya pelayanan administrasi dan pelayanan teknis lainnya secara profesional dan berintegritas di lingkungan Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian	<p>Jumlah partisipasi dalam perundingan internasional bidang pertanian untuk memperjuangkan pemasaran komoditi pertanian Indonesia (laporan)</p> <p>Jumlah hasil analisa data ekspor dan impor komoditi pertanian serta data perdagangan lainnya yang diperlukan (laporan)</p> <p>Jumlah Gapoktan yang dibina dalam rangka peningkatan ekspor (unit)</p> <p>Jumlah dokumen perencanaan, keuangan, umum serta evaluasi dan pelaporan program peningkatan nilai tambah, daya saing, industri hilir, pemasaran dan ekspor hasil pertanian (dokumen/laporan)</p> <p>Jumlah usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian melalui LMS (kelompok)</p>	25	25	25	86,49	115,00	139,00		
8	Program Penediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Tertaksananya penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian melalui kegiatan perluasan dan pengelolaan lahan; pengelolaan air irigasi; fasilitas pupuk dan pertanian; fasilitas pupuk dan pestisida; serta fasilitas alat dan mesin pertanian untuk mendukung peningkatan produksi pertanian dan mewujudkan pertanian yang berkelanjutan.	<p>Meningkatnya aksesibilitas dan luas lahan yang dioptimasi, dikonservasi, direhabilitasi maupun direklamasi serta meningkatnya luasan areal pertanian baru</p> <p>Meningkatnya efisiensi dan ketersediaan air irigasi pada lahan-lahan pertanian</p> <p>Terfasilitasinya alat dan mesin pertanian</p> <p>Tersalurkannya pupuk dan pestisida</p>	385.787 Ha 454 Km 75.000 Bdg 8 Pkt	640.000 Ha 4.724 Km 25.700 Bdg 4 Pkt	750.000 Ha 4.724 Km 26.150 Bdg 4 Pkt	4.479,72	6.294,15	6.669,95		
				523.250 Ha 3.553 Unit	500.000 Ha 4.355 Unit	500.000 Ha 4.889 Unit					
				2.217 Unit	3.779 Unit	3.996 Unit					
				10.53 jt ton 0.10 jt ton 36,97 jt ton	11,06 jt ton 0.10 jt ton 37,66 jt ton	11,61 jt ton 0.10 jt ton 38,41 jt ton					
				7.000 Gapoktan; 5,0 Triliun; 100 orang; 1,8 triliun; 300 LKMA; Kebijakan pembiayaan pertanian;	10.000 Gapoktan; 7,0 Triliun; 100 orang; 2,2 triliun; 400 LKMA; Kebijakan pembiayaan pertanian;	10.000 Gapoktan; 7,0 Triliun; 100 orang; 2,2 triliun; 400 LKMA; Kebijakan pembiayaan pertanian;					
				Terfasilitasinya pola pembiayaan pertanian	Kebijakan pembiayaan pertanian; Pengembangan pertanian; Uji coba	Kebijakan pembiayaan pertanian; Pelaksanaan asuransi pertanian					

# Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010 - 2014

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITY (Milyar Rp)			
				2012	2013	2014	2012	2013	2014		
8.1	Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian (Priority Nasional dan Bidang)	Meningkatnya produktivitas lahan pertanian, luasan areal pertanian baru dan prosarana Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi serta pengendalian lahan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian	1	Luasan (Ha) perluasan areal Tanaman pangan (sawah dan lahan kering), kawasan hortikultura, kawasan perkebunan Dan kawasan peternakan	116.387 Ha	140.000 Ha	150.000 Ha	1.280,26	1.540,00	1.650,00	
			2	Jumlah (Ha) Lahan yang dioptimasi, dikonservasi, direhabilitasi dan direklamasi	209.400 Ha	300.000 Ha	350.000 Ha	471,15	675,00	787,50	
			3	Jumlah (Ha) Konservasi DAS Hulu							
			4	Jumlah (Ha) Pengembangan SRI (System of Rice Intensification)	60.000 Ha	200.000 Ha	250.000 Ha	135,00	450,00	562,50	
			5	Jumlah bidang tanah petani yang di prasertifikasi	75.000 Bdg	25.700 Bdg	26.150 Bdg	7,50	2,57	2,61	
			6	Jumlah Panjang Jalan Usaha Tani (JUT) dan Jalan Produksi (JAPROD) pada Jalan Pertanian	454 km	4.724 Km	4.724 Km	45,40	472,40	472,40	
			7	Jumlah audit Lahan Luar Jawa	7 Paket	3 Paket	3 Paket	125,00	100,00	5,00	
			8	Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE)	1 Paket	1 Paket	1 Paket	25,00	25,00	25,00	
<b>Sub Total</b>							<b>2.089,31</b>	<b>3.264,97</b>	<b>3.505,01</b>		
8.2	Pengelolaan air irigasi untuk pertanian (Priority Nasional dan Bidang)	Meningkatnya ketersediaan air irigasi dalam mendukung produksi pertanian	1	Jumlah (Unit) pengembangan sumber air alternatif skala kecil (melalui pengembangan sumber air permukaan dan air tanah) untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan.	1.667 Unit	1.855 Unit	2.039 Unit	100,62	139,13	152,93	
			2	Jumlah (Ha) pengembangan jaringan dan optimalisasi air (melalui pengembangan/rehabilitasi JIUT, JIDES, dan TAM) untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan	523.250 Ha	500.000 Ha	500.000 Ha	522,85	500,00	500,00	
			3	Jumlah (Unit) pengembangan/ pelaksanaan konservasi air dan lingkungan hidup serta antisipasi perubahan iklim (melalui pembangunan embung/ dam parit dan Sekolah Lapang Iklim) untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan	1.586 Unit	1.750 Unit	2.000 Unit	95,16	175,00	200,00	

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITYAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITYAS (Milyar Rp)		
				2012	2013	2014	2012	2013	2014	
			Jumlah (Unit) pengembangan kelembagaan petani pemakai air (melalui Pemberdayaan P3A dan Pengembangan Irigasi Partisipatif) untuk mendukung tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan.	300 Unit	750 Unit	850 Unit	30,00	75,00	85,00	
<i>Sub Total</i>							<b>748,63</b>	<b>889,13</b>	<b>937,93</b>	
8.3	Penyuluran pupuk bersubsidi (Priorityas Nasional dan Bidang)		1 Jumlah pupuk bersubsidi (juta ton)	10,53	11,06	11,61	16,943,99	19,696,88	22,794,26	
			2 Bantuan Langsung Pupuk (juta ton)	0,10	0,10	0,10	450,00	472,50	496,13	
			3 Jumlah Roadmap Kebutuhan dan Penyediaan Pupuk (juta ton)	36,97	37,66	38,41				
			4 Terbangunnya Rumah Kompos	-	-	-				
<i>Sub Total</i>							<b>17,393,99</b>	<b>20,169,38</b>	<b>23,290,38</b>	
8.4	Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian (priorityas Nasional dan Bidang)		1 Meningkatnya pemanfaatan alat dan mesin pertanian	2,217	3,779	3,996	73,18	111,13	117,87	
			2 Jumlah (Paket) UPIA Mandiri	100	120	150	5,00	7,20	10,50	
			3 Jumlah jenis alsintan yang diawasi di lokasi	4	20	20	2,00	11,10	11,70	
<i>Sub Total</i>							<b>80,18</b>	<b>129,43</b>	<b>140,07</b>	
8.5	Pelayanan Pembiayaan Pertanian, Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) / Priorityas Nasional		1 Pembentukan Sentra Usaha Ekonomi Produktif Petani melalui Gapoktan PUAP & Penumbuhan Gapoktan PUAP menjadi LKM-A, Tersedianya plafon kredit program (KPP-E, KUPS, KPEN-RP dan KUR) oleh perbankan. Meningkatnya kemampuan Tenaga Pendamping dalam memfasilitasi petani kepada Perbankan, Terselusnya Pembiayaan Syariah melalui Bank Syariah & LKM-A, Terbentuknya LKM-A pada Gapoktan PUAP berprestasi, sebagai unit pembiayaan petani perdesaan, Tersusunnya kebijakan pembiayaan pertanian, serta Terbentuknya pola asuransi pertanian untuk melindungi usaha pertanian.	7.000 Gapoktan	10.000 Gapoktan	10.000 Gapoktan	800,00	1.160,00	1.200,00	
			2 Penyediaan kredit program oleh perbankan	5,0 Triliun	6,0 Triliun	7,0 Triliun	1,00	1,50	1,50	
			3 Meningkatnya jumlah tenaga pendamping dalam memfasilitasi pembiayaan	100 orang	100 orang	100 orang	2,60	2,60	2,60	
			4 Tumbuhnya Pembiayaan Syariah	1,8 Trilyun	2,0 Trilyun	2,2 Trilyun	0,80	1,10	1,30	
			5 Meningkatnya kemampuan pengurus Gapoktan dalam mengelola dana melalui pembukaan, menerapkan SOP standar LKM-A	300 LKMA	350 LKMA	400 LKMA	120,00	140,00	150,00	
			6 Terealisasinya kebijakan pembiayaan pertanian	Kebijakan pembiayaan pertanian	Kebijakan pembiayaan pertanian	Kebijakan pembiayaan pertanian	7,00	7,00	8,00	
			7 Terlindungnya usaha pertanian dari dampak kerugian	Pengembangan dasar hukum dan uji coba	Uji coba	Pelaksanaan asuransi pertanian	1,00	1,00	2,50	
<i>Sub Total</i>							<b>932,40</b>	<b>1.313,20</b>	<b>1.365,90</b>	

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITY (Milyar Rp)		
				2012	2013	2014	2012	2013	2014	
8.6	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Prasarana dan sarana pertanian	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya fasilitasi pelayanan teknis dan administrasi untuk mendukung pelaksanaan kerja Direktorat Jenderal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah dokumen perencanaan (Program, Anggaran dan Kerjasama), keuangan, umum serta evaluasi dan pelaporan program</li> <li>peningkatan nilai tambah, daya saing, sarana dan prasarana pertanian.</li> </ul>	6	6	6	224,93	224,93	224,93	
<i>Sub Total</i>										
9	<b>Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Meningkatnya inovasi dan diseminasi teknologi pertanian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah varietas unggul baru tanaman dan galur unggul temak</li> <li>Jumlah inovasi teknologi pertanian</li> <li>Jumlah rekomendasi kebijakan pertanian</li> <li>Jumlah teknologi Pertanian yang terdiseminasikan</li> </ul>	49	45	43	1.436,95	1.636,28	1.728,35	
9.1	Dukungan manajemen, fasilitasi dan instrumen teknis dalam pelaksanaan kegiatan litbang pertanian	1	Meningkatnya manajemen perencanaan program dan anggaran, kerjasama, pengelolaan sumberdaya, dan hasil litbang pertanian	1	12	12	342,97		508,68	
				2	200	200				
				3	60	60				
9.2	Penelitian dan pengembangan tanaman pangan	2	Tersedianya varietas unggul baru, benih sumber dan peningkatan inovasi teknologi tanaman pangan mendukung pencapaian swasembada padi dan jagung berkelanjutan, swasembada kedelai, serta peningkatan produktivitas tanaman pangan lainnya	1	12	13	136,22		154,15	
				2	9	11				
				3	61	61				

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Milyar Rp)			
				2012	2013	2014	2012	2013	2014	
9.3	Penelitian dan pengembangan tanaman hortikultura	Meningkatnya inovasi teknologi Hortikultura untuk meningkatkan produktivitas, kualitas dan daya saing produk Hortikultura yang berkelanjutan	1	Jumlah YUB hortikultura yang diminati konsumen	25	16	13	73,34	76,53	79,59
			2	Jumlah inovasi teknologi budidaya produksi hortikultura ramah lingkungan	12	14	14			
			3	Jumlah benih sumber : ● Kentang ● Bawang merah dan sayuran potensial ● Buah tropika, jeruk dan buah sub tropika ● Anggrek dan tanaman hias lainnya ● Krisan ● Batang bawah dan batang atas jeruk hasil SE	24.000 30.000 16.000 3.100 250.000 500.000	26.000 35.000 17.200 3.700 250.000 300.000	28.000 40.000 18.700 4.000 250.000 300.000			
9.4	Penelitian dan pengembangan tanaman perkebunan	Meningkatnya inovasi teknologi tanaman perkebunan untuk meningkatkan produktivitas, diversifikasi dan nilai tambah tanaman perkebunan	1	Jumlah varietas/klon unggul tanaman perkebunan	6	10	10	98,26	107,15	111,61
			2	Jumlah inovasi teknologi untuk peningkatan produktivitas tanaman perkebunan	19	17	14			
			3	Jumlah planlet tebu melalui teknologi SE Tanaman perkebunan (Ton) Tanaman perkebunan (Stek/rhizome) Jumlah bibit tebu melalui teknologi SE (Planlet) Jumlah bibit tebu melalui teknologi SE (Budget G2)	340 869.000 2.500.000	341 896.000 2.500.000	343 923.000 3.000.000			
9.5	Penelitian dan pengembangan peternakan	Meningkatkan Inovasi Teknologi Peternakan dan Veteriner Mendukung Program Swasembada Daging Sapi (PSDS)-2014	1	Jumlah galur unggul/harapan ternak dan TPT spesifik lokasi	6	6	6	151,90	116,28	127,90
			2	Jumlah inovasi teknologi peternakan dan teknologi veteriner	24	24	24			
			3	Jumlah bibit/benih sumber ternak dan TPT	850/1000	1000/1000	1200/1000			
			4	Jumlah rekomendasi kebijakan pembangunan Peternakan dan Veteriner	4	4	4			



# Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010 - 2014

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITY (Milyar Rp)		
				2012	2013	2014	2012	2013	2014	
9.6	Penelitian/analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian	Tersedianya rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian yang berguna bagi stake holder	▲	Jumlah rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian	12	15	15	25,56	26,51	27,49
			▲	Jumlah artikel yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah	182	185	190	15,49	15,71	16,38
			2	Prosentase perpustakaan digital	80	90	100			
9.7	Pengembangan perpustakaan dan penyebaran teknologi pertanian	Meningkatnya pemanfaatan informasi oleh pengguna layanan perpustakaan serta pengembangan sistem informasi dan diseminasi inovasi pertanian mendukung ketahanan dan kemandirian pangan	3	Jumlah database tambahan koleksi jurnal ilmiah internasional yang diunggah	4	4	5			
			▲	Meningkatnya inovasi dan adopsi teknologi/mekanisasi pertanian untuk peningkatan produktivitas, efisiensi dan nilai tambah produk pertanian dan limbahnya	1	5	5	18,14	18,86	19,62
			2	Jumlah bahan rekomendasi kebijakan nasional mekanisasi pertanian	2	2	2			
9.8	Penelitian/perekrasan dan pengembangan mekanisasi pertanian	Tersedianya data, informasi dan peningkatan inovasi teknologi pengelolaan sumberdaya lahan pertanian	1	Jumlah informasi/peta potensi sumberdaya lahan	8	8	8	74,59	79,06	82,31
			2	Jumlah inovasi teknologi pengelolaan tanah, pupuk, iklim dan air, lahan rawa, lingkungan pertanian serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	14	14	14			
			4	Jumlah rekomendasi kebijakan pemanfaatan sumberdaya lahan dan perubahan iklim global	6	6	6			
9.9	Pengembangan perpustakaan sumberdaya lahan pertanian	Meningkatnya inovasi hasil bioteknologi dan pengelolaan sumberdaya genetik pertanian (SDGP) untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan daya saing produk pertanian	1	Jumlah varietas atau galur harapan komoditas pertanian	360	42	26	29,51	30,65	31,83
			2	Jumlah inovasi teknologi berbasis bioteknologi	4	4	4			
9.10	Pengembangan bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian									
9.11	Penelitian dan pengembangan pasca panen pertanian	Meningkatnya inovasi teknologi penanganan dan pengolahan hasil pertanian mendukung ketahanan pangan, nilai tambah, daya saing dan ekspor	▲	Jumlah inovasi teknologi penanganan segar dan pengolahan hasil pertanian	14	16	17	20,23	21,05	21,92
			▲	Jumlah inovasi teknologi pengolahan hasil pertanian						

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITY		
				2012	2013	2014	2012	2013	2014	
9.12	Pengkajian dan percepatan diseminasi inovasi teknologi pertanian	Penyediaan dan penyebarluasan inovasi spesifik lokasi mendukung program strategis pembangunan pertanian nasional dan daerah	1 Jumlah inovasi teknologi spesifik lokasi	96	105	125	450,76	520,84	546,88	
			2 Jumlah teknologi yang terdiseminasi ke pengguna	320	320	320				
10	Program Pengembangan SDM Pertanian Dan Kelembagaan Petani	Meningkatkan kemampuan, kompetensi, kemandirian, dan daya saing SDM pertanian melalui program pengembangan SDM pertanian dan kelembagaan petani, untuk mendukung empat sukses pembangunan pertanian.	1 Meningkatnya kompetensi aparatur di sektor pertanian (orang)	24.443	26.327	29.312	1.419,37	1.480,78	1.524,80	
			2 Meningkatnya kapasitas non aparatur di sektor pertanian (orang)	22.205	22.205	24.014				
			3 Meningkatnya kinerja ketenagaan penyuluhan (orang)	55.458	55.458	72.000				
			4 Meningkatnya kapasitas aparatur fungsional pertanian (orang)	4.429	4.429	5.029				
			5 Tersedianya tenaga teknis menengah dan calon wirusahawan muda di sektor pertanian (orang)	16.248	16.248	16.248				
			6 Meningkatnya kapasitas kelembagaan Petani (unit)	51.763	51.704	72.170				
			7 Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah (unit)	2.088	2.088	2.088				
10.1	Revitalisasi Pendidikan Pertanian, Standardisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian		1 Meningkatkan kualitas SDM Pertanian yang Peranian melalui standardisasi dan sertifikasi profesi	7	7	7	169,30	199,26	210,26	
			2 Jumlah penyuluh pertanian yang mendapat sertifikasi profesi (orang)	1.400	1.400	2.000				
			1 Jumlah kelembagaan pendidikan yang ditingkatkan dan dikembangkan kualitasnya (unit)	6	6	6				
			2 Jumlah ketenagaan pendidikan kedinasan yang ditingkatkan kualitasnya (orang)	3.180	3.180	3.180				
			1 Jumlah tenaga fungsional yang mengikuti jenjang pendidikan kedinasan yang sesuai standar kompetensinya (orang)	2.825	2.825	2.825				
			2 Jumlah aparatur yang mengikuti jenjang pendidikan formal S2 dan S3 (orang)	204	204	204				

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Milyar Rp)		
				2012	2013	2014	2012	2013	2014
10.2	Pengembangan Pendidikan Menengah Pertanian	1 Meningkatkan tingkat pendidikan menengah pertanian	3 Jumlah dokumen perencanaan, keuangan, organisasi dan kepegawaian serta evaluasi dan pelaporan kegiatan revitalisasi pendidikan, standarisasi dan sertifikasi profesi pertanian	107	107	107			
			4 Jumlah waktu pelaksanaan pelayanan perkantoran	12	12	12			
			1 Jumlah generasi muda pertanian yang difasilitasi melalui pendidikan di SMK-SPP (orang)	16.248	16.248	16.248	43,61	55,61	57,61
			2 Jumlah kelembagaan pendidikan menengah pertanian (SMK-SPP) yang ditingkatkan kualitasnya (unit)	9	9	9			
			3 Jumlah ketenagaan pendidikan menengah pertanian (SMK-SPP) yang ditingkatkan kualitasnya (orang)	241	241	241			
10.3	Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas kelembagaan pelatihan pertanian	4 Jumlah dokumen perencanaan, keuangan, organisasi dan kepegawaian serta evaluasi dan pelaporan kegiatan pendidikan menengah(Dok)	59	59	59			
			5 Jumlah waktu pelaksanaan pelayanan perkantoran (bulan)	12	12	12			
			1 Jumlah kelembagaan pelatihan UPT/Pusat dan Daerah yang difasilitasi dan dikembangkan (unit)	29	29	29	375,19	405,54	418,41
			2 Jumlah kelembagaan pelatihan milik petani (P4S) yang terbiasa dan terklasifikasi kelembagaannya (unit)	229	170	170			
			3 Jumlah ketenagaan pelatihan pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan (orang)	1.277	1.277	1.277			
4 Jumlah dokumen perencanaan, keuangan, organisasi dan kepegawaian serta evaluasi dan pelaporan kegiatan pemantapan sistem pelatihan pertanian (Dok)	258	258	132						
5 Jumlah waktu pelaksanaan pelayanan perkantoran (bulan)	12	12	12						

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Milyar Rp)					
				2012	2013	2014	2012	2013	2014			
10.4	Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)	2	Meningkatnya kualitas aparatur dan non aparatur pertanian	1	Jumlah aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan pertanian (orang)	23.166	25.050	28.035				
				2	Jumlah non aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya melalui pelatihan pertanian (orang)	22.205	22.205	24.014				
		3	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat di daerah tertinggal (READ Program)	Jumlah desa yang meningkat kapasitasnya (desa)			150	150	150			
				1	Meningkatnya kualitas kelembagaan penyuluhan pertanian	2.044	2.044	2.044	762,89	742,56	755,58	
		2	Meningkatnya jumlah kelembagaan petani	51.534	51.534	72.000						
		3	Meningkatkan kualitas program dan materi penyuluh pertanian	1	Jumlah dokumen program, materi dan informasi pertanian yang dihasilkan dan disebarluaskan (judul)	4.369	4.369	4.369				
				2	Jumlah dokumen kegiatan pemantapan sistem penyuluhan pertanian (Dok)	247	247	247				
		4	Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketenagaan penyuluh pertanian	Jumlah Ketenagaan penyuluhan pertanian yang difasilitasi (orang)			55.458	55.458	72.000			
				1	Jumlah desa yang kegiatan penyuluhannya dikelola petani (desa)	772	0	0				
		5	Meningkatkan mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang dikelola oleh petani (FEATI)	2	Jumlah BPP yang dibangun dan direhab (unit)	0	0	0				
3	Jumlah peralatan dan meubelair BPP (unit)			0	0	0						
10.5	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis lainnya	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi, dan manajemen organisasi PPSDMP melalui pemantapan sistem perencanaan, pengelolaan keuangan dan perlengkapan, money serta ketatalaksanaan, kepegawaian dan ketatausahaan	1	Jumlah dokumen perencanaan, keuangan, organisasi dan kepegawaian, serta evaluasi dan pelaporan program penyuluhan dan pengembangan SDM Pertanian (Dok)	91	91	91	68,38	77,81	82,94		
			2	Jumlah waktu pelaksanaan pelayanan perkantoran (bulan)	12	12	12					

Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010 - 2014

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Milyar Rp)		
				2012	2013	2014	2012	2013	2014	
11	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Meningkatnya ketahanan pangan melalui pengembangan ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan	1	Penurunan penduduk rawan pangan per tahun	1%	1%	1%	695,25	799,54	919,47
			2	Skor PPH Peningkatan Diversifikasi Pangan	89,8	91,5	93,3			
			3	Penurunan Konsumsi Beras per kapita tiap tahun	1.5%	1.5%	1.5%			
			4	Pengembangan Lembaga Distribusi Stabilisasi Pangan Pokok	1.265 Gap 1.040 LB	1.500 Gap 900 LB	1.750 Gap 1.000 LB			
11.1	Pengembangan pengeneragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar	Meningkatnya pemertanian pengeneragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan	1	Jumlah desa yang diberdayakan dalam P2KP	5.990 Desa	8.000 Desa	10.000 Desa			
			2	Jumlah hasil pemantauan, monitoring, evaluasi dan perumusan kebijakan P2KP	1 Pusat 33 Prop 363 kab/kota	1 Pusat 33 Prop 400 kab/kota	1 Pusat 33 Prop 425 kab/kota			
			3	Jumlah hasil promosi P2KP	1 Pusat 33 Prop 390 kab/kota	1 Pusat 33 Prop 400 kab/kota	1 Pusat 33 Prop 425 kab/kota			
			4	Jumlah hasil analisis pola konsumsi pangan penduduk	1 Pusat 33 Prop	1 Pusat 33 Prop	1 Pusat 33 Prop			
			5	Jumlah hasil kerjasama dengan perguruan tinggi	5 Lap	5 Lap	5 Lap			
			6	Jumlah hasil koordinasi keamanan pangan segar	1 Pusat 33 Prop	1 Pusat 33 Prop	1 Pusat 33 Prop			
			7	Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan keamanan pangan	1 Pusat 33 Prop	1 Pusat 33 Prop	1 Pusat 33 Prop			
			8	Jumlah hasil pengembangan olahan pangan lokal	9 Prop	15 Prop	20 Prop			
<i>Sub Total</i>							197,44	227,06	261,11	

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITY	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITY (Milyar Rp)		
				2012	2013	2014	2012	2013	2014	
11.2	Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan.	Meningkatnya pemantapan distribusi dan harga pangan	1	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	1.265 Gap	1.500 Gap	1.750 Gap			
			2	Jumlah kelembagaan cadangan pangan	1.040 Lb	1.200 Lb	1.375 Lb			
			3	Jumlah hasil panel harga pangan pokok	16 Prop	16 Prop	16 Prop			
			4	Jumlah hasil pemantauan/pengumpulan data distribusi, harga dan cadangan pangan	1 Pusat 33 Prop	1 Pusat 33 Prop	1 Pusat 33 Prop			
			5	Jumlah hasil pengembangan model pemantauan distribusi, harga dan cadangan pangan	13 Prop	13 Prop	13 Prop			
<i>Sub Total</i>							<b>144,21</b>	<b>165,84</b>	<b>190,72</b>	
11.3	Pengembangan ketersediaan pangan dan penanganan kerawanan pangan	Meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan	1	Jumlah Desa yang diberdayakan/Demapan	2.989 Desa	3.050 Desa	3.300 Desa			
			2	Jumlah Penanganan daerah/lokasi Rawan Pangan	410 Kab	410 Kab	410 Kab			
			3	Jumlah Hasil Penyusunan FSVA	22 Prop	25 Prop	33 Prop			
			4	Jumlah hasil analisis ketersediaan, rawan pangan dan akses pangan	1 Pusat 33 Prop	1 Pusat 33 Prop	1 Pusat 33 Prop			
			5	Jumlah laporan pelatihan aparat yang ditingkatkan pengetahuan dan keterampilan	1 Pusat 33 Prop	1 Pusat 33 Prop	1 Pusat 33 Prop			
<i>Sub Total</i>							<b>204,49</b>	<b>235,16</b>	<b>270,44</b>	
11.4	Dukung Manajemen dan teknis lainnya pada Badan Ketahanan Pangan.	Meningkatnya manajemen dan pelayanan administrasi dan keuangan secara efektif dan efisien dalam mendukung pengembangan dan koordinasi kebijakan ketahanan pangan	1	Jumlah dokumen perencanaan, program dan anggaran	1 Pusat 33 Prop	1 Pusat 33 Prop	1 Pusat 33 Prop			
			2	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan	33 Prop / Lap	33 Prop / Lap	33 Prop / Lap			
			3	Jumlah dokumen kepegawaian, organisasi, humas dan hukum	1 Dok	1 Dok	1 Dok			
			4	Jumlah waktu pelaksanaan pelayanan keuangan dan perlengkapan	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun			


NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Milyar Rp)		
				2012	2013	2014	2012	2013	2014	
		2	Meningkatnya koordinasi perumusan kebijakan, evaluasi dan pengendalian ketahanan pangan melalui Dewan Ketahanan Pangan	Jumlah hasil sidang pleno, konferensi dan sidang regional ketahanan pangan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan			
		3	Meningkatnya model pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam pemantapan ketahanan pangan keluarga	Jumlah kelompok masyarakat mandiri yang dibina SOLID	368 Kel	649 Kel	732 Kel			
				Jumlah federasi / gapoktan masyarakat yang dibina SOLID	108 Fd	195 Fd	259 Fd			
				Jumlah dokumen manajemen dan administrasi SOLID	12 Bln	12 Bln	12 Bln			
				Jumlah prasarana desa yang dibangun dalam SOLID	44 Unit	64 Unit	87 Unit			
				Jumlah demonstrasi plot yang dilakukan di desa binaan SOLID	64 Paket	87 Paket	64 Paket			
<i>Sub Total</i>										
								149,11	171,48	197,20
12	Program Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	Meningkatnya efektifitas pelayanan karantina dan pengawasan keamanan hayati	1	Efektifitas pengendalian resiko masuk dan penyebarannya HPHK dan OPTK, serta pangan yang tidak sesuai standar keamanan pangan	80%	85%	90%	747,29	821,34	903,47
			2	Efektifitas pelayanan ekspor komoditas pertanian dan produk tertentu.	90%	90%	95%			
			3	Tingkat kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina pertanian	90%	90%	95%			
12.1	Peningkatan Sistem Karantina Hewan dan Keamanan Hayati Hewan (Prioritas Bidang)	Kebijakan teknis yang efektif dalam operasional pencegahan masuk, menyebar dan keluarnya HPHK, Pangan Hewan yang tidak aman serta media lain yang mengancam kelestarian sumberdaya hayati hewan dan kesehatan pangan hewan		Jmi Rumusan Kebijakan teknis operasional karantina hewan yang dihasilkan/ disempurnakan dan dapat berimplementasi dalam operasional pelayanan dan pengawasan.	6	6	6	11,19	12,31	13,54

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET				ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Milyar Rp)		
				2012	2013	2014	2012	2013	2014	
12.2	Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan dan Keamanan Hayati Nabati (Prioritas Bidang)	<p>▲ Kebijakan teknis yang efektif dalam operasional pencegahan masuk dan penyebarannya OPTK, Pangan nabati yang tidak aman serta media lain yang mengancam kelestarian sumberdaya hayati tumbuhan dan kesehatan pangan nabati</p>	<p>Jml Rumusan Kebijakan teknis operasional karantina tumbuhan dan keamanan hayati nabati yang dihasilkan/disempurnakan dan dapat berimplementasi dalam operasional pelayanan dan pengawasan</p>	6	6	6	10,64	11,70	12,87	
				12.3	<p>Peningkatan Kepatuhan, Kerjasama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantinahan (Prioritas Bidang)</p>	<p>1 Rumusan kebijakan pengawasan dan penindakan yang dapat mendukung meningkatnya kepatuhan pengguna jasa karantina dan integritas petugas karantina</p> <p>2 Kerjasama yang kondusif dalam mendukung efektivitas perumusan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinahan pertanian</p>	<p>2</p> <p>4</p>	<p>2</p> <p>4</p>	<p>2</p> <p>4</p>	<p>9,89</p> <p>10,88</p>
12.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati. (Prioritas Nasional dan Bidang)	<p>▲ Sistem informasi yang optimal dalam mendukung kinerja manajemen dan operasional karantina</p> <p>Pelayanan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati yang efektif</p>	<p>1 Realisasi target operasional sertifikasi karantina dan pengawasan keamanan hayati</p> <p>2 Media Pembawa yang disertifikasi bebas HPHK/OPTK</p> <p>3 Persentase penolakan kiriman barang ekspor yang disertifikasi karantina pertanian</p> <p>4 Peningkatan indeks kepuasan Masyarakat</p> <p>5 Peningkatan kepatuhan pengguna jasa</p>	10	10	10	572,67	629,94	692,93	
				100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				0%	0%	0%	0%	0%	0%	
				10%	10%	10%	10%	10%	10%	
				10%	10%	10%	10%	10%	10%	



NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET			ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Milyar Rp)					
				2012	2013	2014	2012	2013	2014			
12.5	Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan laboratorium Uji Standar dan Uji Terap Teknik dan Metode Karantina Pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)	<p>Penyelenggaraan laboratorium yang berkualitas dalam mendukung efektivitas penilaian dan pengendalian resiko ditempat pemasukkan dan pengeluaran</p>	Jmi Uji Terap teknik dan metoda tindakan karantina dan pengawasan keamanan hayati yang dapat diterapkan, dan jumlah desiminasi teknik dan metode yang dapat diimplementasikan (paket)	2	2	2	52,82	58,10	63,91			
			Jumlah sampel lab. yang diperiksa sesuai ruang lingkup pengujian (Uji Standar, rujukan, konfirmasi dan profisiensi)	6000	6000	6000						
			Jumlah laboratorium karantina yang dibimbing secara teknis dalam rangka akreditasi	2	2	2						
			Opini lap keuangan WTP	2 Lap	2 Lap	2 Lap	89,46	98,41	108,25			
			Kualifikasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Baik	Baik	Baik	Baik						
			Terpenuhinya SDM yang sesuai dengan standar kompetensi Barantan	0.05	0.05	0.05						
12.6	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Badan Karantina Pertanian	<p>Meningkatnya kualitas kinerja manajemen dalam mendukung penyelenggaraan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati</p>	Indeks Budaya Kerja	≥ 70	≥ 70	≥ 70						
			Tingkat penyelesaian rancangan peraturan terhadap rumusan kebijakan teknis	1	1	1						
			Tingkat Kepefulihan Masyarakat terhadap Perkarantinahan	0.3	0.38	0.48						
			<b>TOTAL</b>							<b>17.831,30</b>	<b>21.513,95</b>	<b>24.108,37</b>



A photograph of a rice field with green rice stalks and panicles, serving as the background for the text.

**BAB VI  
PENJABARAN EMPAT  
TARGET SUKSES KE  
DALAM PROGRAM  
DAN KEGIATAN  
PEMBANGUNAN  
PERTANIAN 2010-2014**

## VI. PENJABARAN EMPAT TARGET SUKSES KE DALAM PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN PERTANIAN 2010-2014

Sejalan dengan Visi dan Misi Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014, telah ditetapkan Empat Target Sukses, yaitu: (1) pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan; (2) peningkatan Diversifikasi Pangan; (3) peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor; dan (4) peningkatan Kesejahteraan Petani. Guna mencapai visi, misi dan empat target sukses tersebut, ditempuh strategi revitalisasi pertanian dengan fokus pada tujuh aspek dasar yang disebut dengan TUJUH GEMA REVITALISASI, yang terdiri dari revitalisasi: (1) lahan, (2) perbenihan dan perbibitan, (3) infrastruktur dan sarana, (4) sumber daya manusia, (5) pembiayaan petani, (6) kelembagaan petani, serta (7) teknologi dan industri hilir.

Strategi revitalisasi pertanian tersebut dituangkan ke dalam 12 program dan setiap tahunnya diimplementasikan ke dalam kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian. Implementasi program dan kegiatan tersebut dilaksanakan dengan pendekatan pengembangan kawasan sentra pertanian dengan memperhatikan aspek kesisteman usaha pertanian, penguatan kelembagaan dan pemberdayaan petani. Sistematika alur kebijakan pembangunan pertanian disajikan pada Bagan 6-1.

Bagan 6.1 Alur Kebijakan Pembangunan Pertanian



Penjabaran Empat Target Sukses ke dalam 12 program dan kegiatan pembangunan pertanian diperlukan untuk mengarahkan program dan kegiatan lebih fokus mendukung pada pencapaian Empat Target Sukses dan memastikan alokasi sumberdaya mengarah kepada pencapaian target yang dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Keterkaitan Empat Target Sukses dengan program pembangunan pertanian secara rinci disajikan pada Bagan 6-2, yaitu : (1) Pencapaian Swasembada dan swasembada berkelanjutan, (2) Peningkatan Diversifikasi Pangan, (3) Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor serta (4) Peningkatan Kesejahteraan Petani.

**Bagan 6.2 Keterkaitan Empat Target dengan 12 Program/Kegiatan**



Penjelasan rinci penjabaran empat target sukses ke dalam program, kegiatan, dan output kegiatan diuraikan sebagai berikut :

## 6.1. Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan

Target swasembada dan swasembada berkelanjutan khususnya untuk komoditas padi dan jagung difokuskan pada pencapaian swasembada berkelanjutan, sedangkan kedele, gula dan daging sapi ditargetkan mencapai swasembada pada Tahun 2014. Program dan kegiatan yang akan mendukung pencapaian target ini adalah sebagai berikut :

### 6.1.1. Swasembada Berkelanjutan Padi

Untuk mempertahankan swasembada berkelanjutan padi dan tercapainya surplus beras sebesar 10 juta ton pada tahun 2014, dilaksanakan melalui enam Program dan 28 Kegiatan sebagaimana disajikan pada Tabel 6.1.

**Tabel 6.1. Program dan Kegiatan yang Mendukung Swasembada Berkelanjutan Padi**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	TARGET (VOLUME)		
				2012	2013	2014
<b>PENCAPAIAN SWASEMBADA DAN SWASEMBADA BERKELANJUTAN</b>						
a. Swasembada Berkelanjutan Padi						
1.	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan	1. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia (SLPTT)	1. SLPTT Padi Non Hibrida (Ha)	2.651.700	3.447.210	4.481.373
			2. SLPTT Padi Hibrida (Ha)	290.700	377.910	491.283
			3. SLPTT Padi Lahan Kering (Ha)	500.000	650.000	845.000
			4. SLPTT Padi Non Hibrida dan Hibrida Spesifik Lokasi (Model) (Ha)	85.700	300.000	600.000
			5. SLPTT Padi Non Hibrida Peningkatan IP (Model) (Ha)	29.500	150.000	300.000
			6. Pelatihan SLPTT Padi (PL) (Paket)	1	1	1
			7. Pembinaan, pengawalan, pendampingan, monev serealia (Paket)	1	1	1
		2. Pengelolaan Sistem penyediaan Benih Tanaman Pangan	1. BLBU Padi Non Hibrida (Ha)	2.700.000	3.510.000	4.563.000
			2. BLBU Padi Hibrida (Ha)	300.000	390.000	507.000
			3. BLBU Padi Lahan Kering (Ha)	500.000	650.000	845.000
			4. Pemberdayaan Penangkar Padi (Ha)	10.000	13.000	16.900
			5. Insentif Pengawas Benih Tanaman/ PBT (Paket)	1	1	1
			6. Sarana BPSBTPH (Paket)	1	1	1
			7. Pembinaan, Pengawalan, Pendampingan Monev Perbenihan (Paket)	1	1	1
		3. Penguatan Perlindungan Tanaman dari gangguan OPT dan DPI	1. Operasional BPTPH Padi (Paket)	1	1	1
			2. Biaya Operasional POPT-PHP Padi (Paket)	1	1	1

# Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010 - 2014

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	TARGET (VOLUME)				
				2012	2013	2014		
<b>PENCAPAIAN SWASEMBADA DAN SWASEMBADA BERKELANJUTAN</b>								
a. Swasembada Berkelanjutan Padi								
			3. SLPHT Padi (Paket)	1	1	1		
			4. SLI Padi (Paket)	1	1	1		
			5. Bantuan Penanganan Tikus dan WBC Padi (Paket)	-	1	1		
			6. Operasional Lab Pengamatan Hama Terpadu, Diperta, Brigade Proteksi Tanaman (Paket)	1	1	1		
			7. Insentif THL POPT PHP (Paket)	1	1	1		
			8. Pembinaan, pengawalan, pendampingan (Paket)	1	1	1		
			9. Sarana Pengendalian OPT (Paket)	1	-	-		
			4. Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan	1. Bantuan Sarana Pascapanen Padi (Paket)	1	1	1	
				2. Pembinaan Pengawalan Pendampingan Padi (Paket)	1	1	1	
		3. Survey Susut Hasil Padi (Paket)		1	-	-		
		5. Dukungan Manajemen & Dukungan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	1. Bantuan Bencana Alam (Paket)	1	1	1		
		2.	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	1. Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian	1. Cetak sawah (Ha)	100.000	100.000	100.000
					2. SRI (Ha)	60.000	200.000	250.000
3. Optimasi lahan (Ha)	209.400				300.000	350.000		
2. Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian	1. Pengembangan Jaringan Irigasi (Ha)			522.850	500.000	500.000		
	2. Pengembangan Sumber Air (Unit)			1.665	1.855	2.039		
	3. Konservasi Air dan Antisipasi Anomali (Unit)			1.331	1.470	1.691		
3. Penyaluran Pupuk Bersubsidi	1. Jumlah Pupuk Bersubsidi (juta ton)			10.53	11.06	11.61		
4. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengewasaan Alat Mesin Pertanian	1. Bantuan Kepemilikan Alsintan (BAKAL) Traktor Roda 2 (unit)			1.567	1.650	1.750		
	2. Bantuan Kepemilikan Alsintan (BAKAL) Pompa Air (unit)			600	639	681		
5. Pembiayaan Pertanian	1. Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) (Ton GKG)			22.680	32.400	32.400		
3.	Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian			1. Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian	1. Pengolahan hasil pertanian (Unit)	145	750	900
				2. Pengembangan Mutu dan Standardisasi Pertanian	2. Peningkatan mutu hasil pertanian (Unit)	145	145	145
				3. Pengembangan Usaha dan Investasi	3. Kelembagaan usaha, investasi dan promosi (kali)	14	14	14
				4. Pengembangan Pemasaran Domestik	4. Kelembagaan dan jaringan pasar domestik (unit)	180	190	200
				5. Pengembangan Pemasaran internasional	5. Proteksi hasil pertanian strategis	5	5	5

## Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010 - 2014

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	TARGET (VOLUME)				
PENCAPAIAN SWASEMBADA DAN SWASEMBADA BERKELANJUTAN				2012	2013	2014		
a. Swasembada Berkelanjutan Padi								
4.	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani	1. Revitalisasi Pendidikan Pertanian, Standarisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian	1. Aparatur yang mengikuti pendidikan diploma IV program studi penyuluhan pertanian (Orang)	956	956	956		
			2. SDM pertanian yang mendapat sertifikasi profesi (Orang)	1.400	1.400	1.400		
			3. Sertifikat tanah (m2)	11.377	11.377	11.377		
			4. Aparatur yang mengikuti pendidikan diploma IV program studi organisme pengganggu tanaman (Orang)	35	35	35		
		2. Pengembangan Pendidikan Menengah Pertanian	1. Generasi muda pertanian yang mengikuti pendidikan menengah program studi tanaman pangan dan hortikultura (Orang)	6.725	6.725	6.725		
		3. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	1. Aparatur pertanian yang mengikuti TOT Padi (Orang)	60	60	60		
			2. Aparatur pertanian yang mengikuti Diklat Teknis Agribisnis Padi (Orang)	990	990	990		
			3. Non Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Agribisnis Padi (Orang)	450	450	450		
			4. Non Aparatur pertanian yang mengikuti Diklat Benih Padi bersertifikat (Orang)	150	150	150		
			5. Aparatur pertanian yang mengikuti Diklat Pengelolaan Tanaman Terpadu Padi (Orang)	30	30	30		
			6. Aparatur yang mengikuti Diklat Budaya Padi (Orang)	30	30	30		
			7. Aparatur pertanian yang mengikuti Pelatihan Padi Organik (Orang)	60	60	60		
			8. Aparatur pertanian yang mengikuti Diklat Teknis Agribisnis Padi Sawah (Orang)	30	30	30		
			9. Non Aparatur pertanian yang mengikuti Diklat Teknis Agribisnis Padi Sawah (Orang)	30	30	30		
		5.	Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing	1. Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan	1. Jumlah produksi benih sumber (BS,FS) padi dengan SMM ISO 9001-2008 (ton)	35	35	35
					2. Jumlah varietas unggul baru padi	6	6	6
					3. Jumlah teknologi budidaya, panen dan pascapanen primer padi	4	5	5
2. Penelitian/Perekayasaan dan Pengembangan Mekanisasi Pertanian	1. Teknologi mekanisasi untuk mendukung peningkatan intensitas tanam dan efisiensi sistem produksi padi			3	3	3		



# Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010 - 2014

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	TARGET (VOLUME)			
				2012	2013	2014	
<b>PENCAPAIAN SWASEMBADA DAN SWASEMBADA BERKELANJUTAN</b>							
a. Swasembada Berkelanjutan Padi							
			2. Teknologi mekanisasi untuk penyediaan dan peningkatan efisiensi air irigasi (indoor dan outdoor)	0	1		
		3. Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian	1. Teknologi pengelolaan tanah, dan pupuk mendukung peningkatan produktivitas padi	16	16	16	
			2. Peta SDL mendukung produksi padi	6	6	6	
			3. Rekomendasi kebijakan pemanfaatan SDL pertanian mendukung produksi padi	4	4	4	
		4. Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya genetik Pertanian	1. Galur harapan komoditas pertanian	20	5	4	
			2. Inovasi teknologi berbasis bioteknologi	1	1	1	
		5. Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen	1. Teknologi penanganan susut pascapanen padi	1	1	1	
		6. Penelitian/analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian	1. Rekomendasi kebijakan yang mendukung swasembada berkelanjutan padi	3			
		7. Pengkajian dan percepatan diseminasi inovasi teknologi pertanian	1. Jumlah Teknologi spesifik lokasi	64	64	75	
			2. Jumlah Teknologi yang Terdiseminasi ke pengguna	128	90	90	
6.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Pengembangan Pengenekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar (P2KP)	1. Jumlah hasil promosi P2KP	1 Pusat	1 Pusat	1 Pusat	
				33 Prop	33 Prop	33 Prop	
				390 Kab/Kota	400 Kab/Kota	425 Kab/Kota	
			2. Jumlah hasil analisis pola konsumsi pangan penduduk	1 Pusat	1 Pusat	1 Pusat	
				33 Prop	33 Prop	33 Prop	
		2. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan (LDPM)	3. Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	1.265 Gap	1.500 Gap	1.750 Gap	
			4. Jumlah hasil panel harga pangan pokok	16 Prop	16 Prop	16 Prop	
			5. Jumlah hasil pemantauan/pengumpulan data distribusi, harga dan cadangan pangan		1 Pusat	1 Pusat	1 Pusat
					33 Prop	33 Prop	33 Prop
			6. Jumlah hasil pengembangan model pemantauan distribusi, harga dan cadangan pangan		13 Prop	13 Prop	13 Prop
3. Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan (Demapan)	7. Jumlah hasil analisis ketersediaan, rawan pangan dan akses pangan		1 Pusat	1 Pusat	1 Pusat		
			33 Prop	33 Prop	33 Prop		
	8. Jumlah laporan pelatihan aparat yang ditingkatkan pengetahuan dan keterampilan	1 Pusat	1 Pusat	1 Pusat			
		33 Prop	33 Prop	33 Prop			

### 6.1.2. Swasembada Berkelanjutan Jagung

Untuk mempertahankan swasembada berkelanjutan jagung pada kurun waktu 2010-2014 ditargetkan meningkat sebesar 10,02%, akan dilaksanakan melalui lima Program dan 19 Kegiatan, sebagaimana disajikan pada Tabel 6.2.

**Tabel 6.2. Program dan Kegiatan yang Mendukung Swasembada Berkelanjutan Jagung**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	TARGET (VOLUME)		
				2012	2013	2014
<b>PENCAPAIAN SWASEMBADA DAN SWASEMBADA BERKELANJUTAN</b>						
b. Swasembada Berkelanjutan Jagung						
1.	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan	1. Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia (SLPTT)	1. SLPTT Jagung Hibrida (Ha)	200.000	260.000	338.000
		2. Pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan	1. BLBU Jagung Hibrida (Ha)	200.000	260.000	338.000
			2. Pemberdayaan Penangkar Jagung (Ha)	700	910	1183
		3. Penguatan Perlindungan Tanaman dari gangguan OPT dan DPI	1. Operasional BPTPH Jagung (Paket)	1	1	1
			2. Biaya Operasional POPT-PHP Jagung (Paket)	1	1	1
			3. SLPHT Jagung (Paket)	1	1	1
			4. SLI Jagung (Paket)	1	1	1
		4. Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan	1. Bantuan Sarana Pascapanen Jagung (Paket)	1	1	1
			2. Pembinaan Pengawasan Pendampingan Jagung (Paket)	1	1	1
		2.	Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian	1. Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian	1. Pengolahan hasil pertanian	5
2. Pengembangan Mutu dan Standarisasi Pertanian	2. Peningkatan mutu hasil pertanian segar dan olahan			2	2	2
3. Pengembangan Usaha dan Investasi	3. Kelembagaan usaha, investasi dan promosi			10	10	10
4. Pengembangan Pemasaran Domestik	4. Kelembagaan dan jaringan pasar domestik			120	130	140
5. Pengembangan Pemasaran Internasional	5. Proteksi hasil pertanian strategis			5	5	5
3.	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani	1. Revitalisasi Pendidikan Pertanian, Standarisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian	1. Aparatur yang mengikuti pendidikan diploma IV program studi pengawas benih tanaman (Orang)	35	35	35
			2. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	1. Aparatur yang mengikuti TOT Jagung (Orang)	60	60
		2. Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Agribisnis Jagung (Orang)		450	450	450
		3. Non Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Agribisnis Jagung (Orang)		265	265	265
		4. Non Aparatur yang mengikuti Diklat Benih Jagung Bersertifikat (Orang)		120	120	120
		5. Aparatur yang mengikuti Diklat Budidaya Jagung (Orang)		30	30	30

# Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010 - 2014

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	TARGET (VOLUME)				
				2012	2013	2014		
<b>PENCAPAIAN SWASEMBADA DAN SWASEMBADA BERKELANJUTAN</b>								
b. Swasembada Berkelanjutan Jagung								
4.	Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing	1. Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan	6. Aparatur yang mengikuti Pelatihan Kewirausahaan Jagung (Orang)	30	30	30		
			7. Non Aparatur yang mengikuti Pelatihan Kewirausahaan Jagung (Orang)	25	25	25		
			1. Jumlah produksi benih sumber (BS,FS) jagung dengan SMM ISO 9001-2008 (ton)	11	11	11		
					2. Jumlah varietas unggul baru jagung	2	2	2
					3. Jumlah teknologi budidaya, panen dan pascapanen primer jagung	1	2	2
			2. Penelitian/Perekayasaan dan Pengembangan Mekanisasi Pertanian	1. Teknologi mekanisasi untuk mendukung peningkatan intensitas tanam dan efisiensi sistem produksi jagung	0	1	1	
				2. Teknologi mekanisasi untuk mendukung penanganan pasca panen produksi jagung	1	1	1	
			3. Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian	1. Teknologi pengelolaan tanah, dan pupuk mendukung peningkatan produktivitas jagung	3	3	3	
				2. Peta SDL mendukung produksi jagung	2	2	2	
				3. Rekomendasi kebijakan pemanfaatan SDL pertanian mendukung produksi jagung	2	2	2	
			4. Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen	1. Teknologi penanganan susut pascapanen jagung	0	1	1	
			5. Pengkajian dan percepatan diseminasi inovasi teknologi pertanian	1. Jumlah Teknologi spesifok lokasi	20	20	24	
				2. Jumlah Teknologi yang Terdiseminasi ke pengguna	32	32	32	
		5.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Pengembangan Pengenekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar (P2KP)	1. Jumlah hasil promosi P2KP	1 Pusat 33 Prop 390 Kab/Kota	1 Pusat 33 Prop 400 Kab/Kota	1 Pusat 33 Prop 425 Kab/Kota
					2. Jumlah hasil analisis pola konsumsi pangan penduduk	1 Pusat 33 Prop	1 Pusat 33 Prop	1 Pusat 33 Prop
3. Jumlah Hasil Pengembangan Olahan Pangan Lokal	9 Prop				15 Prop	20 Prop		
2. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan (LDPM)	4. Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)				1,265 Gap	1,500 Gap	1,750 Gap	
	5. Jumlah hasil panel harga pangan pokok				16 Prop	16 Prop	16 Prop	
	6. Jumlah hasil pemantauan/ pengumpulan data distribusi, harga dan cadangan pangan				1 Pusat 33 Prop	1 Pusat 33 Prop	1 Pusat 33 Prop	
	7. Jumlah hasil pengembangan model pemantauan distribusi, harga dan cadangan pangan			13 Prop	13 Prop	13 Prop		

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	TARGET (VOLUME)		
				2012	2013	2014
<b>PENCAPAIAN SWASEMBADA DAN SWASEMBADA BERKELANJUTAN</b>						
b. Swasembada Berkelanjutan Jagung						
		3. Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan (Demapan)	8. Jumlah hasil analisis ketersediaan, rawan pangan dan akses pangan	1 Pusat	1 Pusat	1 Pusat
				33 Prop	33 Prop	33 Prop
			9. Jumlah laporan pelatihan aparat yang ditingkatkan pengetahuan dan keterampilan	1 Pusat	1 Pusat	1 Pusat
				33 Prop	33 Prop	33 Prop

### 6.1.3. Swasembada Kedelai

Untuk mencapai swasembada kedelai pada Tahun 2014, sasaran produksi kedelai pada tahun 2014 ditargetkan sebesar 2,70 juta ton dengan peningkatan rata-rata 20,05% pertahun, akan dilaksanakan melalui lima Program dan 19 Kegiatan, sebagaimana disajikan pada Tabel 6.3.

**Tabel 6.3. Program dan Kegiatan yang Mendukung Swasembada Berkelanjutan Kedelai**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	TARGET (VOLUME)		
				2012	2013	2014
<b>PENCAPAIAN SWASEMBADA DAN SWASEMBADA BERKELANJUTAN</b>						
c. Swasembada Berkelanjutan Kedelai						
1.	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan	1. Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	1. SLPTT Kedelai (Ha)	350.000	500.000	700.000
			2. Pengembangan kedelai Model (Ha)	2.094	2.722	3.539
			3. Ubinan SLPTT Kedelai (Ha)	3.500	4.550	5.915
			4. Pembinaan, pengawasan, pendampingan, monev (Paket)	1	1	1
		2. Pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan	1. BLBU Kedelai (Ha)	350.000	500.000	700.000
			2. Pemberdayaan Penangkar Kedelai (Ha)	2.500	3.250	4.225
		3. Penguatan Perlindungan Tanaman dari gangguan OPT dan DPI	1. Operasional BPTPH Kedelai (Paket)	1	1	1
			2. Biaya Operasional POPT-PHP Kedelai (Paket)	1	1	1
			3. SLPHT Kedelai (Paket)	1	1	1
			4. SLI Kedelai (Paket)	1	1	1
		4. Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT (SLPTH, SLI)	1. Bantuan Sarana Pascapanen Kedelai (Paket)	1	1	1
			2. Pembinaan Pengawasan Pendampingan Kedelai (Paket)	1	1	1
		2.	Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian	1. Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian	1. Pengolahan hasil pertanian	8
2. Pengembangan Mutu dan Standardisasi Pertanian	2. Peningkatan mutu hasil pertanian segar dan olahan			45	45	45
3. Pengembangan Usaha dan Investasi	3. Kelembagaan usaha, investasi dan promosi			9	9	9

# Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010 - 2014

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	TARGET (VOLUME)		
				2012	2013	2014
<b>PENCAPAIAN SWASEMBADA DAN SWASEMBADA BERKELANJUTAN</b>						
b. Swasembada Berkelanjutan Kedelai						
		4. Pengembangan Pemasaran Domestik	4. Kelembagaan dan jaringan pasar domestik	100	100	100
		5. Pengembangan Pemasaran Internasional	5. Proteksi hasil pertanian strategis	5	5	5
3.	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani	1. Revitalisasi Pendidikan Pertanian, Standarisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian	1. Aparatur yang mengikuti TOT Kedelai	60	60	60
			2. Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Agribisnis Kedelai	330	330	330
			3. Non Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Agribisnis Kedelai	270	270	270
			4. Aparatur yang mengikuti TOT Agribisnis Kedelai	60	60	60
			5. Aparatur yang mengikuti Diklat Budidaya Kedelai	30	30	30
			6. Non aparaturnya yang mengikuti Diklat Benih Kedelai Bersertifikat	60	60	60
4.	Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing	1. Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan	1. Jumlah produksi benih sumber (BS,FS) kedelai dengan SMM ISO 9001-2008 (ton)	8,5	8,5	8,5
			2. Jumlah varietas unggul baru kedelai	2	2	2
			3. Jumlah teknologi budidaya, panen dan pascapanen primer kedelai	1	1	1
			4. Jumlah teknologi budidaya, panen dan pascapanen primer kedelai	1	1	1
		2. Penelitian/Perekayasaan dan Pengembangan Mekanisasi Pertanian	1. Teknologi mekanisasi untuk mendukung peningkatan produktivitas dan efisiensi budidaya produksi dan pasca panen kedelai	1	1	1
			3. Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian	1. Teknologi pengelolaan tanah, dan pupuk mendukung peningkatan produktivitas kedelai	2	2
		2. Peta SDL mendukung produksi kedelai		2	2	2
		3. Rekomendasi kebijakan pemanfaatan SDL pertanian mendukung produksi kedelai		1	1	1
		4. Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya genetik Pertanian	1. Galur harapan komoditas pertanian	320	25	15
			2. Inovasi teknologi berbasis bioteknologi	1	1	1
		5. Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen	1. Teknologi penanganan susut pascapanen kedelai	0	1	1
		6. Pengkajian dan percepatan diseminasi inovasi teknologi pertanian	1. Jumlah Teknologi spesifok lokasi	6	13	18
			2. Jumlah Teknologi yang Terdiseminasi ke pengguna	32	33	33
		5.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Pengembangan Penganevaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar (P2KP)	1. Jumlah hasil promosi P2KP	1 Pusat
	33 Prop				33 Prop	33 Prop
	390 Kab/Kota				400 Kab/Kota	425 Kab/Kota

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	TARGET (VOLUME)		
				2012	2013	2014
<b>PENCAPAIAN SWASEMBADA DAN SWASEMBADA BERKELANJUTAN</b>						
b. Swasembada Berkelanjutan Kedelai						
			2. Jumlah hasil analisis pola konsumsi pangan penduduk	1 Pusat 33 Prop	1 Pusat 33 Prop	1 Pusat 33 Prop
	2. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan (LDPM)		3. Jumlah hasil panel harga pangan pokok	16 Prop	16 Prop	16 Prop
			4. Jumlah hasil pemantauan/ pengumpulan data distribusi, harga dan cadangan pangan	1 Pusat 33 Prop	1 Pusat 33 Prop	1 Pusat 33 Prop
			5. Jumlah hasil pengembangan model pemantauan distribusi, harga dan cadangan pangan	13 Prop	13 Prop	13 Prop
	3. Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan (Demapan)		6. Jumlah hasil analisis ketersediaan, rawan pangan dan akses pangan	1 Pusat 33 Prop	1 Pusat 33 Prop	1 Pusat 33 Prop
			7. Jumlah laporan pelatihan aparat yang ditingkatkan pengetahuan dan keterampilan	1 Pusat 33 Prop	1 Pusat 33 Prop	1 Pusat 33 Prop

#### 6.1.4. Swasembada Gula

Untuk mencapai swasembada gula, sasaran produksi gula Tahun 2014 ditargetkan sebesar 3,4 juta ton dengan peningkatan rata-rata 10,80% pertahun. Untuk mencapai swasembada gula tersebut, dilaksanakan melalui enam Program dan 18 Kegiatan, sebagaimana disajikan pada Tabel 6.4.

**Tabel 6.4. Program dan Kegiatan yang Mendukung Swasembada Gula Tahun 2014**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	TARGET (VOLUME)		
				2012	2013	2014
<b>PENCAPAIAN SWASEMBADA DAN SWASEMBADA BERKELANJUTAN</b>						
d. Swasembada Berkelanjutan Gula						
1.	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	1. Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Semusim	1. Pembangunan Kebun Bibit Datar Tebu/Kuljar (ha)	700	770	840
			2. Perluasan (Ekstensifikasi) Tanaman Tebu Rakyat (ha)	6,965	7,662	8,428
			3. Demplot Penerapan Teknologi Budidaya Double (ha)	-	-	-
			4. Warung Tebu Varietas Unggul Baru Bibit Tebu (ha)	-	-	-
			5. Pelatihan Tenaga Kontrak dan Petugas Lapangan	390	429	472
			6. Pembantu TKP (PLP-TKP) (Org) (Tebu)			
			7. Pemberdayaan/Pelatihan Petani Tebu (KT)	272	299	329

# Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010 - 2014

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	TARGET (VOLUME)		
				2012	2013	2014
<b>PENCAPAIAN SWASEMBADA DAN SWASEMBADA BERKELANJUTAN</b>						
d. Swasembada Berkelanjutan Gula						
			8. Rekrutmen TKP dan PLP-TKP (tebu) (org)	282	310	341
			9. Bantuan Pengairan (unit)	340	374	411
			10. Traktor dan Implement (Unit)	30	32	35
			11. Pemetaan Kecocokan Lahan untuk pengembangan tebu (Pkt)	1	1	1
		2. Dukungan Perlindungan Perkebunan	1. Pengendalian OPT tanaman Semusim/tebu (Ha)	525	525	525
		3. Dukungan Pascapanen dan Pembinaan Usaha Perkebunan	1. Eksplorasi dan pengujian mutu benih tanaman perkebunan (Klon)	5	6	7
			2. Pengembangan teknik dan metode pengujian mutu benih (Komoditi)	4	5	6
2.	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	1. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian	1. Bantuan Kepemilikan Alsintan (BAKAL) Traktor Roda 4 (unit)	10	-	-
3.	Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian	1. Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian	1. Pengolahan hasil pertanian			
		2. Pengembangan Mutu dan Standardisasi Pertanian	2. Peningkatan mutu hasil pertanian segar dan olahan	2	2	2
		3. Pengembangan Usaha dan Investasi	3. Kelembagaan usaha, investasi dan promosi	5	5	5
		4. Pengembangan Pemasaran Domestik	4. Kelembagaan dan jaringan pasar domestik			
		5. Pengembangan Pemasaran Internasional	5. Proteksi hasil pertanian strategis	5	5	5
4.	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani	1. Revitalisasi Pendidikan Pertanian, Standarisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian	1. Aparatur yang mengikuti pendidikan diploma IV Program Studi Perkebunan (Orang)	152	152	152
		2. Pengembangan Pendidikan Menengah Pertanian	2. Generasi muda pertanian yang mengikuti pendidikan menengah program studi perkebunan (Orang)	3,680	3,680	3,680
		3. Pematapan Sistem Pelatihan Pertanian	3. Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Agribisnis Tebu (Orang)	210	210	210
			4. Non Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Agribisnis Tebu (Orang)	90	90	90
5.	Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing	1. Penelitian dan Pengembangan Tanaman Perkebunan	1. Jumlah Bibit tebu melalui teknologi SE (Planlet)	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		2. Penelitian/Perekayasaan dan Pengembangan Mekanisasi Pertanian	2. Teknologi mekanisasi untuk mendukung peningkatan efisiensi dan sistem produksi tanaman tebu	1	1	
		3. Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian	1. Teknologi pengelolaan tanah, dan pupuk mendukung peningkatan produktivitas tebu	0	1	0
			2. Peta SDL mendukung produksi tebu	1	1	0
			3. Rekomendasi kebijakan pemanfaatan SDL pertanian mendukung produksi tebu	1	1	0

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	TARGET (VOLUME)		
				2012	2013	2014
<b>PENCAPAIAN SWASEMBADA DAN SWASEMBADA BERKELANJUTAN</b>						
d. Swasembada Berkelanjutan Gula						
6.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Pengembangan Penganeekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar (P2KP)	1. Jumlah hasil promosi P2KP	1 Pusat	1 Pusat	1 Pusat
				33 Prop	33 Prop	33 Prop
				390 Kab/Kota	400 Kab/Kota	425 Kab/Kota
			2. Jumlah hasil analisis pola konsumsi pangan penduduk	1 Pusat	1 Pusat	1 Pusat
				33 Prop	33 Prop	33 Prop
		2. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan (LDPM)	3. Jumlah hasil panel harga pangan pokok	16 Prop	16 Prop	16 Prop
			4. Jumlah hasil pemantauan/ pengumpulan data distribusi, harga dan cadangan pangan	1 Pusat	1 Pusat	1 Pusat
				33 Prop	33 Prop	33 Prop
		3. Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan (Demapan)	5. Jumlah hasil pengembangan model pemantauan distribusi, harga dan cadangan pangan	13 Prop	13 Prop	13 Prop
6. Jumlah hasil analisis ketersediaan, rawan pangan dan akses pangan	1 Pusat		1 Pusat	1 Pusat		
	33 Prop		33 Prop	33 Prop		
7. Jumlah laporan pelatihan aparat yang ditingkatkan pengetahuan dan keterampilan	1 Pusat		1 Pusat	1 Pusat		
	33 Prop		33 Prop	33 Prop		

### 6.1.5. Swasembada Daging Sapi

Untuk mencapai swasembada daging sapi pada Tahun 2014 maka sasaran produksi daging sapi/kerbau ditargetkan sebesar 0,66. juta ton dengan peningkatan rata-rata pertahun sebesar 7,13. persen, akan dilaksanakan melalui enam Program dan 22 Kegiatan, sebagaimana disajikan pada Tabel 6.5.

**Tabel 6.5. Program dan Kegiatan yang Mendukung Swasembada Daging Sapi Tahun 2014**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	TARGET (VOLUME)		
				2012	2013	2014
<b>PENCAPAIAN SWASEMBADA DAN SWASEMBADA BERKELANJUTAN</b>						
e. Swasembada Sapi						
1.	Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal	1. Peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal (optimalisasi IB dan INKA, LM3, SMD) Sapi Potong	1. Optimalisasi Inseminasi Buatan (IB) (juta ekor)	1.6	1.8	2.0
			2. Penyebaran Pejantan INKA (ekor)	2,200	2,500	4,000
			3. Pemberdayaan Pos IB dan Keswan (orang)	1,120	1,600	2,000
			4. Penyediaan Sumber Pembiayaan Pertanian/SMD (klpk)	602	602	602
			5. Pengembangan Agribisnis Peternakan Melalui LM3 (klpk)	60	150	150



# Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010 - 2014

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	TARGET (VOLUME)			
				2012	2013	2014	
<b>PENCAPAIAN SWASEMBADA DAN SWASEMBADA BERKELANJUTAN</b>							
e. Swasembada Sapi							
		2. Peningkatan produksi pakan ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal	6 Pengembangan Budidaya Sapi Potong/Kerbau dan Sapi Perah	110	121	133	
			1 Pengembangan Integrasi Ternak Ruminansia (klpk)	130	140	170	
			2 Optimalisasi Sumber Bibit / Benih (HPT) (klpk)	30	40	50	
			3 Pengembangan Lumbung Pakan Ruminansia	20	20	20	
			4 Pengembangan Unit Pengolah Pakan Ruminansia	35	37	47	
			5 Pengembangan HPT di Lahan Kehutanan di Kab.Blora	20	20	20	
		3. Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular dan penyakit zoonosis	1. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit AI, Brucellosis, Anthrax, Hog Cholera dan Jembrana (dosis)	7,514,752	8,481,802	9,588,673	
			2. Penanggulangan Gangguan Reproduksi pada Sapi / Kerbau (dosis)	150,000	165,000	181,500	
			3. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Parasiter (dosis)	100,000	110,000	121,000	
			4. Penguatan Puskeswan (unit)	15	15	15	
		4. Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumber daya lokal (semen beku, embrio transfer, insentif dan penyelamatan Sapi Betina produktif	1 Produksi Semen Beku (dosis)	7,160	7,976	8,820	
			2 Produksi Bibit Sapi Potong, Sapi Perah dan Kerbau (ekor)	1,790	2,347	3,117	
			3 Penambahan Indukan Sapi (ekor)	7,600	6,000	5,000	
			4 Pengendalian Sapi/Kerbau Betina Produktif (klpk)	1,300	1,000	700	
			5 Penguatan Unit Pembibitan Daerah (unit)	24	26	28	
		5. Penjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan	1 Penguatan Peran dan Fungsi Lembaga Otoritas Veteriner (Unit)	475	475	475	
			2 Fasilitasi RPH Ruminansia	30	33	35	
			3 Fasilitasi Pembangunan Cold Storage	13	5	5	
			4 Pembangunan Kios Daging	16	16	16	
			5 Fasilitasi Alat transportasi daging	25	10	10	
			6 Fasilitasi Peralatan Kesrawan	0	3	5	
		2. Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	1. Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian	1. Konservasi Air dan Antisipasi Anomali (Unit)	255	281	309
		3. Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian	1. Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian	1. Pengolahan hasil pertanian	13	20	25
			2. Pengembangan Mutu dan Standardisasi Pertanian	2. Peningkatan mutu hasil pertanian segar dan olahan	75	75	75
			3. Pengembangan Usaha dan Investasi	3. Kelembagaan usaha, investasi dan promosi	4	4	4

# Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010 - 2014

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	TARGET (VOLUME)			
				2012	2013	2014	
<b>PENCAPAIAN SWASEMBADA DAN SWASEMBADA BERKELANJUTAN</b>							
e. Swasembada Sapi							
		4. Pengembangan Pemasaran Domestik	4. Kelembagaan dan jaringan pasar domestik	110	120	120	
		5. Pengembangan Pemasaran Internasional	5. Proteksi hasil pertanian strategis	5	5	5	
4.	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani	1. Revitalisasi Pendidikan Pertanian, Standarisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian	1. Aparatur pertanian yang mengikuti pendidikan diploma IV program studi peternakan (Orang)	616	616	616	
			2. Aparatur pertanian yang mengikuti pendidikan diploma IV program studi pengawas bibit ternak (Orang)	35	35	35	
			3. Aparatur pertanian yang mengikuti pendidikan diploma IV program studi pengawas mutu pakan (Orang)	35	35	35	
		2. Pengembangan Pendidikan Menengah Pertanian	1. Generasi muda pertanian yang mengikuti pendidikan menengah program studi kesehatan hewan (Orang)	841	841	841	
			2. Generasi muda pertanian yang mengikuti pendidikan menengah program studi peternakan (Orang)	3,817	3,817	3,817	
		3. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian		1. Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Agribisnis Sapi Potong (Orang)	445	445	445
				2. Aparatur yang mengikuti TOMT Sapi Potong (Orang)	30	30	30
				3. Aparatur yang mengikuti TOT Sapi Potong (Orang)	30	30	30
				4. Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Pengolahan Limbah Ternak (Orang)	30	30	30
				5. Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Selektor Bibit Ternak (Orang)	30	30	30
				6. Aparatur yang mengikuti Diklat Manajemen Pakan Ternak (Orang)	60	60	60
				7. Non Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Ternak Sapi Potong (Orang)	60	60	60
				8. Aparatur yang mengikuti Diklat Manajemen Pemilihan Bibit Sapi Potong (Orang)	60	60	60
				9. Aparatur yang mengikuti Diklat Pemberian Pakan Sapi Potong (Orang)	60	60	60
				10. Aparatur yang mengikuti Diklat Kesehatan dan Reproduksi sapi Potong (Orang)	60	60	60
11. Aparatur yang mengikuti Diklat Manajemen Pakan Sapi Perah (Orang)	30			30	30		
12. Aparatur yang mengikuti Diklat Pemeliharaan Sapi Perah (Orang)	30			30	30		

# Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010 - 2014

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	TARGET (VOLUME)			
				2012	2013	2014	
<b>PENCAPAIAN SWASEMBADA DAN SWASEMBADA BERKELANJUTAN</b>							
e. Swasembada Sapi							
			13. Aparatur yang mengikuti Diklat Kesehatan dan Reproduksi sapi Perah (Orang)	30	30	30	
			14. Non Aparatur yang mengikuti Diklat Penggemukan Sapi Potong (Orang)	30	30	30	
			15. Non Aparatur yang mengikuti Diklat Buchery (Orang)	30	30	30	
			16. Aparatur yang mengikuti Diklat Dasar Pengawas Bibit Ternak (Orang)	120	120	120	
			17. Aparatur yang mengikuti Diklat Menyusun Formulasi Pakan Ternak (Orang)	30	30	30	
			18. Aparatur yang mengikuti Diklat Pengolahan Hijauan Pakan Ternak (Orang)	60	60	60	
			19. Aparatur yang mengikuti Diklat Recording Sapi Potong (Orang)	30	30	30	
			20. Aparatur yang mengikuti Diklat Inseminasi Buatan (Orang)	30	30	30	
			21. Aparatur yang mengikuti Diklat Pemanfaatan Limbah Ternak menjadi Pupuk Organik (Orang)	30	30	30	
			22. Aparatur yang mengikuti Diklat Pemeliharaan Induk dan Pedet (Orang)	30	30	30	
			23. Non Aparatur yang mengikuti Diklat Teknis Agribisnis Sapi Potong (Orang)	325	325	325	
			24. Non Aparatur yang mengikuti Diklat Pengolahan dan Pengawetan Hijauan Pakan Ternak (Orang)	60	60	60	
5.	Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing	1. Penelitian dan Pengembangan Tanaman Peternakan	1. Jumlah bibit/benih sumber ternak dan tanaman pakan ternak (Ekor/batang)	500/0	550/0	600/0	
			2. Jumlah inovasi teknologi peternakan dan veteriner	9	10	12	
	2. Penelitian/Perekayasa dan Pengembangan Mekanisasi Pertanian	1. Teknologi mekanisasi untuk penyediaan pakan ternak & pemanfaatan pupuk organik	1. Teknologi mekanisasi untuk penyediaan pakan ternak & pemanfaatan pupuk organik	2	2	1	
			3. Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian	1. Teknologi pengelolaan tanah, dan pupuk mendukung peningkatan produktivitas sapi	2	2	2
				2. Peta SDL mendukung produksi sapi	1	1	1
	3. Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian	3. Rekomendasi kebijakan pemanfaatan SDL pertanian mendukung produksi daging sapi	3. Rekomendasi kebijakan pemanfaatan SDL pertanian mendukung produksi daging sapi	1	1	1	
			4. Penelitian/analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian	1. Rekomendasi kebijakan yang mendukung swasembada sapi	1		

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	TARGET (VOLUME)		
				2012	2013	2014
<b>PENCAPAIAN SWASEMBADA DAN SWASEMBADA BERKELANJUTAN</b>						
e. Swasembada Sapi						
6.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dan Varietas Unggul Berdaya Saing	5. Pengkajian dan percepatan diseminasi inovasi teknologi pertanian	1. Jumlah Teknologi spesofok lokasi	6	8	8
			2. Jumlah Teknologi yang Terdiseminasi ke pengguna	32	33	33
		1. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar (P2KP)	1. Jumlah hasil promosi P2KP	1 Pusat	1 Pusat	1 Pusat
				33 Prop	33 Prop	33 Prop
				390 Kab/Kota	400 Kab/Kota	425 Kab/Kota
			2. Jumlah hasil analisis pola konsumsi pangan penduduk	1 Pusat	1 Pusat	1 Pusat
				33 Prop	33 Prop	33 Prop
			3. Jumlah hasil koordinasi keamanan pangan segar	1 Pusat	1 Pusat	1 Pusat
				33 Prop	33 Prop	33 Prop
			4. Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan keamanan pangan	1 Pusat	1 Pusat	1 Pusat
				33 Prop	33 Prop	33 Prop
		2. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan (LDPM)	5. Jumlah hasil panel harga pangan pokok	16 Prop	16 Prop	16 Prop
				1 Pusat	1 Pusat	1 Pusat
				33 Prop	33 Prop	33 Prop
		7. Jumlah hasil pengembangan model pemantauan distribusi, harga dan cadangan pangan	13 Prop	13 Prop	13 Prop	
3. Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan (Demapan)	8. Jumlah hasil analisis ketersediaan, rawan pangan dan akses pangan		1 Pusat	1 Pusat	1 Pusat	
			33 Prop	33 Prop	33 Prop	
9. Jumlah laporan pelatihan aparat yang ditingkatkan pengetahuan dan keterampilan	1 Pusat	1 Pusat	1 Pusat			
	33 Prop	33 Prop	33 Prop			

## 6.2. Peningkatan Diversifikasi Pangan

Target utama dari peningkatan diversifikasi pangan adalah menurunnya konsumsi beras sebesar 1,5 per tahun dan menurunnya konsumsi terigu, yang dilakukan melalui upaya mempercepat dan mengoptimalkan penganekaragaman konsumsi pangan lokal seperti umbi-umbian, sayuran, buah-buahan dan pangan hewani. Untuk mencapai dan mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan ini, dilaksanakan melalui tujuh Program dan 22 Kegiatan, sebagaimana disajikan pada Tabel 6.6.

Tabel 6.6. Program dan Kegiatan Yang Mendukung Peningkatan Diversifikasi Pangan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	TARGET (VOLUME)			
				2012	2013	2014	
<b>PENINGKATAN DIVERSIFIKASI PANGAN</b>							
1.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Pengembangan Pengankaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar	1. Jumlah desa yang diberdayakan dalam P2KP	5.990 Desa	8.000 Desa	10.000 Desa	
			2. Jumlah hasil pemantauan, monitoring, evaluasi dan perumusan kebijakan P2KP	1 Pusat	1 Pusat	1 Pusat	
				33 Prop	33 Prop	33 Prop	
				363 Kab/Kota	400 Kab/Kota	425 Kab/Kota	
			3. Jumlah hasil promosi P2KP	1 Pusat	1 Pusat	1 Pusat	
				33 Prop	33 Prop	33 Prop	
				390 Kab/Kota	400 Kab/Kota	425 Kab/Kota	
			4. Jumlah hasil analisis pola konsumsi pangan penduduk	1 Pusat	1 Pusat	1 Pusat	
33 Prop	33 Prop	33 Prop					
5. Jumlah hasil kerjasama dengan perguruan tinggi	5 Lap	5 Lap	5 Lap				
	6. Jumlah hasil koordinasi keamanan pangan segar	1 Pusat	1 Pusat	1 Pusat			
33 Prop		33 Prop	33 Prop				
7. Jumlah hasil pemantauan dan pengawasan keamanan pangan	1 Pusat	1 Pusat	1 Pusat				
	33 Prop	33 Prop	33 Prop				
8. Jumlah Hasil Pengembangan Olahhan Pangan Lokal	9 Prop	15 Prop	20 Prop				
2.	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan	1. Pengelolaan produksi tanaman sereal	1. Fasilitasi Kemitraan Pangan Alternatif (Paket)	1	1	1	
			2. Pengelolaan produksi budidaya aneka kacang & umbi	1. Pengembangan Kacang Tanah (Ha)	100	130	169
				2. Pengembangan Ubi Kayu (Ha)	300	390	507
		3. Pengembangan Ubi Jalar (Ha)		850	1.105	1.437	
		3. Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan	1. Bantuan Sarana Pascapanen Ubi Kayu (Paket)	1	-	-	
			2. Bantuan Sarana Pascapanen Ubi Jalar (Paket)	1	-	-	
3.	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan	1. Peningkatan Produk, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan	1. Pengembangan Kawasan Pisang (Ha)	444	466	488	
			2. Pengembangan Kawasan Sukun (Ha)	170	179	188	
		2. Peningkatan Produk, Produktivitas dan Mutu Tanaman Obat dan Sayuran Berkelanjutan	1. Pengembangan Kawasan Kentang (Ha)	698	733	770	
4.	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	1. Dukungan pengujian mutu benih serta penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan	1. Peningkatan uji observasi, uji manfaat dan uji kelayakan benih (Klon)	3	4	5	
5.	Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian	1. Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian	1. Pengolahan hasil pertanian	159	175	195	
		2. Pengembangan Mutu dan Standardisasi Pertanian	2. Peningkatan mutu hasil pertanian	113	123	133	
		3. Pengembangan Usaha dan Investasi	3. Kelembagaan usaha, investasi dan promosi	10	10	10	

# Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010 - 2014

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	TARGET (VOLUME)		
				2012	2013	2014
<b>PENINGKATAN DIVERSIFIKASI PANGAN</b>				<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
		4. Pengembangan Pemasaran Domestik	4. Kelembagaan dan jaringan pasar domestik	149	149	149
		5. Pengembangan Pemasaran internasional	5. Proteksi hasil pertanian strategis	18	18	18
6.	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Sapi	1. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	1. Aparatur pertanian yang mengikuti Diklat Diversifikasi Pangan (Orang)	300	300	300
			2. Non Aparatur pertanian yang mengikuti Diklat Diversifikasi Pangan (Orang)	180	180	180
7.	Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing	1. Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan	1. Jumlah produksi benih sumber (BS,FS) serealida (sorgum, gandum) (ton)	4	4	4
			2. Jumlah varietas unggul baru sorgum dan gandum	1	1	1
			3. Jumlah varietas unggul baru ubikayu dan ubijalar	1	1	1
			4. Jumlah teknologi budidaya, panen dan pascapanen primer sorgum, gandum, ubikayu dan ubijalar	2	2	2
		2. Penelitian dan Pengembangan Tanaman Hortikultura	1. Jumlah VUB hortikultura yang diminati konsumen	2	2	2
			2. Jumlah inovasi teknologi budidaya produksi hortikultura ramah lingkungan	2	2	2
			3. Jumlah benih sumber kentang (GO)	24.000	26.000	28.000
			4. Jumlah benih sumber buah tropika, jeruk dan buah sub tropika (batang)	3.000	4.000	5.000
		3. Penelitian dan Pengembangan Peternakan	1. Jumlah inovasi peternakan dan veteriner	9	10	10
			2. Jumlah galur unggul/harapan dan TPT spesifik lokasi	6	6	6
			3. Jumlah bibit/bemih sumber ternak dan TPT (ekor/batang)	350/0	450/0	600/0
		4. Penelitian/Perekayasaan dan Pengembangan Mekanisasi Pertanian	1. Teknologi mekanisasi untuk mendukung diversifikasi pangan	3	3	3
		5. Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian	1. Teknologi pengelolaan tanah, dan pupuk mendukung peningkatan produktivitas hortikultura	8	8	8
			2. Peta SDL mendukung produksi hortikultura	2	2	2
			3. Rekomendasi kebijakan pemanfaatan SDL pertanian mendukung produksi hortikultura	1	1	1
		6. Penelitian dan Pengembangan Pasca panen Pertanian	1. Teknologi dan produk olahan pangan non beras berbasis sumber pangan lokal	2	2	3
		7. Penelitian/analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian	1. Rekomendasi Kebijakan yang mendukung peningkatan diversifikasi pangan	1		

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	TARGET (VOLUME)		
				2012	2013	2014
PENINGKATAN DIVERSIFIKASI PANGAN						
		8. Pengkajian dan Percepatan Diseminasi inovasi Teknologi Pertanian	1. Jumlah teknologi yang terdiseminasi ke pengguna	64	66	66
		9. Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian	1. Galur harapan komoditas pertanian	16	10	5

### 6.3. Peningkatan Nilai Tambah , Daya saing, dan Ekspor Produk Pertanian

Dalam rangka meningkatkan nilai tambah, daya saing dan ekspor produk pertanian difokuskan pada pengembangan produk pertanian strategis yang berorientasi ekspor dalam bentuk segar dan olahan, melalui sertifikasi; meningkatkan jumlah skala industri hilir pertanian; meningkatkan nilai tambah produk; mensubstitusi impor tepung dan susu, penerapan SNI *cocoa bean*; peningkatan ekspor. Untuk mencapai target-target tersebut dilaksanakan melalui delapan Program dan 28 Kegiatan, sebagaimana disajikan pada Tabel 6.7.

**Tabel 6.7. Program dan Kegiatan yang Mendukung Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor**

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	TARGET (VOLUME)		
				2012	2013	2014
PENINGKATAN NILAI TAMBAH, DAYA SAING DAN EKSPOR						
1.	Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran, dan Ekspor Hasil Pertanian	1. Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian	1. pengolahan hasil pertanian	305	4875	4925
		2. Pengembangan Mutu dan Standarisasi Pertanian	2. peningkatan mutu dan standarisasi	486	431	464
		3. Pengembangan Pemasaran Domestik	3. Kelembagaan dan jaringan pasar domestik	675	723	832
		4. Pengembangan Pemasaran Internasional	4. Proteksi hasil pertanian strategis	91	102	114
		5. Pengembangan Usaha dan Investasi	5. Kelembagaan usaha, investasi dan promosi	62	67	71
2.	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan	1. Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura	1. Fasilitas Pengelolaan OPT (Kali)	1.077	1.550	1.700
			2. Rekomendasi Dampak Perubahan Iklim (Rekomendasi)	65	72	72
			3. Lembaga Perlindungan Tanaman Hortikultura (Unit)	172	127	127
			4. Draft Pest List Persyaratan Teknis SPS (Draft pest list)	13	15	15
			5. SLPHT (Kelompok)	537	600	660

# Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010 - 2014

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	TARGET (VOLUME)		
				2012	2013	2014
<b>PENINGKATAN NILAI TAMBAH, DAYA SAING DAN EKSPOR</b>				<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
		2. Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura	1. Benih Tanaman Sayuran Bermutu (Kg)	467.292	711.516	1.014.974
			2. Benih Tanaman Florikultura Bermutu (Benih)	10.143.982	5.986.978	6.106.717
			3. Benih Tanaman Obat Bermutu (Kg)	10.737	10.951	11.061
			4. Benih Tanaman Buah Bermutu (Batang)	929.860	1.022.846	1.053.531
			5. Lembaga Perbenihan hortikultura (Unit)	133	163	170
		3. Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan	1. Kawasan Tanaman Buah (Ha)	5.900	6.000	6.100
			2. Registrasi Kebun Tanaman Buah (Kebun)	800	850	900
			3. Fasilitas Pengelolaan Pasca Panen Tanaman Buah (Unit)	64	84	100
			4. Sekolah Lapang (GAP) (Kelompok)	418	-	-
		4. Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan	1. Kawasan Tanaman Sayuran (Ha)	4.556	4.732	4.969
			2. Kawasan Tanaman Obat (Ha)	707	720	750
			3. Registrasi Lahan Usaha Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat (Lahan usaha)	630	925	1.200
			4. Fasilitas Pengelolaan Pasca Panen Sayuran dan Tanaman Obat (Unit)	470	525	550
			5. Sekolah Lapang (GAP dan GHP) (Kelompok)	278	-	-
		5. Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelanjutan	1. Kawasan Tanaman Florikultura (M <sup>2</sup> )	356.850	412.563	474.447
	2. Registrasi Lahan Usaha Tanaman Florikultura (Unit usaha)		29	20	16	
	3. Fasilitas Pengelolaan Pasca Panen Tanaman Florikultura (Unit)		141	160	175	
	4. Sekolah Lapang (GAP dan GHP) (Kelompok)		132	-	-	
	3. Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	1. Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Semusim	1. Pembangunan Kebun Penangkar Benih Nilam (ha)	8	10	12
			2. Penanaman Tanaman Nilam (ha)	170	187	206
3. Pembekalan Penerapan GAP Nilam/ SPO (Kel)			19	21	23	
2. Dukungan Pascapanen dan Pembinaan Usaha		1. Penanganan Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar (poktan)	68	75	83	
		2. Penanganan Pascapanen Tanaman Tahunan (poktan)	42	45	47	
		3. Pertemuan Koordinasi Nasional Pascapanen (paket)	1	1	1	
		4. Bimbingan Usaha Perkebunan Berkelanjutan				
		5. Pembinaan Usaha dan Penilaian Usaha Perkebunan (provinsi)	25	25	25	



NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	TARGET (VOLUME)		
				2012	2013	2014
PENINGKATAN NILAI TAMBAH, DAYA SAING DAN EKSPOR				2012	2013	2014
			6. Pertemuan Evaluasi Bagi Petugas Penilai Perkebunan Bersertifikat (paket)	1	1	1
			7. Penyusunan pedoman usaha perkebunan (paket)	1	1	1
			8. Pemantauan, evaluasi, bimbingan dan penilaian teknis PIRBUN dan PIRTRANS/KKPA (provinsi)	19	19	19
			9. Fasilitasi Rekomendasi Teknis Usaha Perkebunan (dokumen)	55	60	65
			10. Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan (provinsi)	24	26	28
			11. Bimbingan Usaha dan Perkebunan Kakao Berkelanjutan di Indonesia (provinsi)	1	15	20
			12. Rapat koordinasi nasional pascapanen dan pembinaan usaha	1	1	1
			13. Penanganan Gangguan Usaha Perkebunan dan Konflik Perkebunan			
			14. Fasilitasi Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan (kasus)	57	62	72
			15. Fasilitasi Penyelesaian Masalah/ Kasus PIRBUN dan PIRTRANS/ KKPA (kasus)	12	12	12
			16. Pertemuan Koordinasi Gangguan Usaha Perkebunan (Paket)	1	1	1
			17. Dukungan Administrasi (Tahun)	1	1	1
	3.	Dukungan perlindungan perkebunan	1. Pemberdayaan Petugas Pengamat Hama dan Penyakit (Org)	988	988	988
			2. Pemberdayaan Perangkat (LL, LUPH, dan Sub Lab Hayati) (Unit)	42	42	42
			3. Fasilitasi Pengendalian OPT			
			- Pengendalian OPT Tanaman Semusim (Tembakau) (Ha)	55	55	55
			- Pengendalian OPT Tanaman Rempah dan Penyegar (Lada, Kopi, dan Cengkeh) (Ha)	975	975	975
			- Pengendalian OPT Tanaman Tahunan (Kelapa, Karet, Jambu Mete) (Ha)	2700	2700	2700
			Fasilitasi Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun			
			Fasilitasi Pemantauan Kebakaran, dampak perubahan iklim, serta bencana alam (Kabupaten)	9	9	9
			- Pertemuan Koordinasi Pencegahan Kebakaran dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim (Provinsi)	9	9	9
			- Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (Kabupaten)	15	17	18

# Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010 - 2014

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	TARGET (VOLUME)		
				2012	2013	2014
<b>PENINGKATAN NILAI TAMBAH, DAYA SAING DAN EKSPOR</b>						
		4. Dukungan pengujian mutu benih serta penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan	1. Identifikasi OPT dan eksplorasi APH serta musuh alaminya (OPT, APH, MA) 2. Analisis serangan dan perkembangan situasi OPT serta non OPT (Provinsi) 3. Pengembangan teknik dan metode surveillance, pengamatan, model peramalan, taksasi kehilangan hasil, dan teknik pengendalian OPT perkebunan (Komoditi, Provinsi) 4. Pengembangan teknologi perbanyakan, penilaian kualitas, pelepasan dan evaluasi agens hayati, dan uji coba PHT (APH, Petani) 5. Peningkatan uji pemanfaatan pestisida nabati (Paket) 6. bimbingan teknis penerapan sistem manajemen mutu dan manajemen laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan (Lab) 7. Koordinasi dan kerjasama antar laboratorium perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan (Provinsi) 8. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM dan pelayanan organisasi (Paket Kegiatan)	5, 2, 5 5 3, 10 4, 150 2 2 10 50	6, 3, 6 6 4, 10 5, 200 2 3 10 50	7, 4, 7 7 5, 10 6, 220 3 4 10 50
4.	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	1. Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian 2. Pengelolaan Air Irigasi untuk Pertanian	1. Perluasan areal hijauan pakan ternak ruminasia (lokasi) Pengembangan areal padang penggembalaan (lokasi) 2. Fasilitasi Embung air untuk padang penggembalaan (Unit)	50 15 255	50 15 281	50 15 309
5.	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani	1. Revitalisasi Pendidikan Pertanian, Standarisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian 2. Pemanjapan Sistem Pelatihan Pertanian	1. Aparatur Pertanian yang Mengikuti Pendidikan Diploma IV Program Studi Pengawas Mutu Hasil Pertanian (orang) 2. Non Aparatur yang Mengikuti Diklat Teknis Pengolahan Hasil Jagung (orang) 3. Aparatur yang Mengikuti Diklat Teknis Pengolahan Hasil Jagung (orang) 4. Aparatur yang Mengikuti Diklat Agribisnis Pengolahan Hasil Ternak (orang) 5. Non Aparatur yang Mengikuti Diklat Agribisnis Pengolahan Hasil Ternak (orang) 6. Aparatur yang Mengikuti Diklat Pascapanen Sapi Potong (orang) 7. Non Aparatur yang Mengikuti Diklat Pascapanen (orang) 8. Aparatur yang Mengikuti Diklat Teknologi Hasil Peternakan (orang)	70 30 60 210 60 60 30 30	70 30 60 210 60 60 30 30	70 30 60 210 60 60 30 30

# Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010 - 2014

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	TARGET (VOLUME)				
				2012	2013	2014		
<b>PENINGKATAN NILAI TAMBAH, DAYA SAING DAN EKSPOR</b>								
6.	Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing	1. Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan	1. Jumlah produksi benih sumber (BS,FS) kacang tanah dan kacang hijau (ton)	2,5	2,5	2,5		
			2. Jumlah varietas unggul baru kacang tanah dan kacang hijau	1	1	1		
			3. Jumlah teknologi budidaya, panen dan pascapanen primer kacang tanah dan kacang hijau	1	1	1		
		2. Penelitian dan Pengembangan Tanaman Hortikultura	1. Jumlah VUB hortikultura yang diminati konsumen	23	14	11		
			2. Jumlah inovasi teknologi budidaya produksi hortikultura ramah lingkungan	10	12	12		
			3. Jumlah benih bawang merah dan sayuran potensial (GO)	30,000	35,000	40,000		
			4. Jumlah benih sumber buah tropika, jeruk dan buah sub tropika (batang)	13,000	13,200	13,700		
			5. Jumlah benih sumber angrek dan tanaman hias lainnya (planlet)	3,100	3,700	4,000		
			6. Jumlah benih sumber krisan (stek)	250,000	250,000	250,000		
			7. Jumlah benih sumber batang bawah dan batang atas jeruk hasil SE	500,000	400,000	400,000		
		3. Penelitian dan Pengembangan Peternakan	1. Jumlah inovasi peternakan dan veteriner	6	4	4		
			2. Jumlah bibit/bemih sumber ternak dan TPT (ekor/batang)	0/1000	0/1000	0/1000		
		4. Penelitian/Perekayasaan dan Pengembangan Mekanisasi Pertanian	1. Teknologi mekanisasi untuk mendukung produksi benih padi, jagung dan kedelai, kentang dan tomat	1	1	1		
			2. Teknologi mekanisasi untuk penanganan segar dan pengolahan komoditas hortikultura (mangga, rambutan, jeruk dan manggis)	1	1	1		
			3. Teknologi mekanisasi untuk pengolahan komoditas tanaman obat	1				
			4. Teknologi mekanisasi untuk mendukung produksi tepung komposit dari aneka umbi	1				
		5. Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Sumberdaya Genetik Pertanian	1. Galur harapan komoditas pertanian	4	2	2		
			2. Inovasi teknologi berbasis bioteknologi	2	2	2		
		6. Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen Pertanian	1. Inovasi teknologi penanganan segar dan pengolahan hasil pertanian dalam mendukung peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor	11	11	11		
		7. Penelitian/analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian	1. Rekomendasi kebijakan yang mendukung peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor	1				
		7.	Peningkatan Kualitas Perkarantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	1. Peningkatan Kepatuhan Kerjasama dan Pengembangan Sistem Informasi Perkarantina	1. Rumusan Kebijakan Pengawasan dan Penindakan Karantina Hewan/ Karantina Tumbuhan yang Dapat Diimplementasikan	2	2	2

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	TARGET (VOLUME)		
				2012	2013	2014
PENINGKATAN NILAI TAMBAH, DAYA SAING DAN EKSPOR				2012	2013	2014
			2. Jumlah Dokumen Bahan Rancangan Kebijakan Kerjasama Perkarantinaaan	4	4	4
			3. Tingkat Pemanfaatan Dokumen Kerjasama SPS dan Dokumen Kerjasama Operasional yang Dihasilkan dalam Perumusan Kebijakan serta Pelaksanaan Pengawasan dan Pelayanan (Persen)	100	100	100
	2.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati	1. Realisasi Target Operasional Sertifikasi Karantina dan Pengawasan Keamanan Hayati (Persen)	100	100	100
			2. Media Pembawa yang Disertifikasi Bebas Hama Penyakit Hewan Karantina/Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (HPHK/OPTK) (Persen)	100	100	100
			3. Prosentase Penolakan Kiriman Barang Ekspor yang Disertifikasi Karantina Pertanian (Persen)	0	0	0
			4. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (Persen)	10	10	10
			5. Peningkatan Kepatuhan Pengguna Jasa (Persen)	10	10	10

#### 6.4. Peningkatan Kesejahteraan Petani

Target peningkatan kesejahteraan petani ditentukan oleh keberhasilan tiga target sukses lainnya, yaitu (1) Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan; (2) Peningkatan Diversifikasi Pangan dan (3) Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor Produk Pertanian. Di samping itu, untuk lebih mengakselerasikan upaya peningkatan kesejahteraan petani dilakukan beberapa kegiatan yang secara langsung ditujukan untuk pemberdayaan petani dan kelembagaannya antara lain : Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), pemberdayaan Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3), Penggerak Membangun Desa (PMD), Sarjana Membangun Desa (SMD) yang dilaksanakan melalui delapan program dan 15 kegiatan yang terkait langsung peningkatan SDM petani, sebagaimana disajikan pada Tabel 6.8.

Tabel 5.8. Program dan Kegiatan yang Mendukung Kesejahteraan Petani

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	TARGET (VOLUME)		
				2012	2013	2014
<b>PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI</b>				<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
1.	Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani	1. Revitalisasi Pendidikan Pertanian, Standarisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian	1 Aparatur pertanian yang mengikuti pendidikan formal pascasarjana (Orang)	204	204	204
			2 Kelembagaan pendidikan pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan (Unit)	84	84	84
			3 Ketenagaan pendidikan pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan (Orang)	3,180	3,180	3,180
			4 Profesi bidang pertanian yang distandardisasi (Dokumen)	7	7	7
			5 SDM pertanian yang mendapat sertifikat profesi (Orang)	1,400	1,400	1,400
			6 Aparatur yang mengikuti pendidikan diploma IV program studi karantina (Orang)	420	420	420
			7 Aparatur yang mengikuti pendidikan alih jenjang (Orang)	332	332	332
		2. Pengembangan dan Pendidikan Menengah Pertanian	8 Kelembagaan SPP yang difasilitasi dan dikembangkan (Unit)	4	4	4
			9 Ketenagaan SPP yang difasilitasi dan dikembangkan (Orang)	241	241	241
		3. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	10 Aparatur yang mengikuti pelatihan teknis pertanian (Orang)	18,175	18,175	18,175
			11 Non aparatur yang mengikuti pelatihan teknis pertanian (Orang)	5,030	5,030	5,030
			12 Kelembagaan pelatihan pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan (Unit)	125	125	125
			13 Ketenagaan pelatihan pertanian yang difasilitasi dan dikembangkan (Orang)	1,277	1,277	1,277
			14 Desa yang meningkat kapasitasnya melalui Program READ (Desa)	150	150	150
			15 Kelembagaan petani yang difasilitasi dan terklasifikasi (Unit)	229	229	229
			16 Aparatur yang mengikuti pelatihan teknis manajemen dan kepemimpinan pertanian (Orang)	17,175	17,175	17,175
		4. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	17 Kelembagaan penyuluhan yang difasilitasi (Unit)	2,080	2,080	2,080
			18 Kelembagaan petani yang difasilitasi dan dikembangkan (Unit)	52,103	52,103	52,103
			19 Ketenagaan penyuluhan yang difasilitasi (Orang)	58,289	58,289	58,289
			20 Penyuluhan yang dikelola petani (FEATI) (Desa)	772	772	772
			21 Materi penyuluhan yang dihasilkan (Judul)	4,369	4,369	4,369

## Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010 - 2014

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	TARGET (VOLUME)		
				2012	2013	2014
<b>PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI</b>				<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
2.	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan	1. Dukungan Manajemen & Dukungan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	1. Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) (Paket)	1	1	1
			2. Administrasi dan Operasional (Paket)	1	1	1
3.	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	1. Kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Semusim	1. Pemberdayaan/Pelatihan Petani Tebu (KT)	272	299	329
			2. Pelatihan Tenaga Kontrak dan Petugas Lapangan Pembantu TKP (PLP-TKP) (Org) (Tebu)	390	429	472
			3. Pembekalan Penerapan GAP Nilam/SPO (Kel)	18	20	22
			4. Pelatihan Tenaga Kontrak dan Petugas Lapangan Pembantu TKP (PLP-TKP) (Org) (kapas)	123	135	149
			5. Pemberdayaan/Pelatihan Petani Kapas (KT)	28	31	34
			6. Rekrutmen TKP dan PLP-TKP (org)	278	305	335
		2. Dukungan perlindungan perkebunan	1. Fasilitasi Pencegahan Kebakaran Lahan dan Kebun			
			2. Sosialisasi PLTB, Peraturan Perundang-undangan dan simulasi pengendalian kebakaran (Kabupaten)	55	60	66
			3. Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) (KT)	65	65	65
			4. Peningkatan taraf hidup masyarakat melalui penerapan sistem usahatani konservasi, tumpang sari dan integrasi kebun-ternak pada perkebunan kopi rakyat (KT)	10	0	0
		3. Dukungan pengujian mutu benih serta penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan	1. Pelayanan teknik kegiatan perbenihan dan proteksi tanaman perkebunan (Paket)	8	8	8
			2. Penyediaan data dan informasi perbenihan dan proteksi (Paket)	1	1	1
		4.	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan	1. Dukungan Manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Ditjen Hortikultura (Lembaga Pengembangan Hortikultura)	1. Penggerak Membangun Desa (PMD)/Kelompok tani pada area perurban (kelompok)	220
2. Lembaga Mandiri dan Mengakar di Masyarakat (LM3) (Lembaga)	80				100	120
5.	Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal	1. Peningkatan Produksi Ternak dengan pendayagunaan sumberdaya lokal	1. Terfasilitasi pengembangan agribisnis peternakan melalui LM3 (kelompok)	60	60	60
6.	Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing	1. Penelitian/analisis sosial ekonomi dan kebijakan pertanian	1. Rekomendasi Kebijakan yang mendukung Peningkatan Kesejahteraan Petani	1		
		2. Pengkajian dan percepatan diseminasi inovasi teknologi pertanian	2. Jumlah teknologi yang terdiseminasi ke pengguna	32	33	33

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	TARGET (VOLUME)		
				2012	2013	2014
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI						
7.	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan (LDPM)	1. Jumlah kelembagaan cadangan pangan	1.040 Lb	1.200 Lb	1.375 Lb
		2. Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Kerawanan Pangan (Demapan)	1. Jumlah Desa yang diberdayakan/ Demapan	2.989 Desa	3.050 Desa	3.300 Desa
			2. Jumlah Penanganan daerah/lokasi Rawan Pangan	410 Kab	410 Kab	410 Kab
8.	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	1. Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)	1. Penguatan modal Gapoktan PUAP (Gapoktan)	7,000	10,000	10,000

Pada periode Tahun 2010-2014, Kementerian Pertanian juga mengembangkan 34 komoditas unggulan nasional dengan sasaran peningkatan produksi yang berorientasi kepada penerimaan devisa/ekspor, bahan baku industri dalam negeri dan substitusi impor. Semua program-program yang mendukung pencapaian empat target sukses, sebagian kegiatan juga akan mendukung pengembangan 34 komoditas tersebut. Dalam pengembangan komoditas tersebut agar memperhatikan :

- a. Implementasi 12 program pembangunan diprioritaskan untuk :
  - (1) pencapaian surplus beras 10 juta ton diakhir tahun 2014;
  - (2) Percepatan pembangunan di beberapa daerah;
  - (3) Pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan;
  - (4) Penanggulangan dampak perubahan iklim dan gas rumah kaca; serta
  - (5) Pemenuhan penyediaan bahan baku bio-energi.
- b. Selanjutnya dalam penyusunan rancangan kegiatan dan operasional di lapangan sampai kepada evaluasi perlu memperhatikan aspek gender dan strategi pengarusutamaan gender (PUG) yang mengarahkan kepada aspek kesetaraan dan keadilan petani (laki-laki dan perempuan) dengan memperhatikan kebutuhan, permasalahan, aspirasi, pengalaman, peran dan tanggung jawab serta dampaknya pada seluruh pelaku pembangunan. Isu gender tersebut dapat dianalisis melalui empat aspek yaitu; partisipasi, akses, kontrol dan manfaat yang diperoleh dari pelaku itu sendiri.

Dalam mengimplementasikan program dan kegiatan ini diperlukan keterpaduan antar program dan antar kegiatan pada lokasi dan waktu yang ditentukan. Jenis rincian kegiatan dan tahapannya perlu disajikan dengan cermat. Untuk itu dalam perencanaan tahunan agar disusun

matriks keterpaduan program/kegiatan dalam mendukung pencapaian Empat Target Sukses.

Di samping melaksanakan program dan kegiatan mendukung Empat Target Sukses, setiap Unit Eselon-I lingkup Kementerian Pertanian bertugas melaksanakan program pembangunan pertanian sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai target indikator outcome, sedangkan Unit Kerja Eselon-II serta UPT melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai target-target dengan indikator output yang telah ditentukan.

Alokasi APBN Kementerian Pertanian diprioritaskan untuk mendukung pencapaian Empat Target Sukses dan dirancang agar mampu me-leverage dan mendorong peran-serta investasi swasta dan masyarakat untuk menggerakkan ekonomi wilayah. Pemilihan jenis-jenis kegiatan difokuskan untuk menyelesaikan masalah mendasar dan isu-isu penting di lapangan sejalan dengan pencapaian target nasional. Jenis kegiatan dan alokasi anggaran dirancang secara terpadu dan *multi-years* diprioritaskan pada kawasan sentra komoditas strategis/unggulan nasional secara berkelanjutan. Pentahapan pengembangan kawasan sentra pertanian dimulai dengan : (1) inisiasi kawasan, (2) penumbuhan kawasan, (3) pengembangan kawasan, (4) pemantapan kawasan dan selanjutnya dilakukan perluasan dan replikasi kawasan. Pada daerah di luar kawasan sentra pertanian tetap dialokasikan kegiatan yang mencakup fungsi pelayanan dasar seperti pelayanan perbenihan/perbibitan, penyuluhan, pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan Penyakit Hewan, penelitian/pengembangan dan lainnya.

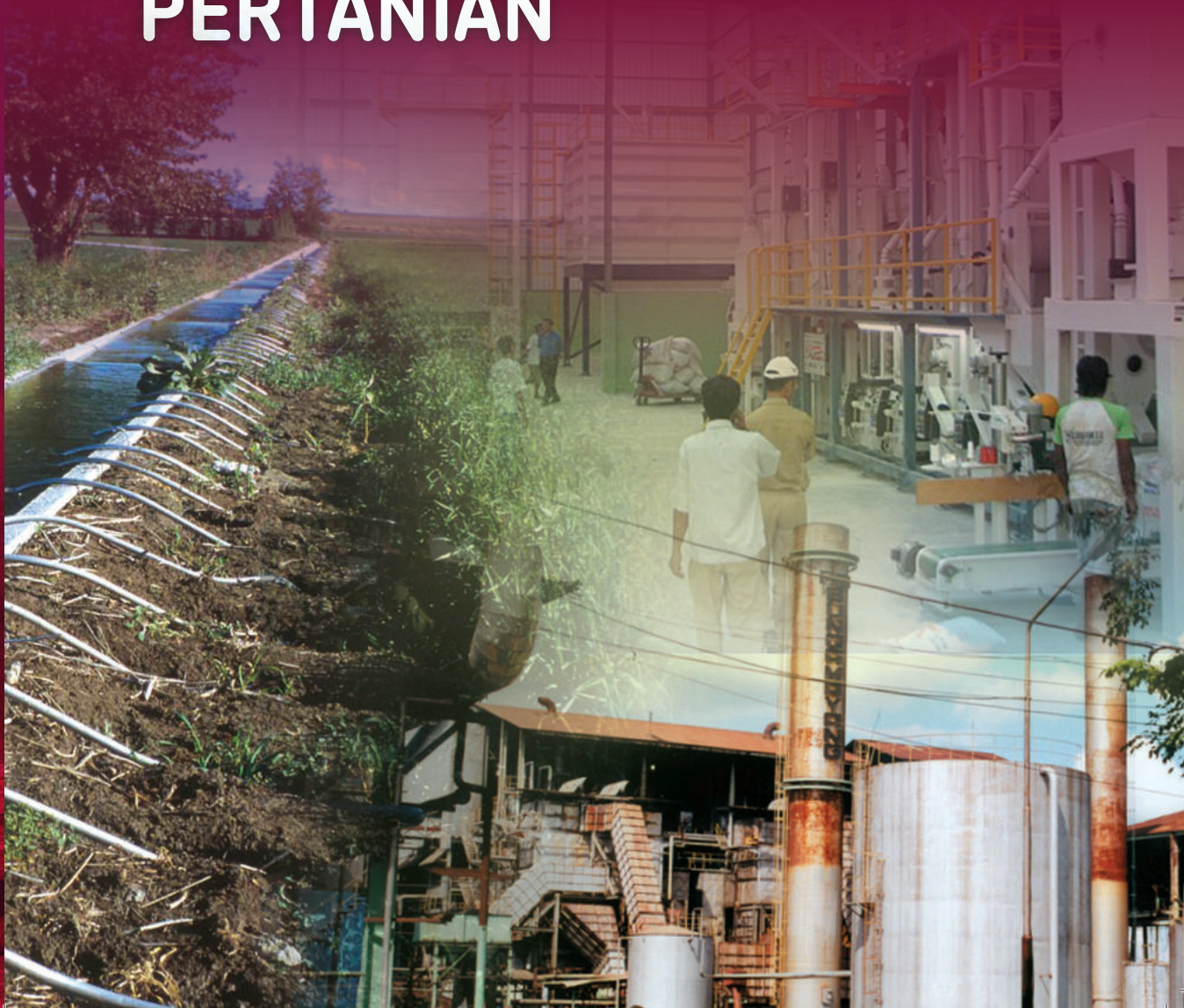
Jenis program, kegiatan, target *output/outcome* serta kebutuhan pendanaan pada tahun 2010-2014 untuk mencapai Empat Target Sukses tersebut secara rinci disajikan pada Tabel lampiran 50.







# BAB VII DUKUNGAN SEKTOR LAIN UNTUK PEMBANGUNAN PERTANIAN



## VII. DUKUNGAN SEKTOR LAIN UNTUK PEMBANGUNAN PERTANIAN

Masalah pembangunan pertanian sangat kompleks, namun fungsi dan kebijakan tidak sepenuhnya berada di bawah wewenang Kementerian Pertanian, bahkan lebih banyak berada di bawah kewenangan Kementerian atau Lembaga lain sehingga diperlukan dukungan dan kerja sama dari Kementerian/Lembaga lain. Dukungan yang diharapkan dari Kementerian/Lembaga lain untuk mengatasi berbagai masalah tersebut adalah sebagai berikut :

**Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Keuangan** - diperlukan dukungan antara lain dalam merumuskan kebijakan makro yang berpihak pada sektor pertanian, yaitu kebijakan fiskal seperti subsidi sarana produksi, bunga kredit, penjaminan, perpajakan, investasi serta kebijakan lain berpihak kepada petani

**Kementerian Dalam Negeri** - diperlukan dukungan :

1. kebijakan pengawasan terhadap Peraturan Daerah, terutama terhadap retribusi daerah yang menyebabkan biaya tinggi yang berakibatkan menurunkan produk pertanian.
2. Mengkoordinasikan program yang didanai dari Dana Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan dengan program yang didanai APBN

**Kementerian Pekerjaan Umum** - diperlukan dukungan berbagai kebijakan antara lain :

1. pengawasan penetapan Rencana Umum Tata Ruang dan Wilayah dan tata guna lahan pertanian di tingkat Pusat, Propinsi dan Kabupaten/ Kota yang tidak melindungi aktivitas pertanian;
2. pengembangan dan rehabilitasi infrastruktur jaringan jalan negara dan lintas provinsi;
3. pembangunan dan rehabilitasi waduk dan embung besar,
4. Pembangunan dan rehabilitasi Jaringan irigasi primer dan sekunder,
5. Mengembangkan dan memelihara infrastruktur sumberdaya air

**Kementerian Perdagangan** - diperlukan dukungan antara lain :

1. kebijakan penetapan aturan non tarif komoditas pertanian impor.
2. pengawasan terhadap penerapan izin distribusi dan peredaran/ penggunaan pupuk an organik, pestisida dan alat mesin pertanian.
3. menjamin efisiensi distribusi pangan dan sarana produksi
4. penataan kerja sama pemasaran internasional di negara tujuan ekspor.
5. pengaturan pajak impor barang modal yang belum dapat diproduksi di dalam negeri.
6. menyederhanakan prosedur ekspor dan impor yang mendukung peningkatan harga produk segar dan olahan hasil pertanian.
7. perlindungan harga bagi produk substitusi impor yang telah mampu dihasilkan masyarakat petani.
8. mengantisipasi gejolak harga pangan menjelang panen raya, musim kemarau dan hari-hari besar.
9. pengawasan perdagangan illegal.
10. mengendalikan efektifitas pemberlakuan regulasi pemasukan ternak dan produk ternak.
11. penyebaran informasi perkembangan harga harian komoditas pertanian di tingkat usaha tani dan pusat-pusat pemasaran serta pengawasan distribusi pupuk bersubsidi dan pestisida, \_

**Kementerian Perindustrian** - diperlukan dukungan antara lain :

1. kebijakan pengembangan kompetensi inti industri nasional dan daerah yang memproduksi barang modal dan sarana produksi yang mendukung produksi primer dan olahan pangan dan non pangan komoditas pertanian.
2. mendukung revitalisasi pabrik pupuk dan pabrik gula.
3. pengaturan dan pengendalian izin usaha sarana produksi pertanian (pupuk an organik, pestisida dan alat mesin pertanian).

**Kementerian Perhubungan** - diperlukan dukungan antara lain :

1. meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan sarana perhubungan (darat, laut dan udara) untuk kelancaran arus transportasi perdagangan sarana produksi dan komoditas pertanian dari dan ke sentra produksi.
2. pengaturan rasionalisasi tarif angkutan komoditas pertanian baik di tingkat lokal, antar pulau maupun internasional.

**Kementerian Kehutanan** - diperlukan dukungan antara lain :

1. kebijakan konservasi hutan lindung dan daerah aliran sungai untuk menjamin ketersediaan air serta menekan degradasi lahan dan air pertanian.
2. peningkatan produksi komoditas pertanian di hutan produksi dan hutan kemasyarakatan.
3. konservasi sumberdaya species genetik tanaman dan hewan konvensional dan yang terancam punah melalui pengendalian perburuan dan pemeliharaan plasma nutfah pertanian *in situ*.
4. pengembangan kebun botani di berbagai wilayah agroekologi, rehabilitasi lahan pertanian terlantar yang belum digunakan.
5. mengevaluasi HGU yang sudah habis masa berlakunya.
6. menetapkan lahan yang siap untuk dikonversi menjadi lahan pertanian serta pemberian kemudahan pelepasan kawasan budidaya yang diperuntukan untuk perluasan areal pertanian.

**Kementerian Kelautan dan Perikanan** - diperlukan dukungan antara lain :

1. kebijakan untuk pelestarian sumber daya air di darat (danau dan situ) untuk menjamin ketersediaan air pertanian melalui pengembangan usaha budidaya perikanan.
2. pengembangan integrasi budidaya perikanan tumpang sari (usaha mina) untuk meningkatkan pendapatan petani dan perlindungan tanaman melalui pengendalian musuh alami oleh ikan.



**Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi** - diperlukan dukungan antara lain :

1. kebijakan peningkatan keterampilan transmigran dan calon transmigran di bidang pertanian.
2. peningkatan kompetensi tenaga kerja yang berprofesi di bidang pertanian (penyuluh, pengamat hama, materi tani, pengawas benih/bibit, penangkar benih/bibit, inseminator).
3. pengembangan wilayah transmigrasi menjadi kawasan agropolitan.
4. peningkatan kapasitas dan perlindungan tenaga kerja pertanian yang akan menjadi buruh migran.

**Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral** - diperlukan dukungan antara lain :

1. kebijakan pengembangan penyediaan energi alternatif berbasis komoditas pertanian dan limbah komoditas pertanian serta pengembangan energi terbarukan (mikro hidro, surya, angin dan panas bumi) yang tersedia di daerah terpencil dan di sentra produksi untuk mendukung efisiensi proses produksi pertanian.
2. penyediaan gas untuk bahan baku pupuk.

**Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah** - diperlukan dukungan antara lain :

1. kebijakan penataan, pengembangan kelembagaan usahatani menjadi kelembagaan koperasi yang berbasis pada usaha pengolahan, pemasaran, dan perdagangan.
2. fasilitasi dan peningkatan aksesibilitas pembiayaan yang dibutuhkan usaha kecil dan menengah yang berbasis usaha produksi dan pengolahan hasil pertanian.

**Kementerian Pendidikan Nasional** - diperlukan dukungan antara lain :

1. kebijakan untuk mendidik anak usia sekolah secara dini untuk mengenal dan mencintai lingkungan hidup dan kebanggaan terhadap profesi petani dan produk pertanian dalam negeri.

2. pendidikan diversifikasi pangan dengan mengkonsumsi bahan pangan lokal.
3. peningkatan gizi anak usia sekolah diantaranya dengan penggunaan dana BOS untuk pemberian makanan tambahan dengan aneka produk pertanian dan bahan pangan lokal.
4. dana BOS juga diarahkan untuk muatan lokal bidang pertanian, pengembangan sekolah pertanian dan pemberian bea siswa bagi anak petani dan aparat pertanian.

**Kementerian Kesehatan** - diperlukan dukungan antara lain :

1. kebijakan untuk membina dan melindungi petani/peternak dan masyarakat melalui proses produksi bersih dan pemeliharaan keamanan lingkungan dari penyakit zoonosis.
2. pemasyarakatan Pola Pangan Harapan yang mendukung penganekaragaman diversifikasi konsumsi pangan.

**Kementerian Lingkungan Hidup** – diperlukan dukungan antara lain menyiapkan metode MRV dalam rangka penurunan emisi gas rumah kaca sektor pertanian.





**Kementerian Luar Negeri** - diperlukan dukungan antara lain kebijakan untuk mengoptimalkan peran KBRI sebagai ujung tombak market intelligence pemasaran produk pertanian di pasar internasional serta promosi, diplomasi dan kerja sama perdagangan produk pertanian dengan negara tujuan ekspor.

**Kementerian Agama** - diperlukan dukungan antara lain kebijakan untuk memasyarakatkan program percontohan pembangunan pertanian melalui pengabdian masyarakat oleh pemuka agama.

**Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal** – diperlukan dukungan antara lain mengkoordinasikan dan menyediakan informasi terkait kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan sektor di wilayah daerah tertinggal.

**Kementerian Negara Riset dan Teknologi** – diperlukan dukungan antara lain kebijakan untuk mengkoordinasikan teknologi untuk mempertajam prioritas penelitian, memperkuat kapasitas kelembagaan, menciptakan iklim inovasi, dan membentuk Sumber Daya Manusia yang handal dalam penelitian dan pengembangan pertanian.

**Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)** – diperlukan dukungan antara lain : (1) kebijakan untuk pembinaan peningkatan kapasitas lembaga dan sumber daya peneliti untuk menghasilkan penelitian rintisan maupun terapan yang mendorong daya saing komoditas dan daerah; (2) melindungi dan memasyarakatkan hasil penelitian unggulan tepat guna yang dibutuhkan masyarakat dan petani; serta (3) kebijakan untuk mengembangkan kerja sama dan pemanfaatan hasil penelitian (*link and match*) dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi maupun industri.

**Badan Koordinasi Penanaman Modal** - diperlukan dukungan antara lain :

1. kebijakan untuk penyediaan informasi investasi komoditas dan daerah sentra dan pengembangan produksi pertanian unggulan nasional.
2. kebijakan pemberian insentif investasi bagi penanaman modal langsung industri primer dan olahan produk pertanian.

**Badan Pertanahan Nasional** - diperlukan dukungan antar lain :

1. kebijakan untuk mencegah dan menekan laju konversi lahan pertanian ke non pertanian.
2. penetapan status penguasaan lahan pertanian.
3. perwujudan dan perlindungan lahan pertanian yang berkelanjutan diantaranya melalui penataan administrasi pertanahan untuk mempermudah sertifikasi lahan bagi petani.

**Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)** - diperlukan dukungan antar lain kebijakan untuk menata jaringan dan melayani penyediaan informasi prakiraan perubahan dan anomali iklim serta bencana alam yang berpotensi mengancam produksi dan keselamatan masyarakat petani.

**Perum BULOG** - diperlukan dukungan antara lain:

1. kebijakan penyerapan hasil panen petani (terutama gabah di saat panen raya) secara maksimal.
2. menyiapkan cadangan pangan yang cukup.
3. stabilisasi harga pangan pada harga yang wajar bagi petani produsen dan masyarakat konsumen.
4. memberdayakan usaha kelompok tani yang mampu bekerja sama langsung dalam pemasaran produk pertanian yang dihasilkannya.

**Perguruan Tinggi** - diperlukan dukungan antara lain : (1) mengembangkan jurusan dan strata pendidikan yang menyiapkan mahasiswa untuk menjadi pelopor pembangunan pertanian pedesaan; (2) meningkatkan penelitian untuk pengembangan pertanian dan mendiseminasikan hasil penelitian;(3) meningkatkan pembinaan dan pendampingan daerah melalui pengabdian masyarakat serta meningkatkan peran Perguruan tinggi dalam penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi pertanian.







# PENUTUP



## VII. PENUTUP

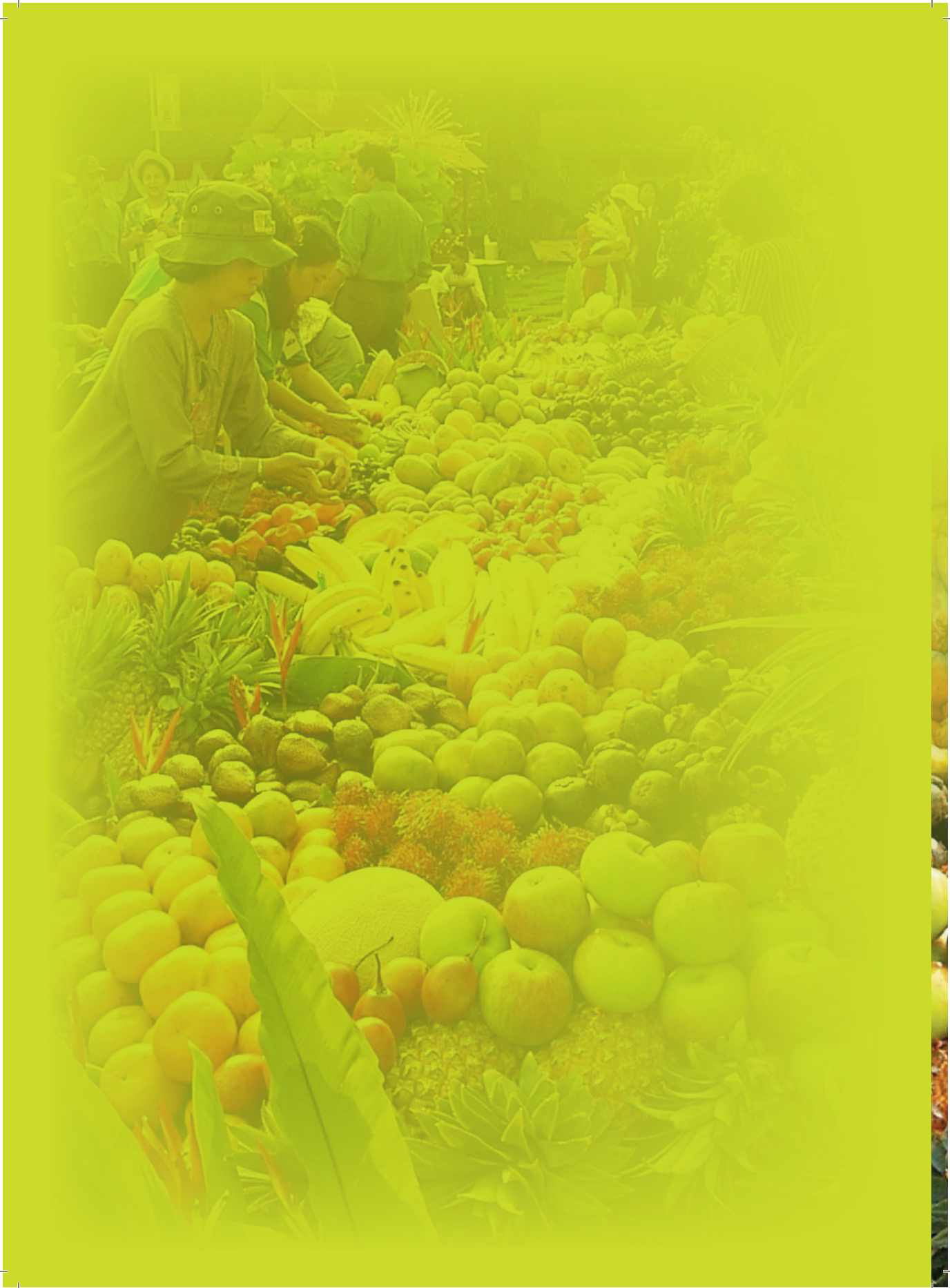
Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan nasional, tujuan dan sasaran pembangunan pertanian nasional 2010 – 2014 akan diwujudkan melalui pencapaian 4 (empat) target utama yaitu: (1) pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan; (2) peningkatan diversifikasi pangan; (3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor; serta (4) peningkatan kesejahteraan petani. Selanjutnya target tersebut akan menjadi pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan semua pemangku kepentingan dalam menetapkan sasaran pembangunan pertanian di tingkat nasional dan wilayah yang disesuaikan dengan potensi sumber daya serta karakteristik permasalahan yang dihadapi di lapangan.

Disadari bahwa untuk mencapai target tersebut bukanlah tugas yang ringan. Namun dengan tekad dan kerja keras, bahu membahu dan terus meningkatkan kerjasama di antara semua pelaku pembangunan, diyakini empat target utama tersebut akan dapat dicapai.

Skenario untuk mencapai target dan sasaran pembangunan pertanian 2010-2014 telah didiskusikan, dirumuskan dan disepakati dalam suatu Rapat Kerja Nasional antara Kementerian Pertanian dengan semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkup pertanian Propinsi seluruh Indonesia yang selanjutnya Pemerintah Propinsi melakukan kesepakatan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota disesuaikan dengan potensi dan permasalahan serta sumber daya di masing-masing wilayah.

Rencana Strategis Kementerian Pertanian ini telah mengakomodasi berbagai masukan dan aspirasi dari berbagai kalangan, seperti Perguruan Tinggi, Asosiasi, Dunia Usaha, LSM, Kementerian/Lembaga terkait, Institusi Pemerintah di Propinsi dan Kabupaten/Kota, serta masyarakat. Kepada semua pihak yang telah menyampaikan saran dan masukan, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah S.W.T meridhoi dan selalu memberi rahmat serta petunjuk kepada semua pelaku pembangunan pertanian demi tercapainya ketahanan pangan, kesejahteraan petani, kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa, amin.







# LAMPIRAN



**LAMPIRAN 1 :**  
**SASARAN PRODUKSI PADI TAHUN 2010 - 2014**

No	Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014
		(Ton)				
1.	Aceh	1.582.393	1.772.962	1.829.158	1.943.481	2.064.948
2.	Sumatera Utara	3.582.302	3.607.036	3.721.366	3.953.951	4.201.073
3.	Sumatera Barat	2.211.248	2.279.442	2.351.692	2.498.673	2.654.840
4.	Riau	574.864	535.799	552.782	587.331	624.039
5.	Jambi	628.828	646.641	667.137	708.833	753.135
6.	Sumatera Selatan	3.272.451	3.381.751	3.488.940	3.706.999	3.938.686
7.	Bengkulu	516.869	483.259	498.577	529.738	562.846
8.	Lampung	2.807.676	2.940.795	3.034.007	3.223.633	3.425.110
9.	Bangka Belitung	22.259	15.186	15.667	16.647	17.687
10.	Kepulauan Riau	1.246	1.223	1.262	1.341	1.424
11.	D.K.I Jakarta	11.164	9.516	9.818	10.431	11.083
12.	Jawa Barat	11.77.070	11.633.836	12.002.586	12.752.747	13.549.794
13.	Jawa Tengah	10.110.830	9.391.959	9.689.652	10.295.253	10.938.706
14.	D.I Yogyakarta	823.887	842.934	869.652	924.005	981.755
15.	Jawa Timur	11.643.773	10.576.543	10.911.780	11.593.767	12.318.377
16.	Banten	2.048.047	1.949.714	2.011.513	2.137.232	2.270.809
17.	Bali	869.161	858.316	885.521	940.867	999.671
18.	Nusa Tenggara Barat	1.774.499	2.067.137	2.132.658	2.265.949	2.407.571
19.	Nusa Tenggara Timur	555.493	591.375	610.119	648.252	688.768
20.	Kalimantan Barat	1.343.888	1.374.206	1.417.763	1.506.373	1.600.522
21.	Kalimantan Tengah	650.416	611.311	630.687	670.105	711.987
22.	Kalimantan Selatan	1.842.089	2.038.309	2.102.916	2.234.348	2.373.995
23.	Kalimantan Timur	588.879	553.459	571.002	606.689	644.607
24.	Sulawesi Utara	584.030	596.223	615.121	653.566	694.414
25.	Sulawesi Tengah	957.108	1.038.459	1.071.374	1.138.335	1.209.481
26.	Sulawesi Selatan	4.382.443	4.511.336	4.654.329	4.945.224	5.254.301
27.	Sulawesi Tenggara	454.644	491.567	597.148	538.845	572.522
28.	Gorontalo	253.563	273.921	282.603	300.266	319.033
29.	Sulawesi Barat	362.900	365.683	377.274	400.853	425.907
30.	Maluku	83.109	87.468	90.240	95.880	101.873
31.	Maluku Utara	55.401	61.430	63.377	67.338	71.547
32.	Papua Barat	34.254	29.304	30.233	32.122	34.130
33.	Papua	102.610	122.846	126.740	134.661	143.077
<b>Indonesia</b>		<b>66.469.394</b>	<b>65.740.946</b>	<b>67.824.692</b>	<b>72.063.735</b>	<b>76.567.719</b>

**LAMPIRAN 2 :**  
**SASARAN PRODUKSI JAGUNG TAHUN 2010 - 2014**

No	Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014
		(Ton)				
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	161.000	177.100	194.810	208.447	229.291
2.	Sumatera Utara	1.309.900	1.473.638	1.621.000	1.781.476	2.004.161
3.	Sumatera Barat	437.733	481.506	529.650	566.725	623.398
4.	R i a u	57.000	62.700	68.970	75.867	83.454
5.	Ja m b i	44.640	49.104	54.014	57.795	63.575
6.	Sumatera Selatan	115.070	126.577	139.235	148.981	163.879
7.	Bengkulu	102.582	112.840	124.124	132.813	146.094
8.	Lampung	2.243.821	2.461.199	2.700.723	2.840.048	3.195.054
9.	D.K.I Jakarta	35	39	40	41	43
10.	Jawa Barat	828.000	910.800	1.001.880	1.102.068	1.212.275
11.	Jawa Tengah	3.148.012	3.541.514	3.895.665	4.246.275	4.670.902
12.	D.I. Yogyakarta	327.000	359.700	395.670	435.237	478.761
13.	Jawa Timur	5.777.834	6.471.174	6.956.512	7.513.033	8.445.992
14.	B a l i	91.000	100.100	105.105	110.360	121.396
15.	Nusa Tenggara Barat	370.000	407.000	427.350	448.718	493.589
16.	Nusa Tenggara Timur	846.693	931.362	1.024.500	1.126.949	1.239.644
17.	Kalimantan Barat	200.000	220.000	242.000	258.940	284.834
18.	Kalimantan Tengah	9.000	9.900	10.890	11.652	12.818
19.	Kalimantan Selatan	120.355	132.391	145.630	155.824	171.406
20.	Kalimantan Timur	14.081	15.489	17.038	18.231	20.054
21.	Sulawesi Utara	660.000	726.000	798.600	878.460	988.268
22.	Sulawesi Tengah	167.360	184.096	202.506	222.756	245.032
23.	Sulawesi Selatan	1.641.217	1.805.339	1.985.870	2.184.457	2.457.514
24.	Sulawesi Tenggara	72.805	80.086	88.094	96.903	106.594
25.	Maluku	15.000	16.500	17.325	18.191	19.101
26.	Papua	7.875	8.663	9.096	9.550	10.028
27.	Bangka Belitung	2.023	2.225	2.337	2.453	2.576
28.	Banten	51.081	56.189	61.808	66.135	72.748
29.	Gorontalo	890.000	979.000	1.076.900	1.173.821	1.320.549
30.	Maluku Utara	23.911	26.302	27.617	28.998	30.448
31.	Riau Kepulauan	1.110	1.221	1.282	1.346	1.413
32.	Papua Barat	1.362	1.498	1.573	1.652	1.734
33.	Sulawesi Barat	62.500	68.750	72.188	75.797	83.377
<b>Indonesia</b>		<b>19.800.000</b>	<b>22.000.000</b>	<b>24.000.000</b>	<b>26.000.000</b>	<b>29.000.000</b>

**LAMPIRAN 3 :**  
**SASARAN PRODUKSI KEDELAI TAHUN 2010 - 2014**

No	Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014
		(Ton)				
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	118.340	142.000	174.400	198.400	238.100
2.	Sumatera Utara	20.530	26.150	34.400	42.800	54.800
3.	Sumatera Barat	7.500	10.150	13.400	16.400	20.800
4.	R i a u	8.080	10.850	14.300	18.900	24.200
5.	Ja m b i	15.340	19.400	24.400	29.700	38.700
6.	Sumatera Selatan	17.090	21.500	26.800	34.600	43.600
7.	Bengkulu	6.170	9.500	14.600	18.900	24.100
8.	Lampung	19.690	24.620	32.600	39.200	51.200
9.	D.K.I Jakarta	-	-	-	-	-
10.	Jawa Barat	78.420	95.100	125.200	150.500	184.600
11.	Jawa Tengah	211.780	254.140	308.500	370.200	446.300
12.	D.I. Yogyakarta	45.600	54.720	65.700	78.800	96.600
13.	Jawa Timur	420.100	488.320	557.800	632.700	715.800
14.	B a l i	14.830	16.950	20.500	24.800	29.800
15.	Nusa Tenggara Barat	135.000	162.000	194.400	232.000	278.400
16.	Nusa Tenggara Timur	3.500	4.240	6.600	7.900	10.500
17.	Kalimantan Barat	3.330	4.100	5.600	8.100	10.800
18.	Kalimantan Tengah	15.000	18.300	22.400	27.400	33.400
19.	Kalimantan Selatan	5.800	7.080	10.200	13.800	18.800
20.	Kalimantan Timur	6.200	7.600	10.700	14.700	19.600
21.	Sulawesi Utara	10.600	12.940	17.800	21.800	27.600
22.	Sulawesi Tengah	9.000	10.980	14.500	18.700	23.800
23.	Sulawesi Selatan	63.450	76.140	94.400	112.200	136.600
24.	Sulawesi Tenggara	9.880	13.060	18.100	23.100	29.200
25.	Maluku	2.130	3.050	4.200	5.100	6.700
26.	Papua	5.000	6.550	8.600	10.500	12.800
27.	Bangka Belitung	-	-	-	-	-
28.	Banten	25.000	31.000	40.700	49.800	60.700
29.	Gorontalo	6.900	8.400	10.200	12.400	16.200
30.	Maluku Utara	2.270	3.250	4.500	5.600	7.100
31.	Riau Kepulauan	-	-	-	-	-
32.	Papua Barat	2.470	3.490	4.800	5.800	7.400
33.	Sulawesi Barat	11.000	14.420	19.700	25.200	31.800
<b>Indonesia</b>		<b>1.300.000</b>	<b>1.560.000</b>	<b>1.900.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.700.000</b>

**LAMPIRAN 4 :**  
**SASARAN PRODUKSI KACANG TANAH TAHUN 2010 - 2014**

No	Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014
		(Ton)				
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	8.019	11.200	11.648	12.707	13.766
2.	Sumatera Utara	21.850	27.330	27.423	29.916	32.409
3.	Sumatera Barat	10.937	11.392	13.787	15.041	16.294
4.	R i a u	3.632	3.994	4.062	4.431	4.800
5.	Ja m b i	2.470	2.716	3.349	3.654	3.958
6.	Sumatera Selatan	7.497	10.429	12.330	13.451	14.572
7.	Bengkulu	6.708	7.377	7.825	8.536	9.248
8.	Lampung	13.168	14.160	17.314	18.888	20.462
9.	D.K.I Jakarta	23	25	28	31	33
10.	Jawa Barat	98.691	111.866	120.115	131.035	141.954
11.	Jawa Tengah	188.964	212.852	240.852	262.747	284.643
12.	D.I. Yogyakarta	73.104	71.626	85.470	93.240	101.010
13.	Jawa Timur	227.336	244.519	283.641	309.426	335.212
14.	B a l i	19.382	22.416	24.645	26.885	29.126
15.	Nusa Tenggara Barat	40.623	54.274	50.115	54.671	59.227
16.	Nusa Tenggara Timur	27.750	20.153	29.763	32.468	35.174
17.	Kalimantan Barat	2.197	2.581	2.896	3.159	3.422
18.	Kalimantan Tengah	2.079	2.286	2.366	2.581	2.797
19.	Kalimantan Selatan	18.020	19.818	23.149	25.254	27.358
20.	Kalimantan Timur	3.038	2.791	3.264	3.561	3.857
21.	Sulawesi Utara	9.740	7.412	10.741	11.718	12.697
22.	Sulawesi Tengah	9.911	10.349	13.760	15.011	16.262
23.	Sulawesi Selatan	40.932	50.856	54.039	58.952	63.864
24.	Sulawesi Tenggara	7.822	8.602	9.784	10.673	11.563
25.	Maluku	3.552	2.808	4.148	4.525	4.902
26.	Papua	3.103	3.147	3.827	4.175	4.523
27.	Bangka Belitung	539	593	695	758	822
28.	Banten	20.985	19.097	24.331	26.543	28.755
29.	Gorontalo	2.100	4.812	3.692	4.028	4.364
30.	Maluku Utara	4.726	5.197	7.749	8.453	9.154
31.	Riau Kepulauan	125	90	100	109	118
32.	Papua Barat	2.094	2.303	2.146	2.341	2.536
33.	Sulawesi Barat	883	929	946	1.032	1.118
<b>Indonesia</b>		<b>882.000</b>	<b>970.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.300.000</b>

**LAMPIRAN 5 :**  
**SASARAN PRODUKSI KACANG HIJAU TAHUN 2010 - 2014**

No	Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014
		(Ton)				
1	Nanggroe Aceh Darussalam	3.284	3.375	3.558	3.740	3.923
2	Sumatera Utara	6.489	6.669	7.030	7.390	7.751
3	Sumatera Barat	1.598	1.643	1.732	1.820	1.909
4	R i a u	2.205	2.267	2.389	2.512	2.634
5	Ja m b i	654	672	708	745	781
6	Sumatera Selatan	4.197	4.313	4.546	4.779	5.013
7	Bengkulu	1.716	1.764	1.859	1.954	2.050
8	Lampung	4.971	5.109	5.386	5.662	5.938
9	D.K.I Jakarta	-	-	-	-	-
10	Jawa Barat	14.403	14.803	15.604	16.404	17.204
11	Jawa Tengah	109.148	112.180	118.343	124.307	130.371
12	D.I. Yogyakarta	633	651	686	721	757
13	Jawa Timur	88.218	90.668	95.569	100.470	105.371
14	B a l i	1.164	1.196	1.261	1.325	1.390
15	Nusa Tenggara Barat	46.771	48.071	50.669	53.267	55.866
16	Nusa Tenggara Timur	24.423	25.102	26.459	27.816	29.172
17	Kalimantan Barat	1.050	1.079	1.138	1.196	1.254
18	Kalimantan Tengah	326	335	353	372	390
19	Kalimantan Selatan	1.631	1.676	1.767	1.857	1.948
20	Kalimantan Timur	1.177	1.210	1.275	1.341	1.406
21	Sulawesi Utara	2.541	2.612	2.573	2.894	3.035
22	Sulawesi Tengah	1.256	1.291	1.361	1.431	1.501
23	Sulawesi Selatan	32.807	33.718	35.620	37.363	39.186
24	Sulawesi Tenggara	1.901	1.954	2.060	2.165	2.271
25	Maluku	693	712	750	789	827
26	Papua	1.225	1.259	1.327	1.395	1.463
27	Bangka Belitung	-	-	-	-	-
28	Banten	2.383	2.449	2.581	2.714	2.846
29	Gorontalo	595	611	644	677	710
30	Maluku Utara	451	464	489	515	538
31	Riau Kepulauan	2	2	2	2	2
32	Papua Barat	830	852	898	944	990
33	Sulawesi Barat	1.258	1.293	1.363	1.433	1.503
<b>Indonesia</b>		<b>360.000</b>	<b>370.000</b>	<b>390.000</b>	<b>410.000</b>	<b>430.000</b>

**LAMPIRAN 6 :**  
**SASARAN PRODUKSI UBIKAYU TAHUN 2010 - 2014**

No	Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014
		(Ton)				
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	45.880	48.256	51.555	54.236	56.917
2.	Sumatera Utara	803.500	845.105	902.890	949.840	996.791
3.	Sumatera Barat	107.250	112.803	120.516	126.783	133.050
4.	R i a u	66.000	69.417	74.164	78.020	81.877
5.	Ja m b i	38.080	40.052	42.790	45.015	47.241
6.	Sumatera Selatan	200.080	210.440	224.829	236.520	248.211
7.	Bengkulu	81.900	86.141	92.031	96.816	101.602
8.	Lampung	7.594.000	7.987.217	8.533.351	8.977.086	9.420.820
9.	D.K.I Jakarta	580	610	652	686	720
10.	Jawa Barat	2.078.200	2.185.809	2.335.266	2.456.700	2.578.134
11.	Jawa Tengah	3.354.000	3.527.670	3.768.878	3.964.860	4.160.841
12.	D.I. Yogyakarta	960.000	1.009.709	1.078.749	1.134.844	1.190.939
13.	Jawa Timur	3.642.000	3.830.583	4.092.503	4.305.313	4.518.123
14.	B a l i	172.280	181.201	193.590	203.657	213.724
15.	Nusa Tenggara Barat	102.000	107.282	114.617	120.577	126.537
16.	Nusa Tenggara Timur	901.000	947.654	1.012.451	1.065.098	1.117.745
17.	Kalimantan Barat	234.720	246.874	263.754	277.469	291.184
18.	Kalimantan Tengah	101.790	107.061	114.381	120.329	126.277
19.	Kalimantan Selatan	125.560	132.061	141.091	148.428	155.765
20.	Kalimantan Timur	123.200	129.579	138.439	145.638	152.837
21.	Sulawesi Utara	80.600	84.773	90.570	95.280	99.989
22.	Sulawesi Tengah	72.450	76.201	81.412	85.645	89.879
23.	Sulawesi Selatan	510.380	536.807	573.512	603.335	633.157
24.	Sulawesi Tenggara	221.100	232.549	248.449	261.369	274.288
25.	Maluku	140.800	148.091	158.216	166.444	174.671
26.	Papua	46.400	48.803	52.140	54.851	57.562
27.	Bangka Belitung	25.380	26.694	28.519	30.002	31.485
28.	Banten	168.000	176.699	188.781	198.598	208.414
29.	Gorontalo	18.000	18.932	20.227	21.278	22.330
30.	Maluku Utara	133.100	139.992	149.564	157.341	165.119
31.	Riau Kepulauan	12.720	13.379	14.293	15.037	15.780
32.	Papua Barat	28.250	29.713	31.744	33.395	35.046
33.	Sulawesi Barat	58.800	61.845	66.073	69.509	72.945
<b>INDONESIA</b>		<b>22.248.000</b>	<b>23.400.000</b>	<b>25.000.000</b>	<b>26.300.000</b>	<b>27.600.000</b>

**LAMPIRAN 7 :**  
**SASARAN PRODUKSI UBI JALAR TAHUN 2010 - 2014**

No	Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014
		(Ton)				
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	30.769	33.077	35.385	37.692	40.000
2.	Sumatera Utara	161.026	173.103	185.179	197.256	209.333
3.	Sumatera Barat	45.128	48.513	51.897	55.282	58.667
4.	R i a u	10.564	11.356	12.149	12.941	13.733
5.	Ja m b i	19.692	21.169	22.646	24.123	25.600
6.	Sumatera Selatan	15.179	16.318	17.456	18.595	19.733
7.	Bengkulu	41.026	44.103	47.179	50.256	53.333
8.	Lampung	42.051	45.205	48.359	51.513	54.667
9.	D.K.I Jakarta	-	-	-	-	-
10.	Jawa Barat	396.923	426.692	456.462	486.231	516.000
11.	Jawa Tengah	150.769	162.077	173.385	184.692	196.000
12.	D.I. Yogyakarta	5.128	5.513	5.897	6.282	6.667
13.	Jawa Timur	166.667	179.167	191.667	204.167	216.667
14.	B a l i	66.667	71.667	76.667	81.667	86.667
15.	Nusa Tenggara Barat	16.923	18.192	19.462	20.731	22.000
16.	Nusa Tenggara Timur	153.846	165.385	176.923	188.462	200.000
17.	Kalimantan Barat	6.667	7.167	7.667	8.167	8.667
18.	Kalimantan Tengah	11.897	12.790	13.682	14.574	15.467
19.	Kalimantan Selatan	13.846	14.885	15.923	16.962	18.000
20.	Kalimantan Timur	22.051	23.705	25.359	27.013	28.667
21.	Sulawesi Utara	30.769	33.077	35.385	37.692	40.000
22.	Sulawesi Tengah	20.513	22.051	23.590	25.128	26.667
23.	Sulawesi Selatan	82.051	88.205	94.359	100.513	106.667
24.	Sulawesi Tenggara	17.231	18.523	19.815	21.108	22.400
25.	Maluku	12.821	13.782	14.744	15.705	16.667
26.	Papua	354.974	381.597	408.221	434.844	461.467
27.	Bangka Belitung	5.128	5.513	5.897	6.282	6.667
28.	Banten	32.308	34.731	37.154	39.577	42.000
29.	Gorontalo	5.128	5.513	5.897	6.282	6.667
30.	Maluku Utara	27.692	29.769	31.846	33.923	36.000
31.	Riau Kepulauan	2.564	2.756	2.949	3.141	3.333
32.	Papua Barat	26.872	28.887	30.903	32.918	34.933
33.	Sulawesi Barat	5.128	5.513	5.897	6.282	6.667
<b>INDONESIA</b>		<b>2.000.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.450.000</b>	<b>2.600.000</b>



**LAMPIRAN 8 :**  
**SASARAN PRODUKSI KELAPA SAWIT 2010-2014**

No	Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014
		(Ribu Ton)				
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	933	992	1,053	1,117	1,184
2.	Sumatera Utara	3.535	3.656	3.782	3.911	4.045
3.	Sumatera Barat	1.176	1.227	1.280	1.334	1.391
4.	R i a u	5.098	5.273	5.453	5.640	5.833
5.	Ja m b i	1.905	1.999	2.098	2.200	2.306
6.	Sumatera Selatan	2.311	2.421	2.536	2.656	2.780
7.	Bengkulu	463	483	503	524	546
8.	Lampung	535	558	581	606	631
9.	D.K.I Jakarta	-	-	-	-	-
10.	Jawa Barat	37	38	39	41	42
11.	Jawa Tengah	-	-	-	-	-
12.	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-
13.	Jawa Timur	-	-	-	-	-
14.	B a l i	-	-	-	-	-
15.	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-
16.	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-
17.	Kalimantan Barat	2.198	2.355	2.519	2.691	2.871
18.	Kalimantan Tengah	1.838	1.964	2.094	2.231	2.375
19.	Kalimantan Selatan	584	621	660	701	743
20.	Kalimantan Timur	986	1.077	1.173	1.273	1.378
21.	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
22.	Sulawesi Tengah	171	185	199	214	230
23.	Sulawesi Selatan	85	95	106	117	129
24.	Sulawesi Tenggara	39	48	58	70	81
25.	Maluku	-	-	-	-	-
26.	Papua	278	324	374	426	481
27.	Bangka Belitung	427	447	468	490	513
28.	Banten	48	49	50	52	54
29.	Gorontalo	-	-	-	-	-
30.	Maluku Utara	-	-	-	-	-
31.	Riau Kepulauan	67	75	83	91	100
32.	Papua Barat	210	248	289	331	376
33.	Sulawesi Barat	275	293	312	330	350
<b>INDONESIA</b>		<b>23.200</b>	<b>24.429</b>	<b>25.710</b>	<b>27.046</b>	<b>28.439</b>

**LAMPIRAN 9 :**  
**SASARAN PRODUKSI KARET 2010-2014**

No	Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014
		(Ribuan Ton)				
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	87,34	88,30	89,27	90,25	91,25
2.	Sumatera Utara	425,48	430,16	434,89	439,68	444,51
3.	Sumatera Barat	91,46	92,47	93,48	94,51	95,55
4.	R i a u	355,31	359,21	363,17	367,16	371,20
5.	Ja m b i	300,63	303,94	307,28	310,66	314,08
6.	Sumatera Selatan	528,32	534,13	540,00	545,94	551,95
7.	Bengkulu	50,79	51,35	51,91	52,49	53,06
8.	Lampung	67,35	68,09	68,84	69,60	70,37
9.	D.K.I Jakarta	-	-	-	-	-
10.	Jawa Barat	56,82	57,45	58,08	58,72	59,36
11.	Jawa Tengah	29,49	29,81	30,14	30,47	30,81
12.	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-
13.	Jawa Timur	23,73	23,99	24,26	24,52	24,79
14.	B a l i	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12
15.	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-
16.	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-
17.	Kalimantan Barat	262,49	265,89	269,00	271,80	274,31
18.	Kalimantan Tengah	195,56	197,71	199,89	202,09	204,31
19.	Kalimantan Selatan	106,30	107,47	108,65	109,85	111,06
20.	Kalimantan Timur	27,22	27,52	27,82	28,13	28,44
21.	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
22.	Sulawesi Tengah	3,36	3,40	3,44	3,47	3,51
23.	Sulawesi Selatan	10,06	10,17	10,28	10,39	10,51
24.	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
25.	Maluku	-	-	-	-	-
26.	Papua	1,71	1,73	1,75	1,77	1,78
27.	Bangka Belitung	19,33	19,55	19,76	19,98	20,20
28.	Banten	14,76	14,92	15,08	15,25	15,42
29.	Gorontalo	-	-	-	-	-
30.	Maluku Utara	-	-	-	-	-
31.	Riau Kepulauan	22,05	22,29	22,53	22,78	23,03
32.	Papua Barat	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
33.	Sulawesi Barat	1,31	1,32	1,33	1,35	1,36
<b>INDONESIA</b>		<b>2.681,00</b>	<b>2.711,00</b>	<b>2.741,00</b>	<b>2.771,00</b>	<b>2.801,00</b>

**LAMPIRAN 10 :**  
**SASARAN PRODUKSI KELAPA 2010-2014**

No	Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014
		(Ribu Ton)				
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	66,25	66,74	67,29	67,91	68,56
2.	Sumatera Utara	104,02	104,79	105,65	106,63	107,65
3.	Sumatera Barat	81,89	82,49	83,17	83,95	84,75
4.	R i a u	572,92	577,13	581,87	587,30	592,92
5.	Ja m b i	117,51	118,37	119,34	120,46	121,61
6.	Sumatera Selatan	66,66	67,15	67,79	68,42	69,07
7.	Bengkulu	8,43	8,49	8,56	8,64	8,72
8.	Lampung	121,38	122,27	123,27	124,43	125,62
9.	D.K.I Jakarta	-	-	-	-	-
10.	Jawa Barat	142,06	143,11	144,28	145,63	147,02
11.	Jawa Tengah	182,10	183,44	184,94	186,67	188,46
12.	D.I. Yogyakarta	46,30	46,64	47,02	47,46	47,91
13.	Jawa Timur	248,89	250,72	252,78	255,14	257,58
14.	B a l i	67,36	67,86	68,41	69,05	69,71
15.	Nusa Tenggara Barat	53,39	53,79	54,23	54,73	55,26
16.	Nusa Tenggara Timur	65,27	65,75	66,29	66,91	67,55
17.	Kalimantan Barat	76,84	77,40	78,04	78,77	79,52
18.	Kalimantan Tengah	87,94	88,59	89,32	90,15	91,01
19.	Kalimantan Selatan	34,15	34,40	34,69	35,01	35,34
20.	Kalimantan Timur	21,33	21,49	21,67	21,87	22,08
21.	Sulawesi Utara	274,33	276,34	278,61	281,22	283,90
22.	Sulawesi Tengah	189,86	191,26	192,83	194,63	196,49
23.	Sulawesi Selatan	76,52	77,08	77,71	78,44	79,19
24.	Sulawesi Tenggara	40,57	40,87	41,21	41,59	41,99
25.	Maluku	71,68	72,21	72,80	73,48	74,18
26.	Papua	12,58	12,67	12,77	12,89	13,01
27.	Bangka Belitung	2,62	2,64	2,66	2,68	2,71
28.	Banten	60,13	60,58	61,07	61,64	62,23
29.	Gorontalo	60,70	61,15	61,65	62,22	62,82
30.	Maluku Utara	233,22	234,94	236,86	239,08	241,36
31.	Riau Kepulauan	11,39	11,47	11,57	11,68	11,79
32.	Papua Barat	8,06	8,12	8,19	8,26	8,34
33.	Sulawesi Barat	59,41	59,84	60,33	60,90	61,48
<b>INDONESIA</b>		<b>3.266</b>	<b>3.290</b>	<b>3.317</b>	<b>3.348</b>	<b>3.380</b>

**LAMPIRAN 11 :**  
**SASARAN PRODUKSI KOPI 2010-2014**

No	Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014
		(Ribu Ton)				
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	51.776	46.599	55.126	56.284	56.903
2.	Sumatera Utara	56.094	50.485	59.673	60.867	61.536
3.	Sumatera Barat	34.385	30.947	36.517	37.247	37.657
4.	Riau	2.310	2.079	2.175	2.196	2.220
5.	Kepulauan Riau	36	32	34	34	34
6.	Jambi	13.138	11.825	13.953	14.232	14.389
7.	Sumatera Selatan	135.812	122.231	144.599	147.491	149.114
8.	Bangka Belitung	12	11	11	11	11
9.	Bengkulu	57.191	51.472	60.737	61.952	62.633
10.	Lampung	149.867	134.880	159.563	162.755	164.545
11.	Jawa Barat	11.972	10.775	12.650	12.916	13.058
12.	Banten	2.288	2.059	2.146	2.167	2.191
13.	Jawa Tengah	16.938	15.244	17.988	18.366	18.568
14.	D.I. Yogyakarta	422	380	396	401	405
15.	Jawa Timur	55.740	50.166	59.196	60.380	61.044
16.	Bali	15.387	13.848	16.341	16.668	16.851
17.	Nusa Tenggara Barat	5.494	4.945	5.835	5.952	6.017
18.	Nusa Tenggara Timur	21.239	19.115	22.555	23.232	23.488
19.	Kalimantan Barat	4.412	3.971	4.685	4.732	4.784
20.	Kalimantan Tengah	2.163	1.947	2.297	2.320	2.346
21.	Kalimantan Selatan	1.491	1.342	1.584	1.600	1.617
22.	Kalimantan Timur	4.005	3.605	4.254	4.296	4.343
23.	Sulawesi Utara	3.521	3.169	3.739	3.814	3.856
24.	Gorontalo	948	853	887	896	906
25.	Sulawesi Tengah	8.072	7.265	8.573	8.659	8.754
26.	Sulawesi Selatan	32.987	29.688	35.032	35.733	36.126
27.	Sulawesi Barat	8.494	7.645	9.021	9.201	9.303
28.	Sulawesi Tenggara	4.070	3.663	4.322	4.408	4.457
29.	Maluku	824	742	773	781	789
30.	Maluku Utara	408	367	382	386	390
31.	Papua	2.706	2.436	2.850	2.878	2.910
32.	Papua Barat	229	206	214	216	219
<b>INDONESIA</b>		<b>704.434</b>	<b>633.991</b>	<b>748.109</b>	<b>763.071</b>	<b>771.465</b>

**LAMPIRAN 12 :**  
**SASARAN PRODUKSI KAKAO 2010-2014**

No	Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014
		(Ribuan Ton)				
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	30.150	25.627	29.984	34.481	37.929
2.	Sumatera Utara	69.631	59.186	69.248	79.635	87.598
3.	Sumatera Barat	34.533	29.353	34.343	39.495	43.444
4.	Riau	4.720	4.012	4.694	5.399	5.938
5.	Kepulauan Riau	1	1	1	1	1
6.	Jambi	526	447	523	602	662
7.	Sumatera Selatan	1.763	1.498	1.753	2.016	2.217
8.	Bangka Belitung	97	82	96	111	122
9.	Bengkulu	5.268	4.478	5.239	6.025	6.628
10.	Lampung	26.922	22.884	26.774	30.790	33.869
11.	Jawa Barat	3.728	3.168	3.707	4.263	4.689
12.	Banten	2.203	1.873	2.191	2.520	2.772
13.	Jawa Tengah	2.700	2.295	2.685	3.088	3.396
14.	D.I. Yogyakarta	1.230	1.046	1.223	1.407	1.548
15.	Jawa Timur	23.403	19.892	23.274	26.765	29.442
16.	Bali	7.044	5.988	7.006	8.057	8.862
17.	Nusa Tenggara Barat	1.551	1.318	1.543	1.774	1.951
18.	Nusa Tenggara Timur	12.440	10.574	12.371	14.227	15.650
19.	Kalimantan Barat	2.350	1.998	2.337	2.688	2.957
20.	Kalimantan Tengah	282	240	280	323	355
21.	Kalimantan Selatan	35	30	35	40	44
22.	Kalimantan Timur	12.422	10.559	12.354	14.207	15.628
23.	Sulawesi Utara	3.586	3.048	3.566	4.101	4.512
24.	Gorontalo	3.760	3.196	3.739	4.300	4.730
25.	Sulawesi Tengah	142.984	121.537	142.198	163.527	179.880
26.	Sulawesi Selatan	170.364	144.809	169.427	194.841	214.325
27.	Sulawesi Barat	100.395	85.336	99.843	114.820	126.302
28.	Sulawesi Tenggara	137.001	116.451	136.247	156.684	172.353
29.	Maluku	8.831	7.506	8.783	10.100	11.110
30.	Maluku Utara	13.568	11.533	13.493	15.517	17.069
31.	Papua	11.401	9.691	11.339	13.039	14.343
32.	Papua Barat	3.028	2.574	3.011	3.463	3.809
<b>INDONESIA</b>		<b>837.918</b>	<b>712.230</b>	<b>833.310</b>	<b>958.306</b>	<b>1.054.137</b>

**LAMPIRAN 13 :**  
**SASARAN PRODUKSI LADA 2010-2014**

No	Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014
		(Ribu Ton)				
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	0,28	0,29	0,30	0,31	0,31
2.	Sumatera Utara	0,10	0,10	0,10	0,10	0,11
3.	Sumatera Barat	0,14	0,14	0,15	0,15	0,16
4.	R i a u	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
5.	Ja m b i	0,03	0,03	0,04	0,04	0,04
6.	Sumatera Selatan	3,67	3,80	3,89	3,98	4,07
7.	Bengkulu	4,05	4,20	4,30	4,40	4,50
8.	Lampung	24,33	24,28	24,99	25,74	26,55
9.	D.K.I Jakarta	-	-	-	-	-
10.	Jawa Barat	0,76	0,79	0,81	0,83	0,84
11.	Jawa Tengah	1,13	1,17	1,20	1,23	1,25
12.	D.I. Yogyakarta	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
13.	Jawa Timur	0,36	0,37	0,38	0,39	0,40
14.	B a l i	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
15.	Nusa Tenggara Barat	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
16.	Nusa Tenggara Timur	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10
17.	Kalimantan Barat	5,25	5,44	5,57	5,70	5,83
18.	Kalimantan Tengah	3,24	3,36	3,44	3,52	3,60
19.	Kalimantan Selatan	0,54	0,56	0,58	0,59	0,60
20.	Kalimantan Timur	11,44	11,86	12,14	12,42	12,70
21.	Sulawesi Utara	0,28	0,29	0,30	0,31	0,31
22.	Sulawesi Tengah	0,16	0,17	0,17	0,18	0,18
23.	Sulawesi Selatan	6,20	6,43	6,58	6,73	6,88
24.	Sulawesi Tenggara	4,65	4,82	4,93	5,04	5,16
25.	Maluku	-	-	-	-	-
26.	Papua	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
27.	Bangka Belitung	15,45	16,01	16,39	16,77	17,14
28.	Banten	0,41	0,43	0,44	0,45	0,46
29.	Gorontalo	-	-	-	-	-
30.	Maluku Utara	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Riau Kepulauan	0,06	0,06	0,06	0,06	0,07
32.	Papua Barat	-	-	-	-	-
33.	Sulawesi Barat	0,22	0,23	0,24	0,24	0,25
<b>INDONESIA</b>		<b>82,93</b>	<b>85,02</b>	<b>87,15</b>	<b>89,34</b>	<b>91,58</b>

**LAMPIRAN 14 :**  
**SASARAN PRODUKSI CENGKEH 2010-2014**

No	Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014
		(Ribu Ton)				
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	2,95	3,02	3,13	3,17	3,25
2.	Sumatera Utara	0,44	0,45	0,46	0,47	0,48
3.	Sumatera Barat	1,82	1,87	1,94	1,96	2,01
4.	R i a u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Ja m b i	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
6.	Sumatera Selatan	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
7.	Bengkulu	0,14	0,15	0,15	0,15	0,16
8.	Lampung	0,52	0,53	0,55	0,56	0,57
9.	D.K.I Jakarta	-	-	-	-	-
10.	Jawa Barat	2,47	2,54	2,63	2,66	2,73
11.	Jawa Tengah	6,89	7,07	7,33	7,42	7,60
12.	D.I. Yogyakarta	0,38	0,39	0,40	0,41	0,42
13.	Jawa Timur	8,79	9,02	9,35	9,47	9,69
14.	B a l i	4,81	4,94	5,12	5,18	5,31
15.	Nusa Tenggara Barat	0,39	0,40	0,41	0,41	0,42
16.	Nusa Tenggara Timur	1,08	1,11	1,15	1,16	1,19
17.	Kalimantan Barat	0,23	0,23	0,24	0,24	0,25
18.	Kalimantan Tengah	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
19.	Kalimantan Selatan	0,41	0,42	0,43	0,44	0,45
20.	Kalimantan Timur	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
21.	Sulawesi Utara	9,86	10,11	11,49	11,63	10,91
22.	Sulawesi Tengah	9,34	9,58	9,94	10,06	10,30
23.	Sulawesi Selatan	6,36	6,53	6,77	6,85	7,02
24.	Sulawesi Tenggara	1,72	1,76	1,83	1,85	1,89
25.	Maluku	9,28	9,52	9,88	10,00	10,23
26.	Papua	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
27.	Bangka Belitung	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
28.	Banten	2,90	2,98	3,09	3,13	3,20
29.	Gorontalo	0,61	0,63	0,65	0,66	0,67
30.	Maluku Utara	3,52	3,61	3,74	3,79	3,88
31.	Riau Kepulauan	1,94	1,99	2,06	2,09	2,14
32.	Papua Barat	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10
33.	Sulawesi Barat	0,41	0,42	0,44	0,45	0,46
<b>INDONESIA</b>		<b>78</b>	<b>80</b>	<b>83</b>	<b>84</b>	<b>86</b>

**LAMPIRAN 15 :**  
**SASARAN PRODUKSI JAMBU METE 2010-2014**

No	Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014
		(Ribuan Ton)				
1	Nanggroe Aceh Darussalam	-	-	-	-	-
2.	Sumatera Utara	-	-	-	-	-
3.	Sumatera Barat	-	-	-	-	-
4.	R i a u	-	-	-	-	-
5.	Ja m b i	-	-	-	-	-
6.	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-
7.	Bengkulu	-	-	-	-	-
8.	Lampung	-	-	-	-	-
9.	D.K.I Jakarta	-	-	-	-	-
10.	Jawa Barat	-	-	-	-	-
11.	Jawa Tengah	15,97	16,15	16,42	16,69	16,86
12.	D.I. Yogyakarta	14,20	14,35	14,60	14,84	14,99
13.	Jawa Timur	1,78	1,79	1,83	1,86	1,87
14.	B a l i	21,65	22,53	23,75	24,63	25,56
15.	Nusa Tenggara Barat	30,17	30,50	31,02	31,53	31,85
16.	Nusa Tenggara Timur	30,17	30,72	31,28	32,20	32,75
17.	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-
18.	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-
19.	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-
20.	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-
21.	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
22.	Sulawesi Tengah	21,30	22,03	22,92	23,81	24,58
23.	Sulawesi Selatan	5,32	5,45	5,62	5,79	5,92
24.	Sulawesi Tenggara	4,26	4,31	4,38	4,45	4,50
25.	Maluku	-	-	-	-	-
26.	Papua	-	-	-	-	-
27.	Bangka Belitung	-	-	-	-	-
28.	Banten	-	-	-	-	-
29.	Gorontalo	-	-	-	-	-
30.	Maluku Utara	0,15	0,17	0,19	0,21	0,23
31.	Riau Kepulauan	-	-	-	-	-
32.	Papua Barat	-	-	-	-	-
33.	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
<b>INDONESIA</b>		<b>144,97</b>	<b>148,00</b>	<b>152,00</b>	<b>156,00</b>	<b>159,12</b>



**LAMPIRAN 16 :**  
**SASARAN PRODUKSI TEMBAKAU 2010-2014**

No	Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014
		(Ribu Ton)				
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	-	-	-	-	-
2.	Sumatera Utara	3,62	3,64	3,66	3,66	3,68
3.	Sumatera Barat	-	-	-	-	-
4.	R i a u	-	-	-	-	-
5.	Ja m b i	-	-	-	-	-
6.	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-
7.	Bengkulu	-	-	-	-	-
8.	Lampung	-	-	-	-	-
9.	D.K.I Jakarta	-	-	-	-	-
10.	Jawa Barat	7,24	7,28	7,32	7,32	7,36
11.	Jawa Tengah	39,82	40,04	40,26	40,26	40,48
12.	D.I. Yogyakarta	3,62	3,64	3,66	3,66	3,68
13.	Jawa Timur	94,12	94,64	95,16	95,16	95,68
14.	B a l i	1,81	1,82	1,83	1,83	1,84
15.	Nusa Tenggara Barat	30,77	30,94	31,11	31,11	31,28
16.	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-
17.	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-
18.	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-
19.	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-
20.	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-
21.	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
22.	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-
23.	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-
24.	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
25.	Maluku	-	-	-	-	-
26.	Papua	-	-	-	-	-
27.	Bangka Belitung	-	-	-	-	-
28.	Banten	-	-	-	-	-
29.	Gorontalo	-	-	-	-	-
30.	Maluku Utara	-	-	-	-	-
31.	Riau Kepulauan	-	-	-	-	-
32.	Papua Barat	-	-	-	-	-
33.	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
<b>INDONESIA</b>		<b>181,00</b>	<b>182,00</b>	<b>183,00</b>	<b>183,00</b>	<b>184,00</b>

**LAMPIRAN 17 :**  
**SASARAN PRODUKSI KAPAS 2010-2014**

No	Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014
		(Ribu Ton)				
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	-	-	-	-	-
2.	Sumatera Utara	-	-	-	-	-
3.	Sumatera Barat	-	-	-	-	-
4.	R i a u	-	-	-	-	-
5.	Ja m b i	-	-	-	-	-
6.	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-
7.	Bengkulu	-	-	-	-	-
8.	Lampung	-	-	-	-	-
9.	D.K.I Jakarta	-	-	-	-	-
10.	Jawa Barat	-	-	-	-	-
11.	Jawa Tengah	1,40	1,89	2,00	2,43	2,52
12.	D.I. Yogyakarta	1,40	1,89	2,00	2,43	2,52
13.	Jawa Timur	2,80	3,77	5,00	7,28	7,56
14.	B a l i	1,75	1,89	3,00	4,85	5,04
15.	Nusa Tenggara Barat	1,40	1,89	3,00	4,85	6,30
16.	Nusa Tenggara Timur	4,38	6,60	8,00	14,55	17,64
17.	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-
18.	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-
19.	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-
20.	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-
21.	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
22.	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-
23.	Sulawesi Selatan	13,13	15,09	17,00	20,62	21,42
24.	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
25.	Maluku	-	-	-	-	-
26.	Papua	-	-	-	-	-
27.	Bangka Belitung	-	-	-	-	-
28.	Banten	-	-	-	-	-
29.	Gorontalo	-	-	-	-	-
30.	Maluku Utara	-	-	-	-	-
31.	Riau Kepulauan	-	-	-	-	-
32.	Papua Barat	-	-	-	-	-
33.	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
<b>INDONESIA</b>		<b>26,25</b>	<b>33,00</b>	<b>40,00</b>	<b>57,00</b>	<b>63,00</b>

**LAMPIRAN 18 :**  
**SASARAN PRODUKSI TEH 2010-2014**

No	Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014
		(Ribu Ton)				
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	-	-	-	-	-
2.	Sumatera Utara	13.511	12.295	13.278	13.942	14.360
3.	Sumatera Barat	7.674	6.838	7.180	7.539	7.765
4.	Riau	-	-	-	-	-
5.	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-
6.	Jambi	5.818	5.173	5.431	5.703	5.874
7.	Sumatera Selatan	2.482	2.209	2.321	2.437	2.510
8.	Bangka Belitung	-	-	-	-	-
9.	Bengkulu	1.368	1.217	1.278	1.342	1.383
10.	Lampung	-	-	-	-	-
11.	Jawa Barat	109.710	98.739	107.527	112.903	116.290
12.	Banten	-	-	-	-	-
13.	Jawa Tengah	11.654	10.489	11.013	11.564	11.911
14.	D.I. Yogyakarta	183	163	172	181	186
15.	Jawa Timur	4.068	3.702	3.891	4.086	4.208
16.	Bali	-	-	-	-	-
17.	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-
18.	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-
19.	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-
20.	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-
21.	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-
22.	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-
23.	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
24.	Gorontalo	-	-	-	-	-
25.	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-
26.	Sulawesi Selatan	136	121	127	133	137
27.	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
28.	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
29.	Maluku	-	-	-	-	-
30.	Maluku Utara	-	-	-	-	-
31.	Papua	-	-	-	-	-
32.	Papua Barat	-	-	-	-	-
<b>INDONESIA</b>		<b>156.604</b>	<b>140.944</b>	<b>152.219</b>	<b>159.830</b>	<b>164.625</b>

**LAMPIRAN 19 :**  
**SASARAN PRODUKSI GULA 2010-2014**

No	Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014
		(Ton)				
1.	Nanggro Aceh Darusalam					
2.	Sumatera Utara		43.913	58.880	58.398	63.715
3.	Sumatera Barat					
4.	Riau					
5.	Jambi					
6.	Sumatera Selatan		101.793	105.338	107.593	107.593
7.	Bengkulu					
8.	Lampung		652.030	757.493	833.473	896.808
9.	D.K.I Jakarta					
10.	Jawa Barat		178.449	191.942	201.892	212.291
11.	Jawa Tengah		301.384	339.232	372.618	417.758
12.	D.I Yogyakarta		27.946	38.311	40.226	42.606
13.	Jawa Timur		1.182.941	1.361.884	1.471.878	1.570.941
14.	Bali					
15.	Nusa Tenggara Barat					
16.	Nusa Tenggara Timur					
17.	Kalimantan Barat					
18.	Kalimantan Tengah					
19.	Kalimantan Selatan					
20.	Kalimantan Timur					
21.	Sulawesi Utara					
22.	Sulawesi Tengah					
23.	Sulawesi Selatan		47.209	70.964	79.999	88.696
24.	Sulawesi Tenggara					
25.	Maluku					
26.	Papua					
27.	Bangka Belitung					
28.	Banten					
29.	Gorontalo		35.514	40.052	42.803	45.546
30.	Maluku Utara					
31.	Riau Kepulauan					
32.	Papua Barat					
33.	Sulawesi Barat					
<b>INDONESIA</b>			<b>2.571.181</b>	<b>2.964.096</b>	<b>3.208.881</b>	<b>3.445.953</b>

**LAMPIRAN 20 :**  
**SASARAN PRODUKSI JARAK PAGAR 2010-2014**

No	Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014
		(Ribu Ton)				
1	Nanggroe Aceh Darussalam	-	-	-	-	-
2.	Sumatera Utara	0,13	0,17	0,21	0,25	0,30
3.	Sumatera Barat	0,44	0,59	0,70	0,85	1,03
4.	R i a u	-	-	-	-	-
5.	Ja m b i	0,44	0,59	0,70	0,85	1,03
6.	Sumatera Selatan	0,38	0,51	0,61	0,74	0,89
7.	Bengkulu	0,25	0,33	0,40	0,48	0,58
8.	Lampung	1,12	1,49	1,79	2,17	2,61
9.	D.K.I Jakarta	-	-	-	-	-
10.	Jawa Barat	0,44	0,59	0,70	0,85	1,03
11.	Jawa Tengah	0,42	0,56	0,67	0,81	0,98
12.	D.I. Yogyakarta	0,43	0,57	0,68	0,82	0,99
13.	Jawa Timur	0,42	0,55	0,66	0,80	0,97
14.	B a l i	-	-	-	-	-
15.	Nusa Tenggara Barat	1,62	2,16	2,59	3,13	3,78
16.	Nusa Tenggara Timur	1,72	2,29	2,75	3,33	4,01
17.	Kalimantan Barat	0,16	0,21	0,26	0,31	0,37
18.	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-
19.	Kalimantan Selatan	0,18	0,24	0,29	0,35	0,42
20.	Kalimantan Timur	0,18	0,24	0,29	0,35	0,42
21.	Sulawesi Utara	1,03	1,37	1,65	1,99	2,40
22.	Sulawesi Tengah	0,50	0,67	0,80	0,97	1,17
23.	Sulawesi Selatan	1,08	1,44	1,73	2,09	2,52
24.	Sulawesi Tenggara	1,02	1,36	1,63	1,97	2,38
25.	Maluku	0,28	0,37	0,44	0,53	0,64
26.	Papua	0,44	0,59	0,70	0,85	1,03
27.	Bangka Belitung	0,08	0,11	0,13	0,16	0,19
28.	Banten	0,42	0,56	0,67	0,81	0,98
29.	Gorontalo	1,08	1,44	1,73	2,10	2,52
30.	Maluku Utara	0,32	0,43	0,51	0,62	0,75
31.	Riau Kepulauan	-	-	-	-	-
32.	Papua Barat	0,16	0,21	0,26	0,31	0,37
33.	Sulawesi Barat	0,28	0,37	0,44	0,53	0,64
<b>INDONESIA</b>		<b>15</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>29</b>	<b>35</b>

**LAMPIRAN 21 :**  
**SASARAN PRODUKSI NILAM 2010-2014**

No	Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014
		(Ribu Ton)				
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	9,75	10,30	11,20	12,40	12,40
2.	Sumatera Utara	9,75	10,20	11,20	12,50	12,40
3.	Sumatera Barat	7,80	8,40	9,20	10,50	11,00
4.	R i a u	-	-	-	-	-
5.	Ja m b i	7,15	7,70	8,60	9,50	10,30
6.	Sumatera Selatan	-	-	-	-	-
7.	Bengkulu	6,50	7,00	8,00	9,00	9,70
8.	Lampung	3,90	4,40	5,30	6,00	7,00
9.	D.K.I Jakarta	-	-	-	-	-
10.	Jawa Barat	6,50	7,00	7,30	7,50	9,00
11.	Jawa Tengah	7,80	8,40	9,30	11,00	11,00
12.	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-
13.	Jawa Timur	13,00	13,60	14,60	14,00	16,00
14.	B a l i	-	-	-	-	-
15.	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-
16.	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-
17.	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-
18.	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-
19.	Kalimantan Selatan	16,25	17,00	17,30	19,00	19,20
20.	Kalimantan Timur	2,60	3,00	4,00	4,60	6,00
21.	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
22.	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-
23.	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-
24.	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
25.	Maluku	-	-	-	-	-
26.	Papua	-	-	-	-	-
27.	Bangka Belitung	-	-	-	-	-
28.	Banten	-	-	-	-	-
29.	Gorontalo	-	-	-	-	-
30.	Maluku Utara	-	-	-	-	-
31.	Riau Kepulauan	-	-	-	-	-
32.	Papua Barat	-	-	-	-	-
33.	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
<b>INDONESIA</b>		<b>91,00</b>	<b>97,00</b>	<b>106,00</b>	<b>116,00</b>	<b>124,00</b>

**LAMPIRAN 22 :**  
**SASARAN PRODUKSI DAGING SAPI 2010-2014**

No	Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014
		(Ton)				
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	9.221	10.141	11.600	13.503	15.737
2.	Sumatera Utara	20.779	23.268	27.110	32.091	38.082
3.	Sumatera Barat	19.221	19.871	21.343	23.328	25.558
4.	R i a u	7.950	8.903	10.373	12.298	14.593
5.	Ja m b i	4.320	4.536	4.951	5.498	6.119
6.	Sumatera Selatan	11.526	11.884	12.730	13.876	15.162
7.	Bengkulu	2.344	2.504	2.781	3.144	3.559
8.	Lampung	13.635	15.268	17.789	21.090	25.027
9.	D.K.I Jakarta	9.860	9.666	9.835	10.182	10.579
10.	Jawa Barat	80.204	78.111	78.948	81.198	83.808
11.	Jawa Tengah	52.656	51.618	52.520	54.378	56.494
12.	D.I. Yogyakarta	5.328	5.223	5.314	5.502	5.716
13.	Jawa Timur	99.494	99.484	103.131	108.977	115.622
14.	B a l i	9.744	9.714	10.054	10.589	11.188
15.	Nusa Tenggara Barat	8.129	8.421	9.064	10.029	11.010
16.	Nusa Tenggara Timur	10.394	11.639	13.560	16.077	19.078
17.	Kalimantan Barat	8.647	9.682	11.281	13.374	15.871
18.	Kalimantan Tengah	6.260	7.009	8.167	9.682	11.490
19.	Kalimantan Selatan	6.609	6.397	6.424	6.565	6.734
20.	Kalimantan Timur	8.261	8.139	8.325	8.665	9.048
21.	Sulawesi Utara	5.099	5.153	5.409	5.777	6.188
22.	Sulawesi Tengah	3.090	3.096	3.221	3.410	3.620
23.	Sulawesi Selatan	12.145	13.599	15.845	18.785	22.292
24.	Sulawesi Tenggara	4.093	4.013	4.083	4.227	4.392
25.	Maluku	1.452	1.423	1.448	1.499	1.558
26.	Papua	2.542	2.607	2.776	3.009	3.270
27.	Bangka Belitung	2.118	2.372	2.764	3.276	3.888
28.	Banten	33.074	37.036	43.150	51.158	60.709
29.	Gorontalo	3.696	4.138	4.821	5.716	6.783
30.	Maluku Utara	1.429	1.616	1.902	2.278	2.730
31.	Riau Kepulauan	915	897	912	945	981
32.	Papua Barat	2.036	2.280	2.657	3.150	3.738
33.	Sulawesi Barat	2.037	2.281	2.657	3.150	3.739
<b>INDONESIA</b>		<b>468.307</b>	<b>481.990</b>	<b>516.946</b>	<b>566.427</b>	<b>624.364</b>

**LAMPIRAN 23 :**  
**SASARAN PRODUKSI DAGING KERBAU 2010-2014**

No	Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014
		(Ton)				
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	1.811	1.837	1.878	1.910	1.943
2.	Sumatera Utara	9.147	9.276	9.488	9.652	9.835
3.	Sumatera Barat	2.146	2.176	2.224	2.275	2.313
4.	R i a u	1.705	1.729	1.767	1.798	1.816
5.	Ja m b i	2.121	2.151	2.199	2.237	2.275
6.	Sumatera Selatan	1.256	1.274	1.303	1.326	1.349
7.	Bengkulu	511	519	531	541	552
8.	Lampung	547	555	568	578	588
9.	D.K.I Jakarta	38	39	41	42	43
10.	Jawa Barat	3.247	3.293	3.365	3.424	3.482
11.	Jawa Tengah	2.430	2.465	2.519	2.563	2.606
12.	D.I. Yogyakarta	8	8	8	8	8
13.	Jawa Timur	369	374	383	390	396
14.	B a l i	22	22	22	23	23
15.	Nusa Tenggara Barat	1.751	1.771	1.810	1.842	1.873
16.	Nusa Tenggara Timur	1.504	1.525	1.559	1.586	1.613
17.	Kalimantan Barat	9	9	9	9	10
18.	Kalimantan Tengah	525	548	577	605	634
19.	Kalimantan Selatan	1.144	1.161	1.187	1.208	1.229
20.	Kalimantan Timur	207	212	218	224	230
21.	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
22.	Sulawesi Tengah	31	31	32	33	33
23.	Sulawesi Selatan	2.703	2.742	2.804	2.853	2.903
24.	Sulawesi Tenggara	55	56	58	59	61
25.	Maluku	243	248	254	260	266
26.	Papua	73	74	76	78	80
27.	Bangka Belitung	7	7	7	7	8
28.	Banten	2.781	2.821	2.884	2.934	2.985
29.	Gorontalo	-	-	-	-	-
30.	Maluku Utara	-	-	-	-	-
31.	Riau Kepulauan	-	-	-	-	-
32.	Papua Barat	-	-	-	-	-
33.	Sulawesi Barat	136	189	263	365	506
<b>INDONESIA</b>		<b>36.526</b>	<b>37.113</b>	<b>38.035</b>	<b>38.829</b>	<b>39.657</b>



**LAMPIRAN 24 :**  
**SASARAN PRODUKSI DAGING KAMBING 2010-2014**

No	Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014
		(Ton)				
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	1.789	1.986	2.208	2.449	2.596
2.	Sumatera Utara	3.307	3.416	3.531	3.646	3.865
3.	Sumatera Barat	1.445	1.461	1.477	1.493	1.510
4.	R i a u	1.693	1.880	2.091	2.318	2.457
5.	Ja m b i	605	671	747	828	918
6.	Sumatera Selatan	1.664	1.682	1.701	1.720	1.738
7.	Bengkulu	186	188	191	193	195
8.	Lampung	7.175	7.964	8.857	9.821	10.890
9.	D.K.I Jakarta	988	999	1.010	1.021	1.032
10.	Jawa Barat	7.220	7.300	7.382	7.462	7.543
11.	Jawa Tengah	9.430	9.533	9.640	9.775	9.916
12.	D.I. Yogyakarta	941	951	962	972	983
13.	Jawa Timur	15.239	15.455	15.675	15.810	16.053
14.	B a l i	1.358	1.459	1.569	1.683	1.806
15.	Nusa Tenggara Barat	273	282	292	301	311
16.	Nusa Tenggara Timur	2.925	3.021	3.123	3.225	3.418
17.	Kalimantan Barat	498	515	532	550	568
18.	Kalimantan Tengah	609	629	650	672	694
19.	Kalimantan Selatan	417	431	446	460	475
20.	Kalimantan Timur	565	572	579	586	594
21.	Sulawesi Utara	380	392	405	419	432
22.	Sulawesi Tengah	952	1.048	1.156	1.272	1.399
23.	Sulawesi Selatan	761	845	940	1.042	1.155
24.	Sulawesi Tenggara	541	547	553	559	565
25.	Maluku	820	829	839	848	857
26.	Papua	135	150	167	185	206
27.	Bangka Belitung	43	48	53	59	65
28.	Banten	5.078	5.637	6.269	6.952	7.708
29.	Gorontalo	1.102	1.223	1.360	1.509	1.673
30.	Maluku Utara	1.246	1.383	1.538	1.706	1.892
31.	Riau Kepulauan	179	198	220	244	271
32.	Papua Barat	64	71	79	88	98
33.	Sulawesi Barat	1.198	1.330	1.479	1.640	1.819
<b>INDONESIA</b>		<b>70.827</b>	<b>74.096</b>	<b>77.722</b>	<b>81.507</b>	<b>85.700</b>

**LAMPIRAN 25 :**  
**SASARAN PRODUKSI DAGING DOMBA 2010-2014**

No	Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014
		(Ton)				
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	184	202	218	234	252
2.	Sumatera Utara	1.724	1.785	1.849	1.914	2.048
3.	Sumatera Barat	59	66	73	80	88
4.	R i a u	22	32	44	49	54
5.	Ja m b i	158	164	169	174	180
6.	Sumatera Selatan	2.273	2.500	2.693	2.900	3.074
7.	Bengkulu	16	17	17	18	19
8.	Lampung	327	342	354	366	379
9.	D.K.I Jakarta	613	640	662	685	705
10.	Jawa Barat	26.523	27.053	27.887	28.525	30.379
11.	Jawa Tengah	6.497	6.538	6.569	6.701	6.902
12.	D.I. Yogyakarta	1.663	1.682	1.701	1.720	1.740
13.	Jawa Timur	12.960	13.418	13.869	14.285	15.264
14.	B a l i	-	-	-	-	-
15.	Nusa Tenggara Barat	65	72	79	86	94
16.	Nusa Tenggara Timur	544	571	592	614	638
17.	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-
18.	Kalimantan Tengah	3.776	4.153	4.473	4.696	4.931
19.	Kalimantan Selatan	46	50	53	56	60
20.	Kalimantan Timur	13	14	14	15	15
21.	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
22.	Sulawesi Tengah	13	12	12	12	12
23.	Sulawesi Selatan	2	2	3	3	4
24.	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
25.	Maluku	732	1.385	2.337	3.941	4.213
26.	Papua	-	-	-	-	-
27.	Bangka Belitung	2	2	2	2	2
28.	Banten	3.463	3.614	3.736	3.848	3.944
29.	Gorontalo	-	-	-	-	-
30.	Maluku Utara	-	-	-	-	-
31.	Riau Kepulauan	-	-	-	-	-
32.	Papua Barat	-	-	-	-	-
33.	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
<b>INDONESIA</b>		<b>61.675</b>	<b>64.315</b>	<b>67.405</b>	<b>70.925</b>	<b>74.994</b>

**LAMPIRAN 26 :**  
**SASARAN PRODUKSI DAGING BABI 2010-2014**

No	Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014
		(Ton)				
1	Nanggroe Aceh Darussalam	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	30.766	31.074	31.385	31.699	32.016
3	Sumatera Barat	485	487	488	490	492
4	R i a u	1.409	1.641	1.912	2.227	2.595
5	Ja m b i	68	68	68	68	68
6	Sumatera Selatan	1.230	1.234	1.238	1.242	1.246
7	Bengkulu	101	115	130	147	167
8	Lampung	3.159	3.376	3.609	3.857	4.122
9	D.K.I Jakarta	12.598	12.640	12.682	12.724	12.766
10	Jawa Barat	1.847	1.853	1.859	1.866	1.872
11	Jawa Tengah	2.154	2.161	2.168	2.175	2.182
12	D.I. Yogyakarta	79	80	80	80	80
13	Jawa Timur	824	827	830	832	835
14	B a l i	88.008	88.186	88.317	88.368	88.559
15	Nusa Tenggara Barat	416	420	424	428	433
16	Nusa Tenggara Timur	29.399	29.693	29.990	30.290	30.442
17	Kalimantan Barat	6.522	6.522	6.522	6.522	6.522
18	Kalimantan Tengah	3.455	3.512	3.571	3.630	3.691
19	Kalimantan Selatan	342	393	452	519	597
20	Kalimantan Timur	2.058	2.081	2.104	2.128	2.152
21	Sulawesi Utara	15.567	15.567	15.567	15.567	15.567
22	Sulawesi Tengah	4.145	4.359	4.584	4.820	5.068
23	Sulawesi Selatan	2.552	2.577	2.603	2.629	2.655
24	Sulawesi Tenggara	925	928	931	934	937
25	Maluku	2.847	2.857	2.866	2.876	2.886
26	Papua	8.600	8.866	9.140	9.423	9.611
27	Bangka Belitung	790	790	791	791	792
28	Banten	980	1.141	1.328	1.545	1.798
29	Gorontalo	67	67	67	67	67
30	Maluku Utara	31	31	32	32	32
31	Riau Kepulauan	6.825	7.730	8.755	9.916	11.231
32	Papua Barat	2.656	3.055	3.513	4.040	4.646
33	Sulawesi Barat	754	863	987	1.130	1.293
<b>INDONESIA</b>		<b>231.658</b>	<b>235.193</b>	<b>238.992</b>	<b>243.064</b>	<b>247.420</b>

**LAMPIRAN 27 :**  
**SASARAN PRODUKSI DAGING AYAM BURAS 2010-2014**

No	Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014
		(Ton)				
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	3.419	3.431	3.441	3.446	3.452
2.	Sumatera Utara	20.062	20.776	21.402	21.689	22.064
3.	Sumatera Barat	5.424	5.617	5.787	5.864	5.966
4.	R i a u	2.681	2.777	2.861	2.899	2.949
5.	Ja m b i	3.277	3.280	3.282	3.283	3.285
6.	Sumatera Selatan	7.444	7.709	7.942	8.048	8.187
7.	Bengkulu	1.697	1.758	1.811	1.835	1.867
8.	Lampung	19.886	20.594	21.215	21.499	21.871
9.	D.K.I Jakarta	6.126	6.562	6.958	7.145	7.392
10.	Jawa Barat	28.621	29.727	30.624	31.134	31.789
11.	Jawa Tengah	35.885	36.013	36.316	36.365	36.428
12.	D.I. Yogyakarta	7.527	7.795	8.030	8.138	8.278
13.	Jawa Timur	75.845	78.573	81.173	82.353	83.777
14.	B a l i	299	300	301	301	302
15.	Nusa Tenggara Barat	8.207	8.499	8.755	8.872	9.026
16.	Nusa Tenggara Timur	8.914	8.946	8.973	8.985	9.000
17.	Kalimantan Barat	6.592	6.827	7.033	7.127	7.250
18.	Kalimantan Tengah	6.561	6.794	6.999	7.093	7.216
19.	Kalimantan Selatan	6.346	6.664	6.947	7.078	7.250
20.	Kalimantan Timur	2.251	2.259	2.266	2.269	2.273
21.	Sulawesi Utara	2.195	2.202	2.209	2.212	2.216
22.	Sulawesi Tengah	5.007	5.274	5.512	5.623	5.769
23.	Sulawesi Selatan	12.117	12.548	12.927	13.100	13.327
24.	Sulawesi Tenggara	11.410	11.817	12.173	12.336	12.549
25.	Maluku	341	341	342	342	342
26.	Papua	995	995	996	996	996
27.	Bangka Belitung	8.875	9.349	9.772	10.068	10.330
28.	Banten	9.690	10.034	10.337	10.476	10.657
29.	Gorontalo	1.723	1.784	1.838	1.863	1.895
30.	Maluku Utara	8.448	16.260	29.001	39.102	56.671
31.	Riau Kepulauan	676	695	712	719	729
32.	Papua Barat	1.523	1.577	1.625	1.647	1.675
33.	Sulawesi Barat	3.870	3.928	3.978	4.000	4.029
<b>INDONESIA</b>		<b>323.933</b>	<b>341.705</b>	<b>363.536</b>	<b>377.907</b>	<b>400.806</b>

**LAMPIRAN 28 :**  
**SASARAN PRODUKSI DAGING ITIK 2010-2014**

No	Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014
		(Ton)				
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	819	823	826	830	835
2.	Sumatera Utara	3.035	3.159	3.289	3.451	3.671
3.	Sumatera Barat	579	598	618	642	674
4.	R i a u	135	141	146	153	163
5.	Ja m b i	168	168	169	170	171
6.	Sumatera Selatan	686	714	744	780	830
7.	Bengkulu	44	44	44	44	45
8.	Lampung	42	42	42	43	43
9.	D.K.I Jakarta	3.459	3.443	3.487	3.516	3.539
10.	Jawa Barat	4.478	4.632	4.852	5.104	5.401
11.	Jawa Tengah	2.848	2.899	2.966	3.049	3.159
12.	D.I. Yogyakarta	2.317	2.411	2.515	2.639	2.808
13.	Jawa Timur	1.408	1.422	1.436	1.453	1.476
14.	B a l i	170	171	171	171	172
15.	Nusa Tenggara Barat	301	314	327	343	365
16.	Nusa Tenggara Timur	91	94	97	100	105
17.	Kalimantan Barat	72	75	78	82	87
18.	Kalimantan Tengah	393	409	426	447	475
19.	Kalimantan Selatan	1.410	1.468	1.528	1.604	1.706
20.	Kalimantan Timur	115	115	116	116	117
21.	Sulawesi Utara	50	52	54	56	60
22.	Sulawesi Tengah	120	124	128	133	140
23.	Sulawesi Selatan	1.227	1.256	1.286	1.323	1.372
24.	Sulawesi Tenggara	195	225	261	310	385
25.	Maluku	125	130	136	142	151
26.	Papua	70	70	70	71	71
27.	Bangka Belitung	22	23	24	25	26
28.	Banten	3.372	3.510	3.654	3.833	4.079
29.	Gorontalo	44	45	47	50	53
30.	Maluku Utara	21	22	23	24	26
31.	Riau Kepulauan	16	16	16	16	16
32.	Papua Barat	9	9	9	10	11
33.	Sulawesi Barat	715	732	750	771	801
<b>INDONESIA</b>		<b>28.554</b>	<b>29.356</b>	<b>30.333</b>	<b>31.500</b>	<b>33.032</b>

**LAMPIRAN 29 :**  
**SASARAN PRODUKSI SUSU 2010-2014**

No	Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014
		(Ton)				
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	45	43	41	41	40
2.	Sumatera Utara	1.884	1.801	1.749	1.724	1.692
3.	Sumatera Barat	1.796	2.160	2.562	3.017	3.564
4.	R i a u	-	-	-	-	-
5.	Ja m b i	-	-	-	-	-
6.	Sumatera Selatan	237	227	220	217	213
7.	Bengkulu	236	284	337	396	468
8.	Lampung	874	1.566	2.658	4.348	7.208
9.	D.K.I Jakarta	10.140	11.174	12.272	13.488	14.836
10.	Jawa Barat	322.208	310.130	303.090	300.291	296.469
11.	Jawa Tengah	153.099	184.173	218.418	257.206	303.906
12.	D.I. Yogyakarta	10.481	10.553	10.720	10.991	11.246
13.	Jawa Timur	507.545	575.836	648.990	729.156	820.463
14.	B a l i	0	0	1	1	1
15.	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-
16.	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-
17.	Kalimantan Barat	0	0	0	0	0
18.	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-
19.	Kalimantan Selatan	298	333	370	411	457
20.	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-
21.	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
22.	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-
23.	Sulawesi Selatan	4.873	5.862	6.952	8.186	9.673
24.	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
25.	Maluku	-	-	-	-	-
26.	Papua	-	-	-	-	-
27.	Bangka Belitung	-	-	-	-	-
28.	Banten	-	-	-	-	-
29.	Gorontalo	-	-	-	-	-
30.	Maluku Utara	-	-	-	-	-
31.	Riau Kepulauan	-	-	-	-	-
32.	Papua Barat	-	-	-	-	-
33.	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
<b>INDONESIA</b>		<b>1.013.715</b>	<b>1.104.142</b>	<b>1.208.379</b>	<b>1.329.472</b>	<b>1.470.237</b>

**LAMPIRAN 30 :**  
**SASARAN PRODUKSI CABE 2010-2014**

No	Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014
		(Ton)				
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	64.149	66.400	68.700	71.200	73.600
2.	Sumatera Utara	196.347	203.200	210.300	217.700	225.300
3.	Sumatera Barat	46.222	47.800	49.500	51.300	53.000
4.	R i a u	11.942	12.400	12.800	13.200	13.700
5.	J a m b i	17.919	18.500	19.200	19.900	20.600
6.	Sumatera Selatan	34.060	35.200	36.500	37.800	39.100
7.	Bengkulu	58.529	60.500	62.700	64.900	67.200
8.	Lampung	38.602	40.000	41.300	42.800	44.300
9.	Kepulauan Bangka Belitung	6.267	6.500	6.700	6.900	7.200
10.	Kepulauan Riau	3.579	3.700	3.800	4.000	4.200
11.	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12.	Jawa Barat	245.597	254.300	262.900	272.100	282.000
13.	Jawa Tengah	194.971	201.800	208.800	216.200	223.700
14.	DI Yogyakarta	15.095	15.600	16.200	16.800	17.400
15.	Jawa Timur	213.674	221.500	229.100	236.800	244.900
16.	B a n t e n	7.435	7.700	8.000	8.200	8.500
17.	Bali	25.286	26.100	27.100	28.000	29.000
18.	N T B	18.870	19.500	20.200	20.900	21.600
19.	N T T	5.968	6.100	6.400	6.600	6.800
20.	Kalimantan Barat	6.765	7.000	7.300	7.500	7.700
21.	Kalimantan Tengah	3.601	3.700	3.900	4.000	4.100
22.	Kalimantan Selatan	8.201	8.500	8.800	9.100	9.400
23.	Kalimantan Timur	14.620	15.100	15.700	16.200	16.800
24.	Sulawesi Utara	10.231	10.600	11.000	11.300	11.700
25.	Sulawesi Tengah	13.906	14.400	14.900	15.400	15.900
26.	Sulawesi Selatan	24.898	25.700	26.700	27.600	28.600
27.	Sulawesi Tenggara	7.817	8.100	8.400	8.700	9.000
28.	Gorontalo	17.233	17.800	18.400	19.200	19.800
29.	Sulawesi Barat	3.349	3.500	3.500	3.700	3.800
30.	Maluku	1.234	1.300	1.300	1.400	1.400
31.	Maluku Utara	719	800	800	800	800
32.	Papua	4.300	7.700	8.000	8.300	8.600
33.	Papua Barat	7.478	4.400	4.600	4.800	5.000
<b>INDONESIA</b>		<b>1.328.864</b>	<b>1.375.400</b>	<b>1.423.500</b>	<b>1.473.300</b>	<b>1.524.700</b>

**LAMPIRAN 31 :**  
**SASARAN PRODUKSI BAWANG MERAH 2010-2014**

No	Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014
		(Ton)				
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	3.615	3.700	3.900	4.000	4.100
2.	Sumatera Utara	9.413	9.700	10.100	10.400	10.800
3.	Sumatera Barat	25.058	25.900	26.800	27.700	28.700
4.	R i a u	-	-	-	-	-
5.	J a m b i	1.492	1.500	1.600	1.700	1.700
6.	Sumatera Selatan	74	100	100	100	100
7.	Bengkulu	602	600	600	700	700
8.	Lampung	369	400	400	400	400
9.	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	-
10.	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-
11.	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12.	Jawa Barat	116.396	120.400	124.500	128.900	133.400
13.	Jawa Tengah	506.357	523.400	541.700	560.400	580.200
14.	DI Yogyakarta	19.950	20.600	21.300	22.100	22.900
15.	Jawa Timur	203.739	210.700	217.900	225.600	233.500
16.	B a n t e n	351	400	400	400	400
17.	Bali	10.981	11.400	11.700	12.200	12.600
18.	N T B	104.324	107.900	111.600	115.500	119.500
19.	N T T	3.879	4.000	4.100	4.300	4.400
20.	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-
21.	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-
22.	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-
23.	Kalimantan Timur	35	-	-	-	-
24.	Sulawesi Utara	5.963	6.200	6.400	6.600	6.800
25.	Sulawesi Tengah	10.301	10.700	11.000	11.400	11.800
26.	Sulawesi Selatan	23.276	24.100	24.900	25.800	26.700
27.	Sulawesi Tenggara	646	700	700	700	700
28.	Gorontalo	240	200	300	300	300
29.	Sulawesi Barat	348	400	400	400	400
30.	Maluku	398	400	400	400	500
31.	Maluku Utara	151	200	200	200	200
32.	Papua	477	500	500	600	600
33.	Papua Barat	499	500	500	500	500
<b>INDONESIA</b>		<b>1.048.934</b>	<b>1.084.600</b>	<b>1.122.000</b>	<b>1.161.300</b>	<b>1.201.900</b>



**LAMPIRAN 32 :**  
**SASARAN PRODUKSI KENTANG 2010-2014**

No	Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014
		(Ton)				
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	8.587	8.800	9.100	9.500	9.800
2.	Sumatera Utara	126.203	130.000	134.200	138.900	144.100
3.	Sumatera Barat	31.949	32.900	34.000	35.200	36.500
4.	R i a u	-	-	-	-	-
5.	J a m b i	84.794	87.300	90.200	93.300	96.800
6.	Sumatera Selatan	1.161	1.200	1.200	1.300	1.300
7.	Bengkulu	5.873	6.000	6.200	6.500	6.700
8.	Lampung	842	900	900	900	1.000
9.	Kepulauan Bangka Belitung	-	-	-	-	-
10.	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-
11.	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12.	Jawa Barat	275.101	283.300	292.600	302.800	314.300
13.	Jawa Tengah	265.123	273.100	281.900	291.800	302.800
14.	DI Yogyakarta	116	100	100	100	100
15.	Jawa Timur	115.423	118.900	122.700	127.000	131.800
16.	B a n t e n	-	-	-	-	-
17.	Bali	4.679	4.800	5.000	5.200	5.300
18.	N T B	5.130	5.300	5.500	5.600	5.900
19.	N T T	542	600	600	600	600
20.	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-
21.	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-
22.	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-
23.	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-
24.	Sulawesi Utara	126.210	130.000	134.200	138.900	144.100
25.	Sulawesi Tengah	1.094	1.100	1.200	1.200	1.200
26.	Sulawesi Selatan	7.627	7.900	8.100	8.400	8.700
27.	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
28.	Gorontalo	-	-	-	-	-
29.	Sulawesi Barat	12	-	-	-	-
30.	Maluku	-	-	-	-	-
31.	Maluku Utara	-	-	-	-	-
32.	Papua	256	100	100	100	100
33.	Papua Barat	83	300	300	300	300
<b>INDONESIA</b>		<b>1.060.805</b>	<b>1.092.600</b>	<b>1.128.100</b>	<b>1.167.600</b>	<b>1.211.400</b>

**LAMPIRAN 33 :**  
**SASARAN PRODUKSI MANGGA 2010-2014**

No	Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014
		(Ton)				
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	21.281	30.452	38.874	40.791	42.951
2.	Sumatera Utara	28.132	40.255	51.388	53.923	56.778
3.	Sumatera Barat	7.309	10.459	13.351	14.010	14.752
4.	R i a u	5.341	7.643	9.756	10.237	10.780
5.	J a m b i	2.207	3.158	4.032	4.230	4.454
6.	Sumatera Selatan	8.310	11.891	15.180	15.928	16.772
7.	Bengkulu	3.314	4.742	6.054	6.352	6.689
8.	Lampung	12.480	17.858	22.797	23.921	25.188
9.	Kep Bangka Belitung	2.810	4.021	5.133	5.386	5.671
10.	Kepulauan Riau	2.170	3.105	3.964	4.159	4.380
11.	DKI Jakarta	3.307	4.732	6.041	6.339	6.674
12.	Jawa Barat	137.104	196.188	250.446	262.798	276.713
13.	Jawa Tengah	203.912	291.787	372.484	390.853	411.549
14.	DI Yogyakarta	11.841	16.944	21.630	22.697	23.898
15.	Jawa Timur	416.803	596.422	761.369	798.918	841.221
16.	B a n t e n	15.947	22.819	29.130	30.567	32.185
17.	Bali	28.924	41.389	52.835	55.441	58.376
18.	N T B	104.669	149.776	191.198	200.627	211.250
19.	N T T	68.948	98.661	125.947	132.158	139.156
20.	Kalimantan Barat	1.960	2.805	3.580	3.757	3.956
21.	Kalimantan Tengah	4.576	6.548	8.359	8.771	9.236
22.	Kalimantan Selatan	2.837	4.060	5.182	5.438	5.726
23.	Kalimantan Timur	10.450	14.953	19.089	20.030	21.091
24.	Sulawesi Utara	16.905	24.190	30.880	32.403	34.119
25.	Sulawesi Tengah	19.490	27.889	35.602	37.358	39.336
26.	Sulawesi Selatan	100.935	144.432	184.377	193.470	203.714
27.	Sulawesi Tenggara	25.783	36.894	47.098	49.420	52.037
28.	Gorontalo	4.452	6.371	8.132	8.533	8.985
29.	Sulawesi Barat	8.205	11.741	14.988	15.727	16.560
30.	Maluku	1.776	2.541	3.244	3.404	3.584
31.	Maluku Utara	1.484	2.124	2.711	2.844	2.995
32.	Papua	1.740	2.490	3.178	3.335	3.512
33.	Papua Barat	1.885	2.697	3.443	3.613	3.804
<b>INDONESIA</b>		<b>1.287.287</b>	<b>1.842.036</b>	<b>2.351.473</b>	<b>2.467.440</b>	<b>2.598.092</b>

**LAMPIRAN 34 :**  
**SASARAN PRODUKSI PISANG 2010-2014**

No	Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014
		(Ton)				
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	70.704	78.143	78.619	82.496	86.865
2.	Sumatera Utara	403.391	445.832	448.549	470.670	495.593
3.	Sumatera Barat	100.525	111.101	111.778	117.291	123.502
4.	R i a u	25.244	27.900	28.070	29.454	31.014
5.	J a m b i	48.443	53.540	53.866	56.523	59.515
6.	Sumatera Selatan	218.770	241.787	243.261	255.257	268.773
7.	Bengkulu	17.468	19.306	19.423	20.381	21.461
8.	Lampung	677.781	749.090	753.656	790.824	832.699
9.	Kep Bangka Belitung	5.345	5.907	5.943	6.236	6.567
10.	Kepulauan Riau	2.259	2.497	2.512	2.636	2.775
11.	DKI Jakarta	747	826	831	872	918
12.	Jawa Barat	1.090.777	1.205.538	1.212.886	1.272.702	1.340.092
13.	Jawa Tengah	854.383	944.273	950.028	996.881	1.049.666
14.	DI Yogyakarta	50.829	56.177	56.519	59.306	62.447
15.	Jawa Timur	921.964	1.018.964	1.025.175	1.075.733	1.132.694
16.	B a n t e n	234.887	259.599	261.182	274.063	288.574
17.	Bali	148.845	164.505	165.508	173.670	182.866
18.	N T B	62.799	69.406	69.829	73.273	77.153
19.	N T T	187.911	207.681	208.947	219.252	230.861
20.	Kalimantan Barat	38.230	42.252	42.510	44.606	46.968
21.	Kalimantan Tengah	17.700	19.562	19.681	20.652	21.746
22.	Kalimantan Selatan	77.921	86.119	86.644	90.917	95.731
23.	Kalimantan Timur	113.113	125.014	125.776	131.978	138.967
24.	Sulawesi Utara	65.303	72.174	72.613	76.195	80.229
25.	Sulawesi Tengah	48.167	53.235	53.559	56.201	59.176
26.	Sulawesi Selatan	144.667	159.887	160.862	168.795	177.733
27.	Sulawesi Tenggara	30.384	33.581	33.785	35.452	37.329
28.	Gorontalo	4.963	5.485	5.519	5.791	6.097
29.	Sulawesi Barat	62.438	69.007	69.428	72.852	76.709
30.	Maluku	18.721	20.691	20.817	21.843	23.000
31.	Maluku Utara	2.899	3.204	3.224	3.383	3.562
32.	Papua	2.453	2.711	2.728	2.862	3.014
33.	Papua Barat	5.042	5.572	5.606	5.883	6.194
<b>INDONESIA</b>		<b>5.755.073</b>	<b>6.360.565</b>	<b>6.399.335</b>	<b>6.714.930</b>	<b>7.070.489</b>

**LAMPIRAN 35 :**  
**SASARAN PRODUKSI JERUK 2010-2014**

No	Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014
		(Ton)				
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	21.238	22.151	22.387	23.491	24.735
2.	Sumatera Utara	788.748	822.642	831.427	872.431	918.626
3.	Sumatera Barat	31.740	33.104	33.457	35.107	36.966
4.	R i a u	11.137	11.616	11.740	12.319	12.971
5.	J a m b i	52.212	54.456	55.037	57.751	60.809
6.	Sumatera Selatan	49.763	51.901	52.456	55.043	57.957
7.	Bengkulu	7.068	7.372	7.450	7.818	8.232
8.	Lampung	8.685	9.058	9.155	9.606	10.115
9.	Kep Bangka Belitung	8.710	9.084	9.181	9.634	10.144
10.	Kepulauan Riau	322	336	339	356	375
11.	DKI Jakarta	15	16	16	17	17
12.	Jawa Barat	26.192	27.318	27.609	28.971	30.505
13.	Jawa Tengah	25.773	26.881	27.168	28.507	30.017
14.	DI Yogyakarta	2.042	2.130	2.152	2.259	2.378
15.	Jawa Timur	289.592	302.036	305.262	320.316	337.277
16.	B a n t e n	2.449	2.554	2.582	2.709	2.852
17.	Bali	97.524	101.715	102.801	107.871	113.583
18.	N T B	7.071	7.375	7.454	7.821	8.235
19.	N T T	24.149	25.187	25.456	26.711	28.125
20.	Kalimantan Barat	146.690	152.993	154.627	162.253	170.845
21.	Kalimantan Tengah	7.551	7.875	7.960	8.352	8.794
22.	Kalimantan Selatan	106.233	110.798	111.981	117.504	123.726
23.	Kalimantan Timur	10.744	11.206	11.325	11.884	12.513
24.	Sulawesi Utara	1.868	1.948	1.969	2.066	2.176
25.	Sulawesi Tengah	28.406	29.627	29.943	31.420	33.083
26.	Sulawesi Selatan	31.334	32.680	33.029	34.658	36.494
27.	Sulawesi Tenggara	98.556	102.791	103.889	109.012	114.785
28.	Gorontalo	1.010	1.053	1.065	1.117	1.176
29.	Sulawesi Barat	115.438	120.399	121.684	127.685	134.446
30.	Maluku	2.215	2.310	2.335	2.450	2.580
31.	Maluku Utara	16.227	16.924	17.105	17.949	18.899
32.	Papua	7.256	7.568	7.649	8.026	8.451
33.	Papua Barat	946	987	997	1.046	1.102
<b>INDONESIA</b>		<b>2.028.904</b>	<b>2.116.089</b>	<b>2.138.688</b>	<b>2.244.162</b>	<b>2.362.991</b>

**LAMPIRAN 36 :**  
**SASARAN PRODUKSI DURIAN 2010-2014**

No	Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014
		(Ton)				
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	15.192	17.519	23.651	24.817	26.131
2.	Sumatera Utara	66.487	76.671	103.505	108.610	114.361
3.	Sumatera Barat	22.112	25.499	34.423	36.121	38.034
4.	R i a u	2.374	2.738	3.696	3.878	4.083
5.	J a m b i	7.036	8.114	10.953	11.494	12.102
6.	Sumatera Selatan	13.188	15.208	20.531	21.543	22.684
7.	Bengkulu	5.041	5.813	7.848	8.235	8.671
8.	Lampung	36.682	42.301	57.106	59.922	63.095
9.	Kep Bangka Belitung	2.616	3.017	4.073	4.273	4.500
10.	Kepulauan Riau	2.235	2.577	3.479	3.651	3.844
11.	DKI Jakarta	260	300	405	425	447
12.	Jawa Barat	39.719	45.803	61.834	64.883	68.319
13.	Jawa Tengah	41.765	48.162	65.019	68.225	71.838
14.	DI Yogyakarta	5.383	6.208	8.380	8.793	9.259
15.	Jawa Timur	87.037	100.368	135.497	142.180	149.708
16.	B a n t e n	8.760	10.102	13.637	14.310	15.068
17.	Bali	5.811	6.701	9.046	9.493	9.995
18.	N T B	2.830	3.263	4.406	4.623	4.868
19.	N T T	1.402	1.617	2.183	2.290	2.412
20.	Kalimantan Barat	8.061	9.296	12.549	13.168	13.865
21.	Kalimantan Tengah	10.000	11.532	15.568	16.336	17.200
22.	Kalimantan Selatan	7.609	8.774	11.846	12.430	13.088
23.	Kalimantan Timur	9.639	11.115	15.006	15.746	16.580
24.	Sulawesi Utara	8.265	9.531	12.867	13.501	14.216
25.	Sulawesi Tengah	17.703	20.415	27.560	28.919	30.450
26.	Sulawesi Selatan	36.475	42.062	56.783	59.584	62.739
27.	Sulawesi Tenggara	4.522	5.215	7.040	7.387	7.778
28.	Gorontalo	793	914	1.235	1.295	1.364
29.	Sulawesi Barat	15.335	17.684	23.873	25.051	26.377
30.	Maluku	3.080	3.552	4.795	5.031	5.298
31.	Maluku Utara	1.753	2.022	2.729	2.864	3.015
32.	Papua	974	1.123	1.516	1.591	1.675
33.	Papua Barat	2.000	2.306	3.114	3.267	3.440
<b>INDONESIA</b>		<b>492.139</b>	<b>567.519</b>	<b>766.150</b>	<b>803.935</b>	<b>846.503</b>

**LAMPIRAN 37 :**  
**SASARAN PRODUKSI MANGGIS 2010-2014**

No	Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014
		(Ton)				
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	1.181	1.362	1.430	1.501	1.580
2.	Sumatera Utara	7.751	8.938	9.385	9.848	10.369
3.	Sumatera Barat	4.093	4.720	4.956	5.200	5.476
4.	R i a u	893	1.030	1.081	1.135	1.195
5.	J a m b i	959	1.106	1.161	1.218	1.283
6.	Sumatera Selatan	415	479	502	527	555
7.	Bengkulu	4.442	5.122	5.378	5.644	5.943
8.	Lampung	6.583	7.591	7.971	8.364	8.807
9.	Kep Bangka Belitung	2.377	2.741	2.878	3.020	3.180
10.	Kepulauan Riau	156	180	189	198	209
11.	DKI Jakarta	1	1	1	1	1
12.	Jawa Barat	27.983	32.269	33.883	35.554	37.436
13.	Jawa Tengah	3.260	3.759	3.947	4.142	4.361
14.	DI Yogyakarta	866	999	1.049	1.100	1.159
15.	Jawa Timur	11.238	12.959	13.607	14.278	15.034
16.	B a n t e n	2.369	2.732	2.868	3.010	3.169
17.	Bali	2.236	2.578	2.707	2.841	2.991
18.	N T B	235	271	285	299	314
19.	N T T	14	16	17	18	19
20.	Kalimantan Barat	862	994	1.044	1.095	1.153
21.	Kalimantan Tengah	947	1.092	1.147	1.203	1.267
22.	Kalimantan Selatan	452	521	547	574	605
23.	Kalimantan Timur	314	362	380	399	420
24.	Sulawesi Utara	1.282	1.478	1.552	1.629	1.715
25.	Sulawesi Tengah	1.461	1.685	1.769	1.856	1.955
26.	Sulawesi Selatan	1.235	1.424	1.495	1.569	1.652
27.	Sulawesi Tenggara	88	101	107	112	118
28.	Gorontalo	0	0	0	0	0
29.	Sulawesi Barat	301	347	364	382	403
30.	Maluku	120	138	145	152	161
31.	Maluku Utara	421	485	510	535	563
32.	Papua	0	0	0	0	0
33.	Papua Barat	3	3	4	4	4
<b>INDONESIA</b>		<b>84.538</b>	<b>97.487</b>	<b>102.361</b>	<b>107.409</b>	<b>113.096</b>

**LAMPIRAN 38 :**  
**SASARAN PRODUKSI TEMULAWAK 2010-2014**

No	Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014
		(Ton)				
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	70.398	73.200	76.300	79.800	83.700
2.	Sumatera Utara	146.565	152.400	158.800	166.100	174.400
3.	Sumatera Barat	12.081	12.600	13.100	13.700	14.400
4.	R i a u	262.909	273.400	284.900	297.900	312.800
5.	J a m b i	2.445	57.400	59.800	62.500	65.600
6.	Sumatera Selatan	55.156	118.600	123.600	129.200	135.700
7.	Bengkulu	114.044	359.900	375.100	392.100	411.700
8.	Lampung	17.517	663.300	691.200	722.700	758.800
9.	Kep Bangka Belitung	346.102	18.200	19.000	19.800	20.800
10.	Kepulauan Riau	637.830	2.500	2.600	2.800	2.900
11.	DKI Jakarta	1.635	1.700	1.800	1.900	1.900
12.	Jawa Barat	1.011.910	1.052.400	1.096.600	1.146.500	1.203.800
13.	Jawa Tengah	244.043	8.091.800	8.431.600	8.815.300	9.256.000
14.	DI Yogyakarta	7.780.547	3.333.700	3.473.700	3.631.800	3.813.300
15.	Jawa Timur	3.205.467	11.568.300	12.054.300	12.602.200	13.232.800
16.	B a n t e n	11.123.355	253.800	264.500	276.500	290.300
17.	Bali	-	-	-	-	-
18.	N T B	40.174	41.800	43.500	45.500	47.800
19.	N T T	259.224	269.600	280.900	293.700	308.400
20.	Kalimantan Barat	435.375	452.800	471.800	493.300	517.900
21.	Kalimantan Tengah	23.244	24.200	25.200	26.300	27.700
22.	Kalimantan Selatan	38.137	39.700	41.300	43.200	45.400
23.	Kalimantan Timur	179.229	186.400	194.200	203.100	213.200
24.	Sulawesi Utara	213.883	222.400	231.800	242.300	254.400
25.	Sulawesi Tengah	4.198	73.100	76.100	79.600	83.600
26.	Sulawesi Selatan	70.265	280.000	291.800	305.100	320.300
27.	Sulawesi Tenggara	269.248	105.100	109.500	114.500	120.200
28.	Gorontalo	3.577	4.400	4.500	4.800	5.000
29.	Sulawesi Barat	101.038	3.700	3.900	4.100	4.300
30.	Maluku	134	100	100	200	200
31.	Maluku Utara	-	-	-	-	-
32.	Papua	848	600	600	600	700
33.	Papua Barat	571	900	900	1.000	1.000
<b>INDONESIA</b>		<b>26.671.149</b>	<b>27.738.000</b>	<b>28.903.000</b>	<b>30.218.100</b>	<b>31.729.000</b>

**LAMPIRAN 39 :**  
**SASARAN PRODUKSI TANAMAN ANGGREK 2010-2014**

No	Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014
		(Ton)				
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	1.057	1.089	1.122	1.156	1.191
2.	Sumatera Utara	531.431	547.480	564.014	581.047	598.595
3.	Sumatera Barat	106.988	110.219	113.548	116.977	120.509
4.	R i a u	10.726	11.122	11.532	11.958	12.399
5.	J a m b i	19.358	20.072	20.813	21.581	22.377
6.	Sumatera Selatan	37.343	38.721	40.150	41.631	43.167
7.	Bengkulu	37.667	38.805	39.976	41.184	42.427
8.	Lampung	219.669	226.303	233.137	240.178	247.431
9.	Bangka Belitung	8.219	8.467	8.723	8.986	9.258
10.	Kepulauan Riau	5.778	5.952	6.132	6.317	6.508
11.	DKI Jakarta	1.305.565	1.347.082	1.389.919	1.434.119	1.479.724
12.	Jawa Barat	2.412.619	2.471.487	2.531.791	2.593.567	2.656.850
13.	Jawa Tengah	452.886	469.597	486.926	504.893	523.524
14.	DI Yogyakarta	86.451	89.926	93.541	97.302	101.213
15.	Jawa Timur	3.430.362	3.549.396	3.672.560	3.799.997	3.931.857
16.	B a n t e n	2.189.988	2.238.387	2.287.855	2.338.417	2.390.096
17.	Bali	1.209.106	1.257.712	1.308.272	1.360.865	1.415.571
18.	N T B	5.633	5.803	5.978	6.159	6.345
19.	N T T	-	-	-	-	-
20.	Kalimantan Barat	1.009.599	1.046.853	1.085.482	1.125.536	1.167.069
21.	Kalimantan Tengah	9.706	9.966	10.233	10.507	10.789
22.	Kalimantan Selatan	11.860	12.178	12.504	12.839	13.183
23.	Kalimantan Timur	484.318	503.788	524.040	545.106	567.020
24.	Sulawesi Utara	296.409	307.346	318.688	330.447	342.641
25.	Sulawesi Tengah	71.075	73.932	76.904	79.996	83.212
26.	Sulawesi Selatan	42.057	43.748	45.506	47.336	49.239
27.	Sulawesi Tenggara	28.878	30.039	31.246	32.503	33.809
28.	Gorontalo	1.769	1.822	1.877	1.934	1.993
29.	Sulawesi Barat	1.534	1.580	1.628	1.677	1.728
30.	Maluku	158	164	171	178	185
31.	Maluku Utara	4.660	4.847	5.042	5.245	5.456
32.	Papua Barat	-	-	-	-	-
33.	Papua	17.576	18.459	19.387	20.361	21.384
<b>INDONESIA</b>		<b>14.050.445</b>	<b>14.492.344</b>	<b>14.948.699</b>	<b>15.419.999</b>	<b>15.906.749</b>



**LAMPIRAN 40 :**  
**SASARAN PRODUKSI TANAMAN KRISAN 2010-2014**

No	Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014
		(Ton)				
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	-	-	-	-	-
2.	Sumatera Utara	1.055.405	1.097.621	1.141.526	1.187.187	1.234.675
3.	Sumatera Barat	109.302	112.581	115.958	119.437	123.020
4.	R i a u	2.405	2.465	2.527	2.590	2.655
5.	J a m b i	667	684	701	718	736
6.	Sumatera Selatan	32.061	33.183	34.345	35.547	36.791
7.	Bengkulu	4.102	4.205	4.310	4.417	4.528
8.	Lampung	86.839	89.444	92.127	94.891	97.738
9.	Bangka Belitung	390	399	407	416	425
10.	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-
11.	DKI Jakarta	-	-	-	-	-
12.	Jawa Barat	55.930.892	58.335.920	60.844.365	63.460.673	66.189.482
13.	Jawa Tengah	81.664.611	85.143.523	88.770.638	92.552.267	96.494.993
14.	DI Yogyakarta	1.714.063	1.787.082	1.863.212	1.942.585	2.025.339
15.	Jawa Timur	43.490.166	45.342.847	47.274.452	49.288.344	51.388.027
16.	B a n t e n	120	123	126	129	132
17.	Bali	667.983	690.694	714.178	738.460	763.568
18.	N T B	3.285	3.367	3.451	3.538	3.626
19.	N T T	-	-	-	-	-
20.	Kalimantan Barat	12.495	12.870	13.256	13.654	14.063
21.	Kalimantan Tengah	562	574	587	600	613
22.	Kalimantan Selatan	3.071	3.148	3.226	3.307	3.390
23.	Kalimantan Timur	110.140	113.444	116.848	120.353	123.964
24.	Sulawesi Utara	275.095	286.814	299.032	311.771	325.053
25.	Sulawesi Tengah	5.234	5.365	5.499	5.636	5.777
26.	Sulawesi Selatan	37.781	38.914	40.082	41.284	42.523
27.	Sulawesi Tenggara	25.689	26.460	27.253	28.071	28.913
28.	Gorontalo	-	-	-	-	-
29.	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
30.	Maluku	-	-	-	-	-
31.	Maluku Utara	-	-	-	-	-
32.	Papua Barat	-	-	-	-	-
33.	Papua	612	627	643	659	676
<b>INDONESIA</b>		<b>185.232.970</b>	<b>193.132.355</b>	<b>201.368.750</b>	<b>209.956.535</b>	<b>218.910.706</b>

## LAMPIRAN 41 : PROYEKSI KEBUTUHAN PUPUK SEKTOR PERTANIAN 2010 - 2014

Jenis Pupuk	2010	2011	2012	2013	2014
	(Juta Ton)				
<b>TANAMAN PANGAN:</b>					
UREA	3,4	3,4	3,4	3,5	3,5
SP-36	2,0	2,0	2,1	2,1	2,1
KCL	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
NPK	1,4	1,4	1,5	1,5	1,6
ZA	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
ORGANIK	8,0	8,1	8,1	8,1	8,2
<b>PERKEBUNAN:</b>					
UREA	2,6	2,4	2,3	2,2	2,1
SP-36	1,7	1,7	1,6	1,5	1,4
KCL	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7
NPK	5,8	6,3	6,8	7,3	7,8
ZA	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
ORGANIK	1,5	1,5	1,5	1,6	1,6
<b>HORTIKULTURA:</b>					
UREA	0,6	0,7	0,7	0,7	0,7
SP-36	0,8	0,8	0,8	0,8	0,9
NPK	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0
ZA	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
ORGANIK	0,9	0,9	1,0	1,0	1,0
<b>PETERNAKAN:</b>					
UREA	0,5	0,6	0,6	0,6	0,7
<b>PERIKANAN:</b>					
UREA	0,2	0,1	0,1	-	-
ORGANIK	1,5	1,7	1,8	2,0	2,2

## PERKIRAAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2010 - 2014

Jenis Pupuk	2010	2011	2012	2013	2014
	(Juta Ton)				
UREA	6,00	5,80	5,60	5,40	5,20
NPK	1,00	0,97	0,80	1,00	1,00
ZA	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
NPK	2,20	2,50	3,00	3,50	4,00
ORGANIK	0,91	1,10	1,30	0,91	0,91
<b>JUMLAH</b>	<b>11,06</b>	<b>11,32</b>	<b>11,65</b>	<b>11,76</b>	<b>12,06</b>

**LAMPIRAN 42 : TARGET PERLUASAN AREAL PERTANIAN 2 JUTA HA TAHUN 2010-2014  
UNTUK LAHAN SAWAH 250.000 HA**

No	Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	Jumlah
		(Ha)					
1.	Nanggro Aceh Darusalam	800	8.000	10.100	10.100	7.800	16.836
2.	Sumatera Utara	550	3.200	2.200	1.700	3.000	8.749
3.	Sumatera Barat	700	850	2.250	2.300	1.100	10.735
4.	Riau	950	2.500	4.650	1.550	1.500	13.602
5.	Jambi	200	1.700	3.000	3.500	3.400	7.251
6.	Sumatera Selatan	600	3.700	7.200	6.800	7.000	12.728
7.	Bengkulu	100	1.500	1.150	950	1.200	2.673
8.	Lampung	400	2.700	2.150	3.100	3.500	5.869
9.	D.K.I Jakarta						-
10.	Jawa Barat	50	0	200	0	0	1.515
11.	Jawa Tengah						-
12.	D.I Yogyakarta						-
13.	Jawa Timur						-
14.	Bali						-
15.	Nusa Tenggara Barat	200	1.000	4.700	4.200	4.500	1.647
16.	Nusa Tenggara Timur	300	2.350	5.000	5.200	4.450	4.119
17.	Kalimantan Barat	700	3.100	6.150	9.350	8.200	13.468
18.	Kalimantan Tengah	620	2.700	5.550	5.750	5.700	11.109
19.	Kalimantan Selatan	900	2.100	3.400	2.800	4.300	10.978
20.	Kalimantan Timur	850	2.750	5.750	8.950	9.500	16.416
21.	Sulawesi Utara	0	600	500	200	300	2.750
22.	Sulawesi Tengah	1.000	2.550	3.200	1.650	2.100	14.628
23.	Sulawesi Selatan	590	2.700	7.350	8.300	8.200	6.025
24.	Sulawesi Tenggara	800	5.200	4.850	4.200	3.100	15.434
25.	Maluku	300	2.500	2.800	3.600	4.600	11.882
26.	Papua	500	2.600	4.850	4.100	3.900	13.120
27.	Bangka Belitung	300	1.600	2.950	4.100	4.900	4.442
28.	Banten						750
29.	Gorontalo	100	1.300	1.000	650	700	2.793
30.	Maluku Utara	0	2.150	2.950	3.100	3.650	12.226
31.	Riau Kepulauan	0	100	100	100	100	-
32.	Papua Barat	115	850	1.850	2.500	2.500	11.113
33.	Sulawesi Barat	400	1.700	4.800	1.250	800	17.144
<b>INDONESIA</b>		<b>12.025</b>	<b>62.000</b>	<b>100.650</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>374.675</b>

**LAMPIRAN 42 : TARGET PERLUASAN AREAL PERTANIAN 2 JUTA HA TAHUN 2010-2014  
UNTUK LAHAN KERING 400.000 HA**

No	Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	Jumlah
		(Ha)					
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	-	4.000	4.500	4.500	4.500	17.500
2.	Sumatera Utara	-	4.000	3.500	3.500	3.500	14.500
3.	Sumatera Barat	-	3.500	3.000	3.000	3.000	12.500
4.	R i a u	-	4.500	5.000	5.000	5.000	19.500
5.	Ja m b i	-	4.000	3.500	3.500	3.500	14.500
6.	Sumatera Selatan	-	3.500	3.500	3.500	3.500	14.000
7.	Bengkulu	-	3.500	3.500	3.500	3.500	14.000
8.	Lampung	-	3.500	3.500	3.500	3.500	14.000
9.	D.K.I Jakarta	-	-	-	-	-	-
10.	Jawa Barat	50	-	-	-	-	50
11.	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-
12.	D.I. Yogyakarta	60	-	-	-	-	60
13.	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-
14.	B a l i	-	-	-	-	-	-
15.	Nusa Tenggara Barat	200	2.960	3.000	3.000	3.000	12.160
16.	Nusa Tenggara Timur	300	2.960	3.000	3.000	3.000	12.260
17.	Kalimantan Barat	50	4.000	4.000	4.000	4.000	16.050
18.	Kalimantan Tengah	-	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
19.	Kalimantan Selatan	-	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
20.	Kalimantan Timur	-	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
21.	Sulawesi Utara	-	4.000	3.500	3.500	3.500	14.500
22.	Sulawesi Tengah	-	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
23.	Sulawesi Selatan	-	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
24.	Sulawesi Tenggara	-	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
25.	Maluku	-	4.000	4.500	4.500	4.500	17.500
26.	Papua	-	9.000	10.000	10.000	10.000	39.000
27.	Bangka Belitung	-	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
28.	Banten	40	-	-	-	-	40
29.	Gorontalo	200	3.000	3.000	3.000	3.000	12.200
30.	Maluku Utara	-	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
31.	Riau Kepulauan	-	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
32.	Papua Barat	150	4.530	5.000	5.000	5.000	19.680
33.	Sulawesi Barat	-	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
<b>INDONESIA</b>		<b>1.050</b>	<b>98.950</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>400.000</b>

**LAMPIRAN 43 : TARGET PERLUASAN AREAL PERTANIAN 2 JUTA HA TAHUN 2010-2014  
UNTUK LAHAN HORTIKULTURA 400.000 HA**

No	Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	Jumlah
		(Ha)					
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	100	3.500	3.500	3.500	3.500	14.100
2.	Sumatera Utara	160	3.000	3.500	3.500	3.500	13.660
3.	Sumatera Barat	50	2.500	2.500	2.500	2.500	10.050
4.	R i a u	130	5.000	5.000	5.000	5.000	20.130
5.	Ja m b i	180	3.000	3.500	3.500	3.500	13.680
6.	Sumatera Selatan	100	3.000	3.400	3.400	3.400	13.300
7.	Bengkulu	110	3.000	3.400	3.400	3.400	13.310
8.	Lampung	60	3.000	3.400	3.400	3.400	13.260
9.	D.K.I Jakarta	-	-	-	-	-	-
10.	Jawa Barat	110	800	800	800	800	3.310
11.	Jawa Tengah	130	800	800	800	800	3.330
12.	D.I. Yogyakarta	-	275	300	300	300	1.175
13.	Jawa Timur	300	1.000	1.000	1.000	1.000	4.300
14.	B a l i	30	300	300	300	300	1.230
15.	Nusa Tenggara Barat	50	2.900	2.900	2.900	2.900	11.650
16.	Nusa Tenggara Timur	100	2.900	2.900	2.900	2.900	11.700
17.	Kalimantan Barat	50	4.000	4.000	4.000	4.000	16.050
18.	Kalimantan Tengah	75	4.500	4.500	4.500	4.500	18.075
19.	Kalimantan Selatan	100	4.500	4.500	4.500	4.500	18.100
20.	Kalimantan Timur	130	4.500	4.500	4.500	4.500	18.130
21.	Sulawesi Utara	100	3.000	4.000	4.000	4.000	15.100
22.	Sulawesi Tengah	140	4.000	4.000	4.000	4.000	16.140
23.	Sulawesi Selatan	140	4.000	4.000	4.000	4.000	16.140
24.	Sulawesi Tenggara	150	4.000	4.000	4.000	4.000	16.150
25.	Maluku	80	4.000	4.000	4.000	4.000	16.080
26.	Papua	130	8.000	8.000	8.000	8.000	32.130
27.	Bangka Belitung	60	1.000	1.000	1.000	1.000	4.060
28.	Banten	25	300	300	300	300	1.225
29.	Gorontalo	150	1.700	2.000	2.000	2.000	7.850
30.	Maluku Utara	-	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
31.	Riau Kepulauan	105	1.000	1.000	1.000	1.000	4.105
32.	Papua Barat	130	4.500	4.500	4.500	4.500	18.130
33.	Sulawesi Barat	350	4.500	4.500	4.500	4.500	18.350
<b>INDONESIA</b>		<b>3.525</b>	<b>96.475</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>400.000</b>

**LAMPIRAN 44 : TARGET PERLUASAN AREAL 2 JUTA HA TAHUN 2010-2014  
UNTUK LAHAN PERKEBUNAN 585.430 HA**

No	Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	Jumlah
		(Ha)					
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	600	7.405	7.500	7.500	7.500	30.505
2.	Sumatera Utara	475	4.000	4.000	4.000	4.000	16.475
3.	Sumatera Barat	575	4.000	4.000	4.000	4.000	16.575
4.	R i a u	525	7.000	7.000	7.000	7.000	28.525
5.	Ja m b i	500	5.000	5.000	5.000	5.000	20.500
6.	Sumatera Selatan	475	5.000	5.000	5.000	5.000	20.475
7.	Bengkulu	550	5.000	5.000	5.000	5.000	20.550
8.	Lampung	200	5.000	5.000	5.000	5.000	20.200
9.	D.K.I Jakarta	-	-	-	-	-	-
10.	Jawa Barat	50	1.000	1.000	1.000	1.000	4.050
11.	Jawa Tengah	-	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
12.	D.I. Yogyakarta	-	300	300	300	300	1.200
13.	Jawa Timur	75	1.000	1.000	1.000	1.000	4.075
14.	B a l i	-	200	200	200	200	800
15.	Nusa Tenggara Barat	475	3.000	3.000	3.000	3.000	12.475
16.	Nusa Tenggara Timur	950	3.000	3.000	3.000	3.000	12.950
17.	Kalimantan Barat	200	6.500	6.500	6.500	6.500	26.200
18.	Kalimantan Tengah	850	6.500	6.500	6.500	6.500	26.850
19.	Kalimantan Selatan	550	6.500	6.500	6.500	6.500	26.550
20.	Kalimantan Timur	-	6.500	6.500	6.500	6.500	26.000
21.	Sulawesi Utara	475	3.000	3.000	3.000	3.000	12.475
22.	Sulawesi Tengah	550	6.500	6.500	6.500	6.500	26.550
23.	Sulawesi Selatan	575	6.500	6.500	6.500	6.500	26.575
24.	Sulawesi Tenggara	450	6.500	6.500	6.500	6.500	26.450
25.	Maluku	-	6.500	6.500	6.500	6.500	26.000
26.	Papua	50	11.100	11.100	11.100	11.100	44.450
27.	Bangka Belitung	150	1.000	1.000	1.000	1.000	4.150
28.	Banten	-	300	300	300	300	1.200
29.	Gorontalo	275	3.000	3.000	3.000	3.000	12.275
30.	Maluku Utara	150	6.500	6.500	6.500	6.500	26.150
31.	Riau Kepulauan	-	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
32.	Papua Barat	-	7.365	7.450	7.450	7.460	29.725
33.	Sulawesi Barat	475	6.500	6.500	6.500	6.500	26.475
<b>INDONESIA</b>		<b>10.200</b>	<b>143.670</b>	<b>143.850</b>	<b>143.850</b>	<b>143.860</b>	<b>585.430</b>

**LAMPIRAN 45 : TARGET PERLUASAN AREAL PERTANIAN 2 JUTA HA TAHUN 2010-2014  
UNTUK LAHAN KEBUN HIJAUAN MAKANAN TERNAK (HMT) 351.000 HA**

No	Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	Jumlah
		(Ha)					
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	285	4.000	3.695	3.400	3.400	14.780
2.	Sumatera Utara	155	3.000	3.000	3.000	3.000	12.155
3.	Sumatera Barat	180	2.500	2.500	2.500	2.500	10.180
4.	R i a u	160	4.000	3.500	3.500	3.500	14.660
5.	Ja m b i	180	3.000	3.000	3.000	3.000	12.180
6.	Sumatera Selatan	340	3.000	3.000	3.000	3.000	12.340
7.	Bengkulu	180	3.000	3.000	3.000	3.000	12.180
8.	Lampung	170	3.000	3.000	3.000	3.000	12.170
9.	D.K.I Jakarta	-	-	-	-	-	-
10.	Jawa Barat	150	1.000	1.000	1.000	1.000	4.150
11.	Jawa Tengah	170	1.000	1.000	1.000	1.000	4.170
12.	D.I. Yogyakarta	-	500	500	500	500	2.000
13.	Jawa Timur	150	1.000	1.000	1.000	1.000	4.150
14.	B a l i	250	200	200	200	200	1.050
15.	Nusa Tenggara Barat	255	2.000	2.000	2.000	2.000	8.255
16.	Nusa Tenggara Timur	350	2.700	2.700	2.700	2.700	11.150
17.	Kalimantan Barat	150	3.500	3.500	3.500	3.500	14.150
18.	Kalimantan Tengah	130	4.000	3.500	3.500	3.500	14.630
19.	Kalimantan Selatan	430	3.900	3.500	3.500	3.500	14.830
20.	Kalimantan Timur	260	4.000	3.500	3.500	3.500	14.760
21.	Sulawesi Utara	-	3.000	2.500	2.500	2.500	10.500
22.	Sulawesi Tengah	160	3.500	3.500	3.500	3.500	14.160
23.	Sulawesi Selatan	250	3.500	3.500	3.500	3.500	14.250
24.	Sulawesi Tenggara	170	3.500	3.500	3.500	3.500	14.170
25.	Maluku	75	3.500	3.500	3.500	3.500	14.075
26.	Papua	300	9.000	8.000	8.000	8.000	33.300
27.	Bangka Belitung	-	400	400	400	400	1.600
28.	Banten	-	400	400	400	400	1.600
29.	Gorontalo	220	2.500	2.000	2.000	2.000	8.720
30.	Maluku Utara	75	3.500	3.500	3.500	3.500	14.075
31.	Riau Kepulauan	50	400	400	400	400	1.650
32.	Papua Barat	340	4.000	3.500	3.500	3.500	14.840
33.	Sulawesi Barat	120	3.500	3.500	3.500	3.500	14.120
<b>INDONESIA</b>		<b>5.705</b>	<b>90.000</b>	<b>85.295</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>351.000</b>

**LAMPIRAN 46 : TARGET PERLUASAN AREAL PERTANIAN 2 JUTA HA TAHUN 2010-2014  
UNTUK LAHAN PADANG PENGEMBANGAN 13.570 HA**

No	Provinsi	2010	2011	2012	2013	2014	Jumlah
		(Ha)					
1.	Nanggroe Aceh Darussalam	80	100	150	150	125	605
2.	Sumatera Utara	-	100	100	100	100	400
3.	Sumatera Barat	40	75	100	100	75	390
4.	R i a u	-	125	200	200	150	675
5.	Ja m b i	-	100	100	100	100	400
6.	Sumatera Selatan	-	100	100	100	100	400
7.	Bengkulu	-	100	100	100	100	400
8.	Lampung	-	100	100	100	100	400
9.	D.K.I Jakarta						-
10.	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-
11.	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-
12.	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-
13.	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-
14.	B a l i	-	-	-	-	-	-
15.	Nusa Tenggara Barat	160	75	100	100	75	510
16.	Nusa Tenggara Timur	260	75	100	100	75	610
17.	Kalimantan Barat	-	100	175	175	100	550
18.	Kalimantan Tengah	40	100	175	175	100	590
19.	Kalimantan Selatan	-	100	175	175	100	550
20.	Kalimantan Timur	80	100	175	175	100	630
21.	Sulawesi Utara	-	100	100	100	75	375
22.	Sulawesi Tengah	120	100	200	200	100	720
23.	Sulawesi Selatan	80	100	175	175	100	630
24.	Sulawesi Tenggara	120	100	200	200	100	720
25.	Maluku	-	100	175	175	100	550
26.	Papua	50	250	375	375	250	1,300
27.	Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-
28.	Banten	-	-	-	-	-	-
29.	Gorontalo	-	100	100	100	75	375
30.	Maluku Utara	-	100	175	175	100	550
31.	Riau Kepulauan	-	-	-	-	-	-
32.	Papua Barat	40	100	200	200	100	640
33.	Sulawesi Barat	-	100	200	200	100	600
<b>INDONESIA</b>		<b>1.070</b>	<b>2.500</b>	<b>3.750</b>	<b>3.750</b>	<b>2.500</b>	<b>13.570</b>



## LAMPIRAN 47 : SUSUNAN POLA KONSUMSI PANGAN TAHUN 2010 - 2014

No	Kelompok Pangan	2010		
		gram/kap/hari	kilo gram/kap/thn	ton/thn (000)
1.	<i>Padi-padian</i>	305,5	111,5	26.038
	Beras	277,1	101,1	23.611
	Jagung	8,2	3,0	3.0
	Terigu	20,3	7,4	1.729
2.	<i>Umbi-umbian</i>	71,4	25,4	5.925
	Singkong	50,4	18,4	4.295
	Ubi jalar	11,1	4,1	946
	Kentang	7,0	2,6	596
	Sagu	1,0	0,4	88
	Umbi lainnya	1,9	0,7	158
3.	<i>Pangan hewani</i>	130,5	47,6	11.122
	Daging ruminansia	7,5	2,7	636
	Daging unggas	16,3	5,9	1.389
	Telur	25,0	9,1	2.134
	Susu	5,8	2,1	492
	Ikan	75,9	27,7	6.471
4.	<i>Minyak dan Lemak</i>	22,4	8,1	1.880
	Minyak kelapa	10,2	3,7	873
	Minyak sawit	11,8	4,3	1.008
	Minyak lainnya	0,4	0,1	32
5.	<i>Buah/Biji berminyak</i>	10,0	3,7	852
	Kelapa	8,9	3,2	756
	Kemiri	1,1	0,4	96
6.	<i>Kacang-kacangan</i>	33,4	11,9	2.779
	Kedele	26,8	9,8	2.284
	Kacang tanah	3,0	1,1	251
	Kacang hijau	2,9	1,0	244
	Kacang lainnya	0,8	0,3	69
7.	<i>Gula</i>	29,0	10,6	2.471
	Gula pasir	25,9	9,4	2.204
	Gula merah	3,1	1,1	267
8.	<i>Sayuran dan buah</i>	225,6	82,3	19.226
	Sayur	145,3	53,0	12.385
	Buah	80,3	29,3	6.841
Jumlah Penduduk				233.477.400

## LAMPIRAN 47 (lanjutan) SUSUNAN POLA KONSUMSI PANGAN TAHUN 2010 - 2014

No	Kelompok Pangan	2011		
		gram/kap/hari	kilo gram/kap/thn	ton/thn (000)
1.	<i>Padi-padian</i>	300,1	109,5	25.889
	Beras	272,1	99,3	23.476
	Jagung	8,0	2,9	694
	Terigu	19,9	7,3	1.719
2.	<i>Umbi-umbian</i>	74,1	26,3	6.226
	Singkong	52,3	19,1	4.514
	Ubi jalar	11,5	4,2	995
	Kentang	7,3	2,6	626
	Sagu	1,1	0,4	92
	Umbi lainnya	1,9	0,7	166
3.	<i>Pangan hewani</i>	136,9	50,0	11.810
	Daging ruminansia	7,8	2,9	675
	Daging unggas	17,1	6,2	1.474
	Telur	26,3	9,6	2.266
	Susu	6,1	2,2	523
	Ikan	79,7	29,1	6.872
4.	<i>Minyak dan Lemak</i>	22,4	8,0	1.900
	Minyak kelapa	10,2	3,7	882
	Minyak sawit	11,8	4,3	1.018
	Minyak lainnya	0,4	0,1	33
5.	<i>Buah/Biji berminyak</i>	10,0	3,7	863
	Kelapa	8,9	3,2	765
	Kemiri	1,1	0,4	97
6.	<i>Kacang-kacangan</i>	34,6	12,3	2.909
	Kedele	27,7	10,1	2.391
	Kacang tanah	3,1	1,1	263
	Kacang hijau	3,0	1,1	255
	Kacang lainnya	0,8	0,3	72
7.	<i>Gula</i>	29,1	10,6	2.509
	Gula pasir	25,9	9,5	2.238
	Gula merah	3,1	1,1	271
8.	<i>Sayuran dan buah</i>	151,6	84,5	19.983
	Sayur	148,8	54,3	12.843
	Buah	82,8	30,2	7.140
Jumlah Penduduk				236.331.300

## LAMPIRAN 47 (lanjutan) SUSUNAN POLA KONSUMSI PANGAN TAHUN 2010 - 2014

No	Kelompok Pangan	2012		
		gram/kap/hari	kilo gram/kap/thn	ton/thn (000)
1.	<i>Padi-padian</i>	294,7	107,6	25.727
	Beras	267,2	97,5	23.329
	Jagung	7,9	2,9	690
	Terigu	19,6	7,1	1.708
2.	<i>Umbi-umbian</i>	76,8	27,3	6.533
	Singkong	54,2	19,8	4.736
	Ubi jalar	12,0	4,4	1.043
	Kentang	7,5	2,7	657
	Sagu	1,1	0,4	97
	Umbi lainnya	2,0	0,7	174
3.	<i>Pangan hewani</i>	143,3	52,3	12.512
	Daging ruminansia	8,2	3,0	715
	Daging unggas	17,9	6,5	1.562
	Telur	27,5	10,0	2.400
	Susu	6,3	2,3	554
	Ikan	83,4	30,4	7.280
4.	<i>Minyak dan Lemak</i>	22,4	8,0	1.919
	Minyak kelapa	10,2	3,7	899
	Minyak sawit	11,8	4,3	1.028
	Minyak lainnya	0,4	0,1	33
5.	<i>Buah/Biji berminyak</i>	10,0	3,7	873
	Kelapa	8,9	3,2	775
	Kemiri	1,1	0,4	98
6.	<i>Kacang-kacangan</i>	35,0	12,5	2.982
	Kedele	28,1	10,2	2.450
	Kacang tanah	3,1	1,1	270
	Kacang hijau	3,0	1,1	262
	Kacang lainnya	0,8	0,3	74
7.	<i>Gula</i>	29,2	10,6	2.547
	Gula pasir	26,0	9,5	2.272
	Gula merah	3,2	1,2	275
8.	<i>Sayuran dan buah</i>	237	86,7	20.747
	Sayur	152	55,6	13.308
	Buah	85	31,1	7.439
Jumlah Penduduk				239.174.300

## LAMPIRAN 47 (lanjutan) SUSUNAN POLA KONSUMSI PANGAN TAHUN 2010 - 2014

No	Kelompok Pangan	2013		
		gram/kap/hari	kilo gram/kap/thn	ton/thn (000)
1.	<i>Padi-padian</i>	289,3	105,6	25,55
	Beras	262,3	95,7	23.172
	Jagung	7,8	2,8	685
	Terigu	19,2	7,0	1.697
2.	<i>Umbi-umbian</i>	79,6	28,3	6.845
	Singkong	56,2	20,5	4.962
	Ubi jalar	12,4	4,5	1.093
	Kentang	7,8	2,8	688
	Sagu	1,1	0,4	101
	Umbi lainnya	2,1	0,8	182
3.	<i>Pangan hewani</i>	149,7	54,7	13.226
	Daging ruminansia	8,6	3,1	756
	Daging unggas	18,7	6,8	1.651
	Telur	28,7	10,5	2.537
	Susu	6,6	2,4	585
	Ikan	87,1	31,8	7.696
4.	<i>Minyak dan Lemak</i>	22,3	8,0	1.938
	Minyak kelapa	10,2	3,7	900
	Minyak sawit	11,8	4,3	1.038
	Minyak lainnya	0,4	0,1	33
5.	<i>Buah/Biji berminyak</i>	10,0	3,7	883
	Kelapa	8,9	3,2	784
	Kemiri	1,1	0,4	100
6.	<i>Kacang-kacangan</i>	35,0	12,5	3.017
	Kedele	28,1	10,2	2.479
	Kacang tanah	3,1	1,1	273
	Kacang hijau	3,0	1,1	265
	Kacang lainnya	0,8	0,3	75
7.	<i>Gula</i>	29,3	10,7	2.585
	Gula pasir	26,1	9,5	2.306
	Gula merah	3,2	1,2	280
8.	<i>Sayuran dan buah</i>	244,0	89,0	21.551
	Sayur	156,0	57,0	13.806
	Buah	88,0	32,0	7.745
Jumlah Penduduk				242.013.800

## LAMPIRAN 47 (lanjutan) SUSUNAN POLA KONSUMSI PANGAN TAHUN 2010 - 2014

No	Kelompok Pangan	2014		
		gram/kap/hari	kilo gram/kap/thn	ton/thn (000)
1.	<i>Padi-padian</i>	283,9	103,6	25.366
	Beras	257,4	94,0	23.001
	Jagung	7,6	2,8	680
	Terigu	18,8	6,9	1.684
2.	<i>Umbi-umbian</i>	82,3	29,3	7.161
	Singkong	58,1	21,2	5.191
	Ubi jalar	12,8	4,7	1.144
	Kentang	8,1	2,9	720
	Sagu	1,2	0,4	106
	Umbi lainnya	2,1	0,8	191
3.	<i>Pangan hewani</i>	156,1	57,0	13.952
	Daging ruminansia	8,9	3,3	798
	Daging unggas	19,5	7,1	1.742
	Telur	30,0	10,9	2.677
	Susu	6,9	2,5	618
	Ikan	90,9	33,2	8.118
4.	<i>Minyak dan Lemak</i>	22,3	8,0	1.957
	Minyak kelapa	10,2	3,7	908
	Minyak sawit	11,7	4,3	1.048
	Minyak lainnya	0,4	0,1	34
5.	<i>Buah/Biji berminyak</i>	10,0	3,7	894
	Kelapa	8,9	3,2	793
	Kemiri	1,1	0,4	101
6.	<i>Kacang-kacangan</i>	35,0	12,5	3.052
	Kedele	28,1	10,2	2.508
	Kacang tanah	3,1	1,1	276
	Kacang hijau	3,0	1,1	268
	Kacang lainnya	0,8	0,3	75
7.	<i>Gula</i>	29,4	10,7	2.623
	Gula pasir	26,2	9,6	2.340
	Gula merah	3,2	1,2	284
8.	<i>Sayuran dan buah</i>	250,0	74,8	18.318
	Sayur	130,4	47,6	11.653
	Buah	74,6	27,2	6.665
Jumlah Penduduk				244.814.900

**LAMPIRAN 48 :**  
**RANCANGAN PENGEMBANGAN INDUSTRI HILIR PERTANIAN**

Komoditas	Rencana Aksi dan Sasaran	Lokasi
<b>Beras</b>  <b>(peningkatan rendemen dan peningkatan mutu beras)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Sistem Informasi Pasar</li> <li>• Pengembangan Pemasaran Beras Berlabel</li> <li>• Pemantauan penerapan HPP/ stabilisasi harga</li> <li>• Fasilitasi Sarana Pergudangan dan Distribusi</li> <li>• Pengembangan Kelembagaan Pemasaran</li> <li>• Pengembangan Jaringan dan Manajemen Stok Beras</li> <li>• Revitalisasi Penggilingan Padi</li> <li>• Penerapan sistem jaminan mutu</li> </ul>	Beras organik:  OKU Timur, Lampung Tengah, Karawang, Subang, Jombang, Tasikmalaya, Pinrang, Sidrap, Bone, Sragen, Cianjur, Temanggung, Sidoarjo Beras konsumsi dalam negeri: NAD, Sumut, Sumbar, Sumsel, Lampung, Jabar, Jateng, DIY, Jatim, NTB, Sulsel, Kalsel, Bali, Banten
<b>Tepung lokal</b>  <b>(5% substitusi impor)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan agroindustri aneka tepung berbahan baku lokal (aneka umbi)</li> <li>• Pengembangan agroindustri aneka tepung berbahan baku lokal (aneka umbi)</li> <li>• Pengembangan sistem informasi pasar</li> <li>• Pemantauan Pasar</li> <li>• Fasilitasi Sarana Pergudangan dan Distribusi</li> <li>• Pengembangan Kelembagaan Pemasaran</li> <li>• Penguatan Jaringan Pemasaran</li> <li>• penerapan sistem jaminan mutu</li> </ul>	Indragiri Hilir, Seram Bagian Barat, Waropen, Riau, Trenggalek, Gunungkidul, Lampung, Garut, Pacitan, Malang, Tulungagung
<b>Pengembangan pengolahan jagung untuk pangan (grits dan tepung) dan pakan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan agroindustri jagung</li> <li>• Fasilitasi Sarana Pergudangan dan Distribusi</li> <li>• Pengembangan Kelembagaan Pemasaran</li> <li>• Pengembangan Jaringan Pemasaran</li> <li>• Pengembangan sistem jaminan mutu</li> </ul>	Simalungun, Lampung Selatan, Kuningan, Ciamis, Cirebon, Wonogiri, Gunung Kidul, Lamongan, NTB, Kupang, Bolaang Mongondow, Boalemo, Bone

Komoditas	Rencana Aksi dan Sasaran	Lokasi
<b>Kedele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan sistem informasi pasar</li> <li>• Pemantauan Pasar</li> <li>• penerapan sistem jaminan mutu</li> <li>• Peningkatan unit usaha pengolahan kedele</li> <li>• Fasilitasi Sarana Pergudangan dan Distribusi</li> <li>• Pengembangan sistem jaminan mutu</li> </ul>	Bireun, Deli Serdang, Pasaman Barat, Rokan Hilir, Tanjung Jabung Timur, Empat Lawang, Lampung Timur, Garut, Sukoharjo, Bantul, Lamongan, Lombok Tengah, Bone
<b>Buah tropika (Pertumbuhan ekspor 15% tahun)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Kelembagaan Pemasaran</li> <li>• Pengembangan sistem informasi pasar</li> <li>• Pemantauan Pasar</li> <li>• penerapan sistem jaminan mutu</li> <li>• Pengembangan unit pengolahan hasil (nata, puree, sari buah, selai, jelli, pati/ tepung, dodol, squash) skala kecil dan menengah</li> <li>• Fasilitasi Sarana Pergudangan dan Distribusi</li> <li>• Pengembangan Kelembagaan Pemasaran</li> <li>• Pengembangan Jaringan</li> <li>• Pengembangan sistem informasi pasar</li> <li>• Pemantauan Pasar</li> <li>• penerapan sistem jaminan mutu</li> </ul>	Cirebon, Indramayu, Probolinggo, Purwakarta, Tasikmalaya, Sleman, Magelang, Gowa, Maros, Karo, Sambas, Ende
<b>Biofarmaka (peningkatan ekspor 20%/thn)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan pengolahan hasil biofarmaka</li> <li>• Pengembangan sistem jaminan mutu</li> <li>• Perluasan pasar dalam negeri dan ekspor</li> <li>• Pengembangan sistem informasi pasar</li> <li>• Pengolahan biofarmaka kering, granule, tepung, minuman, jus, nata, jelli, dan bahan baku obat.</li> </ul>	Semarang, Wonogiri, Karanganyar, Kebumen, Bantul, Madura

Komoditas	Rencana Aksi dan Sasaran	Lokasi
<p><b>Sawit</b></p> <p><b>Sawit (10% peningkatan Ekspor CPO dan produk olahannya)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemantauan Pasar TBS</li> <li>• Pengembangan sistem informasi pasar</li> <li>• Pengembangan agroindustri sawit</li> <li>• pengembangan pasar internasional komoditi hasil olahan sawit</li> <li>• Negosiasi, diplomasi dan promosi sawit</li> <li>• penerapan sistem jaminan mutu</li> </ul>	<p>Aceh, Sumut, Sumbar, Riau, Jambi, Sumsel, Bengkulu, Lampung, Jabar, Banten, Kalbar, Kalsel, Kalteng, Babel, Sulteng, Sulsel, Sulbar, Jabar, Banten, Papua Barat</p>
<p><b>Kakao</b></p> <p><b>(20% kakao fermentasi, 10% dim bentuk olahan)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan agroindustri kakao</li> <li>• Pengembangan sistem informasi pasar</li> <li>• Pengembangan Jaringan Pemasaran</li> <li>• Negosiasi, diplomasi dan promosi kakao</li> <li>• penerapan sistem jaminan mutu</li> </ul>	<p>Sulsel, Sulbar, Sultra, Sulteng, Sumbar, Gorontalo, Bali, NTT, Papua, Kalbar, Jatim</p>
<p><b>Karet</b></p> <p><b>(70% penerapan SNI, 10% peningkatan ekspor)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan agroindustri karet</li> <li>• Pengembangan sistem informasi pasar</li> <li>• Pengembangan Jaringan Pemasaran</li> <li>• Negosiasi, diplomasi dan promosi produk karet</li> <li>• penerapan sistem jaminan mutu</li> </ul>	<p>Muara Enim, Bengkulu Utara, Hulu Sungai Tengah, Kutai Timur, Barito Utara</p>
<p><b>Kopi</b></p> <p><b>(100% sertifikasi kopi specialty dan organik, 15% peningkatan ekspor)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan agroindustri kopi</li> <li>• Pengembangan sistem informasi pasar</li> <li>• Pengembangan Jaringan Pemasaran</li> <li>• Negosiasi, diplomasi dan promosi produk kopi</li> <li>• penerapan sistem jaminan mutu</li> </ul>	<p>Aceh, Sulbar, Sulsel, Sumut, Lampung, Bali, NTB, NTT, Papua, Bengkulu, Jabar, Jateng, Jatim</p>
<p><b>Tebu</b></p> <p><b>(mendukung swasembada gula industri)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan sistem informasi pasar</li> <li>• penerapan sistem jaminan mutu</li> <li>• Pengembangan usaha pengolahan tebu</li> <li>• pengembangan investasi industri gula</li> </ul>	<p>Cirebon, Cilacap, Jombang, Kulonprogo, Lampung Utara, Bone, Gorontalo</p>



Komoditas	Rencana Aksi dan Sasaran	Lokasi
<p><b>Susu</b> <b>(50% substitusi impor)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan agroindustri susu</li> <li>• Fasilitasi Sarana Penyimpanan dan Distribusi</li> <li>• Pengembangan Kelembagaan Pemasaran</li> <li>• Pengembangan Jaringan Pemasaran</li> <li>• Pengembangan Sistem Informasi Pasar</li> <li>• Pemantauan Pasar</li> <li>• Pengembangan sistem jaminan mutu</li> <li>• Pengembangan Sistem Informasi Pasar</li> <li>• Pemantauan Pasar</li> <li>• Fasilitasi Sarana Pergudangan dan Distribusi</li> <li>• Pengembangan Kelembagaan Pemasaran</li> <li>• Pengembangan Jaringan Pemasaran</li> <li>• Pengembangan sistem jaminan mutu</li> <li>• Fasilitasi investasi dan kemitraan pengolahan susu</li> </ul>	<p>Riau, Bengkulu, Jabar, DIY, Jateng, Jatim, Sulsel</p>

**LAMPIRAN 49 :**  
**TARGET PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN 2010-2014**

RENCANA AKSI	INDIKATOR KINERJA
<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PANGAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 59 Varietas unggul baru tanaman pangan</li> <li>2) 47 Inovasi teknologi budidaya, panen dan pasca panen primer tanaman pangan</li> <li>3) 272 Ton Produksi benih sumber padi, serealisa serta kacang &amp; umbi dengan SMM ISO 9001-2008</li> </ol>
<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN HORTIKULTURA</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 91 VUB Hortikultura yg diminati konsumen</li> <li>2) 65 Inovasi teknologi budidaya produksi Hortikultura ramah lingkungan</li> <li>3) Jumlah benih sumber : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 120.000 GO benih kentang, 150.000 Kg benih bawang merah dan sayuran potensial</li> <li>• 81.270 batang benih VUB buah tropika, jeruk &amp; buah sub tropika</li> <li>• 15.000 Planlet benih anggrek dan tanaman hias lain</li> <li>• 1.100.000 stek benih krisan</li> <li>• 1.900.000 benih jeruk bt bwh dan bt atas hsl SE</li> </ul> </li> </ol>
<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TANAMAN PERKEBUNAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 42 Varietas tanaman perkebunan</li> <li>2) 93 Inovasi teknologi tanaman perkebunan</li> <li>3) Benih sumber : <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.547 Ton Benih sumber tanaman perkebunan</li> <li>• 300.000 Planlet tebu dan 8.000.000 Budget G2 tebu</li> </ul> </li> </ol>
<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN DAN VETERINER</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 30 Galur unggul/harapan ternak dan tanaman pakan ternak (TPT) spesifik lokasi</li> <li>2) 4.310 Bibit sumber ternak dan 4600 bibit TPT hewan strategis)</li> <li>3) 19 Rekomendasi kebijakan pembangunan peternakan dan veteriner</li> </ol>

RENCANA AKSI	INDIKATOR KINERJA
<b>PENELITIAN/ANALISIS SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PERTANIAN</b>	60 rekomendasi kebijakan tentang : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan daya saing dan perlindungan usaha pertanian;</li> <li>• Pengelolaan sumberdaya pertanian dan pembangunan infrastruktur pertanian;</li> <li>• Pengembangan kelembagaan dan paraturan mendorong iklim usaha yg kondusif;</li> <li>• Makro ekonomi mendorong pertumbuhan sektor pertanian;</li> <li>• Dinamika pembangunan pertanian dan perdesaan</li> <li>• Isu-isu kebijakan pertanian actual</li> </ul>
<b>PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN PENYEBARAN TEKNOLOGI PERTANIAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 9 Judul publikasi ilmiah yang terdiri atas 41 volume, 98 nomor, 907 artikel</li> <li>2) 100% Perpustakaan lingkup Kemtan menjadi perpustakaan digital</li> <li>3) 5 Database jurnal ilmiah Internasional <i>fulltext</i> yang dilanggan dan diupdate setiap tahun</li> </ol>
<b>PENELITIAN/PEREKAYASAAN DAN PENGEMBANGAN MEKANISASI PERTANIAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 23 Inovasi teknologi, prototipe dan sistem mekanisasi pertanian untuk peningkatan; produktivitas, efisiensi, kualitas, nilai tambah komoditas utama pertanian dan limbahnya</li> <li>2) 10 Bahan rekomendasi kebijakan nasional mekanisasi pertanian</li> </ol>
<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 38 Informasi/peta potensi sumberdaya lahan</li> <li>2) 69 Teknologi pengelolaan tanah, pupuk, iklim dan air, lahan rawa, lingkungan pertanian serta adaptasi dan mitigasi perubahan iklim</li> <li>3) 29 Paket rekomendasi kebijakan pemanfaatan sumberdaya lahan pertanian dan perubahan iklim global</li> </ol>
<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIOTEKNOLOGI DAN SUMBER DAYA GENETIK PERTANIAN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) 1.027 Varietas/galur harapan komoditas pertanian</li> <li>2) 18 Teknologi berbasis bioteknologi</li> </ol>

RENCANA AKSI	INDIKATOR KINERJA
<b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PASCAPANEN PERTANIAN</b>	1) 73 Teknologi penanganan segar dan pengolahan hasil pertanian
PENGKAJIAN DAN PERCEPATAN DISEMINASI INOVASI TEKNOLOGI PERTANIAN	1) 486 Teknologi spesifik lokasi 2) 1.600 Teknologi yang terdiseminasikan ke pengguna

LAMPIRAN 50 :

TARGET PEMBANGUNAN DAN KEBUTUHAN PEMBIAYAAN APBN TAHUN 2010-2014 KEMENTERIAN PERTANIAN

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Milyar Rp)					TOTAL	
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014		
				1	Program Dukungan, Wanaajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian	<p>▲ Meningkatkan pelaksanaan kegiatan Kementerian Pertanian melalui dukungan koordinasi, pembinaan, kerjasama luar negeri dan pelayanan administrasi</p> <p>▲ Meningkatkan pelayanan teknis pertanian terkait penyediaan data dan sistem informasi pertanian, pembiayaan pertanian, perijinan dan investasi pertanian, serta perlindungan varietas tanaman</p>	<p>▲ Persentase dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan</p> <p>▲ Persentase meningkatnya realisasi kegiatan kerjasama luar negeri dalam mendukung pembangunan pertanian baik melalui forum bilateral, regional, multilateral maupun PBB.</p> <p>▲ Persentase dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian yang dapat memenuhi kebutuhan dan menjamin kepastian hukum</p> <p>▲ Persentase sampainya informasi pembangunan pertanian</p> <p>▲ Persentase dokumen di bidang organisasi, ketatausahaan yang dapat dilaksanakan, dan persentase dokumen kepegawaian yang disusun tepat waktu.</p> <p>▲ Persentase peningkatan pengelolaan keuangan dan perlengkapan yang dilaksanakan.</p> <p>▲ Persentase pelayanan data dan sistem informasi pertanian</p> <p>▲ Persentase penyaluran pembiayaan pertanian tepat sasaran</p> <p>▲ Persentase perijinan yang diterbitkan untuk usaha pertanian sesuai pendaftaran</p> <p>▲ Persentase penerbitan hak varietas sesuai pendaftaran</p>	100%	100%	100%	100%	100%	100%		1.417,41

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Milyar Rp)					TOTAL
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
1.1	Koordinasi dan pembinaan perencanaan Kementerian Pertanian	Peningkatan koordinasi dan pembinaan penyusunan rencana kerja kebijakan dan program, anggaran, evaluasi dan pelaporan sesuai siklus perencanaan, serta ketatausahaan Kementerian	Jumlah dokumen dan layanan perencanaan kebijakan dan program, anggaran, evaluasi dan pelaporan serta ketatausahaan Kementerian Pertanian yang disusun tepat waktu, terbib administrasi dan sesuai kebutuhan serta agenda (paket)	4	4	4	4	4	86,67	91,00	95,55	100,33	105,34	478,88
<b>Sub Total</b>									<b>86,67</b>	<b>91,00</b>	<b>95,55</b>	<b>100,33</b>	<b>105,34</b>	<b>478,88</b>
1.2	Pengelolaan keuangan dan perlengkapan departemen serta pemeliharaan sarana dan prasarana kantor pusat Kementerian Pertanian	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan perlengkapan secara akurat dan transparan	Jumlah dokumen penetapan pejabat pengelolaan keuangan dan tugas pembantuan, nota hasil verifikasi, penyelesaian kerugian negara, pembinaan perbendaharaan, pemantauan penerimaan dan realisasi negara bukan pajak (PNBP), pelaporan keuangan dan inventarisasi jumlah aset barang milik negara (paket)	4	4	4	4	4	134,57	141,30	148,37	155,78	163,57	745,60
<b>Sub Total</b>									<b>134,57</b>	<b>141,30</b>	<b>148,37</b>	<b>155,78</b>	<b>163,57</b>	<b>745,60</b>
1.3	Pembinaan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pertanian serta koordinasi humas dan komunikasi publik di bidang pertanian	Tersedianya produk hukum dan perundang-undangan di bidang pertanian, pemyarakatan program pembangunan pertanian melalui berbagai media dan terlaksananya komunikasi publik di bidang informasi pembangunan pertanian,	Jumlah dokumen peraturan perundang-undangan dan laporan evaluasi berita serta analisis pendapat masyarakat, layanan advokasi dan bantuan hukum, pemyarakatan program pembangunan pertanian melalui berbagai media, penyeleenggaraan pameran dan jumlah kegiatan pimpinan Kementerian pertanian serta jumlah asosiasi/LSM/lembaga profesi (paket)	4	4	4	4	4	44,00	46,20	48,51	50,94	53,48	243,13
<b>Sub Total</b>									<b>44,00</b>	<b>46,20</b>	<b>48,51</b>	<b>50,94</b>	<b>53,48</b>	<b>243,13</b>
1.4	Pengembangan kerjasama luar negeri untuk bidang pangan dan pertanian dalam kerangka bilateral, regional, multilateral serta PBB	Peningkatan kerja sama luar negeri di bidang pertanian melalui forum bilateral, regional, multilateral serta PBB	Jumlah kesepakatan dan realisasi kerjasama pembangunan pertanian, keterlibatan forum global bidang pertanian dan lembaga non pemerintah, bantuan yang diterima pemerintah dan usulan/inisiatif yang diajukan, diadopsi dan ditindaklanjuti melalui forum bilateral, regional, multilateral serta PBB (paket)	4	4	4	4	4	16,16	16,97	17,81	18,70	19,64	89,28
<b>Sub Total</b>									<b>16,16</b>	<b>16,97</b>	<b>17,81</b>	<b>18,70</b>	<b>19,64</b>	<b>89,28</b>

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Milyar Rp)					TOTAL
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
1.5	Peningkatan kualitas kelembagaan, keratalaksanaan dan kepegawaian	Penataan kelembagaan, pelayanan administrasi perencanaan dan pengembangan pegawai serta mutasi	Jumlah dokumen koordinasi dan pembinaan penataan kelembagaan, tatalaksana perencanaan dan pengembangan pegawai, mutasi, serta reformasi birokrasi (paket)	4	4	4	4	4	45,24	47,51	49,88	52,37	54,99	250,00
<i>Sub Total</i>									45,24	47,51	49,88	52,37	54,99	250,00
1.6	Pelayaan perizinan dan investasi pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)	Peningkatan penerimaan penyajian bahan analisa, fasilitas proses teknis permohonan ijin, pendaftaran di bidang pupuk, pestisida dan alat mesin pertanian, benih/bibit, produk ternak dan pangan segar serta penyajian bahan pemantauan dan evaluasi	Jumlah ijin usaha pertanian, ijin pemasukan/pengeluaran benih/bibit, obat hewan dan pakan ternak, produk ternak dan agensia hayati, serta rekomendasi produk pangan  Bahan informasi dan bahan kebijakan pengembangan investasi pertanian (publikasi, pameran, bahan analisis untuk kebijakan pertanian)	2.500	2.850	4.200	4.500	5.000	9,36	9,83	10,32	10,83	11,38	51,71
<i>Sub Total</i>									11,61	12,19	12,80	13,44	14,11	64,15
1.7	Pelayaan pembiayaan pertanian, Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) (Prioritas Nasional dan Bidang)	Peningkatan realisasi penyaluran kredit program (KKP-E dan KUR) pembiayaan komersial, pembiayaan syaria, pengembangan sentra usaha pertanian perdesaan, dan pengembangan Gapoktan PUAP	Realisasi penyaluran kredit program untuk pertanian (KKP-E dan KUR)  Realisasi penyaluran pembiayaan syaria dan pembiayaan komersial untuk sektor pertanian,  Jumlah sentra-sentra usaha pertanian di perdesaan  Jumlah Gapoktan PUAP (unit)	1.5 triliun	2 triliun	2 triliun	2 triliun	2,5 triliun	2,18	2,28	2,40	2,52	2,64	12,02
<i>Sub Total</i>									1.017,38	1.068,25	1.108,01	1.163,41	1.221,58	5.553,26
1.8	Pengembangan perstatistikan dan sistem informasi pertanian	Tersedianya data, metodologi, hasil analisis dan sistem informasi pertanian, serta ketatausahaan	Jumlah data, metodologi, hasil analisis tanaman pangan dan peternakan, hortikultura dan perkebunan, layanan sistem informasi pertanian serta ketatausahaan (paket)	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	4 paket	54,78	57,51	60,39	63,41	66,58	302,67
<i>Sub Total</i>									54,78	57,51	60,39	63,41	66,58	302,67
<b>Sub Total</b>									<b>1.017,38</b>	<b>1.068,25</b>	<b>1.121,66</b>	<b>1.177,75</b>	<b>1.236,63</b>	<b>5.621,68</b>





NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Milyar Rp)					TOTAL
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
			Jumlah kegiatan pengawasan preventif (pengawasan kegiatan strategis, pemeriksaan perencanaan dan gerakan WTP) satker lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Pengembangan SDM Pertanian (Paket Kegiatan)	3	3	3	3	3	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	4,75
			Jumlah kegiatan pengawasan represif (pemeriksaan kinerja, evaluasi LAKIP, pemeriksaan khusus) Satker lingkup Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Hortikultura, dan Badan Pengembangan SDM Pertanian (Paket Kegiatan)	3	3	3	3	3	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	6,00
									5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	26,90
2.3	Peringatan pelaksanaan pengawasan pada Satker lingkup Direktorat Jenderal PLA, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan & badan Ketahanan Pangan	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan pre-emptif, preventif dan represif lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Badan Ketahanan Pangan (Paket Kegiatan)	Jumlah kegiatan pengawasan pre-emptif (Pembinaan Sistem Pengendalian Intern (SPI), Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan Reformasi Birokrasi) Satker lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Badan Ketahanan Pangan (Paket Kegiatan)	3	3	3	3	3	3,23	3,23	3,23	3,23	3,23	16,15
			Jumlah kegiatan pengawasan preventif (pengawasan kegiatan strategis, pemeriksaan, perencanaan dan gerakan WTP) satker lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Badan Ketahanan Pangan (Paket Kegiatan)	3	3	3	3	3	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95	4,75
			Jumlah kegiatan pengawasan represif (pemeriksaan kinerja, evaluasi LAKIP, pemeriksaan khusus) Satker lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, dan Badan Ketahanan Pangan (Paket Kegiatan)	3	3	3	3	3	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	6,00
									5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	26,90



NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Milyar Rp)					TOTAL
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
			jumlah kegiatan pengawasan represif (pemeriksaan kinerja, evaluasi LAKIP, pemeriksaan khusus) Satker lingkup Direktorat Jenderal Peternakan, Badan Karantina Pertanian, dan Inspektorat Jenderal (Paket Kegiatan)	3	3	3	3	3	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	6,00
									5,38	5,38	5,38	5,38	5,38	26,90
<b>Sub Total</b>														
2.6	Peningkatan pelaksanaan pengawasan pada satker lingkup Kementerian Pertanian	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan pre-emptif, preventif, represif dan korektif lingkup Kementerian Pertanian	Jumlah kegiatan perumusan kebijakan bidang pengawasan (kegiatan)	1	1	1	1	1	2,16	2,16	2,16	2,16	2,16	10,80
			Jumlah kegiatan pengawasan pre-emptif (pembinaan SDM/PNS kiat cegah korupsi melalui metode THD, pelaksanaan pakta integritas & reformasi birokrasi) lingkup Kementerian Pertanian (Paket Kegiatan)	3	3	3	3	3						
			Jumlah kegiatan pengawasan preventif (pendampingan proses pengadaan barang/jasa) lingkup Kementerian Pertanian (Paket Kegiatan)	1	1	1	1	1						
			Jumlah kegiatan pengawasan represif melalui pemeriksaan khusus dan pengusutan terhadap pengaduan masyarakat serta tujuan tertentu atas petunjuk/instruksi Menteri pada Kementerian Pertanian (Kegiatan dan Pelaporan)	2	2	2	2	2						
			Jumlah kegiatan pengawasan korektif melalui peneraan sanksi PP 30/1980 dan mendaklanjuti temuan hasil pemeriksaan/kasus ke aparat penegak hukum (% tindak lanjut pengawasan korektif) (tahun tunggal)	50	60	70	80	90						
			Jumlah Unit Kerja lingkup Kementerian Pertanian yang ditetapkan sebagai Unit Kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (Unit Kerja)	50	60	70	80	95	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	46,50
<b>Sub Total</b>														
									11,46	11,46	11,46	11,46	11,46	57,30

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITYAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITYAS (Milyar Rp)					TOTAL	
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014		
3	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan Untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan	<p>▲ Perluasan penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat yang didukung oleh sistem penyediaan sarana produksi dan benih serta pengamanan produksi yang efisien untuk mewujudkan produksi tanaman pangan yang cukup dan berkelanjutan</p>	<p>▲ Luas areal penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat (ribu ha)</p> <p>▲ Jumlah sarana produksi yang disediakan dan disalurkan serta lembaga perbibitihan tanaman pangan yang dibina di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Sarana Produksi (Unit)</li> <li>● Lembaga perbibitihan (Balai)</li> </ul> <p>Jumlah subsidi pupuk dan benih :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pupuk (Juta ton)</li> <li>● Benih (ribu ton)</li> </ul> <p>Luas areal yang aman dari serangan OPT dan DPI pada pertanaman pangan yang menerapkan budidaya tanaman yang tepat (ribu ha)</p>	<p>2.969,49</p> <p>3.401,81</p> <p>3.737,28</p> <p>4.137,78</p> <p>4.493,31</p>	<p>13.836</p> <p>14.989</p> <p>16.110</p> <p>17.235</p> <p>18.354</p>	<p>63</p> <p>63</p> <p>63</p> <p>63</p> <p>63</p>	<p>11,06</p> <p>11,32</p> <p>11,6</p> <p>11,89</p> <p>12,2</p>	<p>178,18</p> <p>211,99</p> <p>217,55</p> <p>222,19</p> <p>226,92</p>	<p>147,5</p> <p>169,25</p> <p>186</p> <p>206</p> <p>223,75</p>	<p>892,35</p> <p>1.086,65</p> <p>1.291,48</p> <p>1.547,77</p> <p>1.837,96</p>	<p>6.656,21</p>				
			<p>Produksi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Padi non hibrida (ribu ton)</li> <li>- Padi hibrida (ribu ton)</li> <li>- Padi lahan kering (ribu ton)</li> <li>● Jagung (ribu ton)</li> <li>● Kedelai (ribu ton)</li> <li>● Kacang tanah (ribu ton)</li> <li>● Kacang hijau (ribu ton)</li> <li>● Ubi kayu (ribu ton)</li> <li>● Ubi jalar (ribu ton)</li> </ul> <p>Produktivitas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Padi non hibrida (ku/ha)</li> <li>- Padi hibrida (ku/ha)</li> <li>- Padi lahan kering (ku/ha)</li> </ul>	<p>12.160,00</p> <p>13.376,00</p> <p>13.984,00</p> <p>14.592,00</p> <p>15.200,00</p>	<p>1.463,00</p> <p>1.829,00</p> <p>2.195,00</p> <p>2.926,00</p> <p>3.658,00</p>	<p>1.069,00</p> <p>1.247,00</p> <p>1.425,00</p> <p>1.603,00</p> <p>1.781,00</p>	<p>926,25</p> <p>1.080,63</p> <p>1.235,0</p> <p>1.389,38</p> <p>1.543,75</p>	<p>380,00</p> <p>460,56</p> <p>542,69</p> <p>665,57</p> <p>790,86</p>	<p>83,17</p> <p>172,40</p> <p>268,01</p> <p>370,36</p> <p>383,84</p>	<p>3,96</p> <p>12,49</p> <p>25,26</p> <p>25,54</p> <p>32,28</p>	<p>155,09</p> <p>159,69</p> <p>164,68</p> <p>169,82</p> <p>175,39</p>	<p>117,33</p> <p>126,28</p> <p>139,88</p> <p>149,29</p> <p>159,53</p>	<p>64,00</p> <p>64,00</p> <p>64,00</p> <p>64,00</p> <p>64,00</p>	<p>77,00</p> <p>77,00</p> <p>77,00</p> <p>77,00</p> <p>77,00</p>	<p>37,50</p> <p>37,50</p> <p>37,50</p> <p>37,50</p> <p>37,50</p>

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Miliar Rp)					TOTAL		
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014			
			● Jagung (ku/ha)	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00								
			● Kedelai (ku/ha)	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00								
			● Kacang tanah (ku/ha)	17,51	17,51	17,51	17,51	17,51								
			● Kacang hijau (ku/ha)	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00								
			● Ubi kayu (ku/ha)	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00								
			● Ubi jalar (ku/ha)	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00								
			<b>Luas Tanam:</b>													
			● Padi non hibrida (ribu ha)	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00								
			- Padi hibrida (ribu ha)	200,00	250,00	300,00	400,00	500,00								
			- Padi lahan kering (ribu ha)	300,00	350,00	400,00	450,00	500,00								
			● Jagung (ribu ha)	150,00	175,00	200,00	225,00	250,00								
			● Kedelai (ribu ha)	250,00	300,00	350,00	425,00	500,00								
			● Kacang tanah (ribu ha)	50,00	100,00	150,00	200,00	200,00								
			● Kacang hijau (ribu ha)	3,21	10,00	20,00	20,00	25,00								
			● Ubi kayu (ribu ha)	6,53	6,54	6,56	6,58	6,61								
			● Ubi jalar (ribu ha)	9,50	9,96	10,35	10,76	11,20								
			<b>Luas Panen:</b>													
			● Padi non hibrida (ribu ha)	1.900,00	2.090,00	2.185,00	2.280,00	2.375,00								
			- Padi hibrida (ribu ha)	190,00	238,00	285,00	380,00	475,00								
			- Padi lahan kering (ribu ha)	285,00	333,00	380,00	428,00	475,00								
			● Jagung (ribu ha)	142,50	166,25	190,00	213,75	237,50								
			● Kedelai (ribu ha)	237,50	285,00	332,50	403,75	475,00								
			● Kacang tanah (ribu ha)	47,50	95,00	142,50	190,00	190,00								

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Milyar Rp)					TOTAL		
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kacang hijau (ribu ha)</li> <li>● Ubi kayu (ribu ha)</li> <li>● Ubi jalar (ribu ha)</li> </ul>		3,05	9,50	19,00	19,00	23,75							
					6,20	6,21	6,23	6,25	6,28							
					9,03	9,46	9,83	10,22	10,64							
3.1	Pengelolaan produksi tanaman sereal (Prioritas Nasional dan Bidang)	Meningkatnya perluasan penerapan budidaya tanaman sereal yang tepat dan berkelanjutan untuk peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas per satuan luas.	<p>▲</p> <p>Luas areal penerapan budidaya sereal yang tepat dan berkelanjutan termasuk untuk bahan bakar nabati (ribu ha) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● SLPTT padi non hibrida (ribu ha)</li> <li>● SLPTT padi hibrida (ribu ha)</li> <li>● SLPTT Padi lahan kering (ribu ha)</li> <li>● SLPTT Jagung hibrida (ribu ha)</li> <li>● Pengembangan peningkatan produksi gandum (ribu ha)</li> <li>● Pengembangan peningkatan produksi sorgum (ribu ha)</li> </ul>	336,00	2.000,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	396,75	447,08	507,57	571,56	2.258,96		
					200,00	250,00	300,00	400,00	500,00							
					300,00	350,00	400,00	450,00	500,00							
					150,00	175,00	200,00	225,00	250,00							
					0,10	0,13	0,15	0,18	0,20							
					0,10	0,13	0,15	0,18	0,20							
										336,00	396,75	447,08	507,57	571,56	2.258,96	
										130,00	174,10	233,70	316,50	402,20	1.256,50	
3.2	Pengelolaan produksi tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian (Prioritas Nasional dan Bidang)	Meningkatnya perluasan penerapan budidaya tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian yang tepat dan berkelanjutan untuk peningkatan produksi melalui peningkatan produktivitas per satuan luas.	<p>▲</p> <p>Luas areal penerapan budidaya tanaman kacang-kacangan dan umbi-umbian yang tepat dan berkelanjutan termasuk untuk bahan bakar nabati (ribu ha) :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● SLPTT kedelai (ribu ha)</li> <li>● SLPTT kacang tanah (ribu ha)</li> <li>● SLPTT kacang hijau (ribu ha)</li> <li>● PTT kacang hijau (ribu ha)</li> <li>● PTT ubi kayu (ribu ha)</li> <li>● PTT ubi jalar (ribu ha)</li> <li>● PTT pangan lokal (ribu ha)</li> </ul>	130,00	250,00	300,00	350,00	425,00	500,00	174,10	233,70	316,50	402,20	1.256,50		
					50,00	100,00	150,00	200,00	200,00							
					-	10,00	20,00	20,00	25,00							
					3,21	-	-	-	-							
					6,53	6,54	6,56	6,58	6,61							
					9,50	9,96	10,35	10,76	11,20							
					0,05	0,06	0,08	0,09	0,10							
										130,00	174,10	233,70	316,50	402,20	1.256,50	
										130,00	174,10	233,70	316,50	402,20	1.256,50	

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Milyar Rp)					TOTAL					
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014						
3.3	Pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan (Prioritas Bidang)	Terselenggaranya sistem pembinaan lembaga perbenihan tanaman pangan yang efisien dan berkelanjutan di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat	Lembaga perbenihan tanaman pangan yang dibina di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat : <ul style="list-style-type: none"> <li>Terselenggaranya roadmap kebutuhan &amp; ketersediaan benih (paket)</li> <li>Terselenggaranya kebijakan sistem subsidi benih (paket)</li> <li>Terselenggaranya rancangan revitalisasi perbenihan (paket)</li> <li>BPSBPH (Balai)</li> <li>BBI (Balai)</li> </ul>	1	1	1	1	1	55,00	60,50	66,00	72,50	80,00	334,00					
				176,18	211,99	217,55	222,19	226,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				
				<b>Sub Total</b>											<b>334,00</b>				
				3.4	Penyaluran subsidi benih tanaman pangan (Prioritas Nasional dan Bidang)	Terselenggaranya benih tanaman pangan bersubsidi	Jumlah benih tanaman pangan bersubsidi (ribu ton)	176,18	211,99	217,55	222,19	226,92	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				<b>Sub Total</b>											<b>0,00</b>				
				3.5	Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan sarana produksi tanaman pangan (Prioritas Bidang)	Terselenggaranya sistem penyediaan dan pengawasan sarana produksi tanaman pangan yang efisien dan berkelanjutan di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat.	Sarana produksi tersedia dan terawasi di lokasi penerapan budidaya tanaman pangan yang tepat (unit) : <ul style="list-style-type: none"> <li>Bantuan RPPPO (unit)</li> <li>Bantuan Traktor R-2 (unit)</li> <li>Bantuan Traktor R-4 (unit)</li> <li>Bantuan pompa air (unit)</li> <li>Penguatan UPIA pemula (unit)</li> <li>Penguatan UPIA berkembang (unit)</li> <li>Penguatan UPIA profesional (unit)</li> <li>Penguatan KP3 (unit)</li> <li>Penguatan PPNS Pupus (orang)</li> <li>Skrining pestisida (unit)</li> </ul>	200	300	500	800	1.200	86,90		107,30	135,90	177,20	228,40	735,70
623	685	754	829					912	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
7	8	8	9					10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
350	385	423	466					512	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8.747	8.535	8.354	8.201					8.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2.864	3.581	4.019	4.245					4.313	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
585	1.015	1.552	2.155					2.792	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
430	450	470	500					514	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
30	30	30	30					30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
30	30	30	30					30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
<b>Sub Total</b>											<b>0,00</b>								
<b>Sub Total</b>											<b>0,00</b>								





NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITYAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITYAS (Milyar Rp)					TOTAL																																																																																																
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014																																																																																																	
3.10	Dukungan manajemen dan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	Terselenggaranya pelayanan administrasi dan pelayanan teknis lainnya secara profesional dan berintegritas di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	Jumlah dokumen perencanaan, program kegiatan dan anggaran, data statistik tanaman pangan, keuangan/perangkat, umum, money dan pelaporan; insentif Mantri Tani; LM3; Bantuan penanganan bencana; Terpenuluhnya kebutuhan gaji pegawai dan operasional kantor.	34	34	34	34	34	187,00	240,00	288,00	340,00	408,00	1.463,00																																																																																																
<i>Sub Total</i>									187,00	240,00	288,00	340,00	408,00	1.463,00																																																																																																
4.	<u>Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan</u>	Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman hortikultura yang aman dikonsumsi berdaya saing dan berkelanjutan	Produksi dan Laju Pertumbuhan Produksi Hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>Produksi :</b> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>- Buah Tahunan dan Perdu (ton)</td> <td>9.549.879</td> <td>10.010.038</td> <td>10.560.653</td> <td>11.186.738</td> <td>11.902.690</td> </tr> <tr> <td>- Buah Semusim dan Merambat (ton)</td> <td>814.400</td> <td>862.467</td> <td>944.457</td> <td>1.046.020</td> <td>1.163.967</td> </tr> <tr> <td>- Buah Terna (ton)</td> <td>8.488.779</td> <td>8.715.773</td> <td>8.969.331</td> <td>9.251.452</td> <td>9.555.174</td> </tr> <tr> <td><b>Total Buah (ton)</b></td> <td><b>18.853.058</b></td> <td><b>19.588.278</b></td> <td><b>20.474.441</b></td> <td><b>21.484.210</b></td> <td><b>22.621.831</b></td> </tr> <tr> <td>- Sayuran Umbi (ton)</td> <td>2.463.006</td> <td>2.530.697</td> <td>2.603.504</td> <td>2.681.943</td> <td>2.770.471</td> </tr> <tr> <td>- Sayuran Daun (ton)</td> <td>3.186.699</td> <td>3.275.218</td> <td>3.371.659</td> <td>3.474.848</td> <td>3.586.369</td> </tr> <tr> <td>- Sayuran Buah (ton)</td> <td>4.912.108</td> <td>5.093.775</td> <td>5.288.028</td> <td>5.495.844</td> <td>5.721.462</td> </tr> <tr> <td>- Jamur (ton)</td> <td>50.559</td> <td>55.101</td> <td>60.198</td> <td>65.552</td> <td>72.851</td> </tr> <tr> <td><b>Total Sayuran (ton)</b></td> <td><b>10.612.372</b></td> <td><b>10.954.791</b></td> <td><b>11.323.389</b></td> <td><b>11.716.587</b></td> <td><b>12.151.173</b></td> </tr> <tr> <td>- Tan. Hias Bunga/ Daun Potong (tangkal)</td> <td>248.080.490</td> <td>270.770.892</td> <td>295.664.436</td> <td>322.888.796</td> <td>352.956.738</td> </tr> <tr> <td>- Tan. Hias Pot dan Taman (potoni)</td> <td>12.183.236</td> <td>12.809.235</td> <td>13.487.030</td> <td>14.223.093</td> <td>15.024.862</td> </tr> <tr> <td>- Tan. Hias Bunga Tabur (kg)</td> <td>24.970.713</td> <td>27.364.964</td> <td>30.040.649</td> <td>33.044.714</td> <td>36.431.798</td> </tr> <tr> <td>- Tanaman Biofarmaka Rimpang (kg)</td> <td>417.986.019</td> <td>433.872.743</td> <td>450.990.473</td> <td>469.091.126</td> <td>488.388.883</td> </tr> <tr> <td>- Tanaman Biofarmaka Non Rimpang (kg)</td> <td>70.027.208</td> <td>72.532.716</td> <td>75.313.892</td> <td>78.254.558</td> <td>81.362.706</td> </tr> <tr> <td><b>Total Biofarmaka</b></td> <td><b>487.933.227</b></td> <td><b>506.405.459</b></td> <td><b>526.304.365</b></td> <td><b>547.345.684</b></td> <td><b>569.751.899</b></td> </tr> </tbody> </table> </li> </ul>											- Buah Tahunan dan Perdu (ton)	9.549.879	10.010.038	10.560.653	11.186.738	11.902.690	- Buah Semusim dan Merambat (ton)	814.400	862.467	944.457	1.046.020	1.163.967	- Buah Terna (ton)	8.488.779	8.715.773	8.969.331	9.251.452	9.555.174	<b>Total Buah (ton)</b>	<b>18.853.058</b>	<b>19.588.278</b>	<b>20.474.441</b>	<b>21.484.210</b>	<b>22.621.831</b>	- Sayuran Umbi (ton)	2.463.006	2.530.697	2.603.504	2.681.943	2.770.471	- Sayuran Daun (ton)	3.186.699	3.275.218	3.371.659	3.474.848	3.586.369	- Sayuran Buah (ton)	4.912.108	5.093.775	5.288.028	5.495.844	5.721.462	- Jamur (ton)	50.559	55.101	60.198	65.552	72.851	<b>Total Sayuran (ton)</b>	<b>10.612.372</b>	<b>10.954.791</b>	<b>11.323.389</b>	<b>11.716.587</b>	<b>12.151.173</b>	- Tan. Hias Bunga/ Daun Potong (tangkal)	248.080.490	270.770.892	295.664.436	322.888.796	352.956.738	- Tan. Hias Pot dan Taman (potoni)	12.183.236	12.809.235	13.487.030	14.223.093	15.024.862	- Tan. Hias Bunga Tabur (kg)	24.970.713	27.364.964	30.040.649	33.044.714	36.431.798	- Tanaman Biofarmaka Rimpang (kg)	417.986.019	433.872.743	450.990.473	469.091.126	488.388.883	- Tanaman Biofarmaka Non Rimpang (kg)	70.027.208	72.532.716	75.313.892	78.254.558	81.362.706	<b>Total Biofarmaka</b>	<b>487.933.227</b>	<b>506.405.459</b>	<b>526.304.365</b>	<b>547.345.684</b>	<b>569.751.899</b>	330,28	363,30	417,80	501,36	626,70	2.239,44
- Buah Tahunan dan Perdu (ton)	9.549.879	10.010.038	10.560.653	11.186.738	11.902.690																																																																																																									
- Buah Semusim dan Merambat (ton)	814.400	862.467	944.457	1.046.020	1.163.967																																																																																																									
- Buah Terna (ton)	8.488.779	8.715.773	8.969.331	9.251.452	9.555.174																																																																																																									
<b>Total Buah (ton)</b>	<b>18.853.058</b>	<b>19.588.278</b>	<b>20.474.441</b>	<b>21.484.210</b>	<b>22.621.831</b>																																																																																																									
- Sayuran Umbi (ton)	2.463.006	2.530.697	2.603.504	2.681.943	2.770.471																																																																																																									
- Sayuran Daun (ton)	3.186.699	3.275.218	3.371.659	3.474.848	3.586.369																																																																																																									
- Sayuran Buah (ton)	4.912.108	5.093.775	5.288.028	5.495.844	5.721.462																																																																																																									
- Jamur (ton)	50.559	55.101	60.198	65.552	72.851																																																																																																									
<b>Total Sayuran (ton)</b>	<b>10.612.372</b>	<b>10.954.791</b>	<b>11.323.389</b>	<b>11.716.587</b>	<b>12.151.173</b>																																																																																																									
- Tan. Hias Bunga/ Daun Potong (tangkal)	248.080.490	270.770.892	295.664.436	322.888.796	352.956.738																																																																																																									
- Tan. Hias Pot dan Taman (potoni)	12.183.236	12.809.235	13.487.030	14.223.093	15.024.862																																																																																																									
- Tan. Hias Bunga Tabur (kg)	24.970.713	27.364.964	30.040.649	33.044.714	36.431.798																																																																																																									
- Tanaman Biofarmaka Rimpang (kg)	417.986.019	433.872.743	450.990.473	469.091.126	488.388.883																																																																																																									
- Tanaman Biofarmaka Non Rimpang (kg)	70.027.208	72.532.716	75.313.892	78.254.558	81.362.706																																																																																																									
<b>Total Biofarmaka</b>	<b>487.933.227</b>	<b>506.405.459</b>	<b>526.304.365</b>	<b>547.345.684</b>	<b>569.751.899</b>																																																																																																									







NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Milyar Rp)					TOTAL	
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014		
			Total biofarmaka (kg) dan Rata-rata Pertumbuhan (%)	487.933.227 (4,72 %)	506.405.459 (4,72 %)	526.304.365 (4,98 %)	547.345.684 (5,16 %)	569.751.889 (5,37 %)							
			▲ Laju Peningkatan mutu produk tanaman sayuran dan biofarmaka						27,01	29,71	34,17	41,00	51,25	183,14	
			Laju Peningkatan Produktivitas lahan usaha tanaman sayuran dan biofarmaka	5%	5%	5%	5%	5%							
			Jumlah pelaku usaha panutan (Champion), Gapoktan/Asosiasi Hortikultura	10%	10%	10%	10%	10%							
			<b>Sub Total</b>												
4.4	Peningkatan Produksi, Produktivitas Dan Mutu Produk Tanaman Hias Berkelanjutan (Prioritas Bidang)	Meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu tanaman hias yang berdaya saing dan berkelanjutan	▲ Produksi dan laju pertumbuhan produksi Tanaman Hias (tangkai)	216.625.019 (6,50%)	230.758.895 (6,50%)	245.758.223 (6,50%)	261.732.598 (6,50%)	278.745.121 (6,50%)	12,89	14,18	16,31	19,57	24,46	87,41	
			● Tan. Hias Bunga/Daun Potong (tangkai)	248.080.490 (7,22 %)	270.770.892 (9,15 %)	295.661.436 (9,19 %)	322.888.796 (9,21 %)	355.956.798 (9,31 %)							
			● Tan. Hias Pot dan Taman (poton)	12.183.236 (3,07 %)	12.809.235 (3,14 %)	13.487.030 (3,46 %)	14.223.093 (3,49 %)	15.028.862 (3,94 %)							
			● Tan. Hias Bunga Tabur (kg)	24.970.713 (11,34 %)	27.364.964 (9,59 %)	30.040.649 (9,78 %)	33.044.714 (10,00 %)	36.431.798 (10,25 %)							
			▲ Laju Peningkatan mutu produk tanaman hias						8,59	9,45	10,87	13,05	16,31	58,27	
			Laju Peningkatan Produktivitas lahan usaha tanaman hias (mengejukan registrasi)	5%	5%	5%	5%	5%							
			Jumlah pelaku usaha panutan (Champion), Gapoktan/Asosiasi Hortikultura	10%	10%	10%	10%	10%							
			Laju peningkatan ketersediaan produk tanaman hias kualitas Ekspor	5%	5%	5%	5%	5%							
			<b>Sub Total</b>												
			<b>Sub Total</b>												

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Milyar Rp)				TOTAL																																																																				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013		2014																																																																			
4.5	Pengembangan Sistem Perbenihan, Pupuk dan Sarana Produksi lainnya (Prioritas Bidang)	Terfasilitasinya penyediaan benih bermutu dalam mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk tanaman hortikultura	Peningkatan ketersediaan benih bermutu (%)	Benih buah 3 %, benih sayur umbi 2 %, benih sayur biji 1 %, benih tanaman hias 2 %	Benih buah 3 %, benih sayur umbi 2 %, benih sayur biji 1 %, benih tanaman hias 2 %	Benih buah 3 %, benih sayur umbi 2 %, benih sayur biji 1 %, benih tanaman hias 2 %	Benih buah 3 %, benih sayur umbi 2 %, benih sayur biji 1 %, benih tanaman hias 2 %	Benih buah 3 %, benih sayur umbi 2 %, benih sayur biji 1 %, benih tanaman hias 2 %	46,14	50,75	58,36	70,04	87,54	312,83																																																																			
Sub Total									46,14	50,75	58,36	70,04	87,54	312,83																																																																			
4.6	Pengembangan Sistem Perlindungan Tanaman Hortikultura (Prioritas Nasional dan Bidang)	Berkembangnya sistem perlindungan tanaman dalam mendukung pengembangan produksi hortikultura	Proporsi luas serangan OPT utama hortikultura terhadap total luas panen.	Maksimal 5 % terhadap luas panen	Maksimal 5 % terhadap luas panen	Maksimal 5 % terhadap luas panen	Maksimal 5 % terhadap luas panen	Maksimal 5 % terhadap luas panen	36,29	39,92	45,90	55,09	68,86	246,05																																																																			
Sub Total									36,29	39,92	45,90	55,09	68,86	246,05																																																																			
5.	<b>Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan</b>	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan yang berkelanjutan melalui upaya pengembangan tanaman semusim, tanaman rempah dan penyegar, tanaman tahunan, dukungan penyediaan benih unggul bermutu dan sarana produksi, perlindungan perkebunan dan teknis lainnya	<p>▲ Peningkatan produksi (ribu ton) komoditi unggulan perkebunan (tebu, kapas, nilam, tembakau, kopi, teh, kakao, lada, cengkeh, kelapa, kelapa sawit, jambu mete dan jarak pagar):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Swasembada gula nasional</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>2.996</th> <th>3.867</th> <th>4.396</th> <th>4.395</th> <th>5.700</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Tebu (hablur)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan dan pemantauan ketersediaan dan distribusi pangan di 33 Provinsi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan komoditas pemenuhan konsumsi dalam negeri</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>26</th> <th>33</th> <th>40</th> <th>57</th> <th>63</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Kapas</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Cengkeh</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan komoditas ekspor</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>181</th> <th>182</th> <th>183</th> <th>183</th> <th>184</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>- Tembakau</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Nilam</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Kopi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Teh</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Kakao</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		2.996	3.867	4.396	4.395	5.700	- Tebu (hablur)						Koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan dan pemantauan ketersediaan dan distribusi pangan di 33 Provinsi							26	33	40	57	63	- Kapas						- Cengkeh							181	182	183	183	184	- Tembakau						- Nilam						- Kopi						- Teh						- Kakao						<p>▲</p> <p>454,10</p> <p>1.478,37</p> <p>504,00</p> <p>531,11</p> <p>559,74</p> <p>3.527,32</p>					
	2.996	3.867	4.396	4.395	5.700																																																																												
- Tebu (hablur)																																																																																	
Koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan dan pemantauan ketersediaan dan distribusi pangan di 33 Provinsi																																																																																	
	26	33	40	57	63																																																																												
- Kapas																																																																																	
- Cengkeh																																																																																	
	181	182	183	183	184																																																																												
- Tembakau																																																																																	
- Nilam																																																																																	
- Kopi																																																																																	
- Teh																																																																																	
- Kakao																																																																																	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Milyar Rp)				TOTAL			
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013		2014		
			- Lada	83	85	87	89	92								
			- Jambu mete	145	148	152	156	159								
			- Karet	2.681	2.711	2.741	2.771	2.801								
			● <i>Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakar nabati (bienergi)</i>													
			- Jarak pagar	15	20	24	29	35								
			- Kelapa	3.266	3.290	3.317	3.348	3.380								
			- Kelapa Sawit	23.200	24.429	25.710	27.046	28.439								
			- Kemiri sunan	0	0	0	0	0								
			Peningkatan produktivitas (kg/ha) tanaman unggulan perkebunan (tebu, kapas, nilam, tembakau, kopi, teh, kakao, lada, cengkeh, kelapa, kelapa sawit, jambu mete dan jarak pagar);													
			● <i>Swasembada gula nasional</i>													
			- Tebu	6.450	6.760	6.960	7.130	7.440								
			● <i>Pengembangan komoditas pemenuhan konsumsi dalam negeri</i>													
			- Kapas	1.750	1.900	2.000	2.200	2.500								
			- Cengkeh	266	274	281	284	300								
			● <i>Pengembangan komoditas ekspor</i>													
			- Tembakau	885	888	890	892	893								
			- Nilam	6.300	6.400	6.500	6.550	6.600								
			- Kopi	780	840	900	900	900								
			- Teh	1.520	1.600	1.680	1.760	1.780								
			- Kakao	1.000	1.100	1.200	1.400	1.500								
			- Lada	694	713	722	734	760								
			- Karet	999	1.000	1.009	1.014	1.019								
			- Jambu Mete	537	569	579	616	640								

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Milyar Rp)					TOTAL	
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014		
			<ul style="list-style-type: none"> <li>● Penyediaan bahan tanaman sumber bahan bakat nabati (bioenergi)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jarak Pagar 1.000 1.250 1.500 1.750 2.000</li> <li>- Kelapa 1.105 1.119 1.135 1.151 1.200</li> <li>- Kelapa Sawit 3.888 3.997 4.109 4.225 4.344</li> <li>- Kemiri Sunan 0 0 0 0 0</li> </ul> </li> </ul>												
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Peningkatan mutu (% populasi standar) tanaman unggulan perkebunan (tebu, kapas, nilam, tembakau, kopi, teh, kakao, lada, cengkeh, kelapa, kelapa sawit, jambu mete dan jarak pagar);</li> </ul>	76	77	78	79	80							
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Penggunaan benih unggul bermutu, sarana produksi serta sumber benih bina perkebunan</li> </ul>												
			<ul style="list-style-type: none"> <li>● Jumlah penggunaan sarana produksi (%) (Revitalisasi perbenihan dan pembibitan)</li> </ul>	45	50	56	61	65							
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Penguatan kelembagaan pengawas dan kelembagaan usaha perbenihan (Revitalisasi perbenihan dan pembibitan)</li> </ul>												
			<ul style="list-style-type: none"> <li>● Jumlah kelembagaan perbenihan (unit)</li> </ul>	210	225	240	255	270							
			<ul style="list-style-type: none"> <li>● Jumlah kelembagaan UPIA (unit usaha)</li> </ul>	59	73	88	99	114							
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Jumlah kelembagaan perlindungan tanaman</li> </ul>												
			<ul style="list-style-type: none"> <li>● SL-PHT</li> </ul>	500	515	530	546	563							
			<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Jumlah area pengendalian OPT (hektar) dan penurunan titik api (hot spot) serta penanganan gangguan usaha perkebunan</li> </ul>												
			<ul style="list-style-type: none"> <li>● Jumlah penurunan titik api</li> </ul>	2.500	2.250	2.025	1.823	1.640							



NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Milyar Rp)					TOTAL	
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014		
5.1	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman semusim (Prioritas Nasional dan Bidang)	Terfasilitasinya pengembangan budidaya tanaman semusim (tebu,kapas, tembakau dan nilam)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <i>Swasembada Gula Nasional</i></li> <li>- Tebu</li> <li>● <i>Pengembangan Komoditas Penemuan Komsumsi Dalam Negeri</i></li> <li>- Kapas</li> <li>● <i>Pengembangan Komoditas Ekspor</i></li> <li>- Tembakau</li> <li>- Nilam</li> </ul>	465	572	632	692	767	45,57	47,85	50,24	52,76	55,39	251,81	
				205	205	205	205	205	46,07	1.048,38	50,79	53,33	56,00	1.254,57	
				14	15	16	17	18							
<i>Sub Total</i>															
5.2	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman rempah dan penyegar (Prioritas Nasional dan Bidang)	Terfasilitasinya pengembangan budidaya tanaman rempah dan penyegar (kopi, teh, kakao, lada, cengkeh)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● <i>Pengembangan Komoditas Ekspor</i></li> <li>- Kopi</li> <li>- Teh</li> <li>- Kakao</li> <li>- Lada</li> <li>● <i>Pengembangan Komoditas Penemuan Komsumsi Dalam Negeri</i></li> <li>- Cengkeh</li> <li>● <i>Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional (ribu ha)</i></li> <li>- Rehabilitasi</li> <li>- Intensifikasi</li> <li>- Peremajaan</li> <li>- Pengendalian OPT</li> </ul>	1.291	1.308	1.328	1.331	1.354	45,57	47,85	50,24	52,76	55,39	251,81	
				129	130	130	130	130	46,07	1.048,38	50,79	53,33	56,00	1.254,57	
				1.655	1.746	1.837	1.929	2.020							
				192	193	194	195	196							
<i>Sub Total</i>															



NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Milyar Rp)					TOTAL
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
5.4	Dukungan penyediaan benih unggul bermutu dan sarana produksi dan sarana produksi perkebunan (Prioritas Bidang)	Terfasilitasinya penyediaan benih unggul bermutu dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas dan mutu tanaman perkebunan	<p>Jumlah penggunaan benih unggul bermutu dan sarana produksi pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Revitalisasi Perbenihan</li> <li>Jumlah penggunaan benih unggul bermutu</li> </ul>	45	48	52	55	60	30,66	32,19	33,80	35,49	37,27	169,41
				30,66	32,19	33,80	35,49	37,27	169,41					
5.5	Dukungan perlindungan perkebunan dan penanganan gangguan usaha perkebunan (Prioritas Bidang)	Terfasilitasinya pengamanan dan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman perkebunan pada 13 komoditas perkebunan	<p>Revitalisasi Perindungan Perkebunan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Areal pengendalian OPT dan intensitas serangan OPT (Iha)</li> <li>Penanganan gangguan usaha perkebunan (dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan)</li> </ul>	51.467	52.291	53.128	53.978	54.841	23,03	24,19	25,39	26,66	27,99	127,26
				23,03	24,19	25,39	26,66	27,99	127,26					
				23,03	24,19	25,39	26,66	27,99	127,26					
5.6	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya Direktorat Jenderal Perkebunan	Terfasilitasinya pelayanan bidang perencanaan, evaluasi, data dan informasi, keuangan, dan pelayanan kepegawaian, organisasi, ketumasan, ketatausahaan, rumusan di bidang kesekretariatan yang berkualitas	<p>Provinsi yang memperoleh pelayanan dibidang perencanaan program dan penganggaran dan kerjasama; Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan penyediaan data dan informasi yang berkualitas; Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan asset yang berkualitas; Pelayanan organisasi kepegawaian, humas dan administrasi perkantoran yang berkualitas. (Dukungan pengembangan tanaman perkebunan berkelanjutan)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Penyediaan PP, Keppres, Perpres, Kepmen sebagai turunan dari UU No. 18/2004</li> <li>Pembinaan dan penilaian usaha perkebunan</li> <li>Penyediaan tenaga/petugas lapang seperti penyuluh, pengendali OPT, pengawas benih, inseminator, mantri tan/statistik, paramedik, petugas penyediaan layanan informasi pasca, petugas revit perkebunan</li> </ul>	32	32	32	32	32	165,76	175,61	186,12	197,32	209,28	934,09
				165,76	175,61	186,12	197,32	209,28	934,09					
Sub Total				165,76	175,61	186,12	197,32	209,28	165,76	175,61	186,12	197,32	209,28	934,09

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITYAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITYAS (Milyar Rp)					TOTAL	
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014		
5.7	▲ Dukungan pengujian dan pengawasan mutu benih serta penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan	▲ Teriaksananya pengawasan dan pengujian benih tanaman perkebunan ▲ Teriaksananya penerapan teknologi proteksi tanaman perkebunan	Jumlah bibit yang tersertifikasi (dalam 1.000 batang) Jumlah teknologi terapan perlindungan perkebunan (paket)	201.272	221.603	232.287	243.663	255.869	23.72	24.9	26.15	27.46	28.82	131,05	
<i>Sub Total</i>															
6.	▲ Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewan Yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal	▲ Meningkatnya ketersediaan pangan hewani (daging, telur, susu)	▲ Produksi daging meningkat 4,10% per tahun (ton) ▲ Produksi telur meningkat 4,42% per tahun (ton) ▲ Produksi susu meningkat 15,56% per tahun (ton)	2.201.214	2.283.287	2.370.527	2.456.302	2.584.432	940,70	1.130,89	1.308,36	1.497,40	1.693,99	6.571,34	
		▲ Meningkatnya kontribusi ternak domestik dalam penyediaan pangan hewani (daging dan telur)	▲ Kontribusi daging sapi domestik terhadap total produksi daging sapi nasional meningkat (%) ▲ Kontribusi daging ayam buras terhadap total produksi daging ayam nasional meningkat (%)	1.506.837	1.574.017	1.647.973	1.720.833	1.791.609							
		▲ Meningkatnya ketersediaan protein hewani asal ternak	▲ Ketersediaan protein hewani asal ternak per kapita meningkat 0,03% per tahun (g/kapita/hr)	727.539	853.761	986.135	1.125.375	1.297.034							
		▲ Tersedianya daging sapi domestik sebesar 90 persen	▲ Produksi daging sapi domestik terhadap total penyediaan daging sapi nasional (%)	18,7	19,2	19,8	20,6	21,1							
		▲ Peningkatan kualitas dan kuantitas benih dan bibit ternak (sapi potong, sapi perah)	▲ Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu peternakan (embrio ekor)	14,7	15	15,3	15,4	15,5							
6.1	▲ Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumber daya lokal (Priorityas Bidang)	▲ Peningkatan kualitas dan kuantitas benih dan bibit ternak (sapi potong, sapi perah) ▲ Peningkatan bibit sapi ▲ Penambahan propinsi peserta KUPS	Revisitas perbibitan dan perbibitan (semen ribu dosis) Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu peternakan (embrio ekor) Penyediaan bibit sapi 200 ribu ekor per tahun Penambahan jumlah peserta dan pembinaan pelaksanaan KUPS (propinsi)	4.800	6.000	6.600	7.200	7.500	106,48	116,45	131,49	150,80	177,80	683,03	
<i>Sub Total</i>															
				450	766	835	993	1000	15,78	18,71	22,43	26,09	31,12	114,11	
				200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	15,78	30,54	30,94	32,61	35,56	145,42	
				20	20	25	30	30	9,47	9,16	11,60	14,67	17,60	62,51	
									147,50	174,86	196,47	224,17	262,08	1.005,07	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Milyar Rp)					TOTAL
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
6.2	Peningkatan produksi ternak ruminansia dengan pendayagunaan sumber daya lokal (Prioritas Nasional dan Bidang)	Meningkatnya populasi dan produksi ternak ruminansia	▲ Peningkatan produksi dan produktivitas ternak (sapi ekor)	21.000	23.760	26.136	28.750	31.625	211,52	132,95	150,12	169,57	194,83	858,99
			▲ Swesembada daging sapi (share produk dalam negeri %)	76	76	81	85	90	10,07	8,39	11,49	14,75	18,48	63,18
			▲ Revitalisasi persusuan (ekor)	1.666.667	1.833.333	2.016.667	2.218.333	2.440.167	50,36	30,78	34,75	39,25	45,10	200,24
			▲ Pemanfaatan kotoran ternak menjadi pupuk organik dan pemberian paket bantuan sosial pupuk organik (rumah kompos)	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	27,98	28,72	29,49	30,80	116,99
			▲ Pengembangan dan pembinaan Blogas Asa Ternak Bersama Masyarakat (BATAMAS) terutama di sentra terpencil dan padat ternak (Unit)	100	150	200	250	300	1,01	0,84	1,15	1,47	1,85	6,32
			▲ Pengembangan integrasi ternak dan tanaman melalui pengelolaan kotoran ternak (padat & cair) menjadi pupuk organik dan pengolahan limbah tanaman untuk ternak terutama di sentra perkubanan, tanaman pangan dan holtikulture (Kp)	75	83	91	100	110	75,54	46,44	52,27	58,98	67,77	301,00
6.3	Peningkatan produksi ternak non ruminansia dengan pendayagunaan sumber daya lokal (Prioritas Nasional dan Bidang)	Meningkatnya populasi dan produksi, serta meningkatnya pendayagunaan sumber daya lokal ternak non ruminansia	▲ Penyediaan sumber pembiayaan pertanian (PUAP, SMD, LDPM, LM3, LKM) kelompok	0	720	828	935	1050	0,00	161,16	190,12	220,59	258,83	830,69
			▲ Pemanfaatan 700 ribu ha lahan kerutanan untuk pengembangan peternakan	0	100	150	250	200	0,00	5,60	8,62	14,75	12,32	41,28
			▲ Restrukturisasi perunggasan (kelompok)	230	290	350	410	470	41,87	76,59	95,39	123,27	143,86	480,98
			▲ Pengembangan pakan ternak (Unit)	25	35	50	60	70	7,88	15,91	23,46	30,98	36,79	115,02
			▲ Pengembangan budidaya ternak non unggas (kelompok)	33	50	63	75	87	1,65	2,50	3,15	3,75	4,35	15,40
			Sub Total						348,50	414,14	477,24	548,84	629,97	2.418,69
Sub Total							51,40	95,00	122,00	158,00	185,00	611,40		

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Milyar Rp)					TOTAL
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
6.4	Pengendalian dan penanganan penyakit hewan menular strategis dan penyakit zoonosis (Prioritas Nasional dan Bidang)	<p>▶ Pelaksanaan vaksinasi dan pengobatan</p> <p>▶ Perlindungan hewan terhadap penyakit eksotik</p>	<p>Penguatan sistem kesehatan hewan (vaksin/obat dim juta dosis)</p> <p>Penyediaan tenaga/petugas lapang seperti penyuluh, pengendali OPT, pengawas in-benih, insenerator, mantri tani/statistik, paramedik, petugas penyedia layanan informasi pasca , petugas revit bun</p>	100	100	120	130	140	177,13	174,64	203,35	231,99	262,35	1.049,46
<i>Sub Total</i>														
6.5	Perjaminan pangan asal hewan yang aman dan halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan non pangan (Prioritas Nasional dan Bidang)	<p>▶ Penguatan peran dan fungsi lembaga otoritas veteriner</p> <p>▶ Peningkatan jaminan produk hewan ASUH dan daya saing produk hewan</p>	<p>Peningkatan sertifikasi nomor veteriner yang ASUH 400 unit usaha</p> <p>Jaminan produk pangan asal hewan yang ASUH RPH/RPA</p>	0	100	200	300	400	9,43	8,70	7,98	7,28	6,13	39,51
<i>Sub Total</i>														
6.6	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Direktorat Jenderal Peternakan	<p>▶ Perlindungan hewan dan penyakit hewan</p> <p>▶ Meningkatnya pelayanan prima kepada masyarakat</p> <p>▶ UPT yang menjadi BLU</p>	<p>Penyelesaian PP. Kepmen, turunan dari UU No 18 th 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan</p> <p>Koordinasi dalam perumusan kebijakan dan pemantauan keterseediaan dan distribusi pangan 33 propinsi</p> <p>Pengusulan 3 UPT peternakan menjadi bahan yang menjadi Bahan Layanan Umum (BLU)</p>	2	12	0	0	0	1,41	8,55	0,00	0,00	0,00	9,96
<i>Sub Total</i>														
7.	Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian	<p>▶ Meningkatkan usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian berketajutan</p> <p>▶ Meningkatkan jumlah lembaga pemasaran petan dan penyerapan pasar hasil pertanian di pasar domestik</p>	<p>% penurunan kehilangan/kerusakan hasil tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan</p> <p>% peningkatan produk dan jenis olahan hasil pertanian yang bermutu untuk ekspor dan substitusi impor</p>	Menurun 0,2 – 5% /t/n	Menurun 0,2 – 5% /t/n	Menurun 0,2 – 5% /t/n	Menurun 0,2 – 5% /t/n	Menurun 0,2 – 5% /t/n	326,70	364,40	410,20	471,70	531,00	2.104,00
<i>Sub Total</i>														
<i>Sub Total</i>														

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Milyar Rp)					TOTAL	
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014		
7.1	Pengembangan penangan pasca panen pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)	Meningkatnya penanganan pasca panen hasil pertanian	▲ % peningkatan ekspor dan surplus neraca perdagangan hasil pertanian	15%/thn	15%/thn	15%/thn	15%/thn	15%/thn							
			▲ Jumlah kelompok tani yang menerapkan penanganan pasca panen sesuai GHP dan standar mutu	1800 poktan/gapoktan	1980 poktan/gapoktan	2178 poktan/gapoktan	2396 poktan/gapoktan	2636 poktan/gapoktan	7,56	8,71	10,03	11,61	13,32	51,23	
			▲ % Peningkatan produksi kakao fermentasi, karet bokar mete	10%/thn	10%/thn	10%/thn	10%/thn	10%/thn	22,81	26,29	30,28	35,03	40,21	154,62	
			▲ % Peningkatan produksi pakan temak berbahan baku lokal	10%/thn	10%/thn	10%/thn	10%/thn	10%/thn	18,14	20,90	24,08	27,86	31,97	122,95	
<b>Sub Total</b>															
7.2	Pengembangan pengolahan hasil pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)	Berkembangnya pengolahan hasil pertanian yang berkelanjutan	▲ Jumlah usaha pengolahan hasil pertanian yang bermilai tambah dan berdaya saing	1200 unit	1200 unit	1200 unit	1200 unit	1200 unit	115,25	124,09	132,92	150,58	163,83	686,67	
			▲ % Peningkatan agroindustri susu segar	10%/thn	10%/thn	10%/thn	10%/thn	10%/thn	9,85	10,61	11,36	12,87	14,01	58,70	
			▲ % Peningkatan produksi tepung casawa fermentasi	5%/thn	5%/thn	5%/thn	5%/thn	5%/thn	4,87	5,25	5,62	6,37	6,93	29,04	
			▲ % Peningkatan produksi gula rakyat non tebu.	10%/thn	10%/thn	10%/thn	10%/thn	10%/thn	0,52	0,56	0,60	0,68	0,74	3,09	
<b>Sub Total</b>															
7.3	Pengembangan mutu dan standarisasi pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)	Meningkatnya mutu dan keamanan pangan hasil pertanian	▲ Jumlah usaha pasca panen dan pengolahan yang menerapkan sistem jaminan mutu.	330 unit + 54 unit organik	330 unit + 54 unit organik	330 unit + 54 unit organik	330 unit + 54 unit organik	330 unit + 54 unit organik	31,94	42,08	51,37	60,66	69,96	256,01	
			▲ Jumlah pengujian mutu alat mesin pertanian	42 sertifikat	42 sertifikat	42 sertifikat	42 sertifikat	42 sertifikat	5,86	7,72	9,43	11,14	12,84	46,99	
<b>Sub Total</b>															
7.4	Pengembangan pemasaran domestik (Prioritas Bidang)	Meningkatnya pemasaran hasil pertanian	▲ Jumlah kelembagaan pemasaran bagi petani	186 pasar	195 pasar	205 pasar	214 pasar	223 pasar	44,44	46,53	49,36	56,17	64,40	260,90	
			▲ Jumlah hasil pertanian yang diserap pasar dalam negeri	0%	2%	3%	4%	5%	12,26	12,84	13,62	15,50	17,77	72,00	
			▲ % Peningkatan kerjasama pasar modern dan tradisional	10%/thn	10%/thn	10%/thn	10%/thn	10%/thn	2,55	2,68	2,84	3,23	3,70	15,00	





NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Milyar Rp)					TOTAL				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014					
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Lahan perkebunan</li> <li>Lahan peternakan</li> </ul>		10.200 Ha	143.670 Ha	143.850 Ha	143.850 Ha	143.860 Ha									
					5.705 Ha	92.500 Ha	90.115 Ha	88.750 Ha	87.500 Ha									
			<i>Sub Total</i>							225,35	3.418,00	3.150,65	3.148,94	3.142,87		13.085,81	3.649,71	
8.2	Pengelolaan air untuk pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)	Meningkatnya ketersediaan air irigasi dalam mendukung produksi pertanian	Jumlah sarana irigasi pertanian yang dibangun (Unit atau Km)		102.566 Ha	417.434 Ha	410.000 Ha	410.000 Ha	410.000 Ha		313,23	769,69	860,75	855,96	850,08			
			<ul style="list-style-type: none"> <li>JITUT dan JIDES</li> <li>Tata Air Mikro (TAM)</li> <li>Embung</li> <li>Irigasi air permukaan</li> <li>Pengembangan check DAM</li> <li>Pengembangan air tanah</li> <li>Irigasi bertekanan</li> <li>Sumur resapan</li> </ul>		5.920 Ha	80.000 Ha	80.000 Ha	75.000 Ha	69.080 Ha									
					256 Unit	5.744 Unit	8.000 Unit	8.000 Unit	8.000 Unit									
					286 Unit	714 Unit	500 Unit	500 Unit	509 Unit									
					20 Unit	160 Unit	650 Unit	1.000 Unit	900 Unit									
					719 Unit	1.321 Unit	1.020 Unit	1.020 Unit	1.020 Unit									
					23 Unit	12 Unit	18 Unit	15 Unit	15 Unit									
					208 Unit	50 Unit	50 Unit	92 Unit	100 Unit									
			<i>Sub Total</i>							313,23	769,69	860,75	855,96	850,08		3.649,71	2.917,23	
8.3	Pengembangan pengelolaan lahan pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)	Meningkatnya produktivitas lahan pertanian dan prasarana Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi serta pengendalian lahan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian	Jumlah panjang jalan usaha tani (Km)	▲	483 Km	2.000 Km	1.517 Km	1.500 Km	1.500 Km		211,83	584,41	686,03	701,15	736,82			
			Jumlah panjang jalan produksi (Km)	▲	469 Km	1.481 Km	1.350 Km	1.100 Km	1.100 Km									
			Optimasi lahan terlarang	▲	9.992 Ha	85.538 Ha	90.670 Ha	85.500 Ha	80.300 Ha									
			Konservasi DAS hulu	▲	9.600 Ha	36.400 Ha	38.000 Ha	38.000 Ha	38.000 Ha									
			Reklamasi lahan	▲	2.267 Ha	12.733 Ha	10.000 Ha	10.000 Ha	10.000 Ha									
			Pengembangan rumah kompos	▲	235 Paket	2.000 Paket	1.715 Paket	1.350 Paket	1.200 Paket									
			Optimasi lahan sawah ramah lingkungan	▲	20.000 Ha	20.000 Ha	25.000 Ha	20.000 Ha	15.000 Ha									
			Pengembangan SRI	▲	62	538	600	500	300		2,79	13,26	18,23	17,02	11,15		62,46	
			<i>Sub Total</i>							214,62	594,67	704,26	718,17	747,97		2.979,69	2.979,69	

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITYAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITYAS (Milyar Rp)					TOTAL	
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014		
8.4	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Direktorat pengelolaan lahan dan air	Meningkatnya fasilitasi pelayanan teknis dan administrasi untuk mendukung pelaksanaan kerja Direktorat Jenderal	Tersedianya dokumen (Paket) perencanaan program, anggaran dan kerjasama (Renja-KL, RKA-KL, DIPA, POK, MOU Kerjasama PBIS, TOR)	6	6	6	6	6	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	10,00	
<i>Sub Total</i>														10,00	
9	Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing	Peningkatan inovasi dan adopsi teknologi pertanian	▲ Inovasi teknologi benih, bibit, pupuk, obat hewan dan tanaman, alsintan, dan produk olahan (paket)	98	117	140	168	200	908,32	981,72	1.016,51	1.208,66	1.341,24	5.456,45	
			▲ Inovasi teknologi pengelolaan sumberdaya pertanian (paket)	35	35	35	35	35							
			▲ Rekomendasi kebijakan pertanian (paket)	33	33	33	33	33							
			▲ Adopsi inovasi teknologi benih, bibit, pupuk, obat hewan dan tanaman, alsintan dan produk olahan (propinsi)	32	32	32	32	32							
			▲ Jumlah paket dokumen perencanaan program, anggaran, dan laporan pelaksanaan program/ kegiatan litbang seluruh Sektor Badan Litbang Pertanian	65	65	65	65	65	70,51	79,56	80,51	100,46	112,51	443,55	
9.1	Dukungan manajemen, fasilitasi dan instrumen teknis dalam pelaksanaan kegiatan litbang pertanian	Pengembangan manajemen perencanaan program dan anggaran, kerjasama, pengelolaan sumberdaya, dan hasil litbang pertanian	▲ Jumlah judul kerjasama kemitraan, sinergi penelitian pertanian, dan pemanfaatan hasil dengan Perguruan Tinggi	200	200	200	150	150	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	100,00	
			▲ Jumlah sertifikat paten untuk dilindungi, promosi teknologi litbang, dan naskah perjanjian kerja sama lisensi	20	40	60	80	100	3,77	4,15	4,57	5,02	5,52	23,04	
			<i>Sub Total</i>											566,59	
9.2	Penelitian dan pengembangan tanaman pangan	Penyediaan benih sumber dan varietas sangat genjah, pendampingan SUPTT dan peningkatan inovasi teknologi tanaman pangan mendukung PZBN	▲ Jumlah varietas sangat genjah dan unggul baru padi, serelia, kacang-kacangan & umbi-umbian	5-6	5-7	8-9	10-12	14-15	43,06	47,37	49,11	57,32	63,05	259,92	
			▲ Jumlah teknologi budidaya, panen dan pasca panen primer	5	5	8	7	8	33,40	37,13	38,14	45,76	50,74	205,17	

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Milyar Rp)					TOTAL
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
			Jumlah akses sumberdaya genetik (SDG) padi, sereal, kacang-kacangan dan umbi-umbian terkoaksi, teridentifikasi dan terkonservasi untuk perbaikan sifat varietas	800	800	800	800	800	13,46	14,80	15,18	17,91	19,70	81,06
			Jumlah produksi benih sumber (BS, FS) padi, sereal, kacang-kacangan & umbi-umbian dengan SWM/ISO 9001-2000 dan 100 varietas tanaman pangan	BS 10 ton FS 20 ton	BS 10 ton FS 20 ton	BS 15 ton FS 20 ton	BS 15 ton FS 20 ton	BS 15 ton FS 20 ton	13,46	14,80	15,18	17,91	19,70	81,06
			Jumlah penelitian konsorsium padi, kedelai, dan gandum	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	2 Keg	4,28	4,32	4,36	4,39	4,43	21,78
			<i>Sub Total</i>						107,66	118,43	121,97	143,30	157,63	648,99
9.3	Penelitian dan pengembangan tanaman hortikultura	Meningkatnya inovasi teknologi tan.hortikultura mendukung pengembangan kawasan hortikultura	Jml VUB yg diminati konsumen	40	131	235	414	1032	12,35	14,03	15,16	18,17	20,73	80,43
			Jumlah PN yang terkonservasi dan terkarakterisasi	20 Bw. 455 acc. 3925	600 acc 3978	600 acc 4020	600 acc 4060	600 acc 4100	11,73	13,33	15,16	17,27	19,69	77,18
			Jml benih sumber :						12,44	14,13	16,08	18,31	20,89	81,86
			● Sayuran	20.000 GO 20 ton	22.000 GO 25 ton	24.000 GO 16 ton	26.000 GO 35 ton	28.000 GO 40 ton						
			● VUB buah tropik dan sub tropik batang	14.335 batang (15 var)	15.035 batang (5 var)	16.000 batang (2 var)	17.700 batang (3 var)	18.700 batang (2 var)						
			● Akses mutasi buah trop	960	960	960	960	960						
			● Planlet, benih, stek tan. Hias	151.800; 30 var	202.400; 30 var	253.100	253.700	254.000						
			● Jumlah benih bt bwh dan bt atas hsl SE	100.000	500.000	1.000.000	2.500.000	5.000.000						
			Jumlah teknologi budidaya produksi hortikultura ramah lingkungan	12	12	12	12	12	20,83	23,66	25,12	30,66	34,96	135,22
			<i>Sub Total</i>						57,35	65,15	71,51	84,41	96,27	374,69
9.4	Penelitian dan pengembangan tanaman perkebunan	Peningkatan inovasi tek, tan, perkebunan untuk meningkatkan produktivitas, diversifikasi dan nilai tambah tanaman perkebunan	Jumlah varietas/non unggul tanaman perkebunan	10 var;	10 var;	10 var;	12 var;	15 var;	49,98	52,62	54,15	71,05	78,50	306,30
			Penyediaan jumlah bibit kakao (batang) melalui teknologi SE mendukung Gernas Kakao	10 juta bibit	15 juta bibit	15 juta bibit	20 juta bibit	20 juta bibit						
			Jumlah teknologi untuk peningkatan produktivitas tanaman perkebunan	42	47	47	52	52	27,05	31,59	33,12	34,60	35,72	162,08



NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITYAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITYAS (Milyar Rp)					TOTAL				
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014					
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembangunan pert. &amp; perdesaan</li> <li>Konsorsium karakteristik sosok petani padi</li> </ul>															
	<i>Sub Total</i>																	
9.7	Pengembangan perustakaan dan penyebaran teknologi pertanian	Meningkatkan penyebaran teknologi hasil litbang peranian mendukung kerahaman dan kemandirian pangan	▲ Jumlah judul jurnil primer dan publikasi bibliografis	13 jdi	13 jdi	13 jdi	13 jdi	13 jdi	13 jdi	3.50	3.85	4.14	4.66	5.12	21.52	23.68	97.32	
			▲ Jumlah perpustakaan yang dibina dan ditata	65 UK/UPT	65 UK/UPT	65 UK/UPT	65 UK/UPT	65 UK/UPT	2.50	2.75	3.03	3.33	3.66	15.26				
			▲ Jumlah tambahan koleksi	30 jdi/3 dtbase	35 jdi/4 dtbase	40 jdi/4 dtbase	45 jdi/4 dtbase	50 jdi/4 dtbase	1.50	1.65	1.82	2.00	2.20	9.16				
			▲ Jumlah kegiatan diseminasi dan perustakaan	8 Keg	8 Keg	8 Keg	8 Keg	8 Keg	5.28	5.81	6.20	7.04	7.74	32.07				
	<i>Sub Total</i>																	
9.8	Penelitian/perkayaan dan pengembangan mekanisasi pertanian	Meningkatnya inovasi dan adopsi teknologi mekanisasi pertanian untuk peningkatan produktifitas, efisiensi dan nilai tambah produk pertanian dan limbahnya	▲ Inovasi teknologi dan sistem mekanisasi pertanian untuk peningkatan produktifitas, efisiensi, kualitas, nilai tambah komoditas utama pertanian dan limbahnya	4	4	4	4	4	8.44	9.09	10.07	12.52	12.43	52.54				
			▲ Kerjasama litbang mektan, konsorsium alsintan serta bahan rekomendasi kebijakan (paket)	3	3	3	3	3	4.53	4.94	5.06	5.55	7.18	27.27				
			▲ Prototipe alsin yang didiseminasikan (Paket)	1	1	1	1	1	0.20	0.22	0.24	0.26	0.27	1.19				
	<i>Sub Total</i>																	
9.9	Penelitian dan pengembangan sumberdaya lahan pertanian	Tersedianya data, informasi dan peningkatan inovasi teknologi pengelolaan sumberdaya lahan pertanian	▲ Tersedianya peta potensi sumberdaya lahan pertanian telantar	2,5 juta ha di Sulawesi dan daerah lainnya	2,5 juta ha di Sulawesi, NT & daerah lainnya	3,5 juta ha di Maluku dan Papua	3,5 juta ha di Papua, dan daerah lainnya	3,5 juta ha di Papua, di daerah lainnya	2.50	3.50	3.50	5.50	5.50	20.50				
			▲ Jumlah informasi, paket komponen teknologi pengelolaan SDL (lahan kering, lahan sawah, rawa, pasang surut, air, formula pupuk dan pembenah tanah, dan lingkungan pertanian)	9 paket	9 paket	9 paket	9 paket	8 paket	8 paket	8 paket	50.30	54.27	54.99	63.60	70.04	293.19		

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Milyar Rp)					TOTAL
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
			Jumlah informasi, pengelolaan sumberdaya iklim & air, model prediksi bencana pertanian serta paket komponen teknologi perubahan iklim global, mitigasi dan adaptasinya terhadap sektor pertanian	3 paket; 1 model prediksi bencana pertanian; 1 peta kalender tanam	3 paket; 2 model prediksi bencana pertanian; 1 peta kalender tanam	3 paket;	3 paket; pengelolaan peta SDA; 1 peta kalender tanam	3 paket; pengelolaan peta SDA; 1 peta kalender tanam	6,19	7,12	7,19	9,41	10,82	40,73
			Jumlah rekomendasi kebijakan penanganan perubahan iklim, dan konsorsium pengelolaan perubahan iklim dan lahan kering	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	2 paket	1,30	1,43	1,57	1,73	1,90	7,93
<b>Sub Total</b>														
9.10	Penelitian dan pengembangan bioteknologi dan sumber daya genetik pertanian	Peningkatan inovasi dan adopsi hasil bioteknologi dan pemanfaatan sumberdaya genetik pertanian (SDGP) untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan daya saing produk pertanian	Jumlah akses SDGP dan database yang dikonservasi atau diunggah	2.250 akses SDGP; 4 database	2.250 akses SDGP; 4 database	2.250 akses SDGP; 4 database	2.250 akses SDGP; 4 database	2.250 akses SDGP; 4 database	2,96	2,88	3,15	5,56	6,29	20,84
			Jumlah varietas unggul atau galur harapan padi, kedelai, dan jagung berproduktivitas tinggi dan berumur genjah melalui somatik embryogenesis, <i>genom sequencing</i>	51 galur kedelai; 1 varietas padi; 3 populasi baru padi; 6 galur transgenik	Keragaman 50 galur harapan kedelai; 1 varietas padi; 3 populasi unggul; Galur baru padi; 5 Galur transgenik (POT)	50 galur harapan kedelai; 2 galur harapan baru padi; Galur baru padi; 5 Galur transgenik (POT)	Galur terpilih; 1 var. unggul kedelai; Galur baru Galur baru terseksi padi; 5 Galur transgenik (LUT)	Varietas unggul kedelai; Galur harapan baru padi; 5 Galur transgenik (LUT)	3,39	3,41	3,41	5,99	6,72	22,91
			Jumlah galur harapan gandum tropis	Galur gandum transgenik mengandung aksisi gen <i>ZmDre2A</i>	Galur gandum transgenik mengandung aksisi gen <i>ZmDre2A</i>	Galur gandum transgenik mengandung aksisi gen <i>ZmDre2A</i>	Galur gandum transgenik mengandung aksisi gen <i>ZmDre2A</i>	Galur gandum transgenik mengandung aksisi gen <i>ZmDre2A</i>	2,88	2,88	3,16	5,50	6,23	17,77
			Jumlah galur padi dan jagung efisien penggunaan pupuk sintetik	125 galur calon hibrida jagung unggul	8-10 galur hibrida jagung adaptif kondisi pupuk rendah	20-35 galur hibrida jagung adaptif kondisi pupuk rendah	2-4 galur harapan jagung hibrida adaptif dan padi transgenik	2-4 varietas unggul hibrida adaptif dan padi transgenik	2,88	2,90	3,13	5,53	6,26	20,71
			Jumlah biofertilizer untuk padi dan tebu	20 isolat potensial biofertilizer	20 isolat potensial biofertilizer	3 formula bahan pembawa	2 formula biofertilizer padi	1 biofertilizer tebu	2,82	2,78	3,13	5,43	6,16	20,32
			Jumlah tanaman manggis dan durian tanpa biji	2 metode regenerasi transformasi	2 metode transformasi dan penyuburan	2 jenis tanaman transgenik putatif	2 jenis tanaman transgenik putatif	2 jenis tanaman transgenik putatif	2,95	2,86	3,18	5,48	6,20	20,66

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Milyar Rp)					TOTAL		
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014			
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014			
			Jumlah peta gen sifat-sifat penting pada kelapa sawit, jarak pager dan sapi	7 sekuens whole genom	258 sekuens DNA target	3 sistem kit dan peta gen					27,59	5,58	5,96		39,14	
			Jumlah klon gen pengendali sifat toleran kekeringan, produktivitas dan umur genjah	3 mutan biologi padi terseleksi; 3 klon gen faktor transkripsi; 3 transkrip cDNA	3 klon gen target kemutasi; 3 gen target fungsional; 3 konstruksi fungsional						3,14	3,06	3,48		9,68	
											45,73	26,34	28,60	33,51	37,85	172,03
9.11	Penelitian dan pengembangan pasca panen pertanian	Meningkatnya inovasi teknologi pascapanen dan pengembangan produk hasil pertanian	<p>Jumlah teknologi penanganan segar produk hortikultura dan daging</p> <p>Jumlah produk diversifikasi pangan dan substitusi pangan impor</p> <p>Jumlah produk pengembangan/product development untuk peningkatan nilai tambah</p>	5	4	4	4	2	7,60	6,72	6,72	8,14	4,47	33,66		
				6	6	6	6	8	4,68	5,04	5,15	6,10	8,95	29,92		
				2	4	6	8	10	2,99	5,04	5,15	6,10	8,95	28,23		
									15,28	16,81	17,01	20,34	22,37	91,81		
9.12	Penelitian dan percepatan diseminasi inovasi teknologi pertanian	Pengembangan teknologi pertanian serta pembinaan dan koordinasi kegiatan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian	<p>Jumlah koordinasi penyusunan penganggaran, pelaksanaan dan monev kegiatan di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian</p> <p>Jumlah advokasi teknis, pendampingan, dan kebijakan operasional pembangunan pertanian wilayah, regional, dan nasional (termasuk PUAP)</p> <p>Jumlah adaptasi teknologi spesifik lokasi</p> <p>Jumlah diseminasi inovasi pertanian</p>	10	10	10	10	10	32,21	35,43	36,18	41,21	45,27	190,30		
				34	69	69	69	69	39,34	43,27	45,10	51,96	57,15	236,83		
				64	96	96	96	96	81,77	89,96	92,15	109,54	120,51	495,94		
				329	446	446	446	446	163,56	179,92	183,43	219,07	241,03	987,01		
									316,89	348,58	356,86	421,78	463,96	1.908,07		

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITYAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITYAS (Milyar Rp)					TOTAL		
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014			
10.	Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani	Meningkatnya kemampuan, kompetensi dan daya saing SDM pertanian, melalui pemberdayaan SDM dan kelembagaan pertanian.	▲	Jumlah aparatur di sektor pertanian yang diberdayakan dan dikembangkan kapasitasnya melalui kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi profesi SDM pertanian (orang)	48.853	66.982	75.982	85.983	102.983	1.161,82	1.265,34	1.368,82	1.475,48	1.580,66	6.852,12	
			▲	Jumlah non aparatur di sektor pertanian yang diberdayakan dan dikembangkan kapasitasnya melalui kegiatan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, serta sertifikasi profesi SDM pertanian (orang)	19.091	29.080	29.277	29.278	29.278							
			▲	Jumlah kelembagaan Petani yang ditumbuhkembangkan dan diberdayakan kapasitasnya melalui penyuluhan dan pelatihan pertanian (unit)	28.344	28.554	51.764	63.974	72.880							
10.1	Pengembangan reorientasi pendidikan pertanian (Priorityas Bidang)	▲	Meningkatnya kualitas program pendidikan pertanian	80	80	80	80	80	1.87	2,19	2,53	2,60	2,68	11,86		
		▲	Jumlah jenis profesi SDM Pertanian yang terstandarisasi dan tersertifikasi (jenis)	3	3	3	3	3	2,16	2,38	2,50	2,57	2,65	12,25		
		▲	Jumlah kelembagaan pendidikan yang ditingkatkan kualitasnya (lembaga)	25	19	25	25	25	2,72	2,69	3,34	3,27	3,18	15,20		
▲	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan pertanian.	600	600	600	600	600	10,96	12,72	14,07	14,49	14,92	67,16				
▲	Meningkatnya kualitas lulusan pendidikan pertanian.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	16,03	17,60	18,70	19,97	21,05	93,35				
▲	Jumlah aparatur yang meningkatkan jenjang pendidikan formal	100	100	100	100	100	3,71	4,08	4,28	4,41	4,54	21,02				
▲	Jumlah lulusan DIV di bidang RHP	750	600	600	600	600	7,84	8,61	9,04	9,30	9,58	44,36				



NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Milyar Rp)					TOTAL	
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014		
				Jumlah SDM Pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui pendidikan SPP (orang)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	27,04	29,69	31,17	32,10	33,05	155,05
				Jumlah lulusan yang mengikuti retooling di bidang pertanian	600	600	600	600	600	7,50	8,24	8,65	8,91	9,17	42,46
		Meningkatnya kualitas kerjasama pendidikan pertanian di dalam dan luar negeri.	▲	Persentase Jumlah kegiatan kerjasama pendidikan di dalam dan di luar negeri yang dirancang dan dilaksanakan (%)	60	60	60	60	60	4,39	5,92	7,37	8,78	10,26	36,72
				<i>Sub Total</i>						84,24	94,11	101,65	106,39	111,06	497,45
10.2	Pemantapan sistem pelatihan pertanian	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kelembagaan pelatihan pertanian.	▲	Jumlah kelembagaan UPT Pusat dan PMS yang terakreditasi	40	250	460	670	880	2,44	2,68	2,95	3,21	3,53	14,81
		Meningkatnya kualitas aparatur dan non aparatur pertanian.	▲	Jumlah aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan (orang)	17.010	27.982	27.982	27.983	27.983	104,63	107,80	118,74	119,14	121,12	571,43
				Jumlah non aparatur pertanian yang ditingkatkan kompetensinya melalui pelatihan (orang)	14.491	24.480	24.677	24.678	24.678	38,59	57,34	63,25	65,65	66,36	291,19
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelatihan pertanian	▲	Persentase jumlah kegiatan yang mendukung penyelenggaraan pelatihan pertanian yang dirancang dan dilaksanakan (%)	60	70	80	85	90	8,39	9,22	10,15	11,05	12,16	50,97
		Meningkatnya kualitas kerjasama pelatihan pertanian	▲	Jumlah kegiatan kerjasama pelatihan dan persentase jumlah jenis pelatihan yang dirancang dan dilaksanakan (paket)	15	15	15	15	15	1,58	6,00	8,13	10,66	13,29	39,66
				<i>Sub Total</i>						155,62	183,05	203,20	209,72	216,47	998,06
10.3	Pemantapan sistem penyuluhan pertanian (Prioritas Nasional dan Bidang)	Meningkatnya kualitas kelembagaan penyuluhan pertanian	▲	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang terbentuk sesuai UU No. 16 Tahun 2006 tentang SP3K (Bakorluh dan Bapeluh)	245	345	410	458	491	95,05	96,04	102,48	109,92	118,60	572,09
		Meningkatnya jumlah kelembagaan petani.	▲	Jumlah kelembagaan petani (gapoktan)	28.304	38.304	51.304	63.304	72.000	10,57	10,88	11,40	12,23	13,19	58,09
		Meningkatnya jumlah BPP yang memenuhi persyaratan.	▲	Jumlah BPP model	336	350	380	425	458	33,60	43,49	44,20	45,15	46,40	212,85

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Milyar Rp)					TOTAL
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
		<p>▲ Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketenangan penyuluh pertanian.</p> <p>▲ Meningkatkan mutu penyelenggaraan penyuluhan pertanian</p>	<p>Jumlah kerentangan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya (orang)</p> <p>Persentase jumlah kegiatan yang mendukung penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang dirancang dan dianggarkan (%)</p>	27.393	36.000	45.000	55.000	72.000	429,69	461,01	498,73	529,46	559,44	2.478,34
				30	50	65	80	100	169,51	171,26	182,75	196,03	211,50	931,05
				<b>Sub Total</b>										<b>4.202,41</b>
10.4	Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya pada Badan Pengembangan SDM Pertanian	<p>▲ meningkatkannya kualitas pelayanan administrasi, manajemen sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, anggaran serta pranti lunak organisasi pengembangan SDM pertanian</p> <p>▲ Meningkatkannya kapasitas SDM pengelola LM3</p>	<p>jumlah dokumen perencanaan, keuangan, organisasi dan kepegawaian serta evaluasi dan pelaporan program pengembangan SDM pertanian dengan kualitas memuaskan bagi "dient"</p> <p>Jumlah kegiatan dalam rangka koordinasi LM3 (palet)</p>	18	18	18	18	18	174,40	196,55	215,26	257,43	294,86	1.138,50
				9	9	9	9	9	9,14	9,14	9,14	9,14	9,14	45,70
				<b>Sub Total</b>										<b>1.184,20</b>
11.	<b>Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat</b>	<p>▲ Meningkatkannya ketahanan pangan melalui konsumsi dan keamanan pangan segar, distribusi dan pemberdayaan tingkat masyarakat serta terkoordinasinya kebijakan ketahanan pangan.</p>	<p>▲ % Realisasi koordinasi analisis dan rumusan kebijakan ketahanan pangan.</p> <p>▲ % Realisasi gerakan percepatan pengendalian konsumsi dan keamanan pangan dalam peningkatan konsumsi pangan beragam dan bergizi seimbang.</p> <p>▲ % Realisasi penguatan kelembagaan distribusi pangan masyarakat dalam stabilisasi harga dan cadangan pangan masyarakat.</p> <p>▲ % Realisasi pengembangan Desa Mandiri Pangan dalam mengurangi jumlah penduduk rawan pangan</p>	90	90	95	95	100	397,70	568,97	644,54	737,11	836,02	3.184,34
				90	90	95	95	100	183,54	205,69	224,40	266,57	304,00	1.184,20

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Milyar Rp)					TOTAL
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
11.1	Pengembangan pengeneragaman konsumsi pangan dan peningkatan keamanan pangan segar	Meningkatnya pemantapan pengeneragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan	Perimbangan Desa P2KP (Percepatan pengeneragaman konsumsi pangan, dan Promosi dalam rangka percepatan pengeneragaman konsumsi pangan,	2.000 Desa	4.000 Desa	6.000 Desa	8.000 Desa	10.000 Desa	8,00	31,59	44,10	56,06	68,03	207,77
			383 Pusat / Prop / kab	434 Pusat / Prop / kab	484 Pusat / Prop / kab	484 Pusat / Prop / kab	484 Pusat / Prop / kab	78,40	44,15	37,09	32,76	30,67	223,07	
			2.000 Desa	4.000 Desa	6.000 Desa	8.000 Desa	10.000 Desa	18,67	17,01	20,90	22,81	24,27	103,66	
			33/236 Prop/kab	33/236 Prop/kab	33/236 Prop/kab	33/250 Prop/kab	33/250 Prop/kab	37,33	87,95	86,54	84,10	79,20	375,12	
			33 Prop	33 Prop	33 Prop	33 Prop	33 Prop	8,80	6,01	7,31	9,23	11,61	42,96	
			33 Prop	33 Prop	33 Prop	33 Prop	33 Prop	8,80	5,24	5,14	5,26	5,59	30,02	
<b>Sub Total</b>									160,00	191,94	201,08	210,22	219,36	982,60
11.2	Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilitas Harga Pangan.	Meningkatnya pemantapan distribusi dan harga pangan.	Pengembangan sistem distribusi dan stabilitas harga pangan melalui Penyediaan Pembiayaan dalam Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM).	750 Gap	1.000 Gap	1.250 Gap	1.500 Gap	2.500 Gap	114,07	137,70	145,04	152,44	159,85	709,10
			750 Gap	1.000 Gap	1.250 Gap	1.500 Gap	2.500 Gap	2,63	2,98	2,95	2,91	3,61	15,09	
			33 Prop	33 Prop	33 Prop	33 Prop	33 Prop	6,65	8,26	8,39	8,66	8,05	40,01	
			33 Prop	33 Prop	33 Prop	33 Prop	33 Prop	6,65	7,09	7,08	6,88	6,81	34,50	
			33 Prop	33 Prop	33 Prop	33 Prop	33 Prop	6,65	7,09	7,08	6,88	6,81	34,50	
			33 Prop	33 Prop	33 Prop	33 Prop	33 Prop	6,65	7,09	7,08	6,88	6,81	34,50	
<b>Sub Total</b>									130,00	156,03	163,46	170,89	178,32	798,70

NO	PROGRAM/KEGIATAN PRIORITYAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITYAS (Milyar Rp)					TOTAL
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	
11.3	Pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan.	Meningkatnya pemantapan ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan.	<p>▲ <i>Pengembangan Desa Mandiri Pangan dan Lumbung Pangan.</i></p> <p>▲ <i>Penyediaan tenaga/petugas lapang seperti penyuluh Pendampingan Desa Mandiri Pangan)</i></p> <p>▲ <i>Penanganan daerah/lokasi Rawan Pangan</i></p> <p>▲ <i>Tersedianya Data &amp; Informasi tentang ketersediaan, cadangan dan daerah rawan pangan,</i></p> <p>▲ <i>Terlaksananya pemantauan dan analisis ketersediaan dan kebutuhan pangan, serta pemantauan dan pemantapan kerawanan pangan.</i></p> <p>▲ <i>Menyusun skenario penyediaan pangan berbasis wilayah.</i></p>	1.750 Desa	2.550 Desa	3.350 Desa	4.150 Desa	5.000 Desa	45,58	123,50	160,47	207,60	257,77	794,93
				800 Lb	1.225 Lb	1.650 Lb	2.075 Lb	2.500 Lb	4,57	12,62	16,80	22,20	27,26	83,45
				1.750 Desa	2.550 Desa	3.350 Desa	4.150 Desa	5.000 Desa	2,33	5,58	6,58	7,75	8,69	30,93
				350 Kab	400 Kab	450 Kab	450 Kab	450 Kab	3,33	6,87	7,64	7,98	8,18	33,99
				33 Prop	33 Prop	33 Prop	33 Prop	33 Prop	1,88	4,70	5,19	6,16	7,18	25,11
				33 Prop	33 Prop	33 Prop	33 Prop	33 Prop	1,15	2,37	2,66	3,16	3,63	12,97
<i>Sub Total</i>									60,00	158,00	202,00	258,00	316,34	994,34
11.4	Dukung Manajemen dan teknis lainnya pada Badan Ketahanan Pangan.	Meningkatnya manajemen serta pelayanan administrasi dan keuangan secara efektif dan efisien dalam mendukung pengembangan dan koordinasi kebijakan ketahanan pangan.	<p>▲ <i>Jumlah dokumen perencanaan, keuangan, umum, serta evaluasi dan pelaporan Program Pengembangan Koordinasi Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan</i></p> <p>▲ <i>Koordinasi ketahanan pangan (Dewan Ketahanan Pangan), serta koordinasi dalam perumusan kebijakan dan pemantauan ketersediaan, distribusi dan konsumsi dan keamanan pangan</i></p>	5 Pkt / 33 Prop 350 kab	5 Pkt / 33 Prop 350 kab	5 Pkt / 33 Prop 350 kab	5 Pkt / 33 Prop 350 kab	5 Pkt / 33 Prop 350 kab	23,85	31,50	39,00	49,00	61,00	204,35
				33 Prop 350 kab	33 Prop 350 kab	33 Prop 350 kab	33 Prop 350 kab	33 Prop 350 kab	23,85	31,50	39,00	49,00	61,00	204,35
				33 Prop 350 kab	33 Prop 350 kab	33 Prop 350 kab	33 Prop 350 kab	33 Prop 350 kab	47,70	63,00	78,00	98,00	122,00	408,70
<i>Sub Total</i>									47,70	63,00	78,00	98,00	122,00	408,70
12.	Peningkatan Kualitas Perencanaan, Perencanaan dan Pengawasan Keamanan Hayati	Meningkatnya efektifitas pelayanan karantina dan pengawasan Keamanan Hayati	<p>▲ <i>Efektifitas pengendalian risiko masuk dan penyebarannya HPHK dan OPTK, serta pangan yang tidak sesuai standar keamanan pangan</i></p>	50%	75%	80%	85%	90%	387,40	459,90	532,50	630,00	745,00	2.754,80

NO	PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOKASI ANGGARAN BASELINE KEGIATAN PRIORITAS (Miliar Rp)					TOTAL	
				2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014		
			Efektifitas pelayanan ekspor komoditas pertanian dan produk tertentu, 90%		90%	90%	90%	95%							
			Tingkat kepatuhan dan kepuasan pengguna jasa karantina pertanian 75%		85%	90%	90%	95%							
12.1	Peningkatan Sistem Karantina Hewan (Prioritas Bidang)	Kebijakan teknis Karantina Hewan yang efektif dalam operasional pencegahan masuk, menyebar dan keluarnya HPHK,	Jml Rumusan Kebijakan teknis operasional karantina hewan yang dihasilkan/disempurnakan dan dapat berimplementasi (paket) 3	3	3	3	3	3	6,50	7,50	8,00	8,50	9,00	39,50	
<i>Sub Total</i>														39,50	
12.2	Peningkatan Sistem Karantina Tumbuhan (Prioritas Bidang)	Kebijakan teknis Karantina Tumbuhan yang efektif dalam operasional pencegahan masuk dan menyebarnya OPTK	Jml Rumusan Kebijakan teknis operasional karantina tumbuhan yang dihasilkan/disempurnakan dan dapat berimplementasi (paket) 3	3	3	3	3	3	6,50	7,50	8,00	8,50	9,00	39,50	
<i>Sub Total</i>														39,50	
12.3	Pengembangan Sistem Informasi dan Peningkatan sistem Pengawasan Keamanan Hayati (prioritas Bidang)	Kebijakan teknis pengawasan keamanan hayati yang efektif dalam operasional pengawasan keamanan hayati dan Nabati; dan sistem informasi yang optimal dalam mendukung operasional Program Barantan	Jml Rumusan Kebijakan teknis operasional pengawasan keamanan hayati yang dihasilkan/disempurnakan dan dapat berimplementasi 2	2	2	2	2	2	2,04	5,20	8,92	10,46	11,69	38,31	
			Tingkat kesiapan infrastruktur sistem informasi Barantan 40%		50%	75%	80%	90%	4,96	6,30	5,58	6,54	7,31	30,69	
			Prosentase peningkatan akses informasi melalui jaringan ke pusat data Barantan oleh instansi terkait, pengguna jasa dan unit kerja lingkup Barantan 25%		50%	50%	50%	25%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Sub Total</i>														69,00	
12.4	Peningkatan Kualitas Pelayanan Karantina Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati (Prioritas Nasional dan Bidang)	Pelayanan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati yang efektif	Vol, dan frek, operasional tindakan karantina pertanian dan pengawasan keamanan hayati (sertifikasi karantina) 350 rb	400 rb	420 rb	450 rb	450 rb	450 rb	179,40	228,10	281,00	351,00	440,00	1.479,50	
			Prosentase peningkatan indeks kesesuaian operasional tindakan karantina dan pengawasan terhadap kebijakan, standar, teknik dan metoda yang diberlakukan 10%		20%	5%	5%	5%							

